RANCANGAN AKHIR

RKPD

KABUPATEN NUNUKAN

TAHUN 2026



BAPPEDA LITBANG

Kabupaten Nunukan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur diucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan kesempatan hingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Dasar penyusunan RKPD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Materi RKPD ini memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana kerja berupa program-program dan pendanaan untuk tahun 2026 serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029, prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam membantu penyusunan disampaikan terima kasih.

Walaupun RKPD ini telah dipersiapkan sebaik-baiknya, tetap saja ada ketidaksempurnaan dalam penyusunannya sehingga kekurangan dan kesalahan sangat mungkin terjadi. Untuk itu tanggapan dan koreksi sangat diharapkan.

Akhir kata semoga segala upaya kita bersama dalam membangun Kabupaten Nunukan senantiasa memperoleh petunjuk dan ridho dari Allah SWT dan diterima sebagai amal ibadah, Aamien.

Nunukan, 1 Juli 2025

BUPATI NUNUKAN

IRWAN SABRI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR iii

1. BAB I : PENDAHULUAN I-1
- 1.1. Latar Belakang I-1
- 1.2. Dasar Hukum I-4
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen I-9
- 1.4. Maksud dan Tujuan I-10
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-11

2. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
- 2.1. Kondisi Umum Daerah II-1
  - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
  - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-26
  - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-46
  - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-65
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 ..... II-72
  - 2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ..... II-72
  - 2.2.2. Evaluasi Realisasi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 II-79
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II-82
  - 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah II-82
  - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-83

3. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
  - 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah III-3
  - 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah III-9
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-15
  - 3.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Kerangka Pendanaan III-15

4. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH . IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 ..... IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 ..... IV-8
4.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional IV-19

5. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

6. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1. Capaian dan Target Kinerja Makro Daerah Tahun 2024– 2026 ..... VI-1
6.2. Capaian dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2024– 2026 ..... VI-3
6.3. Capaian dan Target Kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024– 2026 ..... VI-3

7. BAB VII : PENUTUP VII-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan suatu daerah, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun ke-II dari periode RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Sebagai satu kesatuan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menjamin sinergitas dan keselarasan program maka dalam penyusunan RKPD ini tidak lepas dari telaah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 dan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan RKPD melalui 6 tahapan yaitu: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan Rancangan Awal; c. penyusunan rancangan; d. Pelaksanaan musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan akhirnya ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah.

Gambar 1.1

Bagan Alir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Mempergunakan banyak pendekatan dalam proses penyusunannya yaitu melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom up* sedangkan untuk substansi menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial.

Sebagai lanjutan dari pelaksanaan RKPD tahun 2025 maka RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; prioritas pembangunan daerah; rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Menjadi bagian dari kebijakan tahap I RPJPD yang menjadi bagian awal mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang menjadi komitmen pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 maka upaya mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pelaporan berbasis digital telah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), yang didalam terdapat 3 Komponen, yakni (1) Sistem Informasi

Pembangunan Daerah; (2) Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan (3) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Penerapan aplikasi SIPD-RI ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu, penerapan aplikasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah benar-benar dihasilkan melalui proses perencanaan yang transparan mulai dari persetujuan kepala daerah terhadap Rancangan Awal RKPD, Musrenbang RKPD di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Kabupaten serta kesepakatan terhadap aspirasi masyarakat anggota DPRD melakukan kegiatan reses.

Berikut login awal https://sipd.kemendagri.go.id/landing dengan *Screen Shoot* tampilan pertama aplikasi

Gambar 1.3



Halaman Muka Aplikasi SIPD-RI Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/

Secara normatif, RKPD Tahun 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan RAPBD Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1)
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2038; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor xx Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antara RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dengan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 tersaji dalam Gambar berikut.

Gambar 1.4

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

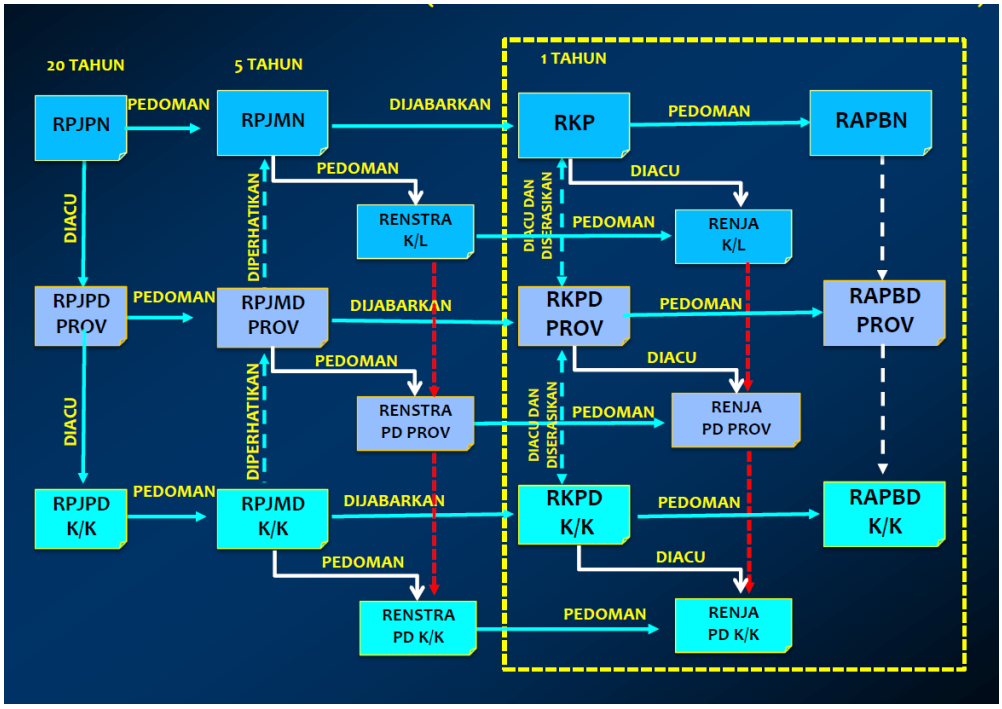

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 mengacu pada arah pembangunan dan arah kebijakan serta sasaran pada Rancangan RPJMD 2025-2029.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2026 harus sejalan dengan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi rujukan utama adalah Undang-undang nomor 59 tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dengan Visi nasional "Negara Nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan".

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah serta memberikan arah dan menjadi tolok ukur keberhasilan Pembangunan daerah Kabupaten Nunukan.

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2026 adalah:

a. Menjaga konsistensi antara substansi rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dengan substansi rencana jangka pendek;
b. Untuk memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan PD telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD;
c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan

pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
e. Menjadi pedoman bagi PD untuk menyusun Rencana Kerja PD;
f. Menjadi Pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2026;
g. Sebagai dasar pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan maupun hasil perencanaan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan Penulisan RKPD Tahun 2025 serta Sistematika Dokumen RKPD;

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH, berisi tentang Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Nunukan, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, serta Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2026;

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, berisi tentang Arah kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2026;

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, berisi tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan pada Tahun 2026;

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta pagu yang akan menjadi dasar penyusunan Renja PD Tahun 2026;

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, berisi

indikator kinerja memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang meliputi tiga aspek yaitu 1) aspek kesejahteraan masyarakat, 2) aspek pelayanan umum dan 3) aspek daya saing daerah;

BAB VII PENUTUP, berisi tentang kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Pada bagian ini akan diuraikan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Nunukan yang terdiri atas Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan wilayah

Wilayah Kabupaten Nunukan secara geografis terletak pada 115°33’00"-118°03’55" Bujur Timur dan 3°15’00”-4°24’55" Lintang Utara dengan luas wilayah 14.247,50 km^2 atau sekitar 18,87% dari luas Provinsi Kalimantan Utara dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Malinau
- Sebelah Barat berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia

Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi Kabupaten Nunukan

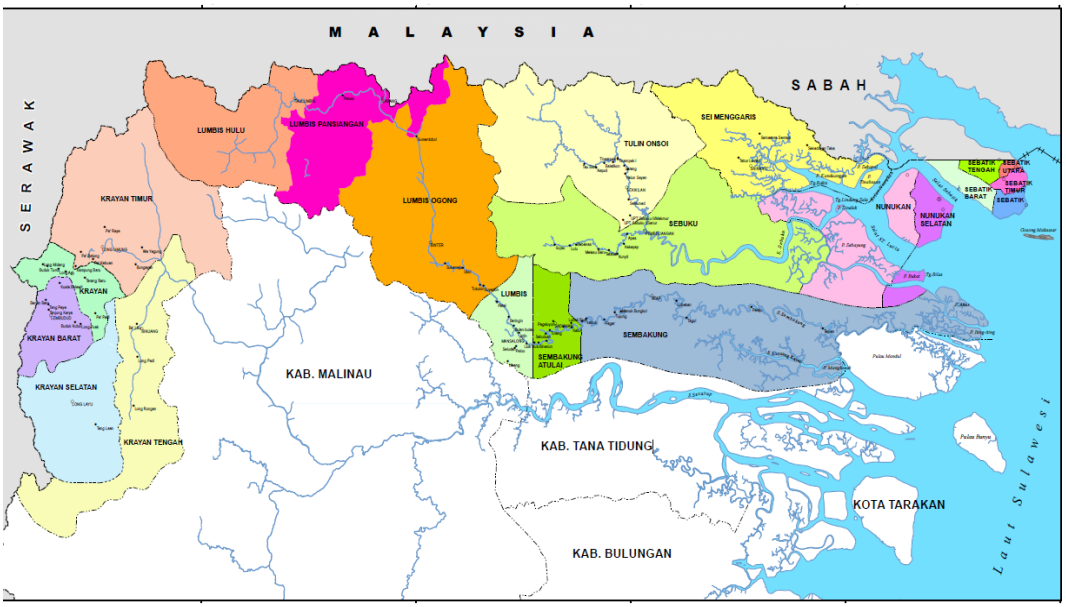

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, 2025

Saat ini Kabupaten Nunukan terdiri atas 21 wilayah Kecamatan, 232 Desa dan 8 Kelurahan, dengan pembagian wilayah administrasi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Nunukan
Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Krayan	254,35	1,79
2	Krayan Selatan	760,24	5,34
3	Krayan Tengah	997,42	7,00
4	Krayan Barat	307,22	2,16
5	Krayan Timur	1.273,17	8,94
6	Lumbis	290,23	2,04
7	Lumbis Ogong	1.628,66	11,43
8	Lumbis Pansiangan	763,93	5,36
9	Lumbis Hulu	964,42	6,77
10	Sembakung	1.764,94	12,39
11	Sembakung Atulai	277,72	1,95
12	Sebuku	1.608,48	11,29
13	Tulin Onsoi	1.513,36	10,62
14	Sei Menggaris	850,48	5,97
15	Nunukan	564,50	3,96
16	Nunukan Selatan	181,77	1,28
17	Sebatik	51,07	0,36
18	Sebatik Barat	93,27	0,65
19	Sebatik Timur	39,17	0,27
20	Sebatik Tengah	47,71	0,33
21	Sebatik Utara	15,39	0,11
J u m l a h		**14.247,50**	**100,00**

Sumber: BPS Nunukan, 2025

Karakteristik 21 wilayah kecamatan tersebut sangat bervariasi dan letaknya terpisah sehingga menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten dengan kawasan yang sangat kompleks karena memiliki kawasan pedalaman, pesisir, pegunungan, dan kepulauan, serta kawasan terpencil.

Secara topografi, Kabupaten Nunukan juga memiliki ketinggian bervariasi berkisar antara 0 – 1500 meter di atas permukaan laut (DPL), dan kemiringan tanah dari 0 sampai lebih dari 40%.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Kabupaten Nunukan

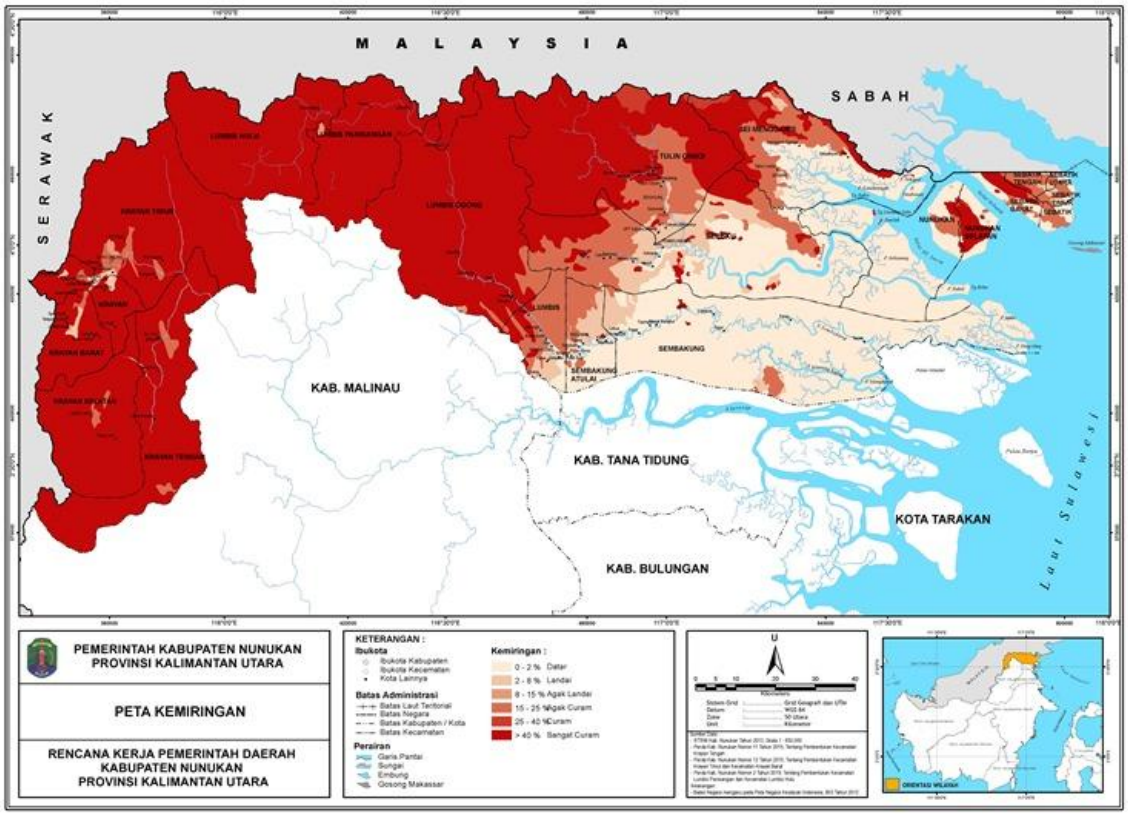

Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, 2025

Kemiringan tanah wilayah Kabupaten Nunukan berkorelasi positif dengan ketinggian, sehingga makin tinggi letak wilayahnya maka kemiringannya semakin terjal. Luas kemiringan lahan di Kabupaten Nunukan meliputi datar (0-2%) seluas 357.587,5 Ha, landai (2-8%) seluas 55.877,0 Ha, agak landai (8-15%) seluas 1.583,2 Ha, agak curam (15-25%) seluas 145.765,4 Ha, curam (25-40%) seluas 8.790,2 Ha dan sangat curam (>40%) seluas 855.146,7 Ha. Sementara kondisi ketinggian wilayah Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel Tinggi Wilayah per Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Nunukan Menurut Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Tinggi DPL (m)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Krayan	1000	225,27
2	Krayan Selatan	891	229,83
3	Krayan Tengah	790	209,05
4	Krayan Barat	1003	231,75
5	Krayan Timur	992	217,12
6	Lumbis	94	114,41
7	Lumbis Ogong	128	132,08
8	Lumbis Pansiangan	n/a	146,33
9	Lumbis Hulu	n/a	168,74
10	Sembakung	19	78,58
11	Sembakung Atulai	27	104,65
12	Sebuku	23	79,09
13	Tulin Onsoi	11	81,09
14	Sei Menggaris	49	49,55
15	Nunukan	21	10,42
16	Nunukan Selatan	28	2,79
17	Sebatik	19	22,63
18	Sebatik Barat	12	5,78
19	Sebatik Timur	40	17,48
20	Sebatik Tengah	98	15,03
21	Sebatik Utara	14	21,15

Sumber: BPS Nunukan, 2025

Kondisi topografi bervariasi dan wilayah kecamatan yang terpisah-pisah merupakan kendala tersendiri bagi Kabupaten dalam mewujudkan pemerataan pembangunan terutama dalam hal infrastruktur dasar.

Secara geomorfik yang mendasarkan pada peta rupa bumi, Kabupaten Nunukan Sebagian besar berupa bentang alam pegunungan di bagian barat, bentang alam perbukitan di bagian timur dan sebagian bentang alam dataran/pantai di bagian paling timur. Sementara secara litostratigrafi, maka daerah Kabupaten Nunukan terdiri dari batuan yang berumur Kapur-Paleosen yang dikenal dengan Kelompok Embaluh dan batuan yang berumur Tersier (Eosen-Pliosen) dan batuan Kwarter yang berupa Endapan Aluvial. Kelompok Embaluh yang berumur Kapur-Paleosen terdiri dari Formasi Lurah (KTlu), Formasi Longbawan (KTlb), Formasi Mentarang (KTme), selanjutnya batuan uang

berumur Tersier terdiri dari Formasi Sembakung (Tes), Formasi Naintopo (Ton), Formasi Meliat (Tmm) dan Intrusi Diorit (Tmd), sedangkan di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik terdapat tambahan Formasi Tabul (Tmt), Formasi Sinjin (Tps), Formasi Sajau (TQps), dan beberapa intrusi seperti andesit, basalt, dasit (Qpi) serta Endapan Aluvial (Qa) yang berumur Kwarter.

Kondisi geologi di kabupaten Nunukan baik pada wilayah daratan Pulau Kalimantan maupun pulau-pulau kecil merupakan jenis batuan berumur *quaternary, pliocene, miosen* hingga *oligacene.* Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah podsolik merah kuning dengan top soil tipis dan memiliki kesuburan relatif rendah untuk jenis komoditi pangan lahan basah.

Selanjutnya kondisi hidrologi di Kabupaten Nunukan, akan dibagi menjadi dua yakni informasi ketersediaan air tanah, dan informasi Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pemanfaatannya.

Terdapat 3 klasifikasi ketersediaan air tanah di Kabupaten Nunukan, dengan pembagian kawasan sebagai berikut:

1) Kawasan dengan kondisi air tanah langka/tak berarti; terutama berada pada Kecamatan Krayan, Krayan Barat, Krayan Timur, Krayan Selatan, Krayan Tengah Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, Lumbis Pansiangan dan Lumbis serta Tulin Onsoi.
2) Kawasan dengan produktivitas akuifer rendah; terletak pada daerah peralihan antara kawasan dengan kondisi air tanah langka/tak berarti dengan kawasan setempat akuifer produktif dan berada di Kecamatan Sei Menggaris, Sebuku dan Tulin Onsoi.
3) Kawasan dengan akuifer produktif; terutama berada di wilayah pesisir Kecamatan Sembakung, Sembakung Atulai dan Sei Manggaris, pesisir Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik.

Kemudian kondisi DAS di Kabupaten Nunukan terbentuk oleh sistem sungai dengan cabang-cabang aliran (*channel*) yang panjang sehingga membentuk wilayah DAS yang cukup luas. Permukaan sungai-sungai di wilayah Kabupaten Nunukan sebagian besar berbentuk sempit memanjang, namun berdebit besar sebagai akibat dari panjangnya daerah aliran sungai. Adapun daerah aliran sungai di Kabupaten Nunukan terbagi menjadi:

a. Daerah Aliran Sungai Nunukan, Daerah Aliran Sungai Sebatik
b. Daerah Aliran Sungai Sebuku, dengan panjang 115 km, memiliki dua anak sungai utama, yaitu Sungai Tulid dan Sungai Tikung. Sungai Tu!id berasal dari beberapa anak sungai, yaitu Sungai Apan, Sungai Tampilon di sebelah Utara serta Sungai Sebuda, Sungai Kapakuan, Sungai Agison di sebelah Barat. DAS Sebuku hanya melewati Kecamatan Nunukan (di daratan Pulau Kalimantan)
c. Daerah Aliran Sungai Sei Manggaris, dengan panjang 36 km, memiliki tiga anak sungai, yaitu Sungai Sei Manggaris, Sungai Sitabul dan Sungai Sebakis. DAS Sei Manggaris hanya melewati Kecamatan Nunukan (di daratan Pulau Kalimantan).
d. Daerah Aliran Sungai Sembakung, dengan panjang 278 km, memiliki beberapa anak sungai, yaitu Sungai Tagul, Sungai Membuluh, Sungai Sebuluan, Sungai Simalumbeng dan Sungai Selimulan. DAS Sembakung melewati Kecamatan Lumbis di sebelah Barat dan Kecamatan Sembakung di sebelah Timur.

DAS di Kabupaten Nunukan memiliki beberapa peranan yang cukup penting, antara lain:

a. Sebagai sarana transportasi air yang memfasilitasi mobilitas penduduk maupun hasil pertanian/perkebunan, dan hasil kelautan dan perikanan, serta barang dagangan antar daerah.
b. Sarana pengangkutan hasil hutan berupa kayu tebangan perusahaan Hak Pemegang Hutan (HPH).
c. Sumber air baku penduduk, serta digunakan untuk aktivitas MCK penduduk yang bertempat tinggal di sepanjang daerah aliran sungai.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

A. Kawasan Strategis Nasional

Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Nunukan terdiri atas:

a. Kawasan Perbatasan Darat Republik Indonesia di Kalimantan (KASABA) dan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*)
b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan berupa Kawasan Perbatasan Laut Republik Indonesia termasuk dua pulau kecil terluar dengan Negara Malaysia dan Filipina meliputi Pulau Sebatik dan Pulau Gosong Makassar.
c. Kawasan Andalan Nasional TATAPAN BUMA (Tarakan, Tanjung Palas, Nunukan, Pulau Bunyu dan Malinau), dimana Kabupaten Nunukan menjadi bagian dari kawasan andalan tersebut.

B. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi ditetapkan sebagai kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal provinsi yang terdapat di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037, kawasan yang termasuk ke dalam Kawasan Strategis Provinsi terdiri atas:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi: Long Bawan dan Long Layu , Pulau Sebatik, Lumbis Ogong, Sei Menggaris, kawasan *food estate* dan *rice estate di* Kabupaten Nunukan, kawasan *technopark* pertanian organik di Kabupaten Nunukan, kawasan *marine technopark* perikanan di Kabupaten Nunukan.
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan konservasi mangrove di Kabupaten Nunukan.
c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan teknologi tinggi yang ada di Kabupaten Nunukan adalah PLTA Sei Sembakung.

C. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
    1) Kawasan Agroindustri di Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sei Menggaris.
    2) Kawasan Cepat Tumbuh Jalan Lingkar Pesisir Pantai Pulau Nunukan di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Nunukan Selatan;
    3) Kawasan Industri Perikanan Terpadu Mansapa (Marine Technopark) di Kecamatan Nunukan Selatan;
    4) Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bahari Pulau Sebatik di Kecamatan Sebatik;
    5) Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Sei Menggaris di Kecamatan Sei Menggaris;
    6) Kawasan Pengolahan Garam Gunung di Kecamatan Krayan Selatan dan Kecamatan Krayan
    7) Kawasan Pertambangan Batubara di Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sei Menggaris dan di Kecamatan Sebuku.
    8) Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sembakung;
b. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi:
    1) Rumah Adat Tanjung Karya di Kecamatan Krayan; dan
    2) Batu Sicien berada di Kecamatan Krayan Selatan.

2.1.1.3. Potensi Sumber Daya Kabupaten Nunukan

A. Sektor Perkebunan

Salah satu produk perkebunan yang banyak diminati terutama bagi para investor adalah kelapa sawit. Produk tanaman perkebunan lain yang telah diusahakan dan minat pengembangannya tinggi, antara lain jenis tanaman kakao. Pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Nunukan pada masa yang akan

datang masih sangat diharapkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama untuk jenis-jenis tanaman yang mempunyai prospek pasar baik dan dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk pengembangan industri seperti kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Jenis tanaman kelapa sawit merupakan jenis tanaman andalan secara nasional, mempunyai keterkaitan ke depan untuk berkembangnya kegiatan industri dan berorientasi ekspor, mempunyai kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja serta dalam pelaksanaan pengembangannya dapat melibatkan partisipasi masyarakat desa. Demikian pula dengan pengembangan jenis tanaman kakao dan kelapa juga mempunyai keunggulan untuk dikembangkan dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi Kabupaten Nunukan.

Dalam rangka pengembangan pertanian tanaman perkebunan di Kabupaten Nunukan perlu diketahui seberapa besar ketersediaan lahan yang dapat dikembangkan untuk kegiatan tersebut, khususnya pengembangan jenis tanaman kelapa sawit, kelapa dan kakao. Analisis kesesuaian pengembangan tanaman perkebunan dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Kawasan pertanian dengan ketinggian < 2.000 meter di atas permukaan laut.
b. Kawasan dengan lereng < 45 persen.
c. Kedalaman efektif lapisan tanah > 50 cm.
d. Berada di luar kawasan lindung, kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas.

Beberapa tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Nunukan antara lain kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, dan, tebu.

Tabel 2.3
Perkembangan Luas Areal Komoditas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No	Jenis Tanaman	Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Karet	118,00	143,50	150,50	150,50	
2	Kelapa	341,00	305,51	314,40	314,40	
3	Kelapa Sawit	33.169,37	33.299,07	32.764,87	132.785,30	
4	Kopi	113,50	116,50	123,00	105,00	
5	Kakao	1.350,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	
6	Lada	119,50	168,85	168,85	168,85	
7	Tebu	32,00	42,00	60,00	61,00	

Sumber: Kabupaten Nunukan Dalam Angka, 2025

Selain komoditas yang ada di atas, beberapa jenis tanaman perkebunan lain yang dinilai sesuai untuk dikembangkan adalah tanaman buah-buahan. Dalam pengelolaan lahan yang potensial tersebut diperlukan suatu mekanisme pengaturan ruang diantaranya:

a. Pengembangan perkebunan harus dikaitkan dengan pengembangan masyarakatnya. Pola pengembangan PIR sebenarnya dapat digunakan, dimana investor dan masyarakat bekerja sama saling menguntungkan. Investor sebagai pemodal mengelola kebun inti, sedangkan masyarakat mengelola lahan plasma dalam besaran dua hingga lima hektar. Masyarakat yang mempunyai kemampuan terbatas, baik dalam modal, keterampilan dan pengetahuan dapat dibantu oleh investor. Bantuan modal dapat diberikan melalui penyediaan bibit, pupuk, dan sebagainya. Sedangkan keterampilan dan pengetahuan, dapat diadakan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat oleh investor.
b. Dalam pengembangan perlu adanya pengendalian usaha perkebunan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga, yaitu:

1) Tidak diperkenankan adanya bangunan, kecuali bangunan penunjang unit perkebunan seperti pabrik, gudang, pembibitan dan perumahan karyawan;
2) Luas bangunan maksimum sebesar dua persen dari luas perkebunan;
3) Perkebunan dengan luas < 25 hektare, maka kepadatan maksimum lima rumah/ha;
4) Pengaturan jalan untuk jalan produksi memiliki lebar badan jalan empat meter dan tidak boleh diperkeras;
5) Untuk jalan transportasi dengan lebar badan jalan enam meter diperkeras dengan batu, tidak diaspal; serta
6) Pengembangan perkebunan pada lahan plasma yang dikelola oleh masyarakat dapat dikaitkan dengan pengembangan peternakan.

B. Tanaman Pangan Lahan Kering

Salah satu hal yang penting bagi pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yaitu mengembangkan tanaman pangan lahan kering. Beberapa produksi pertanian yang telah dikembangkan antara lain tanaman padi, jagung, kacang-kacangan dan tanaman pertanian lainnya, walaupun keseluruhan produksi belum maksimal. Beberapa hasil produksi tanaman pangan lahan kering umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan sebagian dijual ke pusat perkotaan. Pengembangan tanaman pangan lahan kering di Kabupaten Nunukan pada masa mendatang masih tetap harus diperbesar, terutama untuk mendukung ketahanan dalam bidang pangan (*food security*) sehingga dapat menghilangkan ketergantungan terhadap daerah sekitarnya. Jika dukungan lahan dan sumber daya manusia memadai, Kabupaten Nunukan juga dapat dijadikan sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisa, luas lahan yang potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan lahan kering, yaitu 135.701,46 hektar, sedangkan areal yang tergolong sesuai bersyarat seluas 146.030,73 hektar dan areal tidak sesuai seluas 1.144.635,81 hektar. Kawasan yang potensial untuk pengembangan tanaman pangan lahan kering tersebut menyebar di wilayah Kecamatan Nunukan yaitu di Kecamatan Sebuku, Sembakung, Lumbis dan

Krayan. Namun, kawasan potensial yang berada di kawasan TNKM tidak direkomendasikan untuk dikembangkan dalam skala besar, kecuali untuk pertanian penduduk yang telah bermukim di kawasan tersebut. Hal ini disebabkan kawasan ini merupakan kawasan konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang yang perlu dijaga kelestariannya, di samping juga sebagai kawasan hutan lindung.

Dalam pengelolaan lahan potensial pengembangan tanaman pangan lahan kering tersebut diperlukan suatu mekanisme pengaturan ruang diantaranya:

a. Perlu adanya perluasan pengembangan tanaman pangan lahan kering secara optimal sesuai dengan kesesuaian lahan, dalam rangka menjaga ketahanan dalam bidang pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain.
b. Dalam pengembangannya perlu mempertimbangkan hal-hal berikut :
    1) Diperkenankan adanya budidaya peternakan, permukiman perdesaan dan kegiatan budidaya pertanian lainnya.
    2) Permukiman perdesaan memiliki kepadatan maksimum lima rumah/hektare.

C. Tanaman Pangan Lahan Basah

Pengembangan tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Nunukan bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan (*food security*) dan ketergantungan terhadap daerah lain, yaitu melalui pengembangan tanaman pangan padi sawah, serta pada akhirnya dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisa, luas lahan yang potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan lahan basah/padi sawah adalah 77.337,17 hektare, lahan sesuai bersyarat seluas 63.611,44 hektare dan lahan tidak sesuai seluas 1.285.419,39 hektare.

Kawasan yang potensial untuk tanaman pangan lahan basah menyebar di Kecamatan Sebatik, Nunukan, Sembakung, Lumbis dan Krayan. Kawasan potensial untuk tanaman pangan lahan basah yang berada di Kecamatan Krayan tidak direkomendasikan untuk dikembangkan, kecuali secara terbatas dikembangkan oleh penduduk yang bermukim di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan mengingat kawasan tersebut berada dalam kawasan konservasi Taman

Nasional Kayan Mentarang. Aktivitas masyarakat adat yang berada di sekitar atau di dalam kawasan Taman Nasional dapat memanfaatkan ruang-ruang yang telah ditetapkan didalam zona tersebut diantaranya zona tradisional dan zona pemanfaatan sesuai dengan peraturan zonasi Taman Nasional yang dikeluarkan oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistem tahun 2015 dan penentuan zonasi tersebut telah dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri LHK P.76/menlhk-setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

D. Sektor Pariwisata

Keberadaan kawasan wisata di daerah berpotensi menarik minat wisatawan baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung. Dengan adanya kunjungan wisatawan maka akan menggerakkan perekonomian lokal yang pada akhirnya dapat menjadi sumber pendapatan daerah.

Kabupaten Nunukan memiliki potensi budaya dan pariwisata yang dapat dikembangkan. Di Kabupaten Nunukan, terdapat potensi obyek wisata alami maupun buatan, beberapa diantaranya meliputi:

Tabel 2.4
Obyek Wisata Unggulan di Kabupaten Nunukan

No.	Nama dan Lokasi Obyek Wisata	Kategori
1	Air terjun Sungai Binusan	Alam
2	Pantai Firdaus (Ecing)	Alam
3	Pantai Sedadap	Alam
4	Wanawisata yang didominasi oleh vegetasi spesifik hutan dataran	Alam
5	Agrowisata tambak dan ombak laut di Pulau Tinabasan	Alam
6	Pantai Batu Lamampu	Alam
7	Agrowisata Sungai Nyamuk	Alam
8	Wisata Budaya Suku Dayak Murud (Tegalen)	Budaya
9	Ekowisata Taman Nasional Kayan Mentarang	Alam
10	Pembuatan Garam gunung terletak dihulu Sungai Desa Long Layu	Alam
11	Binuang	Alam
12	Ba'Liku	Alam
13	Pa'Kebuan	Alam

Sumber: Disbudporapar Kab. Nunukan, 2024.

E. Sektor Perikanan

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Nunukan. Prospek sektor perikanan cukup menjanjikan karena letak geografis Kabupaten Nunukan yang menguntungkan untuk pemasaran berskala ekspor.

1. Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap merupakan usaha penangkapan ikan yang umumnya dilakukan di laut, terutama di sekitar pantai dan landasan kontinen. Di Kabupaten Nunukan, seluruh jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan cukup layak untuk dioperasikan. Pengembangan masing-masing alat tangkap untuk meningkatkan produktifitas penangkapan di perairan Kabupaten Nunukan secara lestari adalah sebagai berikut :

a. Alat tangkap *Trawl* > 10 GT, perlu dilakukan pengembangan jumlah armada karena alat tangkap lainnya belum mampu memanfaatkan potensi perairan Nunukan pada daerah lebih dari empat mil hingga lepas pantai dan sepanjang Selat Makasar. Diharapkan pengembangan alat ini dapat mengurangi persaingan dengan nelayan yang hanya dapat beroperasi di daerah kurang dari 4 mil dari garis pantai.
b. Alat tangkap *Trawl* yang ditarik dengan kapal < 5 GT cukup layak untuk dipertahankan, namun jumlah armadanya tidak perlu dikembangkan karena selama ini pengoperasiannya tidak selektif terhadap jenis ikan. Pengembangan terhadap alat tangkap ini diarahkan kepada teknologi, seperti mekanisasi penarikan jaring (*hauling*).
c. Alat tangkap *Trammel Net* dengan tujuan utama untuk menangkap udang, tidak perlu ditambah jumlahnya, tetapi secara teknologi harus dikaji lebih lanjut mengenai tinggi jaring berkaitan dengan tingkat selektivitas hasil tangkapan.
d. Alat tangkap *Gill Net*, dapat dikembangkan, baik intensitas maupun teknik pengoperasiannya melalui penambahan daya jangkau jaring. Pengetahuan nelayan mengenai teknik pengoperasian *gill net* dan keberadaan ikan ekonomis penting masih perlu dibina oleh pihak terkait.

e. Alat tangkap *Encircling Gill Net*, masih dapat dikembangkan dengan target untuk menangkap ikan-ikan ekonomis penting. Hal penting adalah ukuran mata jaring berkaitan dengan tingkat selektivitas penangkapan jenis ikan dan areal penangkapan mengingat pengoperasian jaring ini membutuhkan areal yang relatif luas.
f. Alat tangkap *Pole* dan *Line*, perlu dikembangkan pada kualitas armadanya meliputi kelengkapan navigasi dan informasi daerah penangkapan. Hal ini disebabkan karena alat tangkap ini dioperasikan di perairan lepas pantai dengan target jenis ikan pelagis yang berkelompok, seperti ikan tongkol, cakalang dan tuna.
g. Alat tangkap *Long Line*/pancing rawai, sangat memungkinkan untuk dikembangkan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga daerah operasinya dapat diperluas hingga di atas empat mil dari garis pantai.
h. Alat tangkap *Kelong*, dioperasikan dengan memperhatikan pola pasang surut di sepanjang pantai pulau-pulau kecil. Pengembangannya perlu dipertahankan karena dapat membantu sebagian nelayan untuk memperoleh penghasilan tambahan. Namun ukuran mata jaring yang digunakan harus diperhatikan karena dapat berdampak pada kelestarian lingkungan.
i. Alat tangkap *Julu*/*Tugu*, hampir sama dengan Kelong dalam pengoperasian dan jenis ikan yang tertangkap. Alat ini tidak dapat dikembangkan lagi karena tidak ramah lingkungan dan dapat membahayakan pelayaran karena banyak dioperasikan di mulut muara.
j. Alat tangkap Hampang, tidak direkomendasikan untuk dikembangkan karena dapat mengganggu kelestarian sumber daya hayati di sekitarnya.

Selanjutnya, sebagian besar jenis ikan yang terdapat di perairan Kabupaten Nunukan bernilai ekonomis penting, mulai dari ikan-ikan karang, kerapu, baronang, ikan merah, udang, kepiting dan kerang yang tersebar di daerah perairan pantai, hingga ikan bawal, tongkol dan tuna yang tersebar di perairan lepas pantai.

Dalam rangka pemanfaatan kekayaan sumber daya pesisir dan kelautan Kabupaten Nunukan ini, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh para

nelayan harus dilakukan secara efisien dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

2. Budidaya Tambak

Berdasarkan kondisi fisik lahan, Kabupaten Nunukan sangat potensial untuk mengembangkan kegiatan budidaya tambak. Salah satu kelebihan yang dimiliki Kabupaten Nunukan untuk pengembangan budidaya tambak adalah keberadaan hutan mangrove yang cukup luas.

Pada umumnya peningkatan produktivitas tambak harus dilakukan secara intensifikasi mengingat usaha yang dilakukan masih bersifat tradisional dengan tingkat kematian udang yang tinggi. Pengembangan usaha pertambakan dilakukan melalui:

a. Penyediaan benih yang berkualitas dan terjamin kontinuitasnya melalui panti-panti pembenihan (*hatchery*).
b. Perbaikan konstruksi tambak (pematang, saluran pemasukan dan pengeluaran air) dan sirkulasi air tambak sehingga kualitasnya terjamin.
c. Peningkatan padat penebaran benih dengan pemberian pakan yang proporsional.
d. Pengendalian kesuburan tambak dan penyakit melalui pemupukan dan pengapuran.
e. Penyediaan pakan dan obat-obatan yang memadai.
f. Penyuluhan dan bimbingan mengenai budidaya tambak yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
g. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penanganan pasca panen, pemasaran dan distribusi hasil tambak.

3. Budidaya Air Laut

Rumput laut merupakan salah satu komoditas yang dikembangkan dalam kegiatan budidaya air laut. Parameter kesesuaian lokasi untuk kegiatan budidaya air laut adalah:

a. Keterlindungan lokasi yang dimaksud dari dinamika perairan laut, cukup baik karena berada pada perairan yang semi tertutup.
b. Indikasi pencemaran yang dapat mengganggu kegiatan budidaya, relatif tidak ada.

c. Kondisi pasang surut memiliki fluktuasi yang cukup baik sehingga meskipun terjadi pasang surut maksimum, lokasi budidaya masih tetap dapat tergenang.
d. Arus yang tidak terlalu besar, sehingga sangat mendukung bagi kehidupan organisme kerang-kerangan.
e. Oksigen terlarut (DO) di lokasi berkisar antara 6,8-6,9 mg/l, yang artinya sangat baik untuk kegiatan budidaya laut.
f. Salinitas yang terdapat di lokasi, yaitu antara 25-26 persen, berada pada kisaran yang baik untuk kegiatan budidaya laut.

Pengembangan kegiatan budidaya laut juga dipengaruhi faktor-faktor non teknis seperti penyediaan sarana produksi, penanganan pasca panen dan pemasaran. Saat ini usaha budidaya air laut yang mulai berkembang di Kabupaten Nunukan adalah budidaya rumput laut. Dan berdasarkan hasil analisa, menunjukkan bahwa di perairan Selatan Pulau Tinabasan dan sebelah Timur Pulau Sinelak memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan kegiatan budidaya laut dengan sistem jaring apung, usaha budidaya tiram dan kerang dara.

F. Sektor Peternakan

Pengembangan kawasan penggembalaan (pastura) diarahkan untuk pengembangan peternakan hewan besar dan padang penggembalaan ternak, serta pengembangan ternak dalam skala kecil/rumah tangga. Kebutuhan pengembangan ternak dirasakan masih cukup prospektif pada masa yang akan datang, terutama dikaitkan dengan kebutuhan daging untuk masyarakat Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.

Mengingat kedudukan geografis yang berada pada kawasan perbatasan, produksi daging dapat dijadikan sebagai komoditas ekspor ke negara-negara tetangga. Kenyataan menunjukkan bahwa kebutuhan ternak masih didatangkan dari luar wilayah Kabupaten Nunukan.

Prospek pasar dari pengembangan ternak ini harus diantisipasi secara maksimal di dalam wilayah Kabupaten Nunukan melalui pengembangan wilayah-wilayah potensial. Dalam rangka pengembangan peternakan perlu dilakukan analisa kesesuaian pemanfaatan ruang dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

a. Kawasan yang mempunyai kesesuaian lahan untuk penggembalaan hewan besar.
b. Kawasan dengan ketinggian < 1.000 meter di atas permukaan laut.
c. Kawasan dengan lereng < 30 persen.
d. Jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah.

Berdasarkan hasil analisa, luas lahan yang potensial untuk pengembangan kegiatan penggembalaan (pastura) seluas 216.830,76 hektare, sedangkan areal sesuai bersyarat seluas 146.030,73 hektare dan areal yang tidak sesuai untuk dikembangkan seluas 1.063.506,51 hektare. Dalam pengelolaan lahan potensial pengembangan ternak tersebut diperlukan suatu mekanisme pengaturan ruang diantaranya:

a. Perlu dilakukan pengembangan prasarana jalan dan prasarana ternak.
b. Pengembangan usaha untuk menunjang pengembangan kawasan penggembalaan.
c. Pengembangan padang penggembalaan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
    1) Tidak diperbolehkan melakukan penggembalaan pada kawasan hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap yang telah ditetapkan, terutama untuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada.
    2) Diperkenankan adanya bangunan yang menunjang fungsi kawasan/kegiatan utama untuk kepentingan peternakan.
    3) Diperkenankan adanya jalan sesuai dengan kebutuhan.

2.1.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana merupakan wilayah yang berpotensi mengalami bencana alam. Potensi bencana alam yang ada di Kabupaten Nunukan berdasarkan peta potensi bencana dan peta resiko bencana (BNPB, 2015-2021) berupa tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrem dan abrasi, serta cuaca ekstrem.

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tahun 2024 Kabupaten Nunukan

memperoleh skor IRBI sebesar 117,3. Nilai tersebut berada pada kategori Kelas Risiko Sedang. Capaian tersebut menunjukkan terdapat penurunan risiko bencana di Kabupaten Nunukan sebesar 37,16% persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2023 dimana skor IRBI Kabupaten Nunukan sebesar 154,56.

Kejadian bencana dalam kurun waktu 2020-2024 di Kabupaten Nunukan disajikan secara detail pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Data Kejadian Bencana di Kabupaten Nunukan
Tahun 2020-2024

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Abrasi	1	2	-	-	1
2	Angin Kencang	6	3	6	5	3
3	Banjir	3	7	6	22	7
4	Banjir Bandang	-	-	-	1	-
5	Banjir dan Tanah Longsor	-	1	1	1	1
6	Gempabumi	-	1	-	-	-
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	52	7	8	30	20
8	Tanah Longsor	1	2	6	2	4
Jumlah		63	23	27	61	36

Sumber: Dokumen KRB 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 4 jenis bencana yang hampir terjadi di sepanjang tahun yakni angin kencang, banjir, kebakaran hutan dan lahan serta tanah longsor. Bencana banjir adalah bencana yang menjadi langganan tiap tahun terjadi di Nunukan yang memberikan dampak kerugian materi dan korban jiwa bagi masyarakat yang ada di kabupaten Nunukan. Dari sejarah kebencanaan daerah di atas, diperlukan penataan penanggulangan bencana yang terencana, terukur dan terpadu dalam mengoptimalkan upaya-upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif dan tepat. Untuk pencapaian upaya tersebut, maka diperlukan adanya

pengkajian-pengkajian lebih mendasar terhadap bencana-bencana yang berpotensi, serta kebijakan-kebijakan yang tepat agar terjaminnya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan segala aktivitasnya.

2.1.1.5. Kondisi Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk serta struktur penduduk. Berdasarkan data Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2025 yang dirilis oleh BPS Nunukan, jumlah penduduk Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 mencapai 227.460 jiwa dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,62 persen dibanding tahun lalu, dengan detail per tahun dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut ini.

Gambar 2.3
Jumlah Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

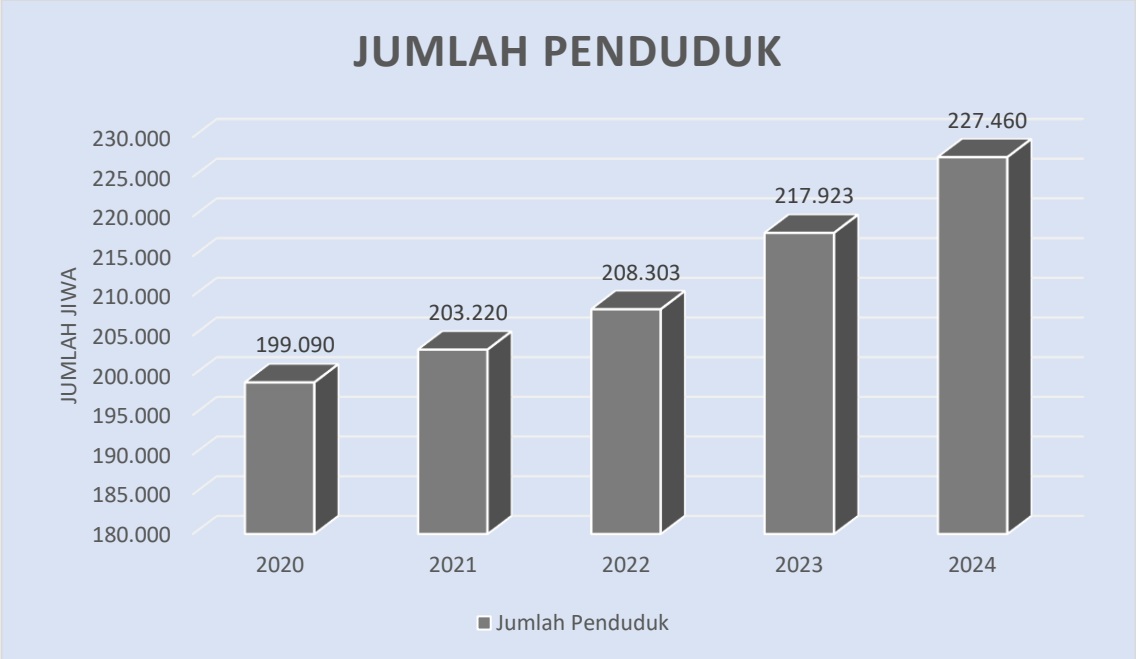

Sumber: BPS Nunukan Tahun 2020-2024, diolah 2025

Jika dilihat dari perkembangannya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi fluktuasi dalam persentase laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nunukan. Meski persentase pertumbuhan jumlah penduduk dalam 5 tahun

terakhir berfluktuasi, namun berdasarkan grafik pada Gambar 2.3 tampak bahwa jumlah penduduk Kabupaten Nunukan konsisten bertambah setiap tahun.

Tabel 2.6
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Nunukan
Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase penduduk per kecamatan (%)	Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)
1	Krayan Selatan	1.511	0,66	760,24	1,99
2	Krayan Tengah	1.124	0,49	997,42	1,13
3	Krayan	3.710	1,63	254,32	14,59
4	Krayan Timur	1.609	0,71	1.272,17	1,26
5	Krayan Barat	3.132	1,38	307,22	10,19
6	Lumbis Ogong	3.256	1,43	1.628,66	2,00
7	Lumbis Pansiangan	1.697	0,75	763,93	2,22
8	Lumbis Hulu	870	0,38	964,42	0,90
9	Lumbis	6.990	3,07	290,23	24,08
10	Sembakung Atulai	3.470	1,53	277,72	12,49
11	Sembakung	7.076	3,11	1.764,94	4,01
12	Sebuku	12.858	5,65	1.608,48	7,99
13	Tulin Onsoi	12.082	5,31	1.513,36	7,98
14	Sei Menggaris	11.329	4,98	850,48	13,32
15	Nunukan	73.095	32,14	564,50	129,49
16	Nunukan Selatan	27.781	12,21	181,77	152,84
17	Sebatik Barat	14.086	6,19	93,27	151,02
18	Sebatik	7.781	3,42	51,07	152,36
19	Sebatik Timur	15.791	6,94	39,17	403,14
20	Sebatik Tengah	9.585	4,21	47,71	200,90

21	Sebatik Utara	8.627	3,79	15,39	560,56
Kabupaten Nunukan		227.460	100,00	14.247,50	15,96

Sumber: Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2025

Berdasarkan data pada Tabel 2.6 distribusi penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2024 terkonsentrasi di Pulau Nunukan sebanyak 100.095 Jiwa atau 44,35 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Nunukan. Sejumlah 73.095 Jiwa bermukim di Kecamatan Nunukan dan selebihnya 27.781 Jiwa di Kecamatan Nunukan Selatan. Hal ini tidak mengherankan mengingat Ibu Kota Kabupaten dan Pusat Pemerintahan Daerah berada di Nunukan. Kemudian yang kedua sebanyak 55.870 Jiwa atau 24,55 persen berada di Pulau Sebatik, yang tersebar di lima Kecamatan, dan penduduk dengan jumlah terendah adalah Kecamatan Lumbis Hulu yaitu hanya sebanyak 870 Jiwa atau 0.38 persen dari total penduduk Kabupaten Nunukan.

Kepadatan penduduk linear dengan pertambahan jumlah penduduk, dalam arti semakin tinggi jumlah penduduk suatu wilayah maka semakin meningkat pula kepadatan penduduknya sepanjang luas wilayahnya tidak bertambah maupun berkurang (konstan). Satu dekade silam, tepatnya tahun 2013 kepadatan penduduk Kabupaten Nunukan masih di kisaran 11,42 Jiwa Per Kilometer Persegi. Kini pada tahun 2023 kepadatan penduduk Kabupaten Nunukan mencapai 15,30 Jiwa Per Kilometer Persegi, artinya setiap 1 Kilometer Persegi (km^2) wilayah ditempati sebanyak 15-16 Jiwa. Hal tersebut menandakan adanya kenaikan densitas penduduk sebesar 33,93% dibanding 10 tahun sebelumnya.

Kepadatan penduduk Kabupaten Nunukan sangat signifikan perbedaannya antar Kecamatan yang berada di Pulau Nunukan dan Sebatik dengan Kecamatan yang berada di daratan Pulau Kalimantan. Densitas penduduk tertinggi berada di Pulau Sebatik mencapai 213,08 Jiwa Per Kilometer Persegi, disusul Pulau Nunukan sebesar 131,95 Jiwa Per Kilometer Persegi dan yang terendah Kecamatan yang berada di daratan Pulau Kalimantan.

Meskipun kepadatan penduduknya semakin meningkat akan tetapi berdasarkan SNI 03-1733-2004, Kabupaten Nunukan masih termasuk dalam

klasifikasi Kepadatan Rendah, yakni di bawah 150 jiwa per Hektar, sehingga belum memerlukan alternatif penambahan lahan permukiman maupun inovasi hunian yang demikian ekstrem.

Kemudian jumlah penduduk Kabupaten Nunukan menurut jenis kelamin pada tahun 2023 masih didominasi penduduk laki-laki sebanyak 115.669 jiwa atau 53,08 persen, sedangkan penduduk perempuan 102.254 jiwa atau 46,92 persen. Perbandingan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan ini menghasilkan *sex ratio* sebesar 113,11 artinya bauran penduduk pada setiap 100 perempuan terdapat 113-114 laki-laki. Kondisi seperti ini oleh Chrisophe Guilmoto seorang pakar populasi dari Prancis dikenal dengan istilah maskulinisasi demografi. Jika perbedaannya semakin melebar, dapat berdampak pada munculnya budaya superior, otoriter dan kekerasan oleh laki-laki.

Selain itu dapat pula menimbulkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan pemanfaatan serta penguasaan terhadap sumber daya terutama pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan bidang strategis lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program pengarusutamaan gender hendaknya menjadi salah satu agenda prioritas di Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya komposisi jumlah penduduk berdasarkan Agama dan kepercayaan yang dianut pada tahun 2023 di Kabupaten Nunukan terdiri atas 73,99% Islam, 16,81% Protestan, 9,06% Katolik, 0,03% Hindu dan 0,08% Budha serta 0.03% menganut aliran kepercayaan lainnya. Keberagaman agama ini melengkapi keunikan Kabupaten Nunukan yang cakupan wilayahnya secara geografis terpisah-pisah, dan suku bangsa yang bervariasi. Keberagaman tersebut tentunya juga merupakan suatu tantangan tersendiri khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam merumuskan program dan kegiatan agar senantiasa terjaga kerukunan antar umat beragama, antar suku, antar wilayah, sekaligus menjaga ketenteraman dan nasionalisme penduduk sebagai satu kesatuan bangsa di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 3 fokus, yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya dan olahraga

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh unit barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu atau di wilayah domestik suatu negara, yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk setempat. Perhitungan PDRB secara konseptual dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan Produksi (Lapangan Usaha), Pengeluaran, dan Pendapatan.

Untuk kepentingan penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 202 perhitungan PDRB menggunakan pendekatan Produksi (Lapangan Usaha), dengan pengelompokan 17 (Tujuh Belas) Lapangan Usaha/sektor PDRB sesuai data yang dipublikasikan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam penyajiannya terbagi dua yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau dikenal dengan PDRB Nominal yang disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan berfungsi untuk mengetahui kemampuan ekonomi dan melihat struktur perekonomian suatu daerah. Yang kedua, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) atau PDRB Riil, yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan ditujukan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara rill dari tahun ke tahun.

Tabel 2.7

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Nunukan Tahun 2019 s.d. 2023 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Sektor PDRB (Lapangan Usaha)	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.552,41	**21,83**	6.026,18	**22,91**	6.568,93	**22,06**	7.076,61	**17,56**	7.688,13	**19,08**
2	Pertambangan dan Penggalian	12.092,78	**47,55**	11.971,28	**45,52**	14.294,21	**48,00**	23.551,60	**58,44**	24.506,98	**60,81**
3	Industri Pengolahan	1.813,39	7,13	1.917,24	7,29	2.061,98	6,92	2.197,18	5,45	2.299,17	5,71
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,46	0,03	7,48	0,03	7,71	0,03	8,82	0,02	10,88	0,03
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,60	0,04	10,37	0,04	11,62	0,04	12,27	0,03	12,65	0,03
6	Konstruksi	1.975,61	**7,77**	2.156,67	**8,20**	2.265,59	**7,61**	2.310,27	**5,73**	2.594,72	**6,44**
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.419,70	5,58	1.502,94	5,71	1.678,80	5,64	1.826,09	4,53	2.005,46	4,98
8	Transportasi dan Pergudangan	519,17	2,04	528,97	2,01	539,79	1,81	619,25	1,54	687,02	1,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	259,46	1,02	262,07	1,00	281,79	0,95	318,68	0,79	346,98	0,86
10	Informasi dan Komunikasi	434,80	1,71	489,52	1,86	550,49	1,85	611,67	1,52	653,16	1,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	80,72	0,32	86,82	0,33	95,45	0,32	107,83	0,27	123,19	0,31
12	Real Estat	108,35	0,43	112,51	0,43	120,91	0,41	128,52	0,32	135,20	0,34
13	Jasa Perusahaan	7,43	0,03	8,03	0,03	8,53	0,03	9,28	0,02	10,00	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	693,75	2,73	710,23	2,70	734,51	2,47	771,53	1,91	809,70	2,01
15	Jasa Pendidikan	347,55	1,37	383,73	1,46	412,95	1,39	447,64	1,11	475,37	1,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,11	0,02	7,18	0,03	8,00	0,03	8,34	0,02	8,72	0,02
17	Jasa Lainnya	103,58	0,41	119,33	0,45	132,03	0,44	145,11	0,36	158,54	0,39
PDRB Nominal		**25.430,87**	**100**	**26.300,55**	**100**	**29.773,29**	**100**	**40.150,69**	**100**	**42.525,85**	**100**

*Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Nunukan, 2024

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas terlihat bahwa struktur ekonomi Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2019 hingga 2023 kontribusi 3 teratas konsisten dikuasai oleh (1) Sektor Pertambangan dan Penggalian; (2) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (3) Sektor konstruksi.

Pada tahun 2023 relatif memiliki pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana perekonomian daerah didominasi sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sebesar 60,81 persen dari total PDRB Kabupaten Nunukan. Namun pertumbuhan *share* di sektor pertambangan dan penggalian melemah yakni hanya tumbuh sebesar 2,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian dipengaruhi oleh berbagai dinamika, seperti adanya larangan ekspor mineral mentah efektif per 10 Juni 2023, dan penurunan Harga Batubara Acuan (HBA) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu terdapat beberapa perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di wilayah Kabupaten Nunukan terpaksa gulung tikar pada tahun 2023 dikarenakan batu bara yang mereka produksi ditolak pasar lantaran kualitasnya yang kurang baik, diantaranya PT. Pipit Intis (PI), PT. Pipit Mutiara Raya (PMR), PT. Anjas Anita Jaya (AAJ), dan PT. Duta Tambang Rekayasa (PTDTR). Kondisi ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan penggalian bukanlah kondisi ideal, karena sifat minerba yang tak terbarukan sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan.

Selanjutnya penyumbang PDRB terbesar kedua adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 19,08 persen dari total PDRB Kabupaten Nunukan tahun 2023. Jika tahun sebelumnya margin kontribusi sektor ini mengalami penurunan hingga 4,50 persen, di tahun 2023 mulai mengalami peningkatan dari 17,56 persen menjadi 19,08 persen atau meningkat sebanyak 1,52 persen. Kemudian menduduki posisi kontribusi terbesar ketiga yaitu lapangan usaha konstruksi. Keadaan ini menunjukkan bahwa geliat pembangunan infrastrukur semakin meningkat. Hal ini seiring dengan adanya kebijakan *mandatory spending* minimal 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) digunakan untuk belanja insfrastruktur daerah, dan terbitnya UU 12 Tahun 2022, yang mengamanatkan Daerah wajib mengalokasikan belanja

infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Selain itu terdapat pula Dana Alokasi Khusus (DAK) Fiisk yang bersumber dari APBN, untuk pembangunan fisik, serta adanya kebijakan penggunaan Dana Desa (DD) yang memproritaskan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa dan pelayanan umum (*public*).

Sementara untuk kontribusi PDRB secara rill berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir akan disajikan pada Tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Nunukan Tahun 2019 s.d. 2023
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Dalam Miliar Rupiah)

No.	Sektor PDRB (Lapangan Usaha)	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.928,98	**24,77**	4.117,38	**26,21**	4.275,81	**26,16**	4.463,96	**25,95**	4.713,75	**26,31**
2	Pertambangan dan Penggalian	6.930,45	**43,69**	6.552,14	**41,71**	6.876,56	**42,08**	7.297,42	**42,42**	7.475,08	**41,73**
3	Industri Pengolahan	1.234,84	**7,78**	1.218,33	**7,76**	1.245,55	**7,62**	1.283,95	**7,46**	1.301,04	**7,26**
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,78	0,03	5,33	0,03	5,47	0,03	5,85	0,03	6,88	0,04
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7,74	0,05	8,06	0,05	8,54	0,05	8,81	0,05	8,98	0,05
6	Konstruksi	1.118,85	7,05	1.123,99	7,16	1.124,18	6,88	1.129,44	6,57	1.230,82	6,87
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	893,91	5,64	899,75	5,73	963,16	5,89	1.047,49	6,09	1.122,93	6,27
8	Transportasi dan Pergudangan	338,25	2,13	333,04	2,12	335,97	2,06	364,66	2,12	385,42	2,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	176,10	1,11	172,95	1,10	179,89	1,10	198,41	1,15	213,19	1,19
10	Informasi dan Komunikasi	347,61	2,19	369,36	2,35	395,32	2,42	425,12	2,47	447,75	2,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	53,22	0,34	53,36	0,34	57,06	0,35	61,89	0,36	69,54	0,39
12	Real Estat	88,60	0,56	89,29	0,57	92,16	0,56	96,50	0,56	100,61	0,56
13	Jasa Perusahaan	5,49	0,03	5,49	0,03	5,61	0,03	5,96	0,03	6,21	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	441,48	2,78	445,90	2,84	447,22	2,74	458,57	2,67	463,88	2,59
15	Jasa Pendidikan	220,77	1,39	236,78	1,51	247,23	1,51	262,09	1,52	272,87	1,52
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,07	0,03	4,53	0,03	4,93	0,03	5,03	0,03	5,16	0,03
17	Jasa Lainnya	66,69	0,42	72,67	0,46	77,58	0,47	84,13	0,49	90,62	0,51
PDRB Riil		**15.861,82**	**100**	**15.708,37**	**100**	**16.342,24**	**100**	**17.199,28**	**100**	**17.914,74**	**100**

*Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Nunukan, 2024

Dari Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa 3 sektor yang mengalami pertambahan kontribusi bruto secara riil tertinggi selama 5 tahun terakhir yakni (1) Sektor Pertambangan dan Penggalian; (2) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (3) Sektor Industri Pengolahan. Artinya meski tergeser secara *share margin* nominal oleh sektor Konstruksi, namun secara nilai rill kontribusi sektor industri pengolahan lebih besar dan selalu menduduki posisi ke-3 teratas dalam PDRB Kabupaten Nunukan hingga tahun 2023.

Selanjutnya persentase pertumbuhan lapangan usaha secara rill disajikan pada Tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9
Pertumbuhan Sektor PDRB Kabupaten Nunukan Tahun 2020 s.d. 2023
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Dalam Miliar Rupiah)
Kabupaten Nunukan

No.	Sektor PDRB (Lapangan Usaha)	2019		2020		2021		2022*		2023**	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	258,00	7,03	188,40	4,80	158,43	3,85	188,15	4,40	249,79	5,60
2	Pertambangan dan Penggalian	398,06	6,09	- 378,31	**-5,46**	**324,42**	4,95	420,86	6,12	177,66	2,43
3	Industri Pengolahan	53,63	4,54	- 16,51	-1,34	27,22	2,23	38,40	3,08	17,09	1,33
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,36	8,14	0,55	**11,51**	0,14	2,63	0,38	6,95	1,03	**17,61**
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,19	2,52	0,32	4,13	0,48	5,96	0,27	3,16	0,17	1,93
6	Konstruksi	102,01	**10,03**	5,14	0,46	0,19	**0,02**	5,26	**0,47**	101,38	8,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	69,52	8,43	5,84	0,65	63,41	7,05	84,33	8,76	75,44	7,20
8	Transportasi dan Pergudangan	24,53	7,82	- 5,21	-1,54	2,93	0,88	28,69	8,54	20,76	5,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,62	8,38	- 3,15	-1,79	6,94	4,01	18,52	**10,30**	14,78	7,45
10	Informasi dan Komunikasi	28,32	8,87	21,75	6,26	25,96	7,03	29,80	7,54	22,63	5,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,19	4,29	0,14	0,26	3,70	6,93	4,83	8,46	7,65	12,36
12	Real Estat	4,76	5,68	0,69	0,78	2,87	3,21	4,34	4,71	4,11	4,26
13	Jasa Perusahaan	0,11	**2,04**	-	0,00	**0,12**	2,19	0,35	6,24	0,25	4,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	31,17	7,60	4,42	1,00	1,32	0,30	11,35	2,54	5,31	**1,16**
15	Jasa Pendidikan	16,15	7,89	16,01	7,25	10,45	4,41	14,86	6,01	10,78	4,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,28	7,39	0,46	11,30	0,40	**8,83**	0,10	2,03	0,13	2,58
17	Jasa Lainnya	4,34	6,96	5,98	8,97	4,91	6,76	6,55	8,44	6,49	7,71
Pertumbuhan PDRB Riil		**1.007,24**	**6,35**	**- 153,48**	**-0,97**	**633,89**	**4,04**	**857,04**	**5,24**	**715,45**	**4,16**

*Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Nunukan, 2024

Berdasarkan Tabel 2.9 tampak bahwa pertumbuhan setiap sektor PDRB bersifat fluktuatif, sehingga lapangan usaha yang menduduki pertumbuhan

tertinggi setiap tahunnya bervariasi. Pada tahun 2023, tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 17,61 persen, diikuti lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,36 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,98 persen.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan nilai bruto riil tertinggi adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas yakni 17,61 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini seiring dengan adanya program bantuan pemasangan listrik gratis sebanyak 300 KK dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan bantuan pemasangan listrik gratis dari PLN dari pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 500 KK di Kecamatan Sei Menggaris. Selain itu kondisi jelang pemilu juga terdapat peningkatan pertemuan yang mengundang massa di lokasi tertentu sehingga membutuhkan konsumsi listrik lebih dari biasanya, dan permintaan gas meningkat guna memenuhi kebutuhan memasak makanan dan minuman dalam volume besar untuk acara pertemuan/kampanye di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.

Disusul yang kedua sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan pertumbuhan sebesar 12,36 persen. Peningkatan ini merupakan efek dari semakin meningkatnya penggunaan jasa keuangan terutama yang bersifat digital serta semakin banyaknya tawaran program kredit menarik dari perbankan dan lembaga keuangan non bank di Kabupaten Nunukan. Dan berdasarkan laporan BI Kaltara, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tertinggi adalah Kabupaten Nunukan yang mencapai 35,18 persen dari total KUR se-Kalimantan Utara. Sementara jasa asuransi juga meningkat, salah satunya karena adanya program unggulan Nunukan Sehat, yakni Program Pelayanan Kesehatan (PPK) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digagas Pemkab Nunukan dengan menggelontorkan dana sebesar 14 Miliar Rupiah. Layanan ini telah aktif sejak bulan Februari 2023 dan program tersebut mengantarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Tahun 2023.

Kemudian lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan ke-3 tertinggi di tahun 2023 yakni sektor Konstruksi sebesar 8.46%. Pertumbuhan sektor Konstruksi dipengaruhi oleh semakin meningkatnya aktivitas pembangunan di

wilayah Kabupaten Nunukan, karena adanya berbagai regulasi *mandatory spending* di bidang infrastruktur, DAK Fisik dari APBN, serta kebijakan penggunaan Dana Desa (DD) yang memprioritaskan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa dan pelayanan umum (*public*).

Untuk mendapatkan gambaran capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Nunukan selama 5 tahun terakhir, berikut disajikan perbandingannya dengan LPE Provinsi Kalimantan Utara dan LPE Indonesia (Nasional) Tahun 2020-2024.

Gambar 2.4
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Indonesia
Tahun 2020-2024

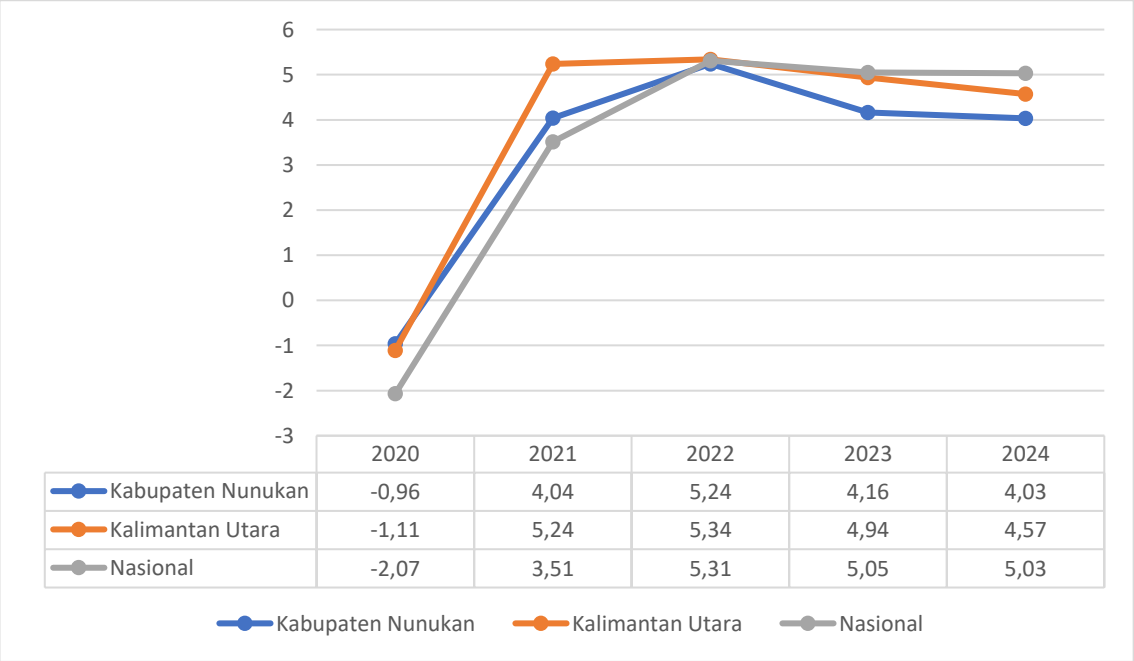

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Nunukan	-0,96	4,04	5,24	4,16	4,03
Kalimantan Utara	-1,11	5,24	5,34	4,94	4,57
Nasional	-2,07	3,51	5,31	5,05	5,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nunukan pada kurun waktu 2019-2021 senantiasa lebih tinggi daripada LPE Indonesia (Nasional). Bahkan pada tahun 2021, Kabupaten Nunukan mengungguli Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara.

Akan tetapi pada tahun 2023 LPE Kabupaten Nunukan mengalami perlambatan, hanya mencapai 4,16 persen atau lebih rendah 1,08 persen dibandingkan tahun lalu. Bahkan lebih rendah 0,78 persen dibandingkan dengan LPE Provinsi Kalimantan Utara, dan 0,89 persen di bawah LPE Indonesia. Kondisi

ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dikaji dalam rangka mencari solusi peningkatan LPE di Kabupaten Nunukan.

A. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran pendapatan rata-rata penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah tertentu, yang didapat dari hasil bagi antara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah pendudukan suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut diasumsikan semakin membaik perekonomiannya serta sejahtera masyarakatnya.

Berikut ini disajikan PDRB Per Kapita Kabupaten Nunukan dalam kurun 5 tahun terakhir, serta gambaran pertumbuhannya.

Tabel 2.10
PDRB Per Kapita Penduduk Kabupaten Nunukan
Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
PDRB (Dalam Juta Rupiah)	25.430.864,44	26.300.564,35	29.773.279,15	40.150.693,17	42.525.849,95
Jumlah Penduduk (Jiwa)	196.918	199.090	203.220	208.303	217.923
PDRB Per Kapita (Rp./Jiwa/Tahun)	129.144.438	132.103.894	146.507.623	192.751.392	195.141.632
PDRB Per Kapita Per Bulan (Rp./Jiwa/Bulan)	10.762.036	11.008.658	12.208.969	16.062.616	16.261.803

*Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Nunukan, 2024

Gambar 2.5
Pertumbuhan PDRB Per Kapita Penduduk Kabupaten Nunukan
Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku

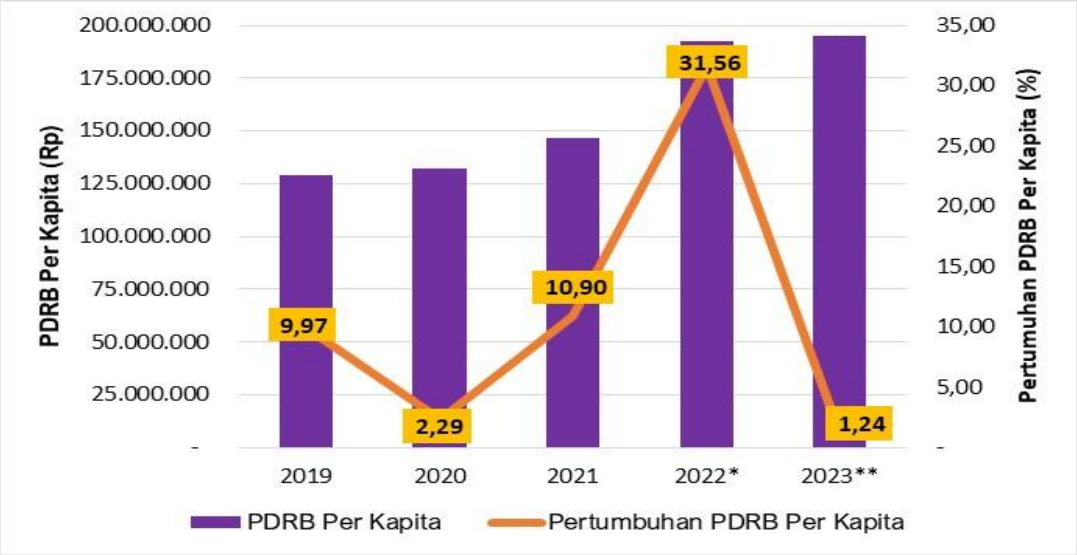

*Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Nunukan, 2024

Secara nominal PDRP Per Kapita penduduk Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir terus menunjukkan tren kenaikan, dengan laju pertumbuhan rata-rata dikisaran 11,19 persen per tahun. Persentase peningkatan PRDB ADHB Kabupaten Nunukan tahun 2023 mencapai 5,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara persentase pertambahan penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2023 hanya sebesar 4,62 persen, sehingga menjadi faktor lain dalam peningkatan PDRB Per Kapita Kabupaten Nunukan, karena pertumbuhan PDRB lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk.

Meski secara nominal PDRB Per Kapita tahun 2023 meningkat, namun persentase peningkatannya kurang signifikan yakni hanya 1,24 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 31,56 persen. Pertumbuhan PDRB Per Kapita tahun 2023 menjadi yang terendah dalam kurun lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian daerah mengalami perlambatan akibat melemahnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian selaku kontributor terbesar PDRB Kabupaten Nunukan.

Berikut ini disajikan perbandingan pendapatan per kapita Kabupaten Nunukan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia. dalam waktu 5 tahun terakhir.

Gambar 2.6
Perbandingan Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Nunukan Dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2019-2023

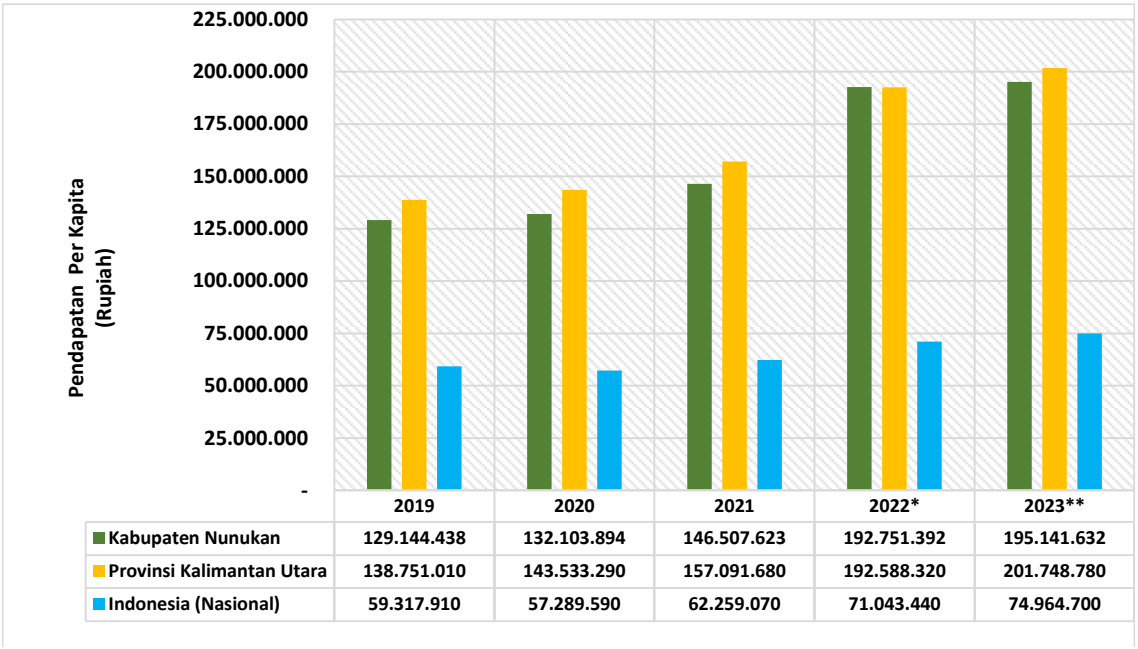

	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten Nunukan	129.144.438	132.103.894	146.507.623	192.751.392	195.141.632
Provinsi Kalimantan Utara	138.751.010	143.533.290	157.091.680	192.588.320	201.748.780
Indonesia (Nasional)	59.317.910	57.289.590	62.259.070	71.043.440	74.964.700

*Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber: Data BPS Nunukan, 2024

Berdasarkan Gambar 2.6 tampak bahwa dalam 5 tahun terakhir Kabupaten Nunukan konsisten berada jauh di atas pendapatan per kapita Indonesia. Namun sebaliknya mengalami kecenderungan berada di bawah Pendapatan Per Kapita Provinsi Kalimantan Utara, kecuali pada tahun 2022 berada di posisi yang sedikit lebih tinggi yakni sebesar 1,32 persen dibandingkan Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2023 Pendapatan Per Kapita Per Tahun Penduduk Kabupaten Nunukan mencapai 195 juta atau lebih tingi 160,31 persen dibandingkan Pendapatan Per Kapita Penduduk Indonesia yang hanya 75 juta. Akan tetapi masih berada dibawah Pendapatan Per Kapita Provinsi Kalimantan Utara dengan selisih 3,27 persen atau sebesar 6,60 juta.

B. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan perekonomian, dan akan menurunkan nilai mata uang.

Selain itu, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat juga turun dan akhirnya meningkatkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah merupakan indikator melemahnya daya beli masyarakat yang akan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Inflasi terlalu rendah juga membuat sektor usaha lesu dan *demand* rendah, sehingga berdampak pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal untuk mengurangi *cost*.

Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori yaitu:

1) Inflasi Rendah (*Creeping Inflation*), yakni tingkat inflasi kurang dari 10 persen per tahun.
2) Inflasi Menengah (*galloping inflation*), yakni tingkat inflasi berada di kisaran 10-30 persen per tahun.
3) Inflasi Tinggi (*High Inflation*), yakni tingkat inflasi berada di kisaran 31-100 persen per tahun.
4) Inflasi Sangat Tinggi (*Hyper Inflation*), yakni tingkat inflasi lebih dari 100 persen per tahun.

Pada tahun 2023 belum terdapat data inflasi secara khusus untuk daerah Kabupaten Nunukan, baik yang bersumber dari publikasi BPS, BI maupun sumber lainnya. Jadi untuk sementara tingkat inflasi yang menjadi acuan adalah tingkat inflasi provinsi Kalimantan Utara yang menggambarkan secara umum kondisi inflasi di wilayahnya termasuk Kabupaten Nunukan.

Namun terhitung sejak Januari 2024, penilaian Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk melihat inflasi atau deflasi di Kalimantan Utara (Kaltara) mengalami penambahan satu daerah penilaian, yakni Kabupaten Nunukan.

Artinya, daerah yang menjadi lokus penilaian IHK di Kaltara bertambah menjadi tiga, yakni Tarakan, Tanjung Selor dan Nunukan. Untuk mendapatkan gambaran inflasi terkini di Kabupaten Nunukan, berikut disajikan perbandingan antara tingkat inflasi provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia dengan Inflasi Kabupaten Nunukan.

Gambar 2.7
Perbandingan Tingkat Inflasi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2012 - April 2024

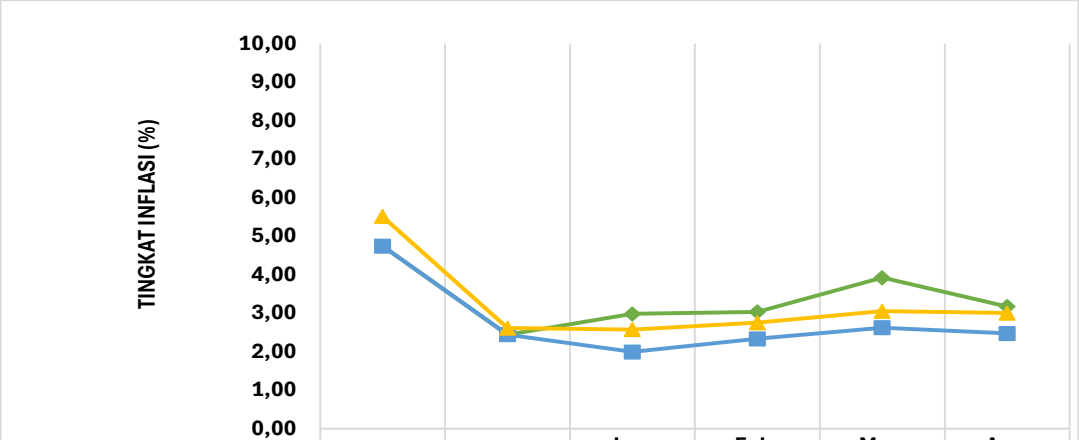

	2022	2023	Jan-2024*	Feb-2024*	Mar-2024*	Apr-2024*
Nunukan	4,74	2,44	2,98	3,03	3,92	3,17
Kalimantan Utara	4,74	2,44	1,99	2,33	2,62	2,47
Indonesia (Nasional)	5,51	2,61	2,57	2,75	3,05	3,00

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2024

Dari Gambar 2.7 di atas terlihat bahwa tingkat inflasi Kalimantan Utara sejak tahun 2022 hingga April 2024 secara konsisten lebih rendah daripada tingkat inflasi Nasional. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Februari 2024 yang dirilis oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan tingkat inflasi paling rendah ke-3 di regional Kalimantan.

Bahkan pada Bulan Agustus 2023 lalu, TPID Provinsi Kalimantan Utara berhasil masuk 3 besar TPID Provinsi Terbaik di Kalimantan, serta TPID Kota Tarakan berhasil meraih predikat TPID Kabupaten/Kota Terbaik di Regional Kalimantan.

Berbeda halnya dengan Kabupaten Nunukan, yang sejak Januari hingga Apri 2024 justru mengalami tingkat inflasi yang lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Utara dan Nasional. Salah satu penyebab tingginya inflasi di Nunukan

karena ada kenaikan harga pada bahan makanan, seperti daging ayam ras, ikan layang, ikan bandeng, ikan tongkol, serta cabai rawit.

Akan tetapi, menurut Kepala BPS Kalimantan Utara, hal tersebut masih dianggap wajar karena Nunukan masih dalam tahap penyesuaian kebijakan sebagai daerah lokus inflasi baru. Pemerintah Kabupaten Nunukan Melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Nunukan dan Dinas Teknis tekait, serta BPS Nunukan juga terus melakukan koordinasi dan sinergi dalam mengimplementasikan kebijakan baru sebagai Daerah lokus perhitungan IHK.

Tingkat inflasi baik Nunukan, Regional Kalimantan Utara maupun Nasional masih termasuk dalam kategori Inflasi Rendah (*Creeping Inflation*) karena tingkat inflasi berada di bawah 10 persen.

C. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Dan Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Data dan informasi angka kemiskinan suatu wilayah diperlukan guna merumuskan program-program peningkatan kesejahteraan, pengendalian penduduk miskin, dan utamanya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh Worldbank.

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Nunukan pada tahun 2024

adalah sebesar Rp. 597.431 per kapita per bulan. Berikut ini disajikan perkembangan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan Kabupaten Nunukan Tahun dalam 5 tahun terakhir.

Gambar 2.8
Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan
Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024



Sumber: Data BPS Nunukan, 2025

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nunukan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren menurun, dengan rata-rata Angka Kemiskinan 6,18 persen. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 980 Jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga angka kemiskinan dapat ditekan dari 6,13 persen di tahun 2022 menjadi 5,53 persen di tahun 2023.

Menurunnya Angka Kemiskinan dipengaruhi oleh pencabutan secara resmi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Desember 2022, serta berakhirnya status Pandemi COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023. Dengan demikian tahun 2023 aktivitas perekonomian semakin bergeliat, sehingga terjadi perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu Pemerintah juga mendukung dalam menjaga

daya beli masyarakat melalui berbagai paket kebijakan pemulihan ekonomi masyarakat, dan program jaring pengamanan sosial.

Berikut disajikan perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Nunukan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional dalam 5 tahun terakhir.

Gambar 2.9
Perbandingan Angka Kemiskinan
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Indonesia
Tahun 2020-2024

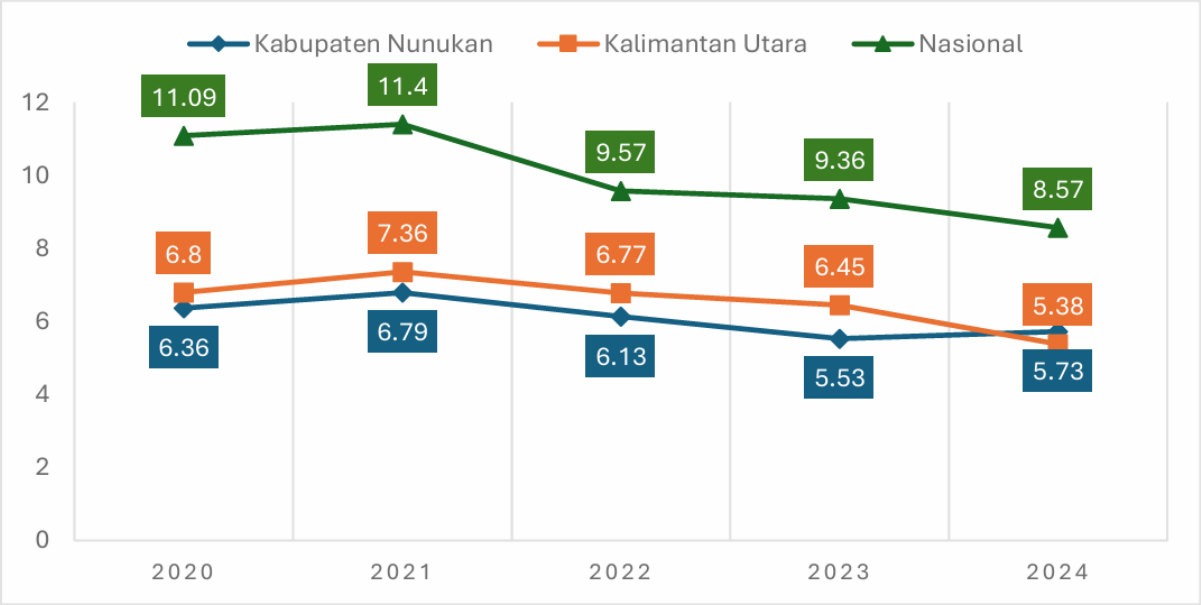

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari Gambar 2.9 dapat diketahui Angka Kemiskinan Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Indonesia, dan konsisten berada di bawah Angka Kemiskinan provinsi Kalimantan Utara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan bukan merupakan Kabupaten dengan Angka Kemiskinan tertinggi baik di Tingkat Provinsi maupun Nasional.

D. Indeks Gini

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan dan dipublikasi oleh Corrado Gini, ahli statistik, demografi sekaligus sosiolog Italia pada tahun 1912 dalam bukunya "*Variabilita e Mutabilita*" atau *Variability dan Mutability*. Kini Indeks

Gini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah.

Indeks Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pendapatan per kapita yang sama. Sedangkan Indeks Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti pendapatan per kapita hanya dimiliki satu penduduk atau sumber pendapatan hanya dikuasai satu pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Indeks Gini, semakin tinggi tingkat kesenjangan distribusi pendapatan suatu daerah antara penduduk yang berpendapatan tinggi dengan penduduk yang berpendapatan rendah.

Gambar 2.10
Perbandingan Indeks Gini
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Indonesia
Tahun 2020-2024

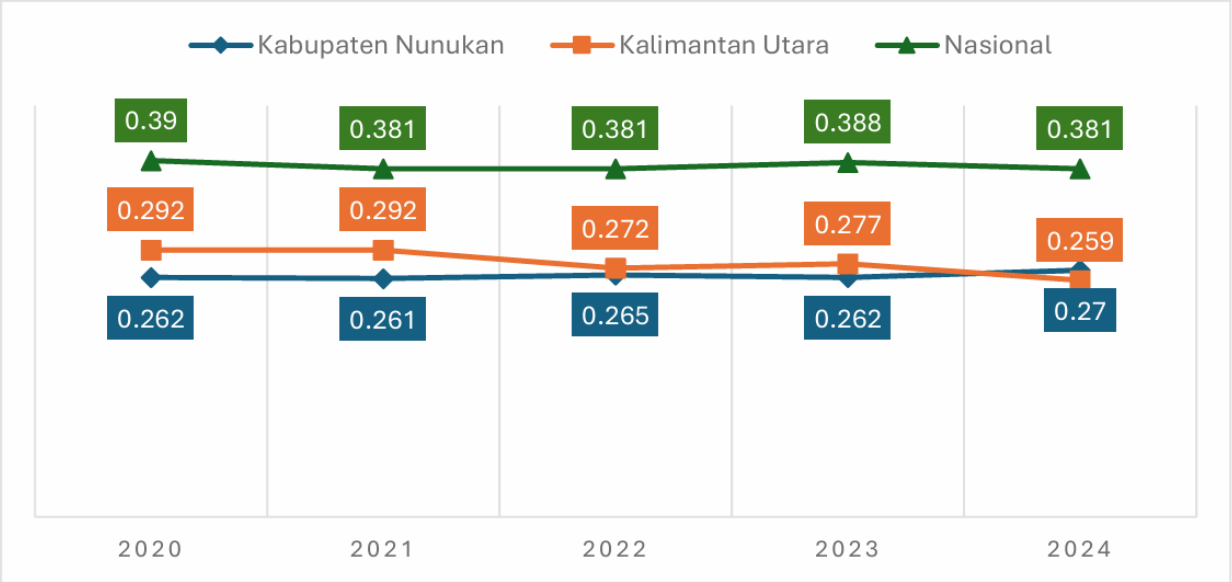

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari Gambar 2.10 tampak bahwa Indeks Gini Kabupaten Nunukan lebih rendah daripada Provinsi Kalimantan Utara maupun Nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di Kabupaten Nunukan relatif rendah. Baik Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional memiliki tingkat ketimpangan pendapatan rendah karena seluruhnya berada di bawah nili 0,400.

Dengan diketahuinya nilai Indeks Gini suatu wilayah, maka diharapkan Pemerintah setempat dapat mengambil kebijakan publik untuk mengurangi ketimpangan, dengan memastikan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi meningkatkan taraf hidupnya dan menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata.

E. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang tergolong penganggur terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Kemudian yang dimaksud angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi bukan termasuk angkatan kerja.

Untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori penganggur terbuka, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.11
Jumlah Penganggur Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024



Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Gambar 2.11 pada tahun 2024 jumalh pengangguran terbuka Kabupaten Nunukan sebesar 2,71 persen, angka ini mengalami kenaikan sedikit dari tahun sebelumnya sebesar 0,02 persen. Namun jika dilihat dari tren lima tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka terjadi penurunan yang signifikan dari angka 4,14 persen di tahun 2020.

Menurunnya persentase penganggur sejalan dengan semakin pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat pasca pencabutan PPKM dan status pandemi Covid-19 berakhir, sehingga terjadi kenaikan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Seri Februari 2024, bahwa terdapat peningkatan persentase jumlah penduduk bekerja khususnya pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan, serta sektor konstruksi dikarenakan berlanjutnya proyek-proyek pembangunan yang semula tertunda karena pandemi Covid-19.

Berikut ini disajikan perbandingan TPT Kabupaten Nunukan dengan TPT di level Provinsi maupun Nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar 2.12
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2020-2024

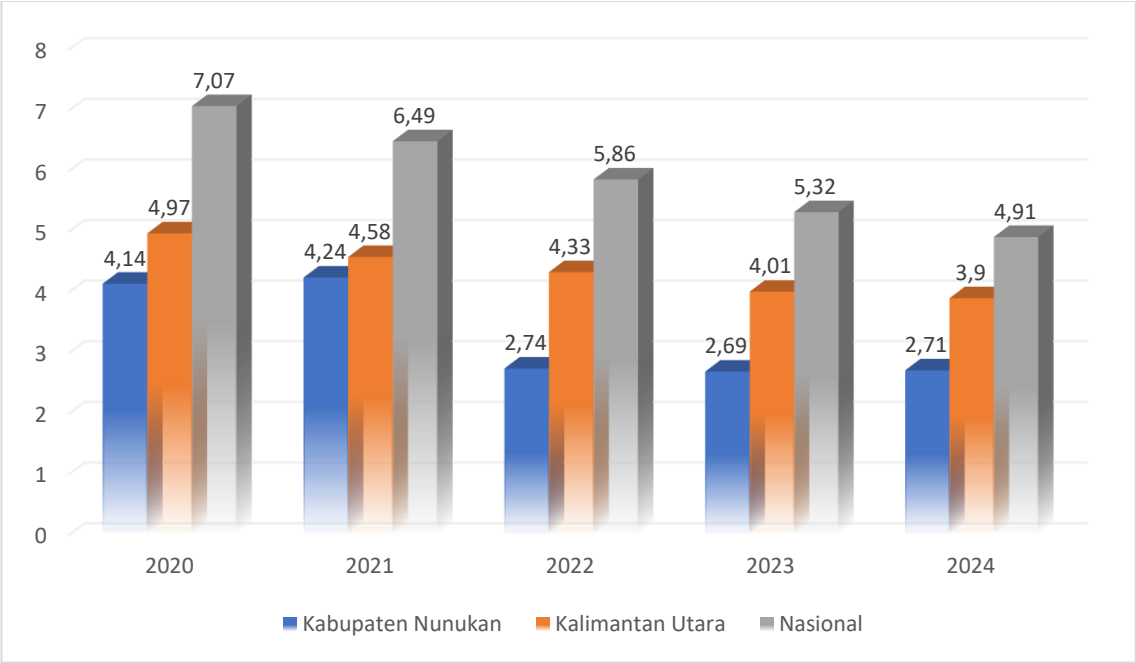

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari grafik pada Gambar 2.11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren menurun dari 4,14% pada tahun 2020 menjadi 2,71% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja serta efektivitas kebijakan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Utara yang turun dari 4,97% menjadi 3,9% dan TPT nasional yang berkurang dari 7,07% menjadi 4,91% dalam periode yang sama, Kabupaten Nunukan memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah mampu menyerap tenaga kerja dengan lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Keberlanjutan tren positif ini memerlukan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja serta diversifikasi sektor ekonomi agar ketahanan pasar kerja tetap terjaga.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Rata-rata lama sekolah *(mean years of schooling)* didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada kondisi normal rata-rata lama sekolah di suatu wilayah diasumsikan tidak akan turun. Rentang batas nilainya adalah minimum 0 tahun dan maksimum 15 tahun.

Harapan Lama Sekolah (*expected years of schooling*) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Umur tertentu dimaksud adalah usia masuk sekolah di jalur pendidikan formal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 7 hingga 15 tahun wajib mengikuti program wajib belajar.

Oleh kerena itu, penghitungan Harapan Lama Sekolah di Indonesia dilakukan terhadap penduduk usia 7 tahun ke atas, dengan rentang batas nilainya adalah minimum 0 tahun dan maksimum 18 tahun. Dengan nilai maksimal 18 tahun, diharapkan penduduk Indonesia dapat menempuh pendidikan formal hingga jenjang Magister (S2) pada Pendidikan Tinggi.

Berikut disajikan Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Nunukan dari 2019 hingga tahun 2023.

Gambar 2.13
Perkembangan ARLS dan HLS
Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

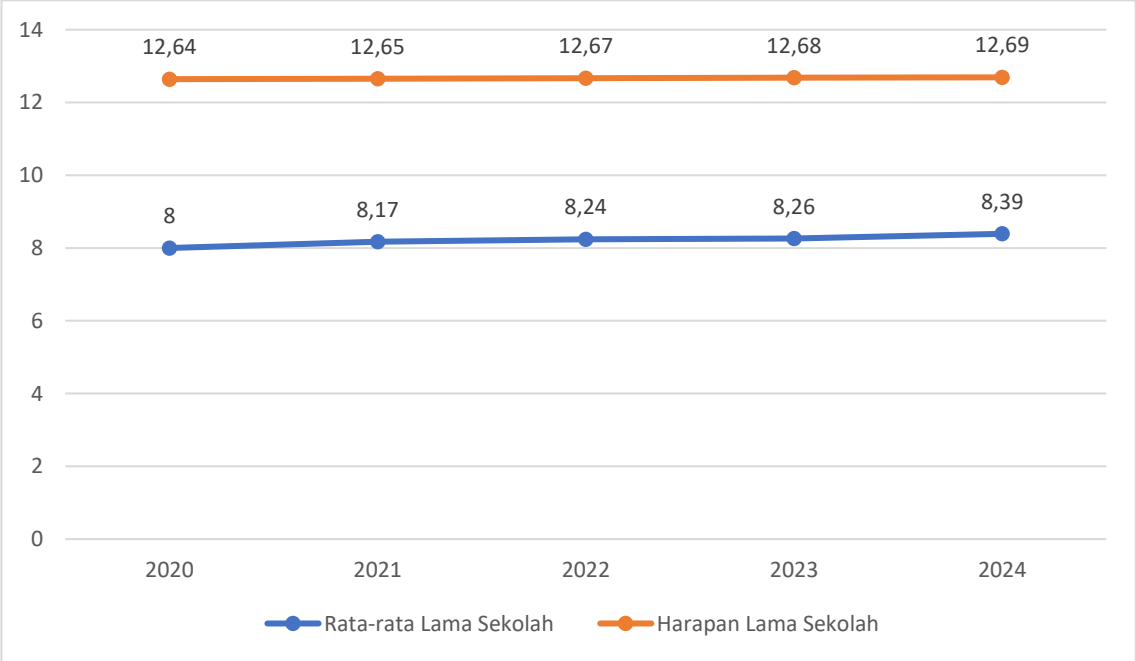

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Grafik 2.13 di atas tampak bahwa baik Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) maupun Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebanyak 0,11 tahun atau tumbuh sebesar 1,41 persen per tahun. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebanyak 0,01 tahun atau tumbuh sebesar 0,10 persen per tahun.

B. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Umur Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah

rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Spesific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Berikut disajikan Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Nunukan dari 2020 hingga tahun 2024.

Gambar 2.14
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

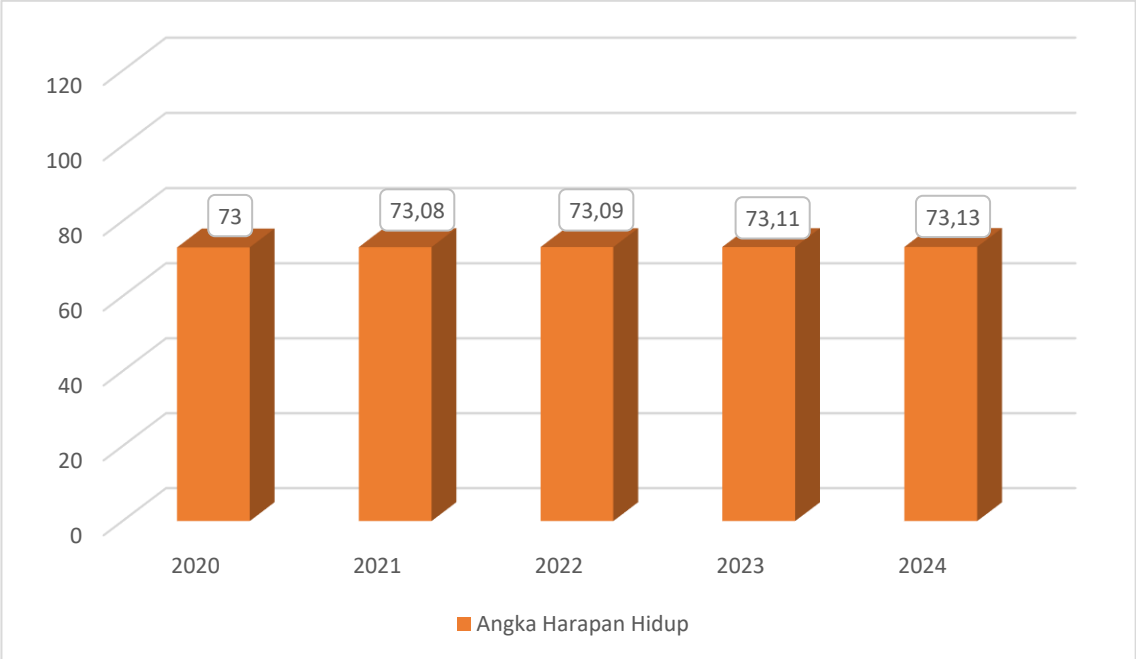

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Gambar 2.14 tampak bahwa dalam lima tahun terakhir Angka Harapan Hidup Kabupaten Nunukan menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi kenaikan tersebut bersifat lamban, sehingga pada tahun 2024 Angka Harapan Hidup Kabupaten Nunukan sebesar 73,13 persen.

C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Human Development Indeks (HDI) atau di Indonesia dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang ditinjau dari dimensi sosial dan ekonomi. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yakni:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*); dan
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diklasifikasikan menjadi 4 (Empat) kategori sebagai berikut:

- Sangat Tinggi, jika IPM sama dengan atau di atas 80.00
- Tinggi, jika IPM di kisaran 70.00-79.99
- Sedang, jika IPM di kisaran 60.00-69.99
- Rendah, jika IPM di bawah 60.00

Berikut ini disajikan perkembangan capaian IPM Kabupaten Nunukan dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Utara dan IPM Indonesia dalam 5 tahun terakhir.

Gambar 2.15
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Indonesia
Tahun 2020-2024

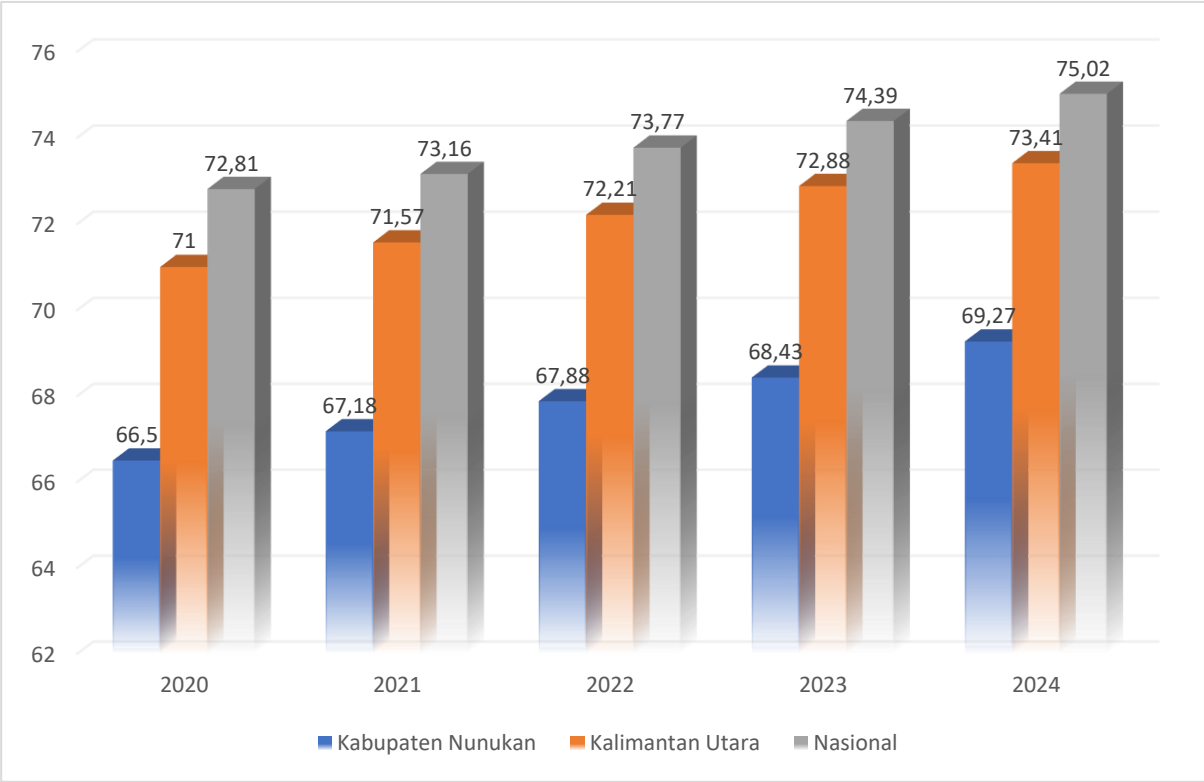

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.15 Pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan sebesar 0,84 persen dari tahun sebelumnya yakni mencapai 69,27. Akan tetapi peningkatakan tersebut belum mampu mengangkat IPM Kabupaten Nunukan ke predikat yang lebih tinggi, karena hingga tahun 2024 masih stagnan di Kategori IPM Sedang, sementara Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2020 telah berhasil melompat ke Kategori IPM Tinggi, demikian pula di skala nasional, Indonesia telah mencapai Kategori IPM tinggi selama 8 tahun terakhir sejak tahun 2017.

Menurut data Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara, bahwa Kabupaten Nunukan menempati posisi IPM terendah dalam 5 tahun terakhir dibandingkan Kabupaten/Kota lain di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kinerja pembangunan yang berfokus pada seni budaya dapat tercermin dari jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian, sementara pembangunan yang berfokus pada olahraga dapat terlihat dari jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Perkembangan capaian kinerja pembangunan yang berfokus pada seni budaya dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga
Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Grup Kesenian	99	99	99	99	101
2	Jumlah Gedung Kesenian	2	2	2	2	2
3	Jumlah Klub Olahraga	32	32	32	32	32
4	Jumlah Gedung Olahraga	6	6	7	8	8

Sumber: Disbudporapar Kab. Nunukan, 2024

Dari Tabel 2.11 tampak bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir peningkatan kinerja seni budaya dan olahraga masih belum signifikan. Hal ini menunjukkan meski penyelenggaraan urusan kebudayaan serta urusan kepemudaan dan olahraga bersifat urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, namun karena terkendala sumber daya yang belum memadai dan kondisi geografis Kabupaten Nunukan maka kinerja Pembangunan khususnya dalam penyediaan Gedung Kesenian dan Gedung Olahraga belum optimal.

Meski ketersediaan keberadaan Gedung Kesenian dan Gedung Olahraga belum optimal, namun masyarakat tampak tetap antusias dalam aktivitas kesenian dan olahraga, hal ini tampak dari banyaknya jumlah grup kesenian dan klub olahraga yang ada di Kabupaten Nunukan.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

A. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada aspek ini akan dijabarkan capaian indikator kinerja pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Nunukan, terutama yang menyangkut hak dasar rakyat. Menurut Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) hak dasar rakyat merupakan hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh semua warga tanpa kecuali. Untuk itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai dasar hukum guna mengakomodir pemenuhan kebutuhan hak dasar rakyat. Peraturan Pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM mengatur ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Oleh karenanya pencapaian SPM Pemerintah Daerah menjadi tolok ukur dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dan wajib dilaporkan secara berkala setiap tahun.

Penerapan SPM di Daerah menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara teknis menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar meliputi 6 urusan yakni urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Pada tahun 2023 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari:

1) Dinas Pendidikan
2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5) Satuan Polisi Pamong Praja
6) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
7) Dinas Penanggulangan Bencana Daerah
8) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Aspek pelayanan umum terutama pemenuhan hak-hak dasar rakyat di Kabupaten Nunukan dapat tercermin dari tercapainya indikator-indikator pelayanan umum pada penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar sebagai berikut.

1. Urusan Pendidikan

Jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pada urusan Pendidikan yaitu penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan Dasar merupakan jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsnawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Oleh karenanya, di Indonesia Wajib Belajar 9 Tahun merupakan kebijakan yang bersifat mandatori dan diharapkan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari hak dasar rakyat.

Kemudian Pendidikan Kesetaraan adalah Pendidikan Non Formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam Pendidikan formal di sekolah, melalui Pendidikan Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA).

Gambaran capaian kinerja pelayanan dasar pada urusan Pendidikan di Kabupaten Nunukan dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu proporsi jumlah penduduk, berapa pun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu, terhadap jumlah penduduk. Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu proporsi jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu sesuai kelompok usianya, terhadap jumlah penduduk kelompok usia sekolah sesuai jenjang pendidikannya.

APK digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, sementara APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Pendidikan tertentu yang dimaksud di sini difokuskan SPM pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan, yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar.

Berikut in disajikan perkembangan APK Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia Tahun 2019-2023.

Gambar 2.16
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2019-2023

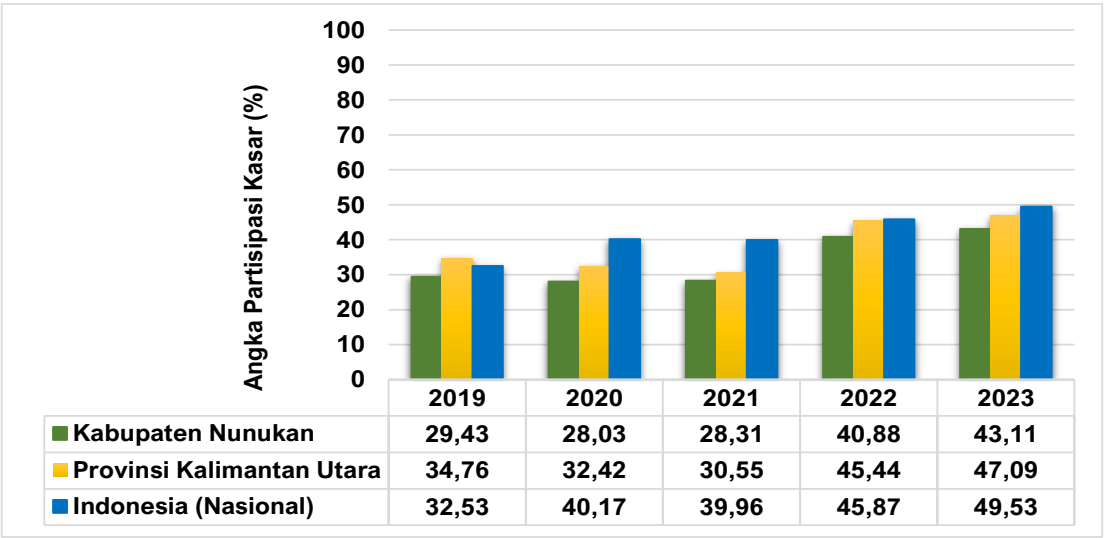

	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Nunukan	29,43	28,03	28,31	40,88	43,11
Provinsi Kalimantan Utara	34,76	32,42	30,55	45,44	47,09
Indonesia (Nasional)	32,53	40,17	39,96	45,87	49,53

Sumber: https://apkapm.data.kemdikbud.go.id, diolah, 2024

Data APK PAUD tahun 2019-2023 merupakan gabungan antara PAUD yang menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan PAUD yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) yang dipublikasikan melalui laman resmi Kemendikbud.

Berdasarkan Gambar 2.13 di atas tampak bahwa secara umum dalam 5 tahun terakhir partisipasi kasar terhadap jenjang PAUD baik secara Nasional, Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Nunukan sendiri masih sangat rendah yakni di bawah 50%. Dan APK PAUD Kabupaten Nunukan senantiasa berada di bawah APK Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2023 APK Jenjang Pendidikan PAUD di Kabupaten Nunukan mencapai 43,11 persen, atau meningkat 2,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dan secara rata-rata dalam kurun 5 tahun terakhir partisipasi kasar penduduk Kabupaten Nunukan dalam menempuh pendidikan PAUD hanya sebesar 33,95 persen.

Gambar 2.17
Perkembangan APK dan APM
Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat SD/MI/Sederajat
Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

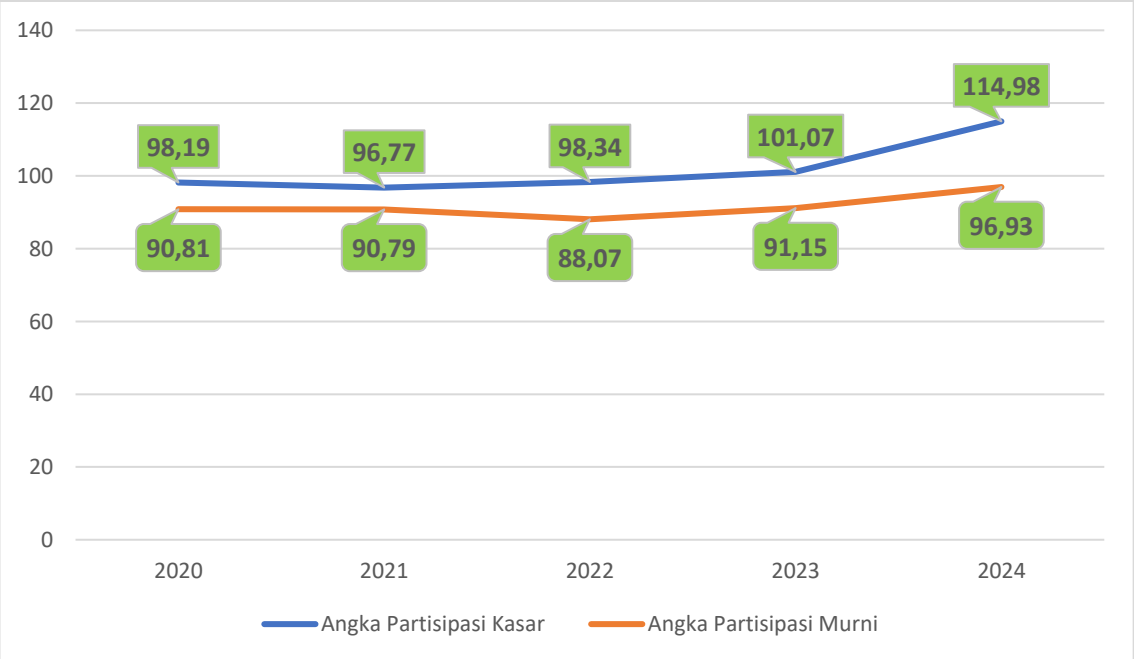

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, 2025

Dari grafik pada Gambar 2.17 dapat diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir rata-rata APK tingkat SD/MI/Sederajat sebesar 96,99 sementara rata-rata APM sebesar 90,99. APM tingkat SD/MI/Sederajat belum pernah mencapai angka

100 dan hal ini berarti tidak seluruh anak usia jenjang SD/MI/Sederajat bersekolah.

Pada tahun 2024 APM tingkat SD/MI/Sederajat sebesar 92,21 persen meningkat 1,05 persen dibanding tahun sebelumnya, dan ini berarti masih terdapat 7,79 persen penduduk usia 7-12 tidak bersekolah atau tidak terserap di SD/MI/Sederajat. Sementara APK tingkat SD/MI/Sederajat mencapai 103,69 persen, angka ini menunjukkan terdapat sebanyak 9,92 persen penduduk yang bukan direntang usia 7-12 tahun menjadi murid/bersekolah di tingkat SD/MI/Sederajat. Dan senada dengan APM, di tahun 2024 terjadi juga peningkatan APK tingkat SD/MI/Sederajat sebesar 2,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Gambar 2.18
Perkembangan APK dan APM
Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat SMP/MTs/Sederajat
Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

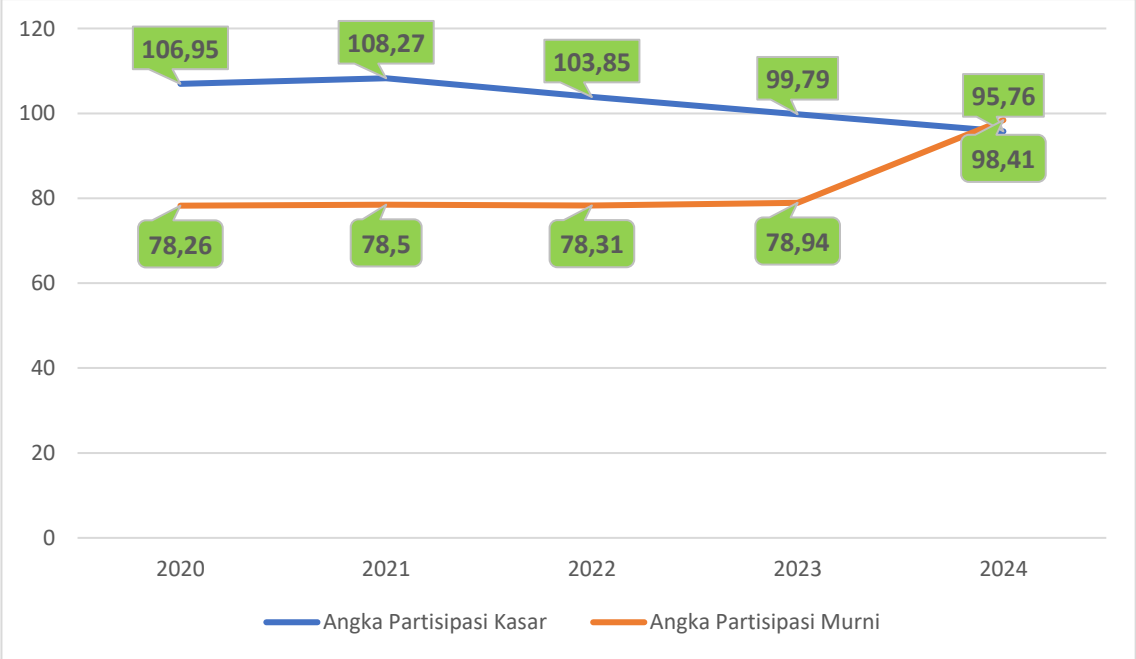

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, 2025

Dari grafik pada Gambar 2.18 Pada tahun 2024 APM tingkat SMP/MTs/Sederajat sebesar 75,17 persen, menurun 3,77 dibanding tahun sebelumnya, dan ini berarti masih terdapat 24,82 persen penduduk usia 13-15 tidak bersekolah atau tidak terserap di SMP/MTs/Sederajat. Sementara APK tingkat SMP/MTs/Sederajat sebesar 88,28 persen, angka ini menunjukkan

terdapat sebanyak 21,72 persen penduduk yang bukan direntang usia 13-15 tahun menjadi siswa/bersekolah di tingkat SMP/MTs/Sederajat.

Gambar 2.19
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat)
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2024

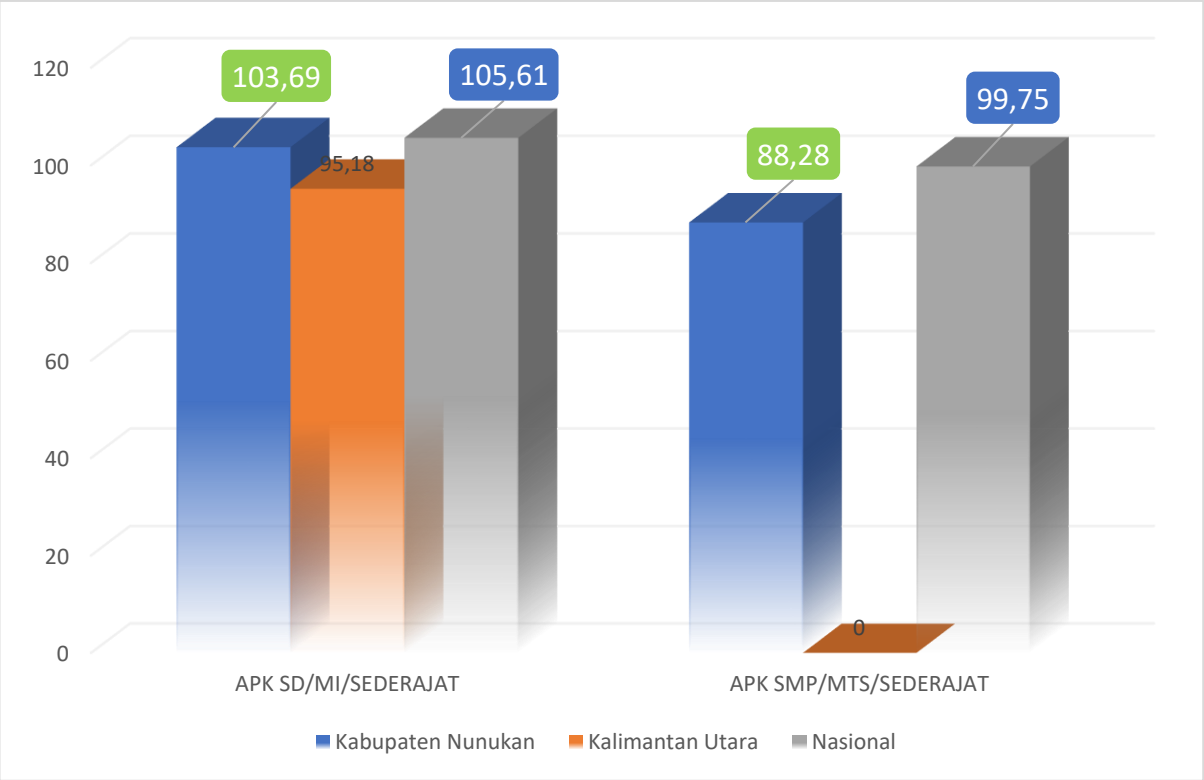

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.19 tampak bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI/Sederajat Kabupaten Nunukan pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan dengan APK Provinsi Kalimantan Utara maupun Nasional. Namun untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/MTs/Sederajat tahun 2023, Kabupaten Nunukan mengungguli capaian APK Provinsi Kalimantan Utara maupun Nasional.

Pada tahun 2023 tampak bahwa penduduk yang berpartisipasi mengakses sekolah tingkat SD/MI/Sederajat lebih tinggi daripada sekolah tingkat SMP/MTs/Sederajat. Faktor penyebab rendahnya APK SMP/MTs/Sederajat dapat dipengaruhi oleh daya tampung sekolah, kendala geografis/jarak, faktor ekonomi/biaya, dan atau minat penduduk itu sendiri.

Selanjutnya akan disajikan perbandingan APM Kabupaten Nunukan Tahun 2023 dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional sebagai berikut.

Gambar 2.20
Perbandingan Angka Partisipasi Murni (APM)
Jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat)
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2024

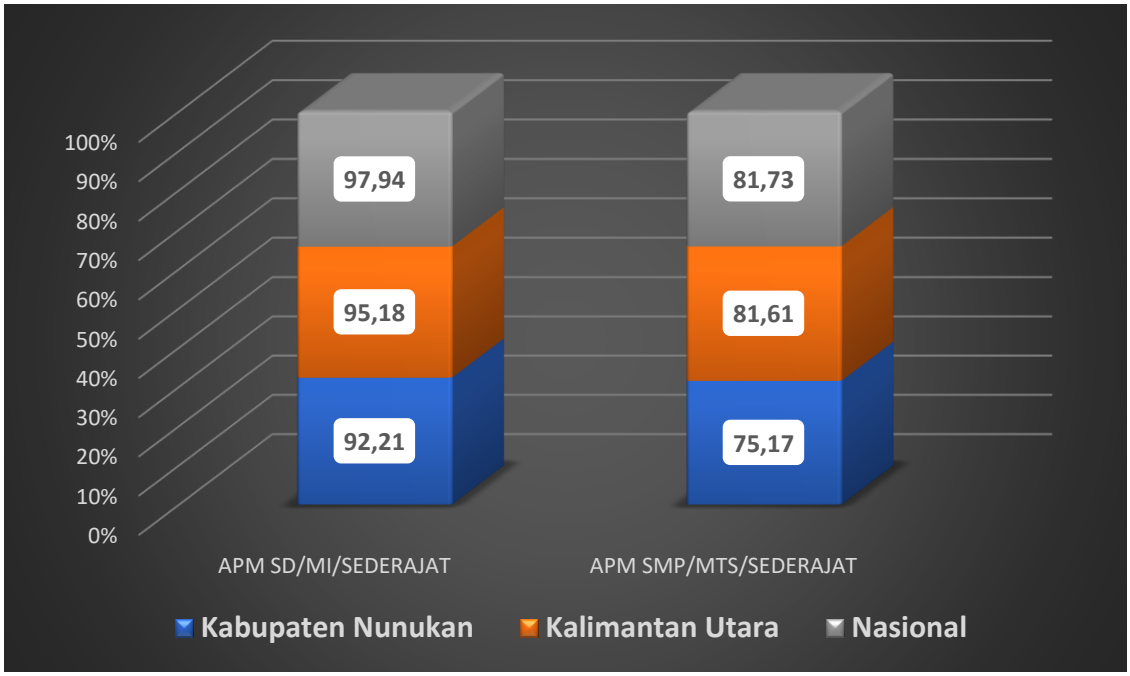

Sumber: Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2025

Dari Gambar 2.20 terlihat bahwa pada tahun 2024 APM Jenjang Pendidikan Dasar tingkat SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/Sederajat, baik di level Nasional, Provinsi Kaltara maupun Kabupaten Nunukan tidak ada yang mencapai 100. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh penduduk usia 7-15 tahun menjadi pelajar di jenjang Pendidikan Dasar.

Kemudian APM tingkat SD/MI/Sederajat lebih tinggi daripada APM tingkat SMP/MTs/Sederajat. Kondisi ini menunjukkan persentase penduduk usia 7-12 tahun lebih banyak yang mengenyam Pendidikan di tingkat SD/MI/Sederajat daripada persentase penduduk usia 13-15 tahun yang menjadi pelajar di tingkat SMP/MTs/Sederajat.

Dan pada tahun 2024 baik capaian APM tingkat SD/MI/Sederajat maupun APM tingkat SMP/MTs/Sederajat Kabupaten Nunukan lebih rendah dibandingkan dengan APM Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah jenjang Pendidikan Dasar adalah jumlah sekolah jenjang Pendidikan Dasar per 10.000 jumlah penduduk usia Pendidikan Dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin baik kesempatan belajar/sekolah bagi penduduk usia pendidikan dasar. Adapun perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Rasio Ketersediaan Sekolah
Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
a. Jumlah SD/MI/Sederajat	137	138	139	139	140
b. Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	24.345	23.710	23.215	24.412	25.708
c. Rasio Ketersedian Sekolah SD/MI (a/b*10.000)	**56,27**	**58,20**	**59,88**	**56,94**	**54,46**
d. Jumlah SMP/MTs/Sederajat	46	48	53	55	57
e. Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	11.736	12.119	12.189	12.249	11.213
f. Rasio Ketersedian Sekolah SMP/MTs (d/e*10.000)	**39,20**	**39,61**	**43,48**	**44,90**	**50,83**
g. Jumlah Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar (a+b)	183	186	192	194	197
h. Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar (b+e)	36.081	35.829	35.404	36.661	36.921
Rasio Ketersedian Sekoalh Jenjang Pendidikan Dasar (g/h*10.000)	**50,72**	**51,91**	**54,23**	**52,92**	**53,36**
Rasio Ideal Per 10.000	52				
Capaian Kinerja (%)	**97,54%**	**99,83%**	**104,29%**	**101,76%**	**102,61%**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan, 2024

Rasio ideal ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar adalah 52. Artinya bahwa minimal tersedia 52 unit sekolah jenjang Pendidikan Dasar per 10.000 jiwa penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar yakni usia 7-15 tahun.

Berdasarkan Tabel 2.12 terlihat bahwa Rasio Ketersediaan Sekolah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir telah mencukupi bahkan melebihi rasio ideal, sehingga capaian kinerjanya lebih dari 100%.

Akan tetapi, dengan kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang 21 Kecamatannya tidak terletak di satu daratan melainkan saling terpisah, maka dapat menjadi pertimbangan untuk terus meningkatkan jumlah sekolah jenjang Pendidikan Dasar demi kemudahan akses Pendidikan Dasar terutama di Kecamatan yang berlokasi di dataran Pulau Kalimantan.

c. Rasio Ketersediaan Guru Jenjang Pendidikan Dasar

Ketersediaan sekolah saja tanpa diimbangi ketersediaan guru akan berdampak pada tidak optimalnya pelayanan umum pada urusan Pendidikan. Rasio Ketersediaan Guru merupakan tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah dalam kemampuan menghadirkan jumlah Guru yang memadai per 10.000 murid jenjang Pendidikan Dasar.

Tabel 2.13
Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Jumlah Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
a. Jumlah Guru SD/MI	1.613	1.570	1.562	1.583	1.981
b. Jumlah Murid SD/MI	22.320	21.633	21.894	22.297	22.533
c. Rasio Ketersediaan Guru SD/MI (a/b*10.000)	**722,67**	**725,74**	**713,44**	**709,96**	**879,16**
d. Jumlah Guru SMP/MTs	615	625	669	693	915
e. Jumlah Murid SMP/MTs	10.293	9.180	8.846	9.083	9.272
f. Rasio Ketersediaan Guru SMP/MTs (d/e*10.000)	**597,49**	**680,83**	**756,27**	**762,96**	**986,84**
g. Jumlah Guru Jenjang Pendidikan Dasar (a+b)	2.228	2.195	2.231	2.276	2.896
h. Jumlah Murid Jenjang Pendidikan Dasar (b+e)	32.613	30.813	30.740	31.380	31.805
Rasio Ketersediaan Guru Jenjang Pendidikan Dasar (g/h*10.000)	**683,16**	**712,36**	**725,76**	**725,30**	**910,55**
Rasio Ideal Per 10.000	500				
Capaian Kinerja (%)	**136,63 %**	**142,47 %**	**145,15 %**	**145,06 %**	**182,11 %**

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Nunukan, 2024

Berdasarkan Tabel 2.13 tampak bahwa ketersediaan Guru pada jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah mencapai kondisi ideal, yakni dengan capaian rasio di atas 500 per 10.000 murid.

Pada tahun 2023 kinerja rasio ketersediaan Guru dapat dikatakan sangat tinggi, yakni 1 Guru hanya bertanggung jawab terhadap 13-14 Murid, sementara standar idealnya 1 Guru maksimal bertanggung jawab terhadap 20 Murid Jenjang Pendidikan Dasar. Meningkatnya capaian rasio tersebut, dikarenakan adanya pertambahan jumlah guru sebanyak 37 orang atau meningkat 1,52 persen dibanding tahun sebelumnya.

d. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

Sebagai bentuk dari implementasi pelayanan Pendidikan Kesetaraan, Kabupaten Nunukan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang menginklusifkan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B dan C sebagai bagian dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Paket A dan B yang setara jenjang Pendidikan Dasar merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

Pada tahun 2023 selain penyelenggaraan Kejar Paket pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Dinas Pendidikan melanjutkan program baru yang dinamai Kejar Si TOGA (Kelompok Belajar dengan Strategi Tutor Siaga). Kejar Si TOGA merupakan layanan pendidikan non formal setara SD, SMP, dan SMA yaitu program Paket A, B, dan paket C, dengan tujuan meningkatkan angka harapan sekolah. pada usia 7 hingga 25 tahun ke atas. Program ini menyasar penduduk yang kesulitan mengakses pendidikan non formal di PKBM, seperti Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Nunukan, pekerja di perusahaan perkebunan sawit, dan sebagainya

2. Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam urusan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setingg-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Selain itu sehat dan memperoleh pelayanan kesehatan merupakan hak dasar rakyat, sehingga Pemerintah Kabupaten Nunukan berkewajiban menyediakan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang memadai untuk pelayanan kesehatan masyarakat di wilayahnya.

Ketersediaan Fasilitas Kesehatan (Faskes) untuk pelayanan dasar kesehatan di Kabupaten Nunukan dapat dilihat melalui Rasio Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas), Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit berikut ini.

Tabel 2.14
Rasio Ketersediaan Posyandu Per Satuan Balita
Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
A	Jumlah Posyandu	235	235	235	235	237
B	Jumlah Balita	19.508	22.046	19.038	17.776	14.949
C	Rasio Posyandu Per 1.000 Balita [A/B*1.000]	12,05	10,66	12,34	13,15	18,26
D	Rasio Ideal Per 1.000 Balita	20,00				
Rasio posyandu per balita [1:B/A]		1:83	1:94	1:81	1:76	1:54
Rasio ideal per balita		01:50				
Kekurangan jumlah posyandu [(B/50)-A]		155	206	146	123	25

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, 2025

Berdasarkan Tabel 2.14, tampak bahwa hingga kini Kabupaten Nunukan belum dapat memenuhi rasio ideal dalam hal ketersediaan Posyandu. Pada tahun 2024 Rasio Posyandu Per 1 Balita adalah 1:54 artinya 1 Posyandu melayani 54 Balita, sementara menurut rasio ideal seharusnya 1 Posyandu melayani

maksimal 50 Balita. Meskipun ada penambahan 38 unit posyandu di tahun 2024 namun belum memenuhi standar pelayanan yang maksimal.

Tabel 2.15
Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit Per Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

N0	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Jumlah Puskesmas	18	18	18	18	18
B	Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)	79	75	95	95	95
C	Jumlah Rumah sakit	2	4	4	4	4
D	Jumlah Penduduk	199.090	203.200	208.303	217.923	210.094
Rasio Puskesmas Per Penduduk (1:(D/A)		1 : 11.061	1 : 11.289	1 : 11.572	1 : 12.107	1:11.672
Rasio Pustu Per Penduduk (1:(D/A)		1 : 2.520	1 : 2.709	1 : 2.709	1 : 2.294	1:2.212
Rasio Rumah Sakit Per Penduduk (1:(D/A)		1: 101.000	1 : 52.500	1 : 49.750	1 : 50.750	1:52.524

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, 2025

Rasio Puskesmas Per Penduduk Idealnya adalah 1:16.000 dan jika melihat Tabel 2.15 diketahui bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir Kabupaten Nunukan telah berhasil memenuhi bahkan melebihi standar ideal ketersediaan Puskesmas. Di tahun 2024 terdapat 18 Puskesmas, artinya 1 Puskemas di Kabupaten Nunukan hanya melayani sebanyak 11.300 Penduduk.

Berbanding terbalik dengan ketersediaan Puskesmas yang telah lama melebihi kondisi ideal, kondisi Pustu di Kabupaten Nunukan belum memenuhi standar ideal yakni 1:1.500. Pada tahun 2024 rasio Pustu per Penduduk sebesar 1:2.212 artinya terdapat beban tambahan sebanyak 712 penduduk yang harus dilayani oleh Pustu se-Kabupaten Nunukan. Dan berdasarkan perhitungan untuk mencapai kondisi ideal melayani 227.460 penduduk tahun 2024 ini, maka diperlukan minimal 136 Pustu, artinya Kabupaten Nunukan masih kekurangan sebanyak 41 Pustu. Sementara untuk rasio ketersediaan Rumah Sakit Per Penduduk pada tahun 2024 adalah 1:52.524 artinya 1 Rumah Sakit hanya melayani 52.524 Penduduk. Capaian tersebut melebihi target, karena telah melampaui standar rasio ideal yakni 1:100.000.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang

bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan. Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas: (a) Tenaga Medis; (b) Tenaga Kesehatan; dan (c) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan.

Tenaga Medis terdiri dari 2 kelompok yakni dokter dan dokter gigi. Sementara Tenaga Kesehatan (Nakes) meliputi 12 kelompok, meliputi:

1) tenaga psikologi klinis;
2) tenaga keperawatan;
3) tenaga kebidanan;
4) tenaga kefarmasian;
5) tenaga kesehatan masyarakat;
6) tenaga kesehatan lingkungan;
7) tenaga gizi;
8) tenaga keterapian fisik;
9) tenaga keteknisian medis;
10) tenaga teknik biomedika;
11) tenaga kesehatan tradisional; dan
12) Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Untuk memberikan gambaran secara umum ketersediaan SDM Kesehatan di Kabupaten Nunukan yang paling mendasar maka difokuskan pada 3 kelompok yaitu Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan selaku Tenaga Kesehatan.

Berikut ini disajikan perkembangan rasio ketersediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 2.16
Rasio Ketersediaan Tenaga Medis, Tenaga Keperawatan dan Tenaga Kebidanan Per Penduduk Kabupaten NunukanTahun 2020-2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Tenaga Medis (Dokter & Dokter Gigi)	91	98	109	123	90
B	Tenaga Keperawatan	502	445	479	464	489
C	Tenaga Kebidanan	341	330	350	330	358
D	Jumlah Penduduk	199.090	203.200	208.303	217.923	210.094
Rasio Dokter Per Penduduk (1:D/A)		1 : 2.188	1 : 2.073	1 : 1.911	1 : 1.772	1: 2.334
Rasio Perawat Per Penduduk (1:D/B)		1 : 397	1 : 457	1 : 435	1 : 470	1: 340
Rasio Bidan Per Penduduk (1:D/C)		1 : 584	1 : 616	1 : 595	1 : 660	1: 587

Sumber data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, 2025

Ketersediaan Dokter, Perawat dan Bidan di Kabupaten Nunukan sangat krusial untuk pelayanan dasar kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan penduduk kabupaten nunukan yang tersebar di 21 Kecamatan dan 232 Desa.

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk yang ideal adalah 1:2.500, artinya 1 Dokter berbanding 2.500 penduduk. Berdasarkan Tabel 2.16 Kabupaten Nunukan telah berhasil melampaui jumlah ketersediaan Dokter dalam 4 tahun terakhir, yakni sejak tahun 2020.

Kemudian untuk ketersediaan Perawat dan Bidan juga telah memenuhi standar, dan secara konsisten bahkan melebihi rasio ideal dalam 5 tahun terakhir ini. Standar rasio ideal Perawat per Penduduk adalah 1:855, sementara standar rasio ideal Bidan per Penduduk adalah 1:1.000.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Pemerintah Pusat Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diampu oleh dua kementerian yang berbeda, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum, sementara untuk urusan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Semula SPM Urusan Pekerjaan Umum diatur dalam Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, namun pada akhir tahun 2023 dicabut dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Berdasarkan permen tersebut pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum pada Kabupaten/Kota terdiri atas 2 (dua) jenis pelayanan yaitu:

1) Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari; dan

Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari dimaksud diberikan melalui Penyelenggaraan SPAM di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik dimaksud diberikan melalui penyelenggaraan (a) SPALD-S; dan/atau (b) SPALD-T

Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum pada Pemerintah Kabupaten Nunukan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan. Berikut ini disajikan secara umum bagaimana pencapaian indikator kinerja pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 tahun terakhir di Kabupaten Nunukan.

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	15.330	16.351	17.899	21.124	19.674
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, Tidak berbau)	Rumah Tangga	15.330	16.351	17.899	21.124	19.674
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap	Rumah Tangga	N/A	N/A	N/A	978	90

	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)						
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	N/A	N/A	N/A	978	90
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Persen	N/A	63,69	63,69	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan capaian table di Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Nunukan tahun 2020 - 2024 memiliki capaian yang beragam. Akses rumah tangga terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan mengalami peningkatan signifikan meskipun terdapat penurunan pada tahun 2024. Sebaliknya, akses melalui SPAM bukan jaringan perpipaan mengalami penurunan drastis hingga 90, menunjukkan peralihan preferensi atau keterbatasan sumber daya. Indikator pengelolaan air limbah domestik justru mengalami penurunan tajam hingga nol pada 2024, mengindikasikan adanya tantangan serius dalam penyediaan fasilitas pengolahan limbah yang memerlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut. Selain itu, terkait tidak terealisasinya kegiatan rumah tangga bersanitasi/ rumah tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah adalah karena belum direncanakannya pendamping untuk Tenaga Fasilitator Lapangan yang merupakan kegiatan swakelola.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan wajib dasar yang diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Nunukan Kabupaten Nunukan. Optimalisasi program perbaikan rumah tidak layak huni serta peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi tetap

diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kualitas permukiman di masa mendatang. Berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa setiap kota/kabupaten memiliki kewenangan untuk melaksanakan SPM begitupun dengan Kabupaten Nunukan. Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nunukan Tahun 2022 - 2024

No	Indikator	Target	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	100%	0%	0%	0%
2	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau bangunan	100%	0%	0%	0%
3	Penyediaan rumah layak huni	100%	100%	100%	100%

Sumber: DPRKPP Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan tabel 2.18, capaian SPM urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Nunukan menunjukkan hasil yang positif dengan dua indikator mencapai 100%, yaitu rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas kebijakan dalam menyediakan hunian yang aman dan layak bagi masyarakat. Namun, indikator fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan yang masih 0% menunjukkan adanya kendala dalam implementasi, baik dari aspek regulasi, pendanaan, maupun administrasi.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan publik pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan wujud pemenuhan Hak Dasar Rakyat yaitu Hak Atas Rasa Aman, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa: *"Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu".*

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan aspek penting dalam menciptakan dan menjaga lingkungan yang aman dan harmonis bagi warga negara. Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dibagi ke dalam 3 sub urusan yaitu sub ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan tupoksi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sub kebencanaan yang merupakan tupoksi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan sub kebakaran yang merupakan tupoksi dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).

Berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa setiap kota/kabupaten memiliki kewenangan untuk melaksanakan SPM begitupun dengan Kabupaten Nunukan. Adapun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketentraman dan ketertiban umum yang capaiannya di Kabupaten Nunukan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayananan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	%	0	0	94,25	100	100
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kerban	KK	73	34	26	14	
3	Pelayanan Informasi rawan bencana	-				90	100
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-				100	100

Sumber: Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD Kabupate Nunukan, 2025

Pada tahun 2024 capaian pelaksanaan indikator SPM pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi, indikator pelayanan informasi rawan berncana, dan indikator pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 100 persen. Sedangkan pada indikator SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi

korban kebakaran, hambatan yang ditemui yaitu adanya keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, akses jalan yang belum memadai dan laporan masyarakat yang sering terlambat juga menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya penanganan kebakaran.

6. Urusan Sosial

Urusan sosial merupakan bagian dari pemerintahan yang wajib menyediakan layanan dasar bagi masyarakat. Tanggung jawab teknis dalam bidang ini berada di bawah kewenangan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nunukan. Kinerja urusan sosial diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan. Indikator tersebut mencerminkan sejauh mana layanan sosial telah menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peningkatan capaian indikator menunjukkan keberhasilan dalam penyelenggaraan layanan sosial. Berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa setiap kota/kabupaten memiliki kewenangan untuk melaksanakan SPM begitupun dengan Kabupaten Nunukan. Adapun capaian SPM bidang sosial Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19
Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Nunukan Tahun 2022 - 2024

No	Pelayanan Dasar	Target	2022	2023	2024*
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas di Luar Panti	100%	18%	110%	110%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100%	38%	105%	105%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di Luar Panti	100%	20%	108%	108%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100%	100%	100%	100%
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	100 %	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nunukan, 2024

Keterangan: (*) Angka Sementara

Berdasarkan Tabel 2.19, dalam tiga tahun terakhir capaian SPM urusan sosial di Kabupaten Nunukan mengalami perkembangan fluktuatif dengan tren

peningkatan yang positif, kecuali pada indikator pencapaian rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti serta perlindungan dan jaminan sosial pada korban bencana yang telah konsisten mencapai target sejak tahun 2022-2024. Hal ini menunjukkan adanya progres yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat.

2.1.3.2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Tenaga kerja

Urusan tenaga kerja merupakan salah satu urusan pelayanan wajib non dasar yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang tersedia sangat menentukan keberhasilan program pembangunan, baik di sektor formal maupun informal. Kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Nunukan dalam lima tahun terakhir dapat direpresentasikan oleh capaian indikator, sebagai berikut:

Gambar 2.21
Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024



Sumber : Disnakertrans Kabupaten Nunukan, 2025

Indikator yang ditampilkan meliputi persentase pencari kerja terdaftar yang berhasil ditempatkan, persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, jumlah sengketa perusahaan-pekerja, dan persentase kasus hubungan industrial yang berhasil ditangani. Dari tahun 2023 hingga 2024, terdapat fluktuasi dalam jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan. Tahun 2023 mencatat angka 8,20%,

kemudian mengalami peningkatan pada 2024 menjadi 25,12%. Sementara itu, angka sengketa antara perusahaan dan pekerja juga pada 2023 hingga tahun 2024 berjumlah 17 kasus. Secara keseluruhan, tren yang ditunjukkan dalam grafik mengindikasikan adanya peningkatan dalam kualitas tenaga kerja melalui sertifikasi, serta efektivitas dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, meskipun tantangan dalam penempatan tenaga kerja masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

B. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk dalam urusan wajib non-pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nunukan. Melalui pendekatan yang komprehensif, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi perempuan dan anak, baik melalui edukasi, pendampingan, maupun pemberian akses terhadap layanan sosial. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan tercipta kondisi yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan dan anak di Kabupaten Nunukan. Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Nunukan dalam empat tahun terakhir dapat direpresentasikan oleh capaian indikator, sebagai berikut:

Gambar 2.22
Capaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 –2024

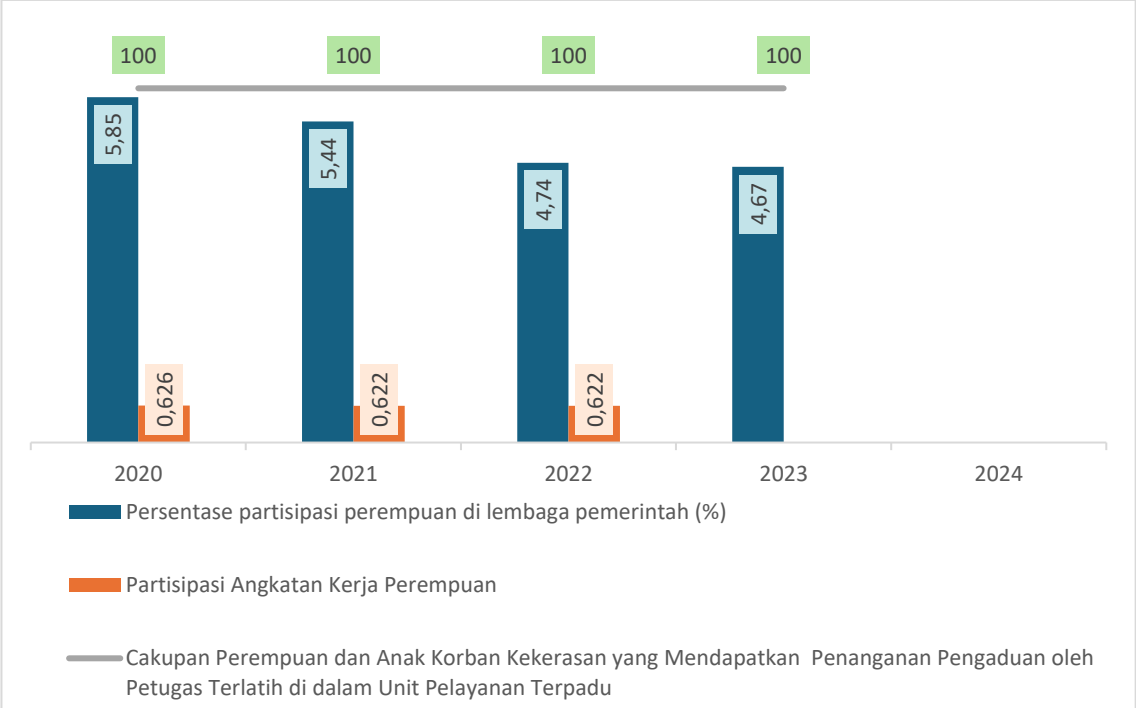

Sumber : Dinas Sosial PPA Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan gambar 2.22, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, yang dalam rentang tahun 2020 - 2023 cenderung menurun. Realisasi tahun 2020 sebesar 5,85% dan terus menurun hingga angka 4,67% di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan tantangan signifikan bagi keterlibatan perempuan akibat adanya hambatan struktural dalam organisasi, kurangnya dukungan kebijakan afirmatif, stereotip dan bias gender, serta kondisi sosial dan ekonomi yang tidak menguntungkan perempuan. Situasi ini mencerminkan perlunya upaya lebih besar untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi perempuan dalam pemerintahan. Di sisi lain, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih mencapai angka 100% sepanjang tahun 2020 hingga 2023. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

C. Pangan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. Sebagai wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas, ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau menjadi prioritas utama. Melalui berbagai program dan kebijakan, dinas ini bertanggung jawab dalam memastikan produksi pangan yang berkelanjutan, mengembangkan sistem distribusi yang efisien, serta mengawasi keamanan pangan agar masyarakat mendapatkan produk yang layak konsumsi. Kinerja urusan pangan selama tahun 2020-2024 direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

Gambar 2.23
Capaian Indikator Urusan Pangan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 –2024

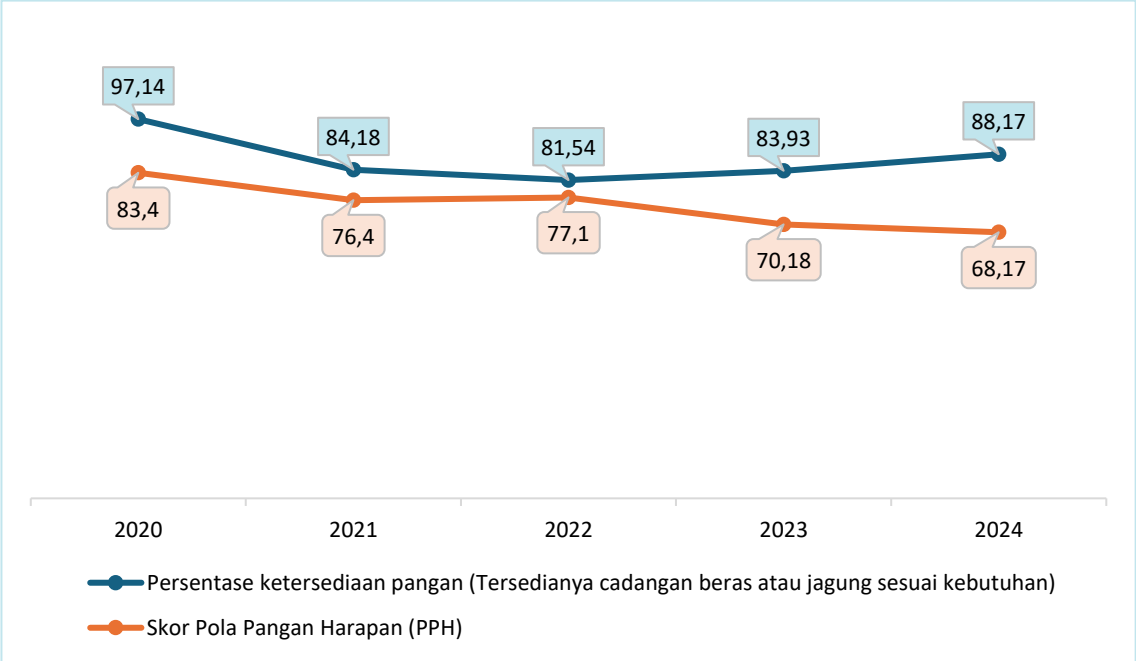

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan gambar 2.23, capaian persentase ketersediaan pangan seperti cadangan beras atau jagung sesuai kebutuhan masyarakat di Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 mengalami kenaikan persentase dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi dan ketahanan stok pangan di daerah tersebut. Sementara itu, Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang menggambarkan keseimbangan konsumsi pangan sesuai standar gizi, mengalami penurunan dari 83,4 pada tahun 2020 menjadi 70,18

pada tahun 2023, sebelum akhirnya kembali turun ke 68,17 pada tahun 2024. Perubahan ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat belum mencapai keseimbangan gizi yang optimal. Upaya peningkatan kesadaran gizi dan distribusi pangan yang lebih baik dapat II-125 menjadi langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Nunukan.

D. Pertanahan

Urusan pertanahan di Kabupaten Nunukan yang diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan berfungsi untuk mengelola penggunaan tanah secara efisien dan adil, menjamin hak kepemilikan, serta melindungi sumber daya alam dan lingkungan. Kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020- 2024 direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:

Gambar 2.24
Capaian Urusan Pertanahan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, 2025

Capaian indikator urusan pertanahan di Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika dalam penanganan sengketa tanah dan penyelesaian kasus pertanahan. Penanganan sengketa tanah melalui mediasi menunjukkan tren yang relatif stabil pada tahun 2020 hingga 2022 dengan jumlah

kasus yang ditangani sebanyak 5 kasus per tahun. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan menjadi 11 kasus, sebelum akhirnya mengalami sedikit penurunan menjadi 9 kasus pada tahun 2024. Peningkatan tajam pada tahun 2023 dapat mengindikasikan meningkatnya kebutuhan akan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi. Sementara itu, penyelesaian kasus pertanahan mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2020, terdapat 4 kasus yang berhasil diselesaikan, tetapi jumlah ini menurun menjadi 3 kasus pada tahun 2021. Tahun 2022 mencatat peningkatan signifikan dengan 6 kasus terselesaikan, sebelum kembali turun menjadi 4 kasus pada 2023 dan 3 kasus pada 2024. Hal ini menunjukkan peran aktif Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dalam mengupayakan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan adil, serta meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

E. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pelayanan wajib nondasar yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan yangberfungsi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kualitas lingkunganyang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Nunukan direpresentasikan oleh capaian kinerja berikut :

Gambar 2.25
Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan
Tahun 2020 – 2024

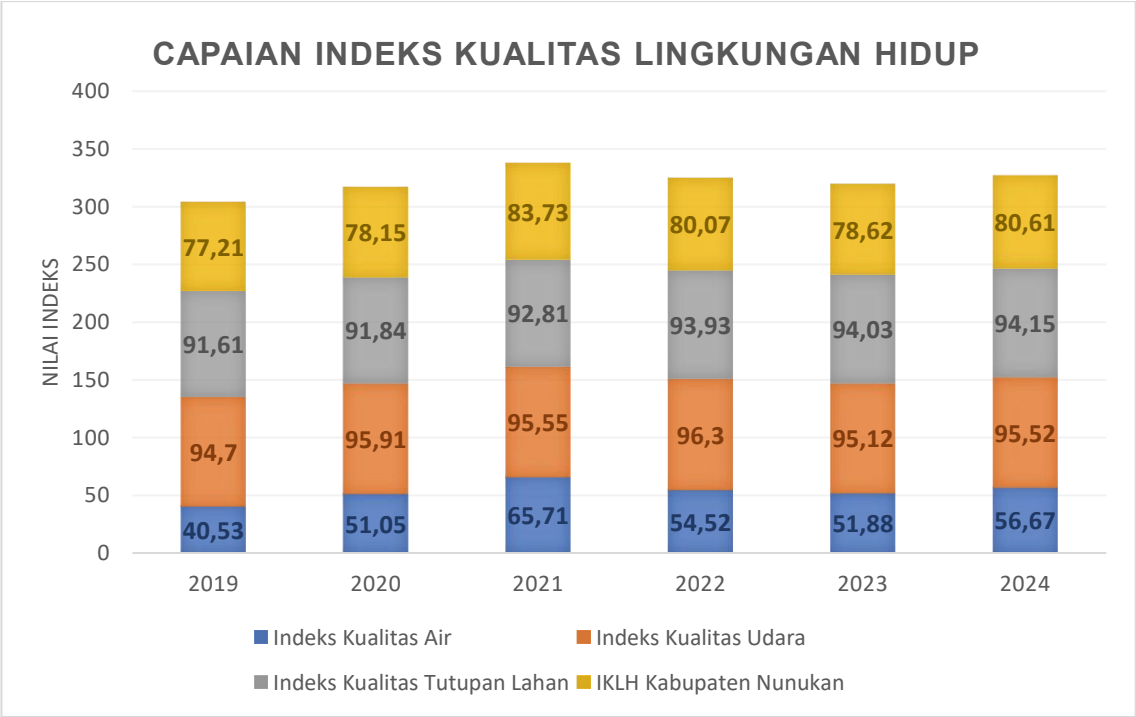

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, 2025

Kualitas lingkungan hidup salah satunya dapat dinilai berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan indikator yang dapat menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional sehingga dapat digunakan sebagai informasi dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Nunukan dalam waktu lima tahun terakhir memiliki tren yang fluktuatif dengan IKLH tertinggi pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, IKLH Kabupaten Nunukan Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,41. IKLH terdiri atas tiga komposit yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perkembangan pada IKA terhambat oleh adanya konversi lahan menjadi perkebunan sawit di sepanjang sungai, kondisi cuaca yang lebih banyak hari hujan dan pengambilan sampel dilakukan setelah hujan, dan belum pernah dilakukan normalisasi sungai pada sungai yang dipantau. Begitu pula pada perkembangan IKU yang terhambat oleh kurangnya anggaran dalam pengendalian pencemaran udara, pengawasan dan pembinaan industri serta kurangnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara, serta tidak adanya uji emisi kendaraan bermotor.

Sedangkan terkait persampahan, persentase jumlah yang tertanganijuga menunjukkan capaian fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Persentase jumlah sampah yang tertangani merupakan persentase antara jumlah sampah yang tertangani dari total keseluruhan jumlah timbulan sampah di kabupaten. Indikator ini menggambarkan keseluruhan jumlah sampah yang berhasil diolah dan teratasi melalui TPA, kegiatan 3R, maupun kegiatan pengolahan sampah lainnya. Capaian pada tahun 2019 menunjukkan angka 52,01% dan menurun di angka 51% di tahun 2023. Faktor yang menghambat kinerja indikator ini adalah keterbatasan sarana prasarana persampahan yang sering mengalami kerusakan.

F. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dan catatan sipil (selanjutnya disebut adminduk) merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan. Urusan adminduk bertanggungjawab atas pengelolaan dan pembangunan daerah karena menyediakan data akurat tentang jumlah dan distribusi penduduk yang mendukung perencanaan infrastruktur, pelayanan publik, dan sistem perpajakan. Kinerja urusan adminduk di Kabupaten Nunukan dapat direpresentasikan oleh capaian kinerja berikut :

Tabel 2.20

Capaian Kinerja Urusan Adminduk di Kabupaten Nunukan tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Kepemilikan E-KTP	98,43	98,66	102,31	97,81	98,91
2	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	156,15	96,41	105,51	102,30	93,89
3	Cakupan Penerbitan KK	148,00	178,64	3,05	2,28	3,82
4	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Cakupan Penerbitan KIA	0	55,14	52,91	49,24	61,61

Sumber : Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, 2025

Pada Tabel 2.20 menunjukkan capaian indikator urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024. Cakupan kepemilikan E-KTP menunjukkan fluktuasi, dengan angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar 102,31% dan menurun pada tahun 2023 menjadi 97,81% sebelum meningkat kembali menjadi 98,91% di tahun 2024. Sementara itu, cakupan kepemilikan akta kelahiran mengalami penurunan signifikan dari 156,15% pada tahun 2020 kemudian menjadi 93,89% pada tahun 2024. Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) mengalami penurunan drastis setelah tahun 2021, dari 178,64% menjadi hanya 3,05% pada tahun 2022 dan tetap rendah pada tahun-tahun berikutnya. Sebaliknya, cakupan penerbitan akta kematian dan akta perkawinan tetap stabil di angka 100% sepanjang periode 2020-2024, menunjukkan pencapaian optimal dalam aspek ini. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) mengalami peningkatan signifikan dari nol persen pada tahun 2020 menjadi 61,61% pada tahun 2024, yang mencerminkan upaya yang lebih kuat dalam penerbitan dokumen identitas bagi anak-anak di Kabupaten Nunukan. Secara keseluruhan, meskipun terdapat pencapaian positif dalam beberapa aspek administrasi kependudukan, beberapa indikator seperti cakupan penerbitan KK mengalami penurunan yang cukup drastis dan memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas layanan kependudukan di daerah tersebut.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan. Urusan ini berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat kelembagaan desa, mendorong partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kesadaran serta akses terhadap hak-hak mereka, sehingga menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Nunukan direpresentasikan oleh capaian indikator berikut :

Gambar 2.26
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Nunukan tahun 2020-2024

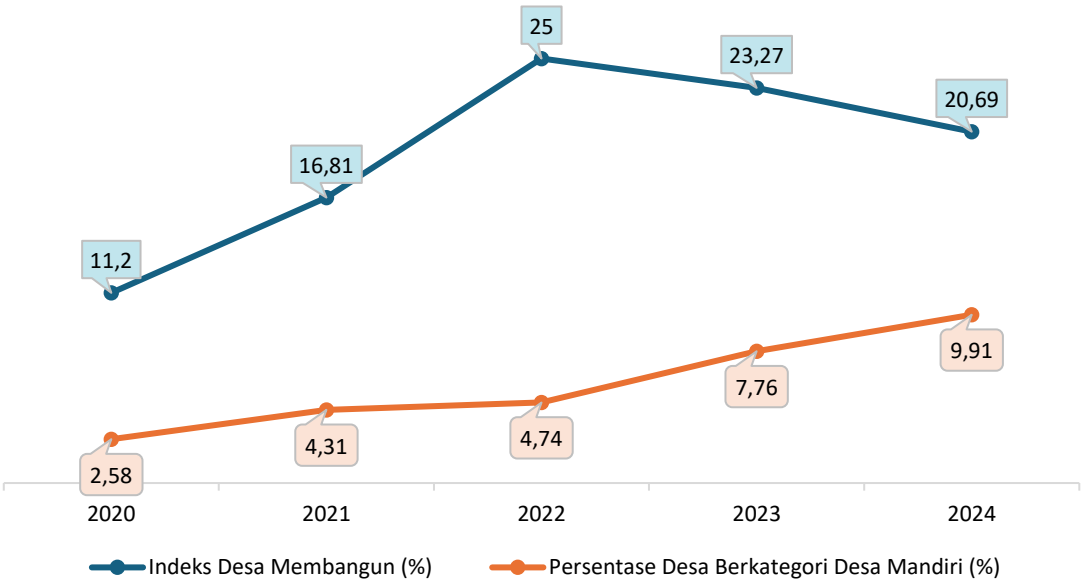

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan, 2025

Capaian indikator urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Nunukan tahun 2020–2024 menunjukkan perkembangan positif dalam dua indikator utama. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Nunukan menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari tahun 2022 - 2024. Sedangkan persentase desa berkategori desa mandiri menunjukkan tren peningkatan yang positif di tahun 2023 - 2024 menunjukkan bahwa semakin banyak desa yang mampu mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan program-program pemerintah dan inisiatif lokal dalam meningkatkan kapasitas ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di desa-desa tersebut. Selain itu, peningkatan ini menunjukkan bahwa desa-desa semakin mampu mengelola sumber daya mereka secara efektif dan mandiri, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini juga mengindikasikan bahwa meskipun ada tantangan seperti yang terlihat dari fluktuasi Indeks Desa Membangun (IDM), upaya jangka panjang untuk memberdayakan desa-desa terus membuahkan hasil positif.

H. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Bencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan pelayanan wajib non dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan. Kinerja urusan PPKB Kabupaten Nunukan direpresentasikan oleh capaian indikator berikut :

Gambar 2.27
Capaian Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Nunukan tahun 2020-2024

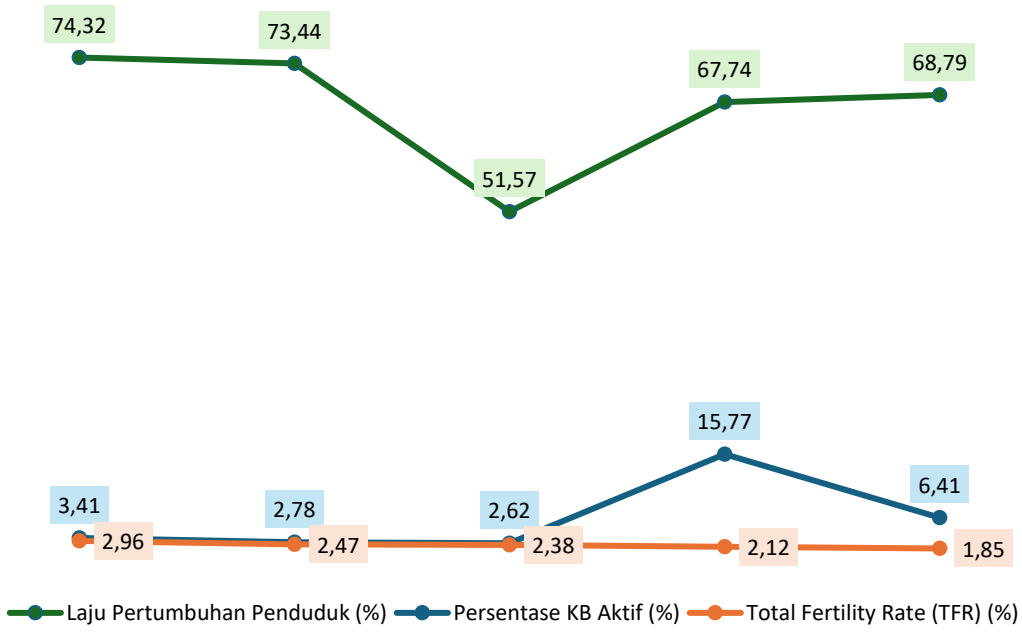

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nunukan, 2025

Capaian indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) di Kabupaten Nunukan tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang signifikan dalam beberapa indikator utama. Laju pertumbuhan penduduk diperoleh dari perhitungan rata-rata pertambahan penduduk per tahun dalam jangka tertentu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nunukan menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat signifikan pada tahun 2023 naik menjadi 15,77% di tahun berjalan. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi menurut kecamatan terjadi di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kecamatan Lumbis Hulu dan Kecamatan Tulin Onsoi. Tren kenaikan signifikan pada laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nunukan adalah dampak keberhasilan

pembangunan sehingga menarik minat pendatang baru utnuk tinggal di Kabupaten Nunukan sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan capaian menjadi 6,41%. Indikator selanjutnya yaitu Total Fertility Rate (TFR) yang merupakan rata rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR di Kabupaten Nunukan telah menunjukkan tren penurunan yang berarti positif dengan capaian 1,85 di tahun 2024, hal ini mengindikasikan keberhasilan program KB dan program pengembangan terkait ibu hamil, perawatan anak, serta program yang berkaitan dengan tingkat kelahiran. Hal ini juga selaras dengan terjadinya kenaikan tren persentase KB aktif, dari angka 67,74% di tahun 2023 menjadi 68,79% di tahun 2024.

I. Perhubungan

Perhubungan merupakan salah satu urusan pelayanan wajib non dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan. Urusan perhubungan penting dalam mendukung mobilitas dan aksesibilitas penduduk, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Kinerja urusan perhubungan direpresentasikan oleh capaian indikator berikut :

Gambar 2.28
Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

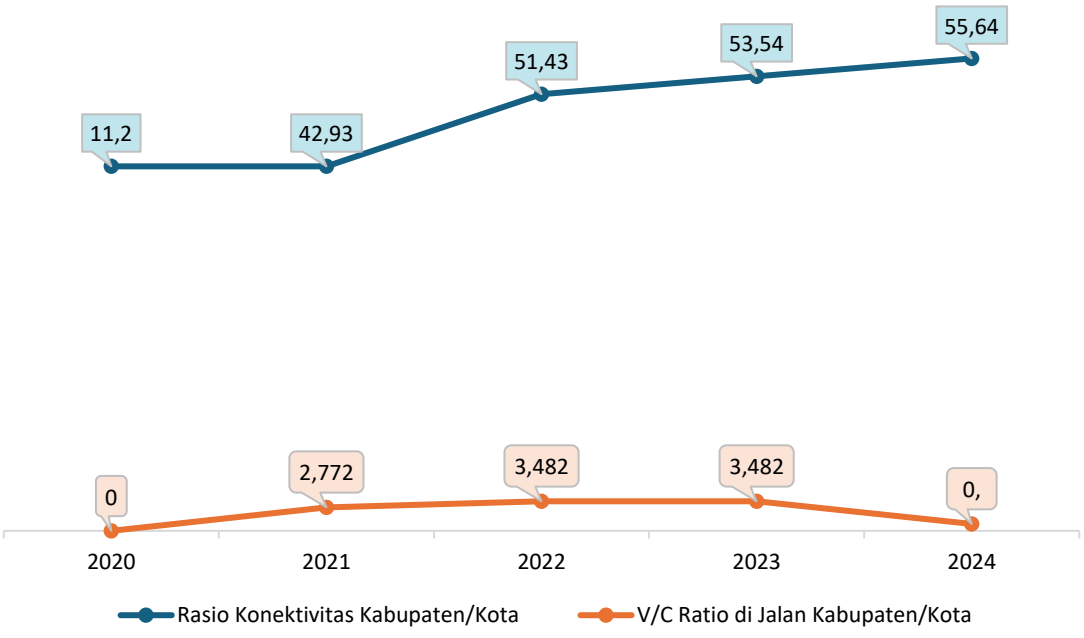

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, 2025

Capaian Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota dan V/C Rasio Kabupaten/Kota di atas menunjukkan tren peningkatan. Kenaikan pada rasio konektivitas kabupaten/ kota menunjukkan tren yang positif, artinya dalam lima tahun terakhir mengalami perkembangan infrastruktur transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, yang meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Nunukan. Hal ini tentunya berdampak pada akses yang lebih baik terhadap layanan publik, pertumbuhan ekonomi dengan dukungan terhadap pariwisata yang lebih baik dan pengurangan disparitas wilayah. Sedangkan capaian V/C rasio di Jalan Kabupaten/Kota pada tahun 2022 - 2023 terpantau stabil pada angka 3,482. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis menjadi 0,8. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas jalan atau berkurangnya kepadatan lalu lintas akibat pengelolaan infrastruktur yang lebih baik kenaikan pada V/C rasio kabupaten/ kota menunjukkan bahwa perlu ada perhatian terhadap pengelolaan kapasitas jalan untuk menghindari kemacetan yang dapat mengganggu efisiensi transportasi.

J. Komunikasi Dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pengelolaan informasi, teknologi komunikasi, dan media. Fokus utama dari urusan ini adalah untuk memastikan akses yang luas dan efisien terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta memfasilitasi komunikasi yang efektif di tingkat individu, masyarakat, dan pemerintahan. Urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Nunukan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 50 tahun 2021 merupakan tupoksi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan. Adapun capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Nunukan secara detail dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.21

Capaian Kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Nunukan tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai indeks SPBE	Indeks	n/a	n/a	2,35	2,61	2,89
2	Jumlah titik akses telekomunikasi yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan	Titik	102	258	259	308	337
	VSAT (Very Small Aperture Terminal)		1	152	152	152	292
	Menara Telekomunikasi/BTS		101	106	107	156	45
3	Jumlah titik akses internet area publik yang difasilitasi Pemda	Unit	7	7	27	30	1
4	Website milik pemerintah daerah	Unit	17	34	35	37	1

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Nunukan, 2025

Capaian Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mulai tercatat pada tahun 2023 dengan skor 2,61 dan meningkat menjadi 2,89 di tahun 2024, menunjukkan kemajuan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi. Jumlah titik akses telekomunikasi di wilayah Kabupaten Nunukan juga mengalami peningkatan, dari 308 titik pada tahun 2023 menjadi 337 titik pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh penambahan fasilitas VSAT *(Very Small Aperture Terminal)* yang melonjak dari 152 unit pada tahun 2023 menjadi 292 unit di tahun 2024.

Selain itu, fasilitas akses internet publik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah juga mengalami penurunan dari 30 titik pada tahun 2023 menjadi 1 titik di tahun 2024 dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap internet gratis. Jumlah website milik pemerintah daerah pun menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun 2020 - 2023, namun di tahun 2024 hanya terdapat 1 unit, dalam mendukung transparansi informasi dan pelayanan publik berbasis digital. Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah

Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pemerintahan yang lebih modern dan pelayanan publik yang lebih efektif.

K. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah sektor yang penting dalam ekonomi suatu negara, terutama dalam menciptakan lapangan kerja,mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Koperasi dan UKM memiliki peran strategis dalam menggerakkanperekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 47 Tahun 2021. Adapun capaian indikator urusankoperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat melalui grafik berikut :

Gambar 2.29
Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

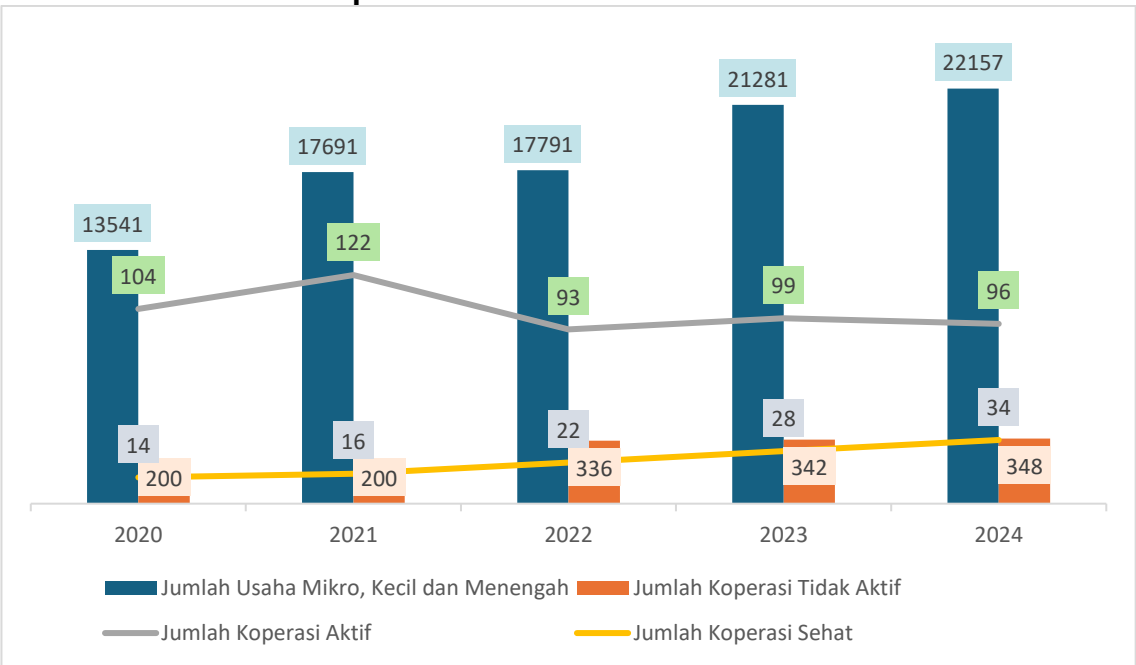

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nunukan, 2024

Gambar 2.29 menunjukkan capaian indikator urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024. Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 yaitu 96 mengalami penurunan dari tahun 2023. Sementara itu jumlah koperasi sehat di Kabupaten Nunukan selama tahun 2020-2024 meningkat namun tidak terlalu signifikan. Terkait jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 22.157 UMKM. Kondisi ini menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi lokal yang signifikan di Kabupaten Nunukan. Masyarakat banyak yang tertarik untuk memulai usaha sendiri karena melihat peluang bisnis yang ada. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Nunukan yang signifikan dapat terjadi karena adanya kemajuan teknologi dan akses internet yang lebih baik sehingga membuka peluang baru bagi UMKM untuk berjualan secara online dan melalui pemasaran digital.

L. Penanaman Modal

Penanaman Modal merupakan aspek penting dalam perekonomian yang bertujuan untuk menarik, mengelola, dan mengembangkan investasi di suatu daerah atau negara. Urusan ini mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya tarik investasi, serta memastikan pelaksanaan investasi berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian lokal. Urusan penanaman modal merupakan tugas dan wewenang dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Nunukan sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 49 Tahun 2021. Adapun capaian realisasi investasi di Kabupaten Nunukan dapat dilihat melalui grafik berikut :

Gambar 2.30
Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 –2024

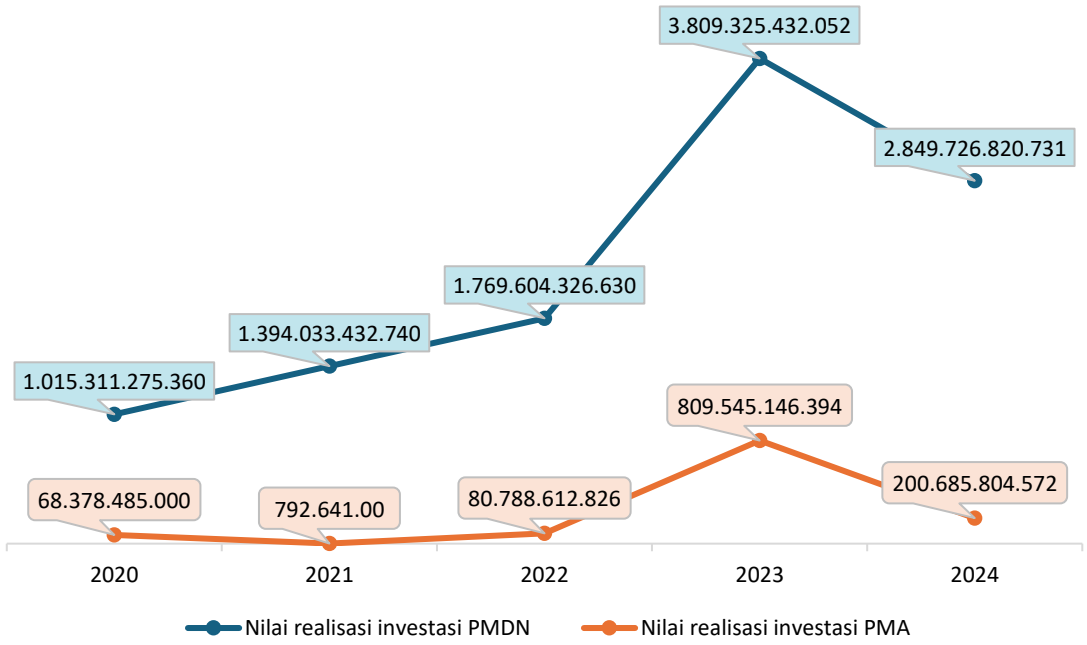

Sumber : DPMPTSP Kab. Nunukan, 2025

Grafik tersebut menunjukkan tren realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024. Nilai realisasi investasi PMDN mengalami peningkatan signifikan dari Rp1,01 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp3,8 triliun pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, nilai ini mengalami penurunan menjadi Rp2,84 triliun. Sementara itu, realisasi investasi PMA menunjukkan tren yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai investasi mencapai Rp68,3 miliar, namun mengalami penurunan drastis menjadi Rp7,96 miliar pada 2021. Tahun 2022 menunjukkan pemulihan dengan investasi mencapai Rp80,78 miliar, dan melonjak signifikan pada tahun 2023 hingga Rp809,54 miliar. Namun, angka ini kembali turun ke Rp200,68 miliar pada 2024.

Gambar 2.31
Capaian Indikator Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan serta ICOR Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

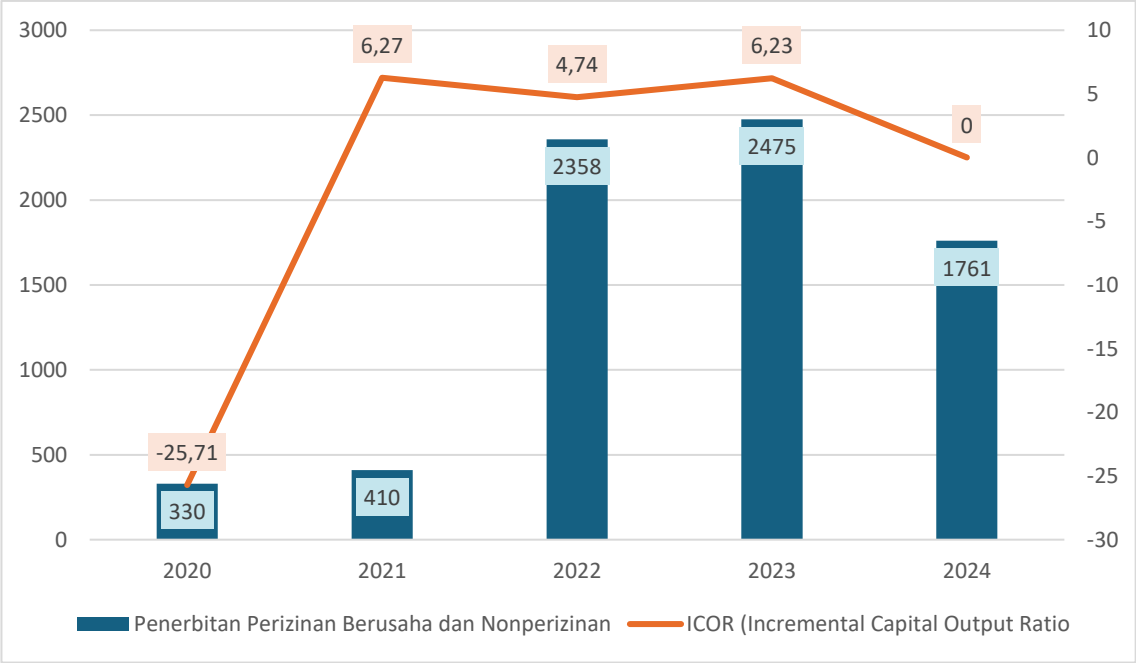

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik di atas menggambarkan tren peningkatan signifikan dalam penerbitan perizinan berusaha dan non-perizinan di Kabupaten Nunukan. Pada tahun 2020, jumlah izin yang diterbitkan masih rendah, hanya 330 izin, dengan nilai ICOR yang sangat negatif (-25,71), menunjukkan efisiensi investasi yang sangat rendah pada tahun tersebut. Tahun 2021 menunjukkan sedikit peningkatan dengan 410 izin yang diterbitkan, meskipun nilai ICOR naik drastis menjadi 6,27, menandakan investasi mulai lebih produktif. Puncak penerbitan izin terjadi pada 2022 dan 2023 dengan jumlah masing masing 2.358 dan 2.475 izin. Meskipun jumlah izin meningkat pesat, nilai ICOR menunjukkan sedikit fluktuasi, yaitu 4,74 pada 2022 dan kembali naik menjadi 6,23 pada 2023. Pada 2024, jumlah izin yang diterbitkan mengalami penurunan menjadi 1.761 izin, sementara nilai ICOR mencapai 0, yang bisa mengindikasikan investasi yang lebih efisien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau adanya perubahan dalam struktur ekonomi yang mempengaruhi perhitungan efisiensi modal.

.

M. Kepemudaan Dan Olahraga

Kepemudaan dan Olahraga adalah sektor penting yang bertujuan untuk membina, mengembangkan, dan memberdayakan potensi pemuda serta mempromosikan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Kedua aspek ini sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat, berdaya saing, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa. Atlet berprestasi adalah atlet yang telah memenangkan kejuaraan di tingkatnasional bahkan internasional. Jumlah atlet berprestasi dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembinaan atlet-atlet pada tahun-tahun berikutnya. Perhitungan jumlah atlet berprestasi merupakan perhitungan akumulatif dari seluruh cabang olahraga. Sementara, pemuda berprestasi adalah individu muda yang telah mencapai prestasi luar biasa atau signifikan dalam berbagai bidang, seperti akademik, olahraga, seni, sains, teknologi, kepemimpinan, atau kewirausahaan. Prestasi ini dapat diakui pada tingkat lokal, nasional, atau internasional dan menunjukkan komitmen, bakat, kerja keras, serta dedikasi yang luar biasa dari individu tersebut.

Gambar 2.32
Jumlah Atlit Berprestasi dan Jumlah Pemuda Berprestasi di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

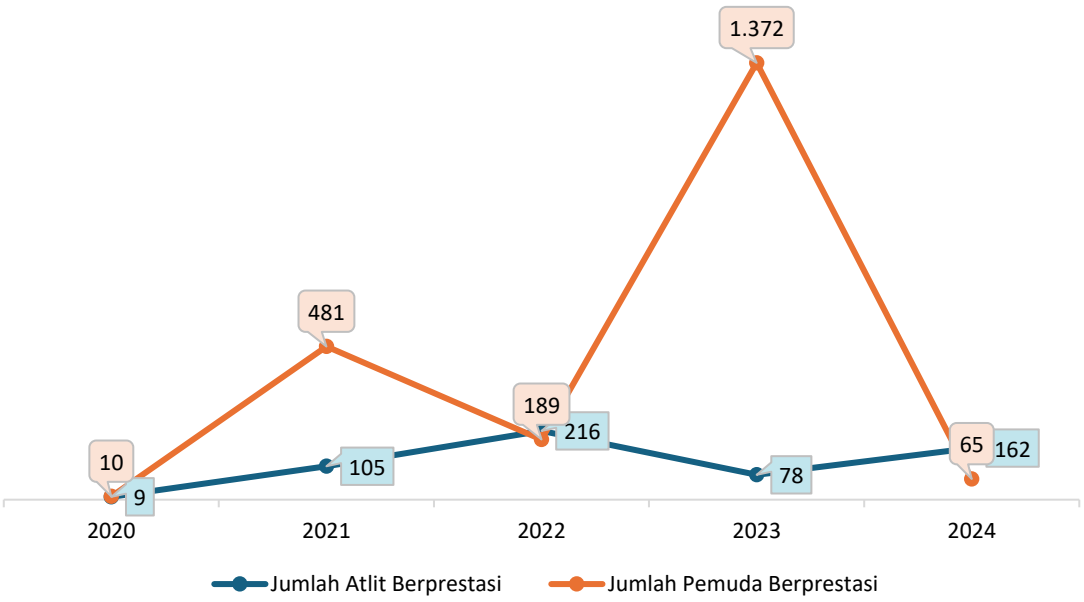

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik menunjukkan jumlah atlet berprestasi dan pemuda berprestasi di Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024.

Gambar 2.33
Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Pemuda dan Jumlah Wirausaha Muda di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

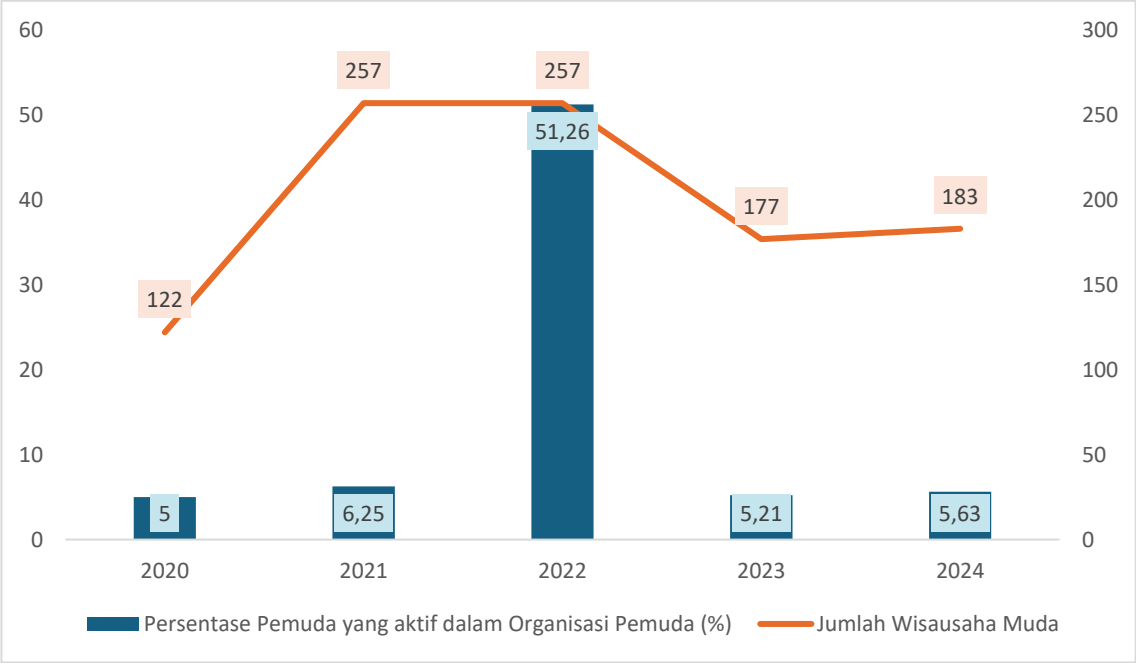

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik menunjukkan persentase pemuda yang aktif dalam organisasi pemuda dan jumlah wirausaha muda di Kabupaten Nunukan periode 2020 2024. Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi pemuda menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2022, mencapai 51,26%, setelah sebelumnya hanya berada pada kisaran 5% hingga 6,25% pada tahun 2020 dan 2021. Namun, setelah puncaknya pada tahun 2022, angka ini kembali turun drastis pada tahun 2023 menjadi 5,21%, dan sedikit meningkat menjadi 5,63% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya lonjakan keaktifan pemuda dalam organisasi pada tahun 2022, yang mungkin disebabkan oleh program atau kebijakan tertentu, namun kurang berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, jumlah wirausaha muda mengalami kenaikan dari 122 orang pada tahun 2020 menjadi 257 orang pada tahun 2021 dan 2022, sebelum mengalami penurunan ke 177 orang pada tahun 2023, dan sedikit meningkat kembali ke 183 orang pada tahun 2024. Korelasi antara kedua indikator ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas

pemuda dalam organisasi tidak selalu berjalan seiring dengan pertumbuhan jumlah wirausaha muda. Tahun 2022, misalnya, meskipun terjadi lonjakan partisipasi dalam organisasi pemuda, jumlah wirausaha muda tetap stagnan di angka 257 orang. Sebaliknya, pada tahun 2023 dan 2024, saat partisipasi dalam organisasi menurun drastis, jumlah wirausaha muda masih relatif stabil di sekitar 177 hingga 183 orang.

N. Statistik

Urusan Statistik adalah bidang penting dalam pemerintahan yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan penyebaran data statistik untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan publik. Statistik yang akurat dan terpercaya sangat penting untuk memahami kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu daerah atau negara. Urusan Statistik di Kabupaten Nunukan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 50 tahun 2021 merupakan tupoksi dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Nunukan. Adapun capaian indikator statistik Kabupaten Nunukan tahun 2019 - 2023 sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

Gambar 2.34
Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

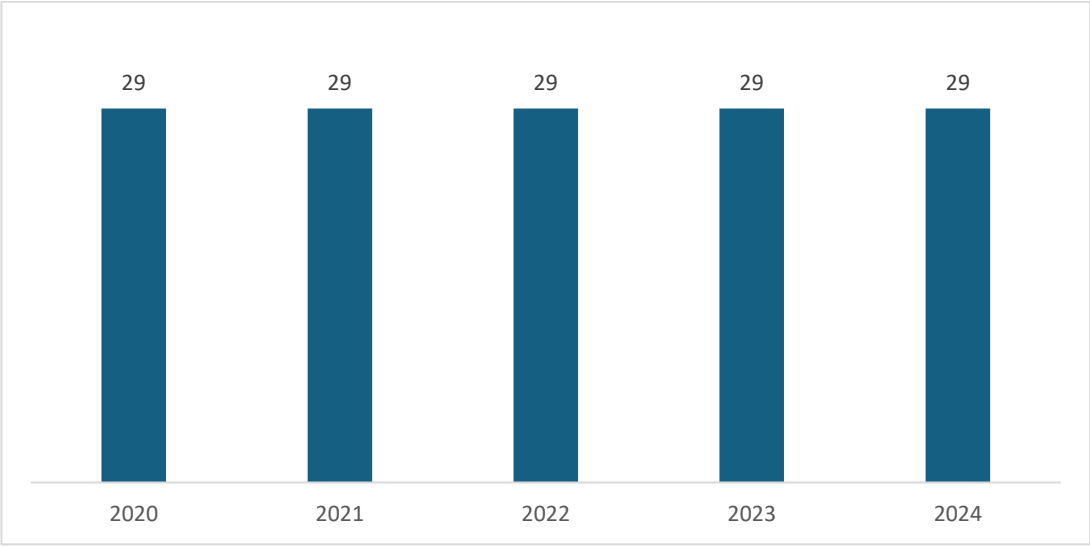

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Nunukan, 2025

Grafik di atas menunjukkan cakupan ketersediaan data statistik sektoral di Kabupaten Nunukan selama periode 2020 hingga 2024. cakupan ketersediaan data statistik sektoral di Kabupaten Nunukan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kondisi yang stabil. Jumlah data statistik sektoral yang tersedia tetap berada di angka 29 setiap tahunnya tanpa mengalami peningkatan maupun penurunan. Stabilitas jumlah data ini mencerminkan bahwa Kabupaten Nunukan telah mempertahankan ketersediaan data statistik sektoral dengan konsisten dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

O. Persandian

Urusan Persandian memegang peran penting dalam menjaga keamanan informasi di lingkungan pemerintahan dan organisasi lainnya. Tugas utama bidang ini adalah melindungi komunikasi dan data melalui teknik sandi guna mencegah akses ilegal serta menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Di Kabupaten Nunukan, pelaksanaan urusan persandian menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 50 Tahun 2021. Namun, capaian indikator terkait urusan persandian untuk periode 2020 hingga 2024 tidak dapat dianalisis lebih lanjut karena tidak tersedianya data yang mendukung. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengumpulan dan pelaporan data untuk mendukung evaluasi efektivitas kebijakan di bidang persandian.

P. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan adalah sektor penting yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya serta nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara. Kebudayaan mencakup berbagai aspek seperti seni, tradisi, bahasa, sejarah, dan adat istiadat yang membentuk identitas dan karakter masyarakat. Kegiatan kebudayaan, seperti festival, pameran seni, dan pelatihan tradisional, berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan generasi muda dengan akar budaya yang dimiliki dan memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan tradisional tidak hilang di tengah modernisasi dan globalisasi. urusan kebudayaan juga berperan dalam mempromosikan nilai-nilai budaya kepada dunia luar, yang dapat meningkatkan citra dan daya tarik pariwisata suatu daerah. Adapun capaian indikator urusan

kebudayaan Kabupaten Nunukan tahun 2020 - 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	1	1	1	1	1
2	Karya budaya, situs, dan cagar budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Objek	65	65	65	65	
3	Jumlah kelompok, sanggar, organisasi seni	Kelompok	n/a	111	111	111	
4	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Objek	0	0	4	5	6

Sumber : Disbudporapar Kabupaten Nunukan, 2025

Tabel di atas menunjukkan capaian indikator urusan kebudayaan di Kabupaten Nunukan selama periode 2020 hingga 2024. Penyelenggaraan festival seni dan budaya secara konsisten diadakan sebanyak satu kali setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Untuk indikator karya budaya, situs, dan cagar budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi, jumlahnya tetap stabil sebanyak 65 objek sampai di tahun 2023. Sementara itu, jumlah kelompok, sanggar, dan organisasi seni mulai tercatat sejak tahun 2021 dengan total 111 kelompok yang konsisten hingga 2023. Adapun jumlah cagar budaya yang ditetapkan menunjukkan tren peningkatan, setiap tahunnya menjadi 6 objek di tahun 2024. Data ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Nunukan.

Q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Untuk itu eksistensi perpustakaan menjadi sangat penting di daerah. Urusan Perpustakaan adalah bidang yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagai pusat informasi, pendidikan, dan budaya. Perpustakaan berperan penting dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat, akses informasi, dan peningkatan literasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten

Nunukan No. 57 Tahun 2021 urusan perpustakaan menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan yang mana capaian indikator kinerjanya dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.23
Capaian Kinerja indikator urusan perpustakaan Kabupaten Nunukan tahun 2020 - 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perpustakaan	47	47	47	145	310
2	Jumlah Koleksi	132.720	192.008	173.974	145.783	170.256
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	5.400	1.629	46.292	5.207	8.287

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan data tersebut, capaian indikator urusan perpustakaan di Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 sebanyak 145 jumlah perpustakaan. Jumlahnya meningkat menjadi 310 perpustakaan pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya upaya besar dalam pengembangan akses layanan perpustakaan di wilayah tersebut. Sementara itu, jumlah koleksi buku di perpustakaan menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2022 jumlah koleksi buku di perpustakaan sebanyak 173.974 dan 145.783 di tahun 2023 sebelum akhirnya kembali meningkat menjadi 170.256 pada tahun 2024. Tren peningkatan jumlah perpustakaan yang sangat signifikan dalam dua tahun terakhir mengindikasikan komitmen yang kuat dalam pengembangan fasilitas literasi di Kabupaten Nunukan. Namun, fluktuasi jumlah koleksi buku menunjukkan adanya dinamika dalam pengelolaan dan distribusi bahan bacaan, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti pengadaan, penyusutan, atau redistribusi koleksi.

R. Kearsipan

Kearsipan adalah proses pengelolaan dan pelestarian dokumen atau arsip yang memiliki nilai sejarah, legal, atau administratif. Pengelolaan arsip yang baik sangat penting untuk memastikan informasi berharga tetap tersedia dan terjaga keutuhannya untuk generasi mendatang. Urusan Kearsipan memainkan peran penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional. Arsip yang dikelola dengan baik dapat membantu dalam pengambilan keputusan,

pelaporan, dan pemenuhan kewajiban hukum. Selain itu, arsip juga berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan sejarah, yang dapat digunakan untuk penelitian, pembelajaran, dan pelestarian warisan budaya. Sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 57 Tahun 2021 urusan kearsipan merupakan bagian tugas dan fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan. Adapun capaian indikator urusan kearsipan secara rinci dapat dilihat melalui grafik berikut :

Gambar 2.35
Capaian Indikator urusan kearsipan Kabupaten Nunukan tahun 2020 - 2024

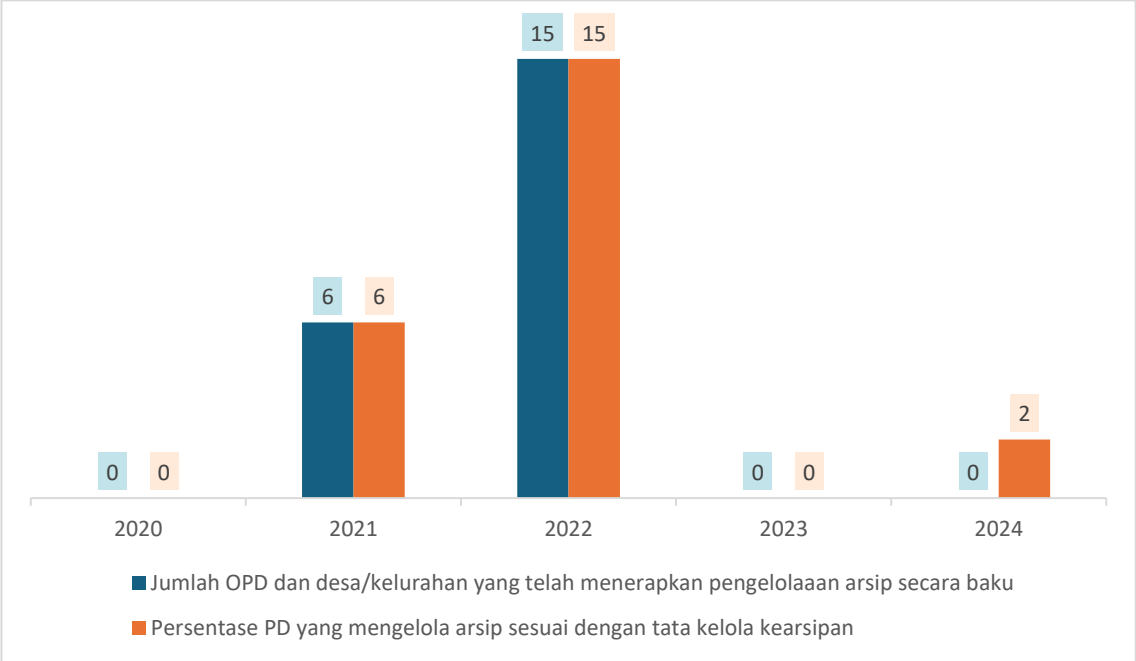

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan, 2024

Grafik ini menunjukkan dua indikator utama, yaitu jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan desa/kelurahan yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku, serta persentase Perangkat Daerah (PD) yang mengelola arsip sesuai dengan tata kelola kearsipan. Capaian indikator urusan kearsipan di Kabupaten Nunukan. Pada tahun tahun 2024, mulai terlihat sedikit peningkatan kembali, dengan 2% PD yang kembali menerapkan pengelolaan arsip sesuai standar. Perkembangan ini mencerminkan bahwa meskipun sempat mengalami kemajuan, masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan arsip di Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya

lebih lanjut untuk memastikan pengelolaan arsip dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

2.1.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Pemerintah Pilihan

A. Kelautan Dan Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014, mendefinisikan Kelautan sebagai hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Sedangkan deskripsi Perikanan menurut dang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, dengan berfokus pada urusan perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Kinerja penyelenggaraan urusan perikanan dapat diukur dari jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya.

Kabupaten Nunukan memiliki panjang garis pantai sepanjang 547,7 km pada tahun 2021 atau menjadi yang tertinggi ketiga di Provinsi Kalimantan Utara. Sementara itu, luas pesisir Kabupaten Nunukan adalah sebesar 533.155,4 hektare atau menjadi yang tertinggi kedua di Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini menjadikan Kabupaten Nunukan memiliki potensi perikanan tangkap perikanan laut yang besar. Potensi ini harus diikuti dengan ketersediaan sarana prasarana, khususnya perahu dan alat penangkap ikan untuk meningkatkan jumlah produksi.

Gambar 2.36
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

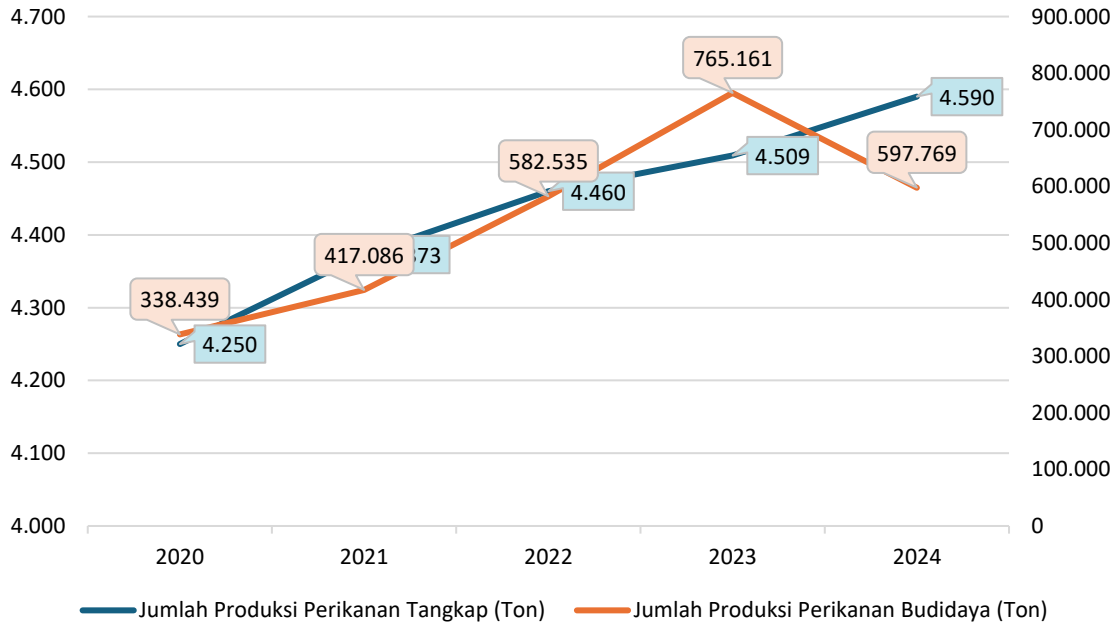

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Nunukan, 2025

Capaian produksi perikanan budidaya mengalami pertumbuhan signifikan dari 765.161 ton pada 2023, sebelum menurun menjadi 597.769 ton di 2024. Penurunan di tahun terakhir ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan musim, gangguan cuaca ekstrem, penyakit ikan, atau kendala teknis budidaya. Sementara itu, produksi perikanan tangkap menunjukkan peningkatan konsisten setiap tahun, dari 4.509 ton pada 2023 menjadi 4.590 ton pada 2024. Meskipun skalanya lebih kecil dibanding budidaya, stabilitas ini menunjukkan keberlanjutan potensi sumber daya perikanan tangkap yang masih cukup terjaga. Namun demikian, perlindungan ekosistem laut, pengawasan penangkapan, serta pemanfaatan teknologi tangkap yang ramah lingkungan tetap menjadi perhatian. Adapun terkait capaian tingkat konsumsi ikan dan cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Nunukan secara rinci dapat dilihat melalui grafik berikut:

Gambar 2.36
Cakupan Bina Kelompok Nelayan dan Tingkat Konsumsi Ikan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

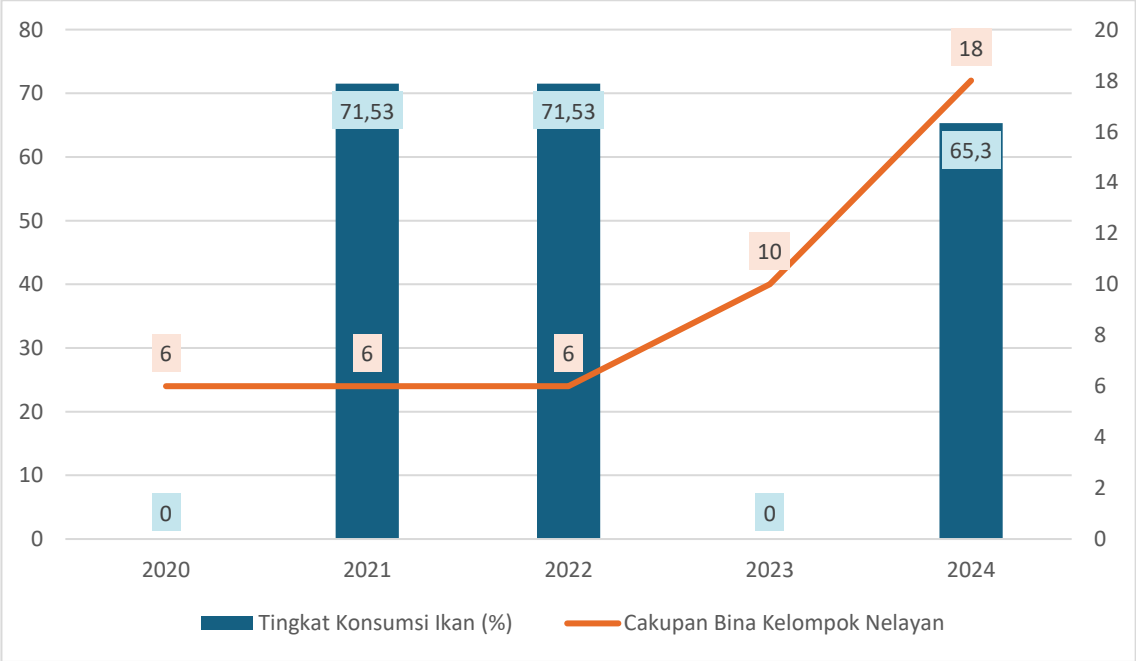

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Nunukan, 2025

Berdasarkan Gambar 2.36 terlihat bahwa Cakupan bina kelompok nelayan mengalami peningkatan yang signifikan dari angka stagnan 10 kelompok pada 2023, menjadi 18 kelompok pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan nelayan kecil dan penguatan kelembagaan masyarakat pesisir, yang sangat penting dalam menjaga kesinambungan produksi dan pengelolaan sumber daya laut secara kolektif. Numun, Tingkat konsumsi ikan masyarakat mengalami penurunan, dari 71,53% pada 2021 menjadi 65,3% pada 2024. Penurunan ini bisa diakibatkan oleh distribusi hasil tangkapan yang belum merata, perubahan pola konsumsi, atau keterbatasan akses masyarakat terhadap ikan segar, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan. Padahal konsumsi ikan yang tinggi sangat penting untuk ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

B. Pariwisata

Kegiatan pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang dapat menjadi salah satu penggerak kegiatan dan kondisi ekonomi di suatu wilayah. Jumlah kunjungan wisata menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan dari

pembangunan di sektor wisata. Kunjungan wisata merupakan gambaran jumlah wisatawan yang berkunjung pada suatu objekwisata di suatu waktu dan daerah tertentu. Minat kunjungan wisata dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pelayanan, sarana prasarana, keamanan, serta objek dan daya tarik wisata. Jumlah kunjungan wisata menjadi salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan dari pembangunan di sektor wisata. Urusan Pariwisata di Kabupaten Nunukan menjadi tugas dan kewenangan dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan. Berikut grafik kunjungan wisata di Kabupaten Nunukan.

Gambar 2.37
Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 – 2024

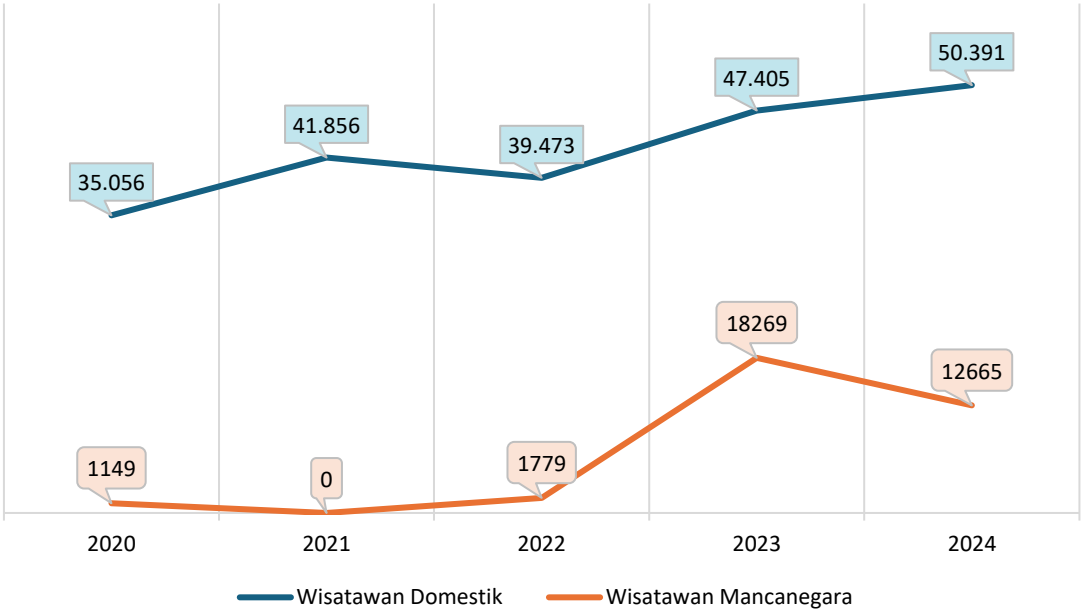

Sumber : Disbudporapar Kabupaten Nunukan, 2025

Jumlah Data kunjungan wisatawan di Kabupaten Nunukan menunjukkan tren yang fluktuatif, baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Pada tahun 2024, jumlah wisatawan domestik tercatat sebanyak 50.391 orang, sementara wisatawan mancanegara pada tahun 2024 mencapai 12.665 orang.

Tabel 2.24
Capaian Indikator Urusan Pariwisata di Kabupaten Nunukan
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lama kunjungan wisatawan	Hari	2	1	1	2	2
2	Jumlah objek wisata	Objek	81	81	81	81	75
3	PAD sektor pariwisata	Rupiah	0	7.899.745,75	10,665,126,564	22,218,749,250	10,689,413,304

Sumber : Disbudporapar Kabupaten Nunukan,2025

Data capaian indikator urusan pariwisata di Kabupaten Nunukan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang bervariasi di beberapa aspek utama. Lama kunjungan wisatawan menunjukkan fluktuasi, di mana pada tahun 2020 wisatawan rata-rata menghabiskan 2 hari di Kabupaten Nunukan, kemudian menurun menjadi 1 hari pada tahun 2021 dan 2022, sebelum kembali meningkat menjadi 2 hari pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, jumlah objek wisata di Kabupaten Nunukan relatif stabil pada angka 81 objek pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan jumlah objek wisata menjadi 75 objek. Dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata, terjadi penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023 dengan capaian sebesar Rp22.218.749.25. Namun, pada tahun 2024, PAD sektor pariwisata mengalami penurunan menjadi Rp10.689.413.304.

C. Pertanian

Pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi perekonomian dan ketahanan pangan suatu negara. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti budidaya tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Pertanian tidak hanya berperan dalam menyediakan bahan makanan pokok seperti beras, gandum, sayuran, dan buah-buahan, tetapi juga menghasilkan bahan baku untuk industri dan sumber mata pencaharian bagi banyak orang, terutama di pedesaan. Urusan Pertanian merupakan bidang yang berfokus pada pengelolaan, pengembangan, dan peningkatan sektor pertanian untuk memastikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, serta menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan utama dari urusan ini adalah untuk memaksimalkan produksi pertanian,

mendukung inovasi teknologi, dan menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 54 tahun 2021 tugas dan fungsi urusan pertanian merupakan bagian dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana realisasi capaian indikator urusan pertanian yang tertuang pada grafik berikut :

Gambar 2.38
Jumlah Kelompok Tani Aktif di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 – 2024

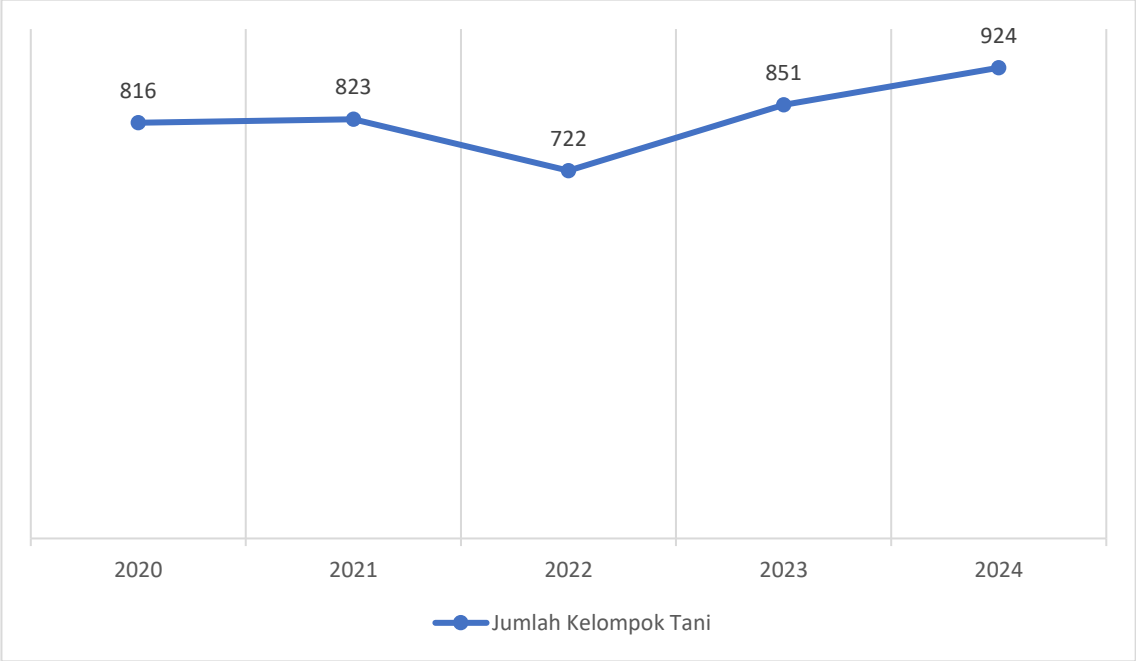

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, 2025

Grafik jumlah kelompok tani aktif di Kabupaten Nunukan pada tahun 2023, terdapat 722 kelompok tani aktif yang kemudian mengalami peningkatan menjadi 924 kelompok, angka ini menjadi tertinggi selama periode tersebut. Peningkatan signifikan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengaktifkan kembali kelompok tani yang tidak aktif serta mendorong terbentuknya kelompok baru guna memperkuat sektor pertanian di Kabupaten Nunukan.

D. Perdagangan

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan perdagangan di Kabupaten Nunukan. Kinerja urusan perdagangan Kabupaten Nunukan

direpresentasikan oleh capaian indikator berikut :

Gambar 2.39
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

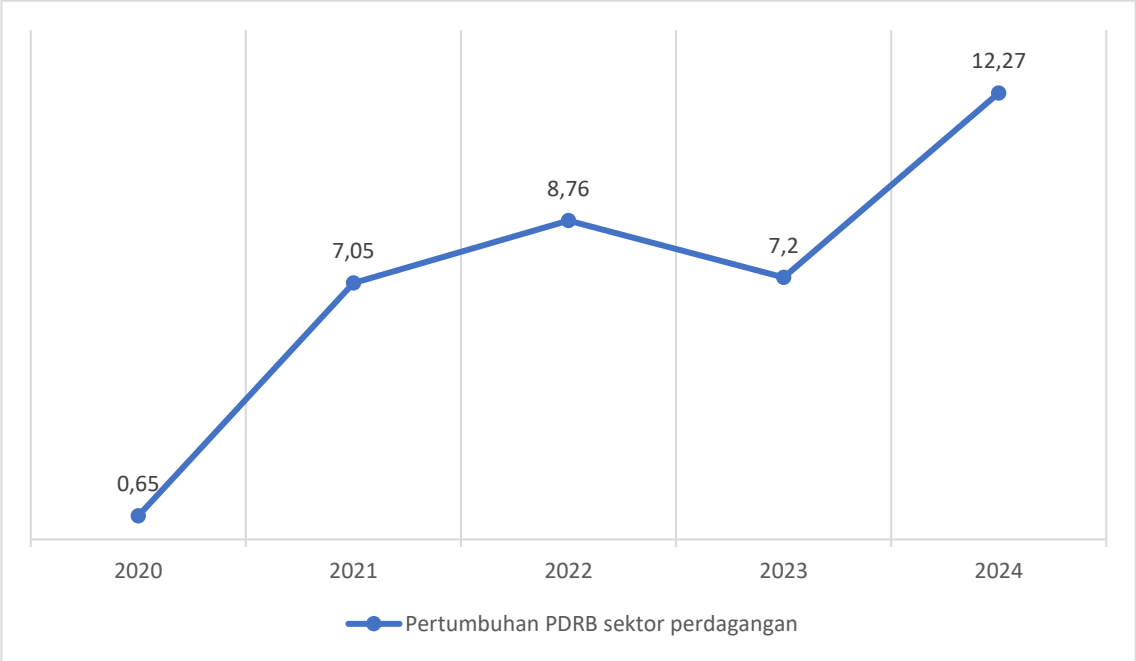

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nunukan, 2025

Capaian pertumbuhan PDRB sektor perdagangan menunjukkan peningkatan dari tahun 2023 dengan angka 7,2 meningkat menjadi 12,27 pada tahun 2024.Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menunjukkan posisi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian wilayah terutama di Kabupaten Nunukan. Sektor perdagangan diwakili dengan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam struktur PDRB. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terdiri dari dua subsektor, yakni subsektor perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya; dan subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini akibat adanya perkembangan inflasi, rendahnya pendapatan perkapita (UMR) dan menurunnya jumlah produksi dan jasa produk unggulan daerah.

E. Perindustrian

Perindustrian merupakan salah satu urusan pilihan yang diampun oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan. Kinerja urusan perindustrian Kabupaten Nunukan pada Tahun 2019 - 2023 direpresentasikan oleh capaian indikator berikut :

Gambar 2.40

Capaian Indikator Urusan Perindustrian di Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024

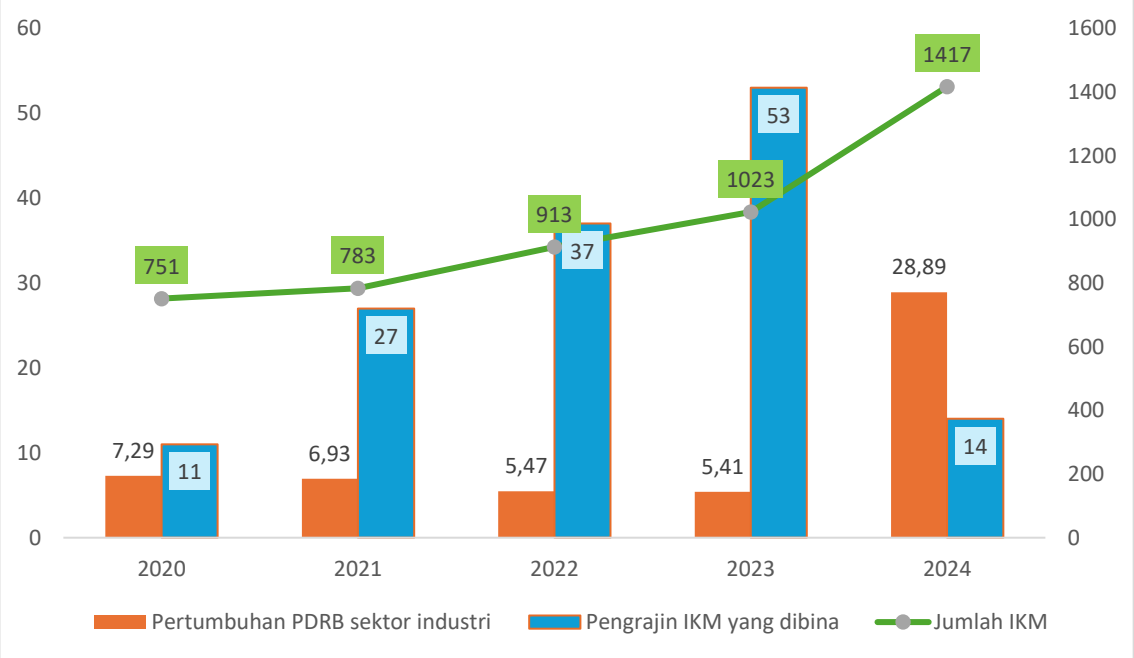

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Nunukan, 2024

Grafik perkembangan IKM Kabupaten Nunukan menunjukkan dinamika yang menarik dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan PDRB sektor industri relatif menurun pada tahun 2023 (5,41%), sebelum melonjak drastis menjadi 28,29% pada tahun 2024. Kenaikan tajam ini mengindikasikan adanya terobosan besar atau efek percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi, serta kemungkinan adanya investasi baru atau penguatan kapasitas produksi lokal yang signifikan. Jumlah pengrajin IKM yang dibina menjadi 53 orang pada 2023, mencerminkan peningkatan intensitas pendampingan dan pembinaan dari pemerintah daerah. Namun, jumlah ini justru turun drastis pada 2024 menjadi 14 orang, di tengah lonjakan pertumbuhan PDRB sektor industri. Hal ini mengisyaratkan bahwa peningkatan output industri tidak sepenuhnya berasal dari sektor IKM yang

dibina, melainkan mungkin dari sektor industri menengah lainnya, atau usaha yang belum terfasilitasi oleh program pembinaan resmi. Jumlah IKM secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang stabil dan signifikan, dari 751 unit pada 2020 menjadi 1.417 unit pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berwirausaha terus meningkat, yang dapat dipicu oleh kebutuhan ekonomi, peluang pasar lokal, serta peran digitalisasi dalam mendorong UMKM/IKM. Namun, kesenjangan antara jumlah IKM yang tumbuh dengan yang mendapat pembinaan menunjukkan perlunya penguatan program pembinaan yang lebih merata, baik secara wilayah maupun sektor usaha.

F. Transmigrasi

Transmigrasi menjadi salah satu urusan yang penting terutama dalam konteks redistribusi penduduk, pembangunan wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Urusan transmigrasi mencakup berbagai aspek yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasi program transmigrasi. Tugas dan fungsi dari urusan transmigrasi di Kabupaten Nunukan merupakan bagian dari Dinas Transmigrasi dan TenagaKerja Kabupaten Nunukan. Adapun capaian indikator urusan transmigrasi dapat dilihat melalui grafik berikut :

Gambar 2.41
Jumlah Transmigran yang Ditempatkan di Kabupaten Nunukan
Tahun 2020 - 2024

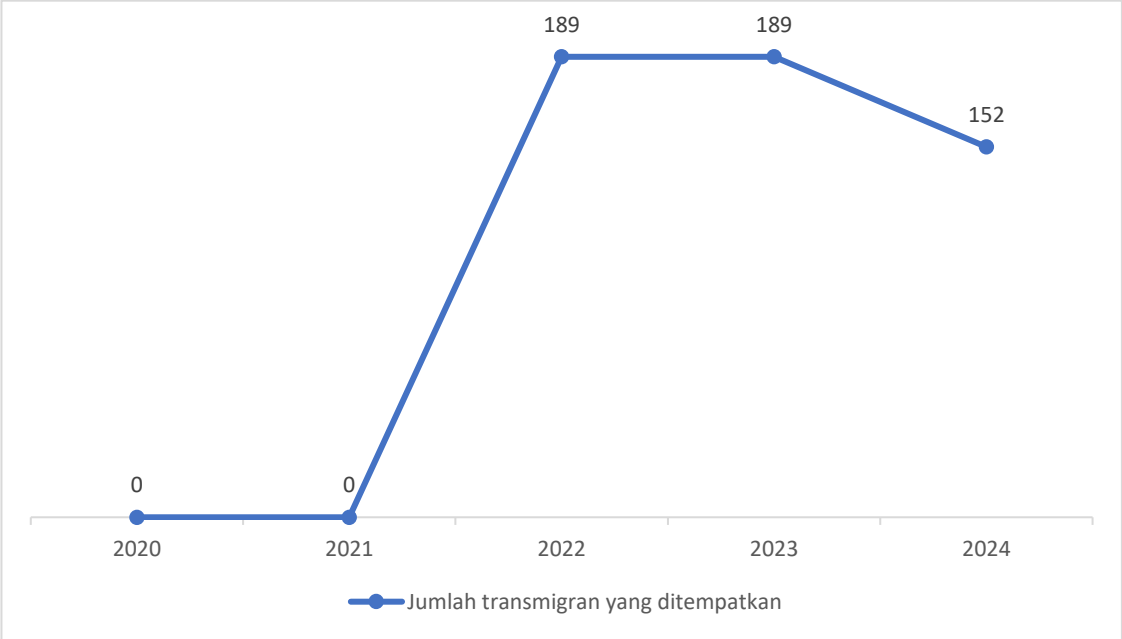

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan, 2025

Berdasarkan data capaian indikator urusan transmigrasi di Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024, jumlah transmigran yang ditempatkan mengalami penurunan dari tahun 2023 sebanyak 189 transmigran. Kemudian, pada tahun 2024 jumlahnya mengalami penurunan menjadi 152 transmigran. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan pemerintah terkait transmigrasi, ketersediaan lahan pemukiman baru, serta kesiapan infrastruktur dan dukungan sosial di daerah tujuan. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2024, secara keseluruhan tren penempatan transmigran di Kabupaten Nunukan menunjukkan adanya kebijakan aktif dalam mendukung program transmigrasi.

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Semakin tinggi daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun akan semakin membaik. Jadi hakikatnya daya saing daerah merupakan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam mentransformasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan yakni kesejateraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Kehadiran IDSD merupakan upaya untuk mengukur dan mengetahui kondisi daya saing suatu daerah ditinjau dari komponen lingkungan pendukung, Sumber Daya Manusia (SDM), Pasar, dan Ekosistem Inovasi.

Pengukuran pada IDSD 2023 ini mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan *Global Competitiveness Index (GCI)* dari *World Economic Forum atau WEF* (Schwab, 2019). Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data. Dengan kerangka ini, IDSD tahun 2023 selaras dengan GCI sehingga dapat digunakan *stakeholder* global untuk mengukur GCI bagi Indonesia.

Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD 2023 distandardisasi dengan rumus min-max sehingga didapat skor 0–5 pada seluruh indikator. Skor pilar daya saing merupakan agregasi skor indikator pembentuknya yang dihitung dengan menggunakan rata-rata aritmatik. Setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga diberikan bobot yang sama dalam perhitungan skor indeks. IDSD 2023 diharapkan menjadi data dasar dalam melakukan riset dan menyusun kebijakan terkait daya saing daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan.

Pada perhitungan IDSD juga terdapat komponen Ekosistem Inovasi, yang mana capaian di tahun 2023 masih rendah. Rendahnya skor kapabilitas inovasi ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan, apalagi mengingat inovasi daerah juga dinilai oleh Kemendagri melalui Penilaian Inovasi Daerah, dan Kemenpanrb melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, serta menjadi bagian dari komponen yang dinilai dalam Indeks Reformasi Birokrasi, dan SAKIP. Berikut ini disajikan detail capaian skor IDSD 2023 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.23
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara Tahun 2023



3,26
SKOR IDSD 2023
PROVINSI
KALIMANTAN UTARA



1 kab/kota
⩾ skor provinsi

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
PROV. KALIMANTAN UTARA	4,55	1,94	3,98	3,79	3,97	3,92	1,81	4,53	1,54	4,06	3,30	1,81	3,26
RATA-RATA KAB/KOTA	4,30	1,94	3,86	3,41	4,01	3,53	1,79	4,15	0,42	4,16	3,35	1,33	3,08
MALINAU	4,25	1,35	2,96	3,51	3,96	3,34	1,11	3,44	0,25	4,04	4,43	0,92	2,80
BULUNGAN	4,22	2,14	3,51	3,65	4,05	3,59	1,97	4,65	0,51	4,21	4,48	1,82	3,23
TANA TIDUNG	-	1,70	4,17	3,21	3,94	3,40	1,07	4,41	0,17	3,70	2,67	0,49	-
NUNUKAN	4,36	2,01	3,71	3,46	3,96	3,26	0,85	3,99	0,47	4,35	2,53	0,89	2,82
KOTA TARAKAN	4,37	2,50	4,95	3,23	4,16	4,07	3,97	4,25	0,72	4,50	2,63	2,53	3,49

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2024

Berdasarkan hasil pengukuran IDSD tahun 2023 pada Gambar 2.41 di atas, Kabupaten Nunukan berada diurutan tertinggi ke-3 tingkat

Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara dengan skor IDSD 2,82 atau tingkat capaian 56,40%. Nilai tertinggi IDSD Kabupaten Nunukan tahun 2023 terdapat pada komponen Lingkungan Pendukung yakni Pilar 1 “Institusi” dengan skor 4,36, sementara yang terendah pada komponen Pasar yakni Pilar 9 “Sistem Keuangan” dengan skor 0,47.

Capaian Skor IDSD Kabupaten Nunukan tahun 2023, berada di bawah rata-rata skor Kabupaten/Kota se-Kalimatan Utara yang berada diangka 3,08. Dengan perolehan skor tersebut, maka Kabupaten Nunukan berada di bawah Skor IDSD Provinsi Kalimantan Utara dengan selisih sebesar 0,44 poin serta IDSD Nasional dengan selisih sebesar 0,62. Masih rendahnya capaian IDSD Kabupaten Nunukan akan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah.

Selain capaian IDSD, aspek daya saing daerah dapat dinilai dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas/infrastruktur wilayah, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia (SDM).

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek Daya Saing Daerah pada fokus kemampuan ekonomi daerah dapat tercermin dari kondisi Rata-rata Pengeluaran Per Kapita dan Nilai Tukar Petani (NTP).

A. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 jumlah Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Penduduk Kabupaten Nunukan adalah sebesar Rp.1.494.542,- per bulan. Dalam sebulan rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Nunukan digunakan untuk konsumsi makanan (*food*) sebesar Rp.744.828,- atau 49,84 persen, sedangkan selebihnya Rp.749.714,- atau 50,16 persen untuk bukan makanan (*non food*).

Gambar 2.41
Struktur Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan
Kabupaten Nunukan Tahun 2023

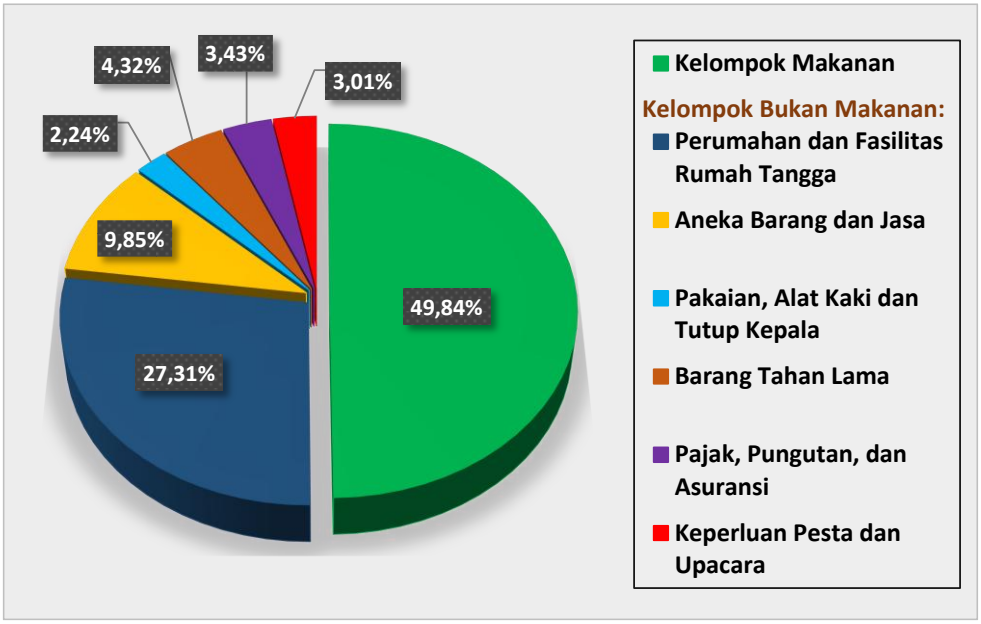

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2024

Untuk mengetahui posisi kemampuan rata-rata pengeluaran/ konsumi per kapita Kabupaten Nunukan tahun 2023 dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Kalimantan Utara serta Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara, disajikan pada grafik berikut ini.

Gambar 2.42
Rata-rata Pengeluaran Per kapita Per Bulan
Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota
Di Kalimantan Utara Tahun 2023

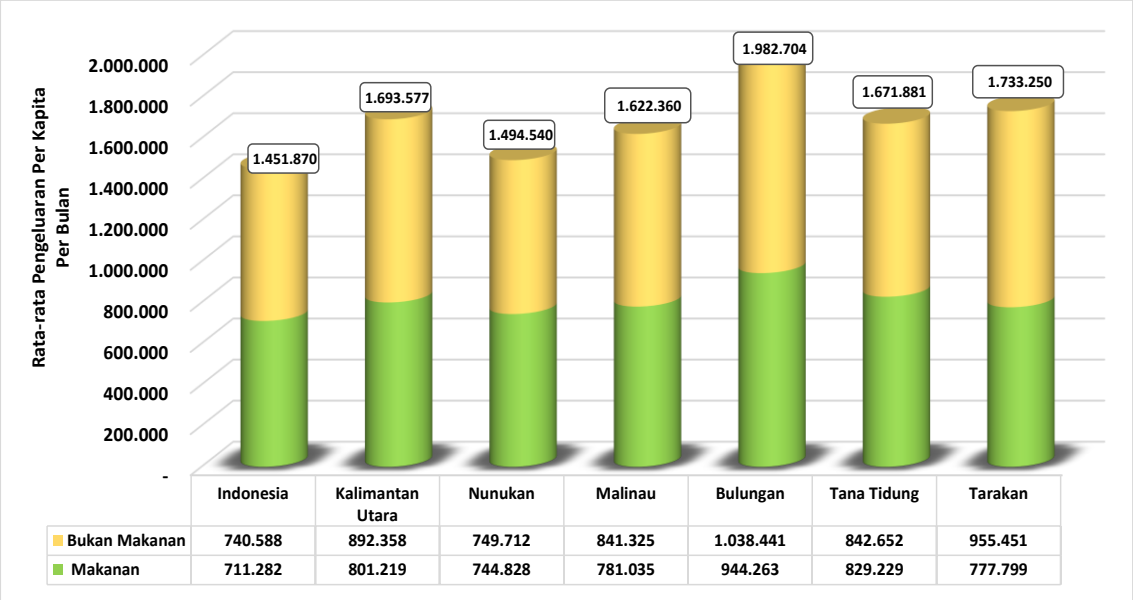

	Indonesia	Kalimantan Utara	Nunukan	Malinau	Bulungan	Tana Tidung	Tarakan
Bukan Makanan	740.588	892.358	749.712	841.325	1.038.441	842.652	955.451
Makanan	711.282	801.219	744.828	781.035	944.263	829.229	777.799

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.43 di atas terlihat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan Kabupaten Nunukan tahun 2023 berada 11,75 persen di bawah rata-rata pengeluaran per kapita per bulan provinsi Kalimantan Utara, dan bahkan merupakan yang terendah di antara Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Utara. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2023 secara struktur, porsi konsumsi kelompok bukan makanan (*non food*) di Kabupaten Nunukan lebih besar daripada konsumsi makanan (*food*). Hal ini seiring dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita sebesar 1,24 persen di tahun 2023, sehingga daya beli masyarakat juga mengalami penguatan.

Akan tetapi jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran per kapita Indonesia per bulan, maka Kabupaten Nunukan masih sdikit unggul yakni berada pada kisaran 2,94 persen di atas rata-rata pengeluaran per kapita Nasional. Demikian pula secara struktur pengeluaran, konsumsi kelompok bukan makanan Kabupaten Nunukan lebih tinggi dibandingkan Nasional yang hanya mencapai 51,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa secara Nasional Kabupaten Nunukan bukanlah daerah yang terendah dalam hal rata-rata pengeluaran per kapita dan bukan pula daerah dengan porsi konsumsi kelompok bukan makanan (*non food*) terendah.

Dari perbandingan tersebut, dapat dikatakan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat Kabupaten Nunukan, terutama dalam hal pengeluaran/konsumsi terbilang masih relatif baik dibandingkan dengan daerah lain di luar provinsi Kalimantan Utara.

B. Nilai Tukar Petani (NTP)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dimaksud dengan Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Usaha Tani mayoritas dijalankan di wilayah perdesaan, dan penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai Petani Sebagian besar bermukim di Desa.

Berdasarkan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, kini Indonesia memiliki 75.265 Desa, dan 447 Desa di antaranya berada di provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan merupakan daerah dengan jumlah Desa terbanyak yakni 232 Desa atau 51,90 persen dari total jumlah Desa yang berada di wilayah Kalimantan Utara.

Wilayah administratif Desa di Kabupaten Nunukan hampir seluruhnya berciri Kawasan Perdesaaan, yakni kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian. Pertanian yang dimaksud adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Sehingga tidak mengherankan jika pada tahun 2023 penyumbang PDRB Kabupaten Nunukan tertinggi ke-2 berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 19,08% persen. Oleh karenanya, Nilai Tukar Petani (NTP) dijadikan sebagai salah satu tolok ukur aspek daya saing daerah khususnya dalam hal kemampuan ekonomi daerah.

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*)

dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

NTP diperoleh dari rasio antara Indeks harga yang diterima oleh Petani (It) dan Indeks harga yang dibayar oleh Petani (Ib) dengan menggunakan formula *Modified Laspeyres* Index. Penghitungan NTP dilandasi pemikiran bahwa sebagai agen ekonomi, baik sebagai produsen dan konsumen, petani memproduksi hasil pertanian yang kemudian hasilnya dijual dan petani juga merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga mengeluarkan biaya produksi dalam usahanya untuk memproduksi komoditas/produk pertanian. NTP diukur pada level provinsi, dan diasumsikan berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi.

Pada tahun 2023 Wilayah cakupan penghitungan NTP di Provinsi Kalimantan Utara meliputi 4 kabupaten yaitu Malinau, Bulungan, Tana Tidung, dan Nunukan. Sektor pertanian yang dicakup dalam penghitungan NTP meliputi lima subsektor yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Subsektor Hortikultura, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Subsektor Peternakan, dan Subsektor Perikanan.

Gambar 2.43
Perbandingan NTP Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2019-2023

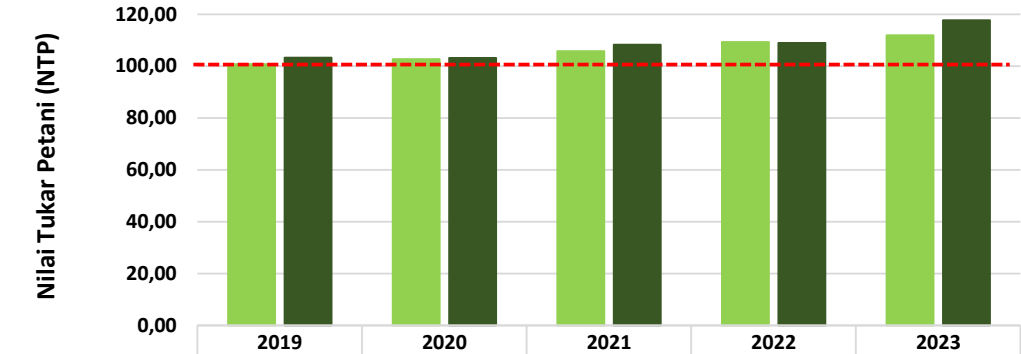

	2019	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Utara	100,81	102,75	105,85	109,35	111,92
Indonesia	103,36	103,25	108,34	109,00	117,76

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2024

Perolehan NTP diinterpretasikan menjadi 3 kategori sebagai berikut:

1) NTP > 100 (NTP di atas 100)

   berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih tinggi dari pengeluarannya.

2) NTP = 100 (NTP sama dengan 100)

   berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.

3) NTP < 100 (NTP di bawah 100)

   berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pengeluaran petani naik lebih tinggi dari pendapatannya.

Berdasarakan Gambar 2.24 di atas NTP Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun 5 tahun terakhir konsisten berada di atas 100, dan mengalami tren peningkatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kemampuan daya beli petani di Kalimantan Utara termasuk Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya harga-harga barang pertanian, serta andil berbagai program pemerintah dalam pemberdayaan petani seperi pemberian bibit, pupuk dan bantuan alat pertanian yang mampu menekan ongkos/biaya produksi barang pertanian sehingga selisih pendapatan yang diterima petani lebih besar daripada pengeluarannya. Akan tetapi tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan NTP Indonesia, dengan selisih 5,84 poin atau lebih rendah 4,96 persen.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek Daya Saing Daerah pada fokus wilayah/infrastruktur dapat dinilai dari Kondisi Jalan, Luas Wilayah Produktif, serta Penggunaan Air Bersih dan Konsumsi Listrik.

A. Kondisi Jalan di Kabupaten Nunukan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, yang dimaksud dengan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Gambar 2.44
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km)
di Kabupaten Nunukan Tahun 2023

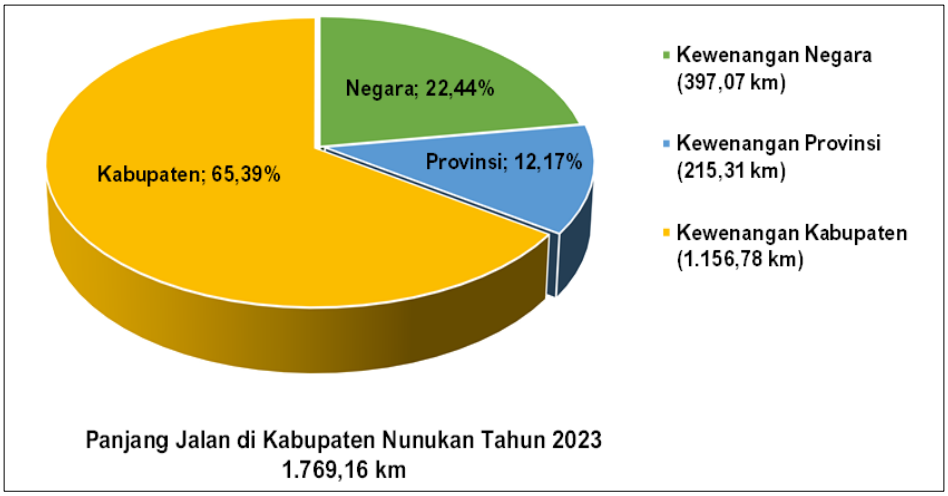

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.45 keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Nunukan tahun 2023 adalah 1.769,16 km atau bertambah 23,88 km dari tahun lalu. Porsi terbesar adalah jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu sepanjang 1.156,78 km atau 65,39 persen dari total keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Nunukan. Selanjutnya jalan yang menjadi kewenangan Negara (Pemerintah Pusat) menduduki porsi ke-2 sebesar 22,44 persen dan terakhir jalan yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Utara dengan porsi 12,17 persen.

Gambar 2.45
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km)
di Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2023

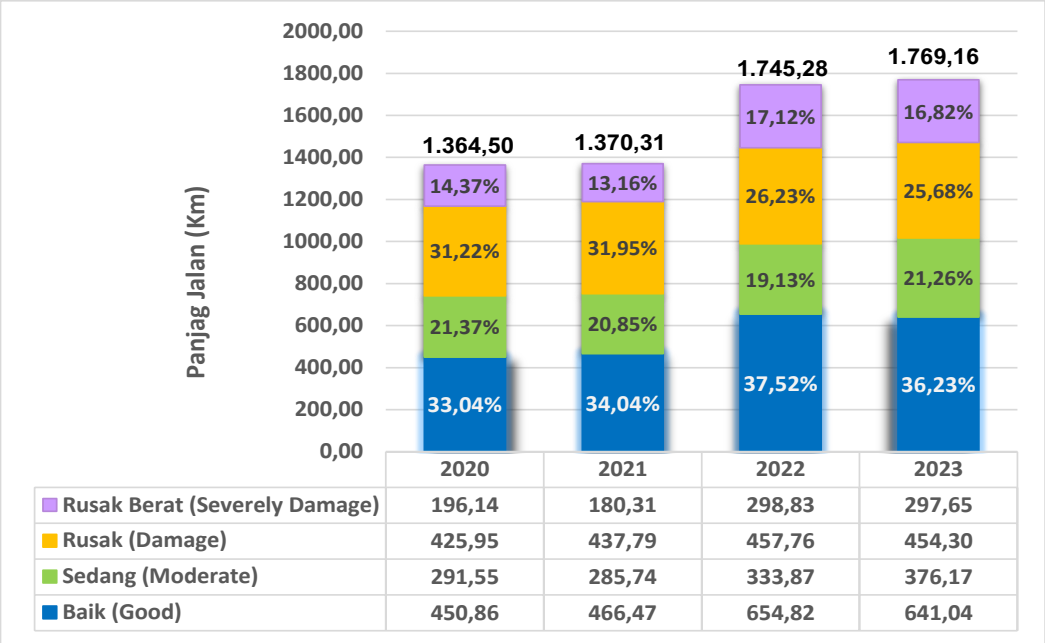

	2020	2021	2022	2023
Rusak Berat (Severely Damage)	196,14	180,31	298,83	297,65
Rusak (Damage)	425,95	437,79	457,76	454,30
Sedang (Moderate)	291,55	285,74	333,87	376,17
Baik (Good)	450,86	466,47	654,82	641,04

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2024

Dari Gambar 2.46 tampak bahwa panjang jalan di Kabupaten Nunukan semakin bertambah. Pada tahun 2023 dari 1.769,16 km jalan di Kabupaten Nunukan, sepanjang 641,04 km atau 36,23 persen dalam kondisi baik, dan sepanjang 376,17 km atau 21,26 persen dalam kondisi sedang, sementara 42,50 persen dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Gambar 2.46
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km)
di Kabupaten Nunukan Tahun 2023

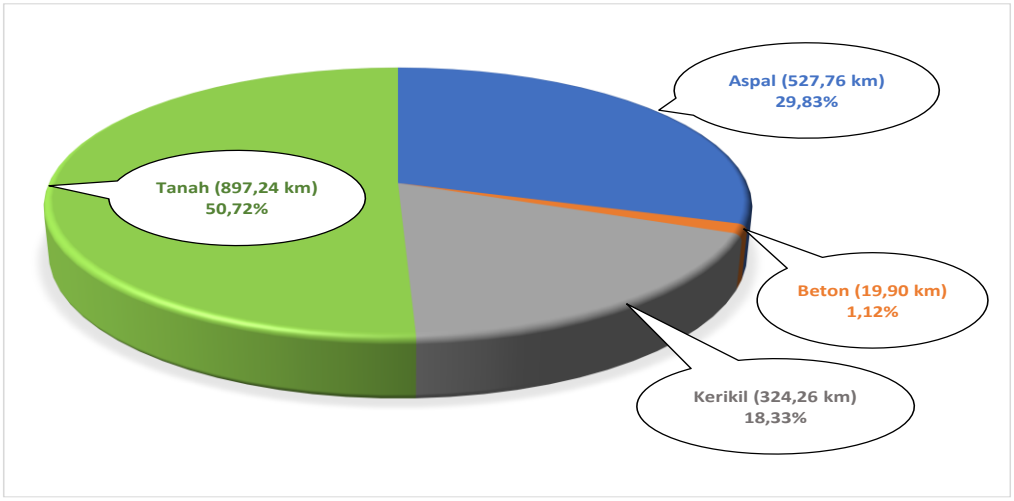

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.47 pada tahun 2023 kondisi permukaan jalan aspal di Kabupaten Nunukan mencapai porsi 29,83 persen atau sepanjang 527,76 km. Kemudian 1,12 persen permukaan beton dan 18,33 persen permukaan kerikil. Dan selebihnya 50,72 persen atau sepanjang 897,24 km masih dalam kondisi permukaan tanah, yang merupakan porsi terbesar.

B. Jumlah hotel dan restoran

Salah satu sarana penunjang sektor pariwisata yang sangat diperlukan bagi wisatawan baik nusantara maupun mancanegara adalah hotel dan akomodasi lainnya. Sektor perhotelan dan pariwisata berjalan beriringan dan saling mendukung. Tersedianya tempat menginap yang nyaman dan layak akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pendatang sehingga betah, baik yang berniat untuk tinggal sementara maupun menetap. Nunukan sebagai daerah transit dan perbatasan sangat mendukung untuk berkembangnya usaha perhotelan, penginapan dan pariwisata. Pada tahun 2023, rumah makan/ restoran sebanyak 413 restoran, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 214 restoran.

Gambar 2.47
Jumlah Hotel dab Restoran yang ada di Kabupaten Nunukan
Tahun 2020-2023

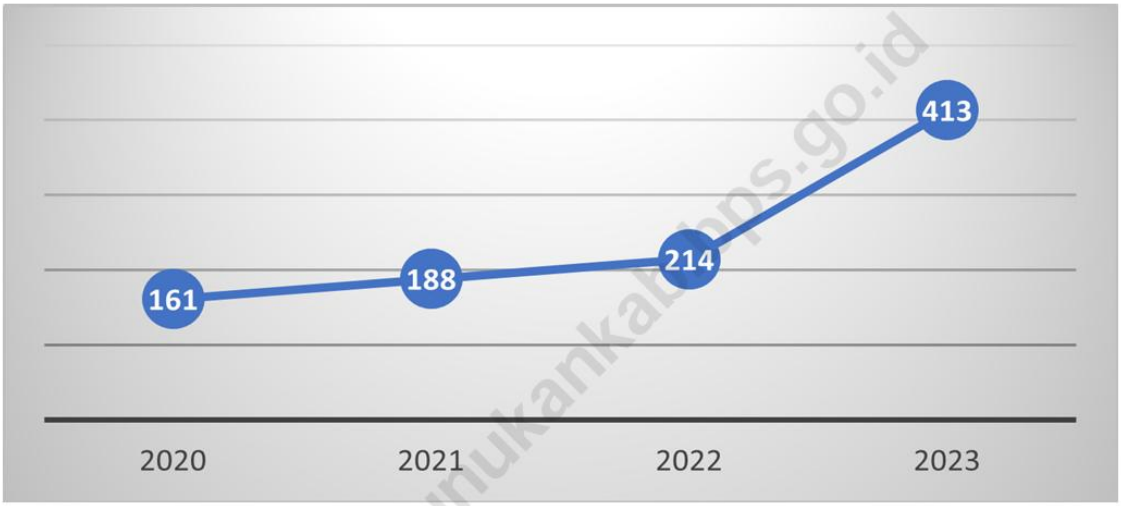

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

C. Akses Terhadap Air Minum Layak

Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, karena merupakan salah satu Jenis Pelayanan Dasar yang tertuang dalam SPM Pekerjaan Umum. Yang dimakud

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Nunukan setiap tahun berupaya memprioritaskan pembangunan infrastruktur sumber daya air khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih untuk konsumsi. Ketersediaan akses terhadap air bersih terutama air minum dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Nunukan.

Gambar 2.48
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Tahun 2023

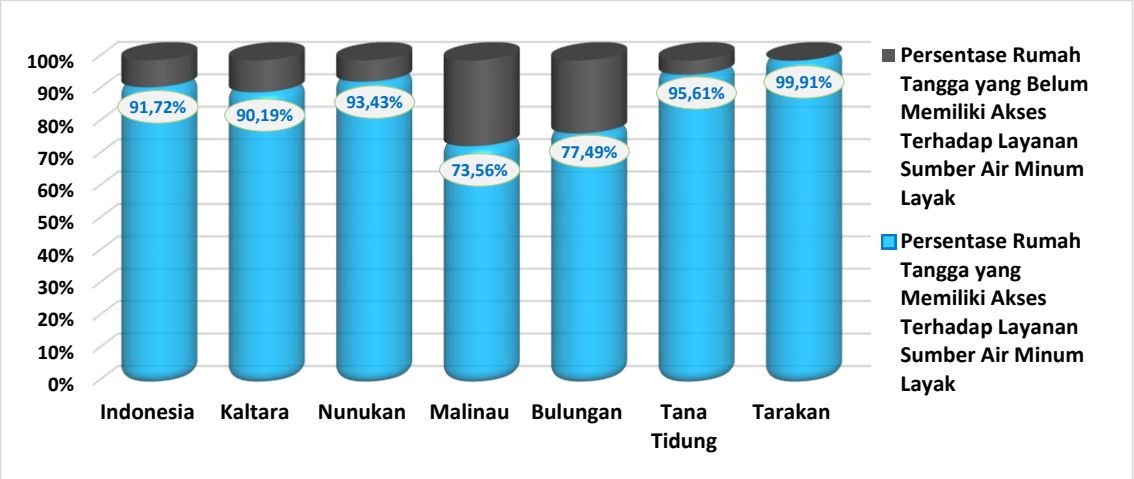

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Berdasarkan Gambar 2.49 di atas terlihat bahwa persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 sebesar 93,43 persen. Capaian tersebut lebih tinggi 1,71 persen dari kondisi umum di Indonesia yang baru mencapai 91,72 persen dan bahkan lebih tinggi 3,24 persen dari Kalimantan Utara yang baru mencapai 90,19 persen. Sementara jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Utara, maka tingkat persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kabupaten Nunukan menduduki posisi tertinggi ke-3 setelah Kabupaten Tana Tidung.

D. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN

Listrik merupakan energi terpenting dalam perkembangan kehidupan manusia, baik di kota-kota maupun di wilayah perdesaan. Kini listrik merupakan kebutuhan primer bagi manusia karena keberadaannya yang menopang segala aktivitas, seperti untuk bekerja, belajar, bertani, berniaga, memproduksi barang dan jasa, berekreasi dan sebagainya. Oleh karenanya, tercukupinya pasokan akan listrik merupakan sebuah prasyarat bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Gambar 2.49
Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Listrik PLN
Tahun 2023

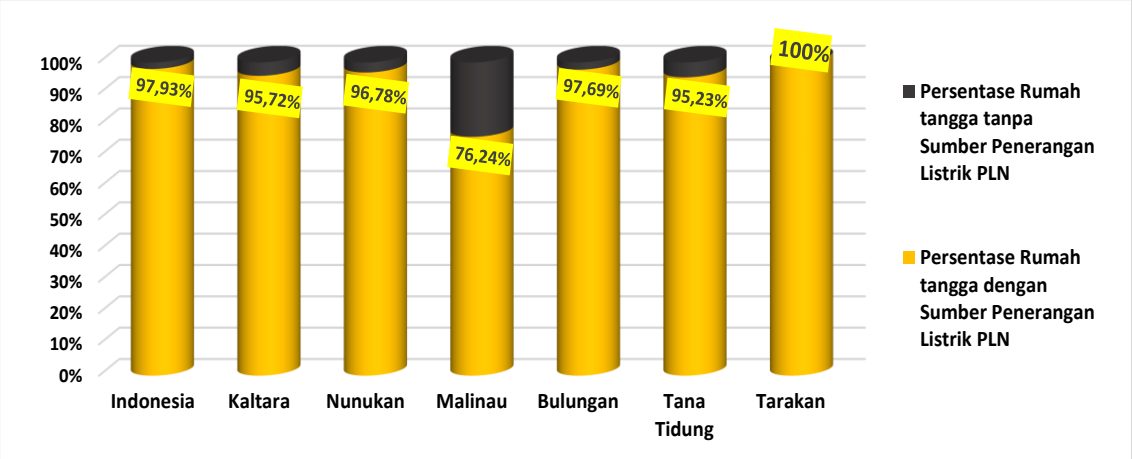

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 2.50 di atas terlihat bahwa persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 sebesar 96,78 persen. Capaian tersebut lebih rendah 1,15 persen dari kondisi umum di Indonesia yang mencapai 97,93 persen. Akan tetapi, persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN di Kabupaten Nunukan lebih tinggi 1,06 persen jika dibandingkan dengan Kalimantan Utara, dan menjadi yang tertinggi ke-3 diantara Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Utara. Dengan capaian di tahun 2023, maka Persentase Rumah tangga tanpa Sumber

Penerangan Listrik PLN hanya tinggal 3,22 persen atau berkurang 1,10 persen dibanding tahun lalu yang berada dikisaran 4,32 persen.

Energi listrik di Kabupaten Nunukan yang disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) memiliki durasi pelayanan yang bervariasi tergantung wilayah pelayanan. Di Ibu Kota Kabupaten Nunukan dan beberapa Ibu Kota Kecamatan telah terlayani 24 Jam, sementara wilayah lain antara 6-15 Jam layanan. Kebutuhan akan energi listrik dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Gambar 2.50
Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Konsumsi Litrik
Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023

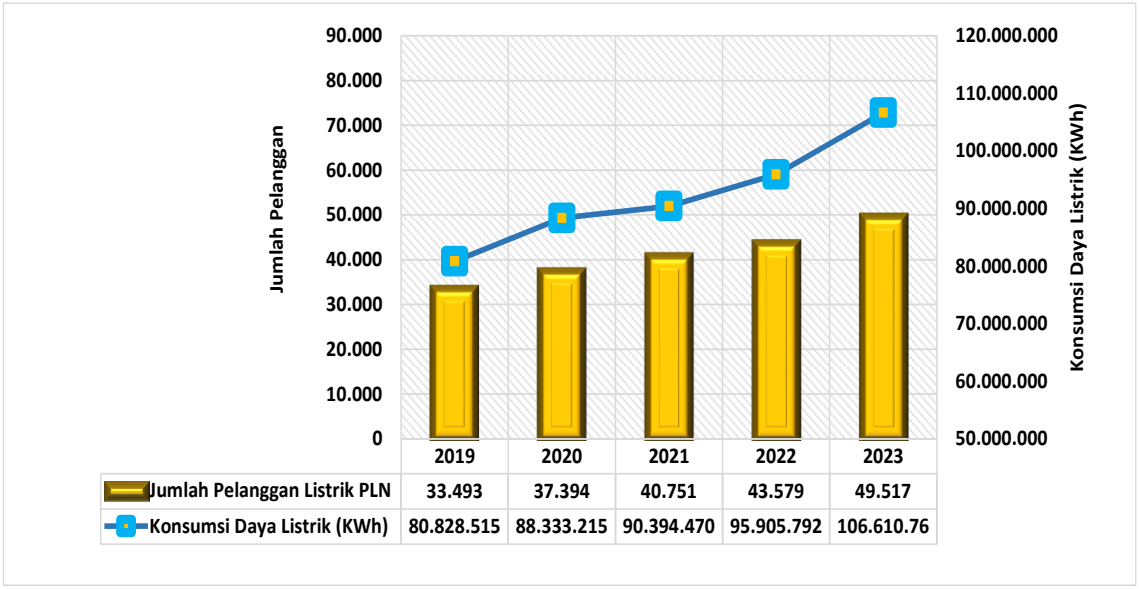

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.51 memperlihatkan bahwa konsumsi listrik setiap tahunnya semakin meningkat seiring bertambahnya pelanggan listrik di Kabupaten Nunukan. Pada tahun 2023 jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Nunukan mencapai 49.517 pelanggan atau meningkat 13,63 persen dari tahun lalu. Seiring peningkatan jumlah pelanggan, maka terjadi pula kenaikan konsumsi daya listrik PLN yakni sebanyak 10.704.977 KWh atau naik 11,16 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas infrastruktur dan kemampuan daya listrik di Kabupaten Nunukan cukup memadai untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kegiatan perekonomian.

E. Posisi Strategis Wilayah Kabupaten Nunukan

Aspek daya saing daerah lain yang dimiliki Kabupaten Nunukan adalah posisinya yang sangat strategis baik dalam RTRW Nasional maupun RTRW Provinsi Kalimantan Utara.

Kabupaten Nunukan ditetapkan sebagai Pusat Kasawan Strategis Nasional (PKSN) yakni kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Kemudian Kabupaten Nunukan juga merupakan bagian dari Kawasan Andalan Nasional TATATAPANBUMA (Tarakan, Tanjung Selor, Nunukan, Pulau Bunyu dan Malinau) dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan industri. Selain itu, Kabupaten Nunukan ditetapkan pula sebagai Kawasan Perbatasan Negara, fungsi Kepentingan Pertahanan dan Keamanan. Kedudukan yang strategis tersebut menjadikan Kabupaten Nunukan mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat melalui program-program nasional Kementerian/Lembaga yang pensasaran lokasi fokus (lokus)-nya berada di wilayah Kabupaten Nunukan.Kabupaten Nunukan juga merupakan bagian dari *Heart of Borneo*, karena wilayahnya termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Aspek Daya Saing Daerah pada fokus iklim berinvestasi dapat tercermin dari Angka Kriminalitas dan Persentase Desa Berstatus Desa Mandiri.

A. Angka Kriminalitas

Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan data Kalimantan Utara Dalam Angka Tahun 2024 yang diterbitkan BPS, selama tahun 2023 terdapat 445 Peristiwa/Kasus Kejahatan

(*Total Crime*) yang dilaporkan di Kabupaten Nunukan. Dengan demikian Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*) di Kabupaten Nunukan yang berpenduduk 217.923 Jiwa pada tahun 2023 adalah 204,20. Artinya dalam setiap 100.000 penduduk di Kabupaten Nunukan, terdapat sebanyak 204-205 Jiwa memiliki risiko tekena tindak kejahatan/kriminalitas.

Tabel 2.24
Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)
Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (Total Crime)	322	351	309	358	445
Jumlah Penduduk (Jiwa)	196.918	199.090	203.220	208.303	217.923
Angka Kriminalitas per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)	**163,52**	**176,30**	**152,05**	**171,87**	**204,20**

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Dari Tabel 2.24 tampak bahwa pada tahun 2023 terdapat kenaikan jumlah kriminalitas yang dilaporkan sebanyak 87 peristiwa/kasus dibandingkan tahun sebeumnya. Demikian pula Angka Kriminalitas meningkat 18,81 persen dibandingkan tahun 2022.

Tabel 2.25
Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*Crime Clearence*)
Kabupaten Nunukan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Total Crime*)	322	351	309	358	445
Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan	303	258	254	292	325
Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*Crime Clearence*)	**94,10%**	**73,50%**	**82,20%**	**81,56%**	**73,00%**

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2024

Dalam kurun 5 tahun terakhir penyelesaian Peristiwa/Kasus Kejahatan (*Crime Clearence*) di Kabupaten Nunukan hingga berakhirnya tahun pelaporan belum dapat mencapai 100%. Hal ini dikarenakan situasi dan kondisi di lapangan dalam penanganan setiap kasus kejahatan tentunya berbeda-beda. Selain itu peristiwa kejahatan yang cenderung meningkat menjelang natal dan tahun baru, juga memiliki keterbatasan waktu dalam penyelesaiannya karena terjadi diakhir tahun, sehingga masih dalam proses penanganan.

Meski demikian secara umum kondisi di wilayah Kabupaten Nunukan cukup aman serta tenteram. Hal ini tercermin pula dari Indeks Rasa Aman tahun 2023 yang mencapai 80,38 persen, sehingga iklim berinventasi di Kabupaten Nunukan masih terbilang kondusif.

B. Persentase Desa Mandiri (Sembada) Terhadap Total Desa

Menurut Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun , yang dimaksud dengan Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Setiap tahun KemendesPDTT melakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) dengan tujuan untuk mengetahui status kemandirian desa, yang diklasifikasikan menjadi 5 (Lima) kategori sebagai berikut:

1. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada;
2. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada;
3. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya;
4. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra-Madya; dan
5. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.

Gambar 2.51
Distribusi Klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Nunukan Tahun 2023

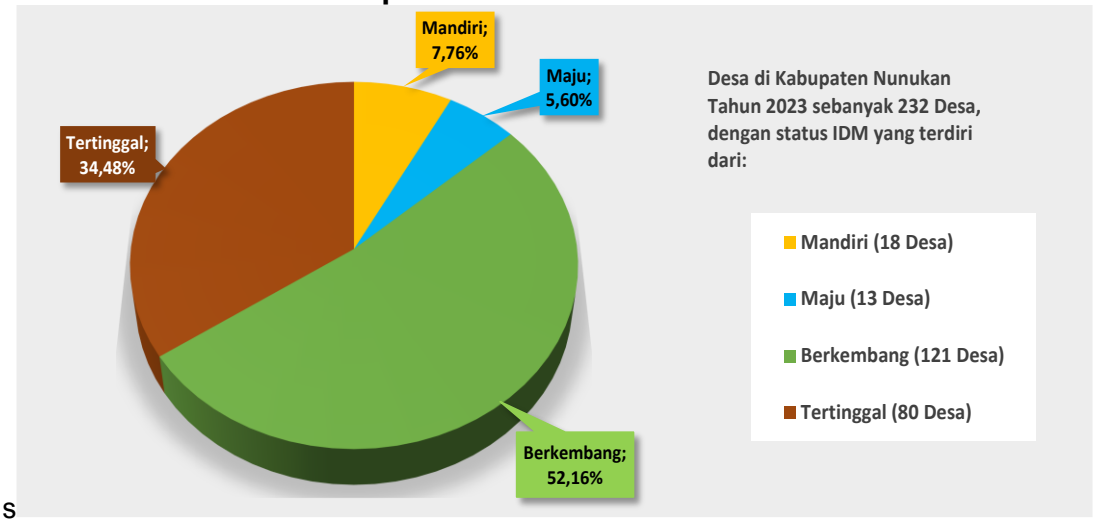

s

Sumber: E-Book IDM, KemendesPDTT, 2024

Berdasarkan Gambar 2.51 di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 dari 232 Desa yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan, terdapat 18 Desa atau 7,76 persen dibandingkan total Desa yang meraih status sebagai Desa Mandiri. Ini berarti terdapat pertambahan 7 Desa Mandiri dibanding tahun lalu. Kategori Desa Berkembang menduduki porsi terbanyak yakni 52,16 persen atau sebanyak 121 Desa, disusul Desa Tertinggal sebanyak 80 Desa atau 34,48 persen.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak Desa di wilayah Kabupaten Nunukan yang rendah kemampuannya dalam hal Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Lingkungan (Ekologi).

Tabel 2.26
Daftar Desa Yang Bestatus Desa Mandiri (Sembada)
Di Kabupaten Nunukan Tahun 2023

NO.	DESA	KECAMATAN	IKS	IKE	IKL	NILAI IDM
1	SUNGAI NYAMUK	SEBATIK TIMUR	0,9657	0,8667	0,9333	0,9219
2	BUKIT ARU INDAH	SEBATIK TIMUR	0,9714	0,8333	0,9333	0,9127
3	BINALAWAN	SEBATIK BARAT	0,8343	0,8667	1,0000	0,9003
4	SUNGAI PANCANG	SEBATIK UTARA	0,9657	0,9333	0,8000	0,8997
5	MANSALONG	LUMBIS	0,9429	0,8833	0,8667	0,8976
6	BALANSIKU	SEBATIK	0,8857	0,8833	0,8667	0,8786
7	AJI KUNING	SEBATIK TENGAH	0,8686	0,8833	0,8667	0,8729
8	BINUSAN	NUNUKAN	0,9086	0,8167	0,8667	0,8640
9	SUNGAI LIMAU	SEBATIK TENGAH	0,9371	0,7833	0,8667	0,8624
10	TANJUNG KARANG	SEBATIK	0,8914	0,8167	0,8667	0,8583
11	SANUR	TULIN ONSOI	0,9714	0,8833	0,6667	0,8405
12	SETABU	SEBATIK BARAT	0,8457	0,8000	0,8667	0,8375
13	SEBERANG	SEBATIK UTARA	0,9143	0,7167	0,8667	0,8325
14	ATAP	SEMBAKUNG	0,8800	0,8000	0,8000	0,8267
15	LONG KATUNG	KRAYAN	0,8857	0,7833	0,8000	0,8230
16	SUNGAI MANURUNG	SEBATIK	0,8971	0,7667	0,8000	0,8213
17	LONG BAWAN	KRAYAN	0,8343	0,8167	0,8000	0,8170
18	TANJUNG HARAPAN	SEBATIK TIMUR	0,9143	0,6000	0,9333	0,8159

Sumber: E-Book IDM 2023, KemendesPDTT, diolah, 2024

Dari Tabel 2.26 tampak bahwa Desa Berstatus Mandiri didominasi oleh Desa yang berada di wilayah Pulau Sebatik, yakni sebanyak 11 Desa Mandiri. Dengan demikian Pulau Sebatik menjadi sangat potensial untuk menjadi lokasi fokus (lokus) sasaran tujuan inventasi di Kabupaten Nunukan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2025 Sampai Triwulan I 2025 dan Realisasi RPJMD

Sub bab ini menggambarkan status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 yang paling mutakhir. Sementara Realisasi RPJMD digunakan untuk memberikan gambaran progres/status capaian kinerja RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang merupakan tahun pertama. Berdasarkan realisasi target indikator tujuan dan sasaran RPJMD dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD. Tingkat capaian realisasi anggaran RPJMD bersumber dari realisasi anggaran Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I 2025

RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dan dokumen tersebut yang akan menjadi dasar evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan hingga Triwulan I 2025.

Tabel 2.27
Ringkasan Rata-Rata Capaian Target Kinerja Program dan Anggaran RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**DINAS PENDIDIKAN**	**6**	**16**	**92**	**2.08**	**SR**	**2.52**	**SR**	**56,835,479,840**
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				*3.61*	*SR*	*0.78*	*SR*	*1,056,000,000*
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				*0.00*	*SR*	*0.00*	*SR*	-
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				*0.00*	*SR*	*0.00*	*SR*	-
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				*0.00*	*SR*	*0.00*	*SR*	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				*0.00*	*SR*	*0.00*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*29.61*	*SR*	*14.36*	*SR*	*55,779,479,840*
2	**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**8**	**28**	**87**	**1.164**	**SR**	**3.353**	**SR**	**44,922,748,275**
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**9.314**	**SR**	**22.099**	**SR**	**7,695,937,820**
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				*0.00*	*SR*	*0.00*	*SR*	-
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				*0.00*	*SR*	*0.00*	*SR*	-

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				*0.00*	*SR*	*0.00*	*SR*	-
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				*0.00*	*SR*	*0.00*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				*0.00*	*SR*	*0.00*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				*0.00*	*SR*	*0.00*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*5*	*SR*	*4.727*	*SR*	*37,226,810,455*
3	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**8**	**16**	**49**	**2.5**	**SR**	**0.945**	**SR**	**3,315,668,138**
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*26.37*	*SR*	*7.557*	*SR*	*3,315,668,138*
4	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN**	**8**	**15**	**29**	**0.521**	**SR**	**5.589**	**SR**	**1,446,893,849**
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				*0*	*SR*	*4.923*	*SR*	*17,340,000*
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				*0*	*SR*	*6.686*	*SR*	*34,580,000*
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				*0*	*SR*	*20.438*	*SR*	*29,639,522*
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				*0*	*SR*	*7.239*	*SR*	*14,539,796*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*4.663*	*SR*	*5.424*	*SR*	*1,350,794,531*
5	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**	**2**	**13**	**33**	**10.642**	**SR**	**1.991**	**SR**	**6,157,755,984**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				*7.601*	*SR*	*0.378*	*SR*	*9,070,000*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*66.54*	*S*	*3.604*	*SR*	*6,148,685,984*
6	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**2**	**10**	**30**	**11.016**	**SR**	**5.573**	**SR**	**3,746,700,524**
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				*9.964*	*SR*	*1.082*	*SR*	*131,250,000*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*23.297*	*SR*	*10.065*	*SR*	*3,615,450,524*
7	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**2**	**10**	**44**	**10.321**	**SR**	**2.338**	**SR**	**1,875,566,350**
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				*8.8*	*SR*	*0.231*	*SR*	*30,092,280*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*11.842*	*SR*	*4.445*	*SR*	*1,845,474,070*
8	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**13**	**25**	**54**	**0.066**	**SR**	**6.31**	**SR**	**1,584,675,894**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				*0*	*SR*	*2.563*	*SR*	*15,380,000*
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				*0*	*SR*	*4.448*	*SR*	*2,224,000*
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				*0*	*SR*	*4.393*	*SR*	*30,814,000*
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				*0*	*SR*	*0.315*	*SR*	*20,290,000*

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				*0*	*SR*	*24.868*	*SR*	*67,330,000*
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				*0*	*SR*	*2.264*	*SR*	*3,030,000*
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				*0*	*SR*	*33.935*	*SR*	*32,666,110*
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*0.855*	*SR*	*9.241*	*SR*	*1,412,941,784*
9	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**	**10**	**19**	**32**	**11.665**	**SR**	**13.858**	**SR**	**6,513,791,241**
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				*0*	*SR*	*6.99*	*SR*	*65,714,300*
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				*30*	*SR*	*8.565*	*SR*	*8,684,000*
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANAPERTANIAN				*0*	*SR*	*71.179*	*S*	*127,032,615*

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				*0*	*SR*	*7.984*	*SR*	*86,233,120*
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				*0*	*SR*	*2.782*	*SR*	*14,676,028*
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				*2.955*	*SR*	*1.123*	*SR*	*4,230,000*
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				*22.222*	*SR*	*6.204*	*SR*	*5,294,500*
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				*34.783*	*SR*	*14.274*	*SR*	*190,507,980*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA				*26.687*	*SR*	*19.479*	*SR*	*6,011,418,698*
10	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**11**	**18**	**39**	**4.944**	**SR**	**2.345**	**SR**	**5,167,477,140**
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				*0*	*SR*	*2.693*	*SR*	*19,085,847*
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				*0*	*SR*	*1.988*	*SR*	*28,570,000*
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				*31.25*	*SR*	*8.896*	*SR*	*1,451,242,850*
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN				*5.556*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				*1.677*	*SR*	*4.479*	*SR*	*1,693,676,600*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*33.846*	*SR*	*7.733*	*SR*	*1,974,901,843*
11	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**5**	**14**	**29**	**4.171**	**SR**	**1.977**	**SR**	**2,099,506,654**
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				*7.937*	*SR*	*3.604*	*SR*	*21,830,000*
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				*0*	*SR*	*0.908*	*SR*	*6,441,000*
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*18.988*	*SR*	*5.372*	*SR*	*2,071,235,654*
12	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	**5**	**10**	**38**	**1.429**	**SR**	**6.807**	**SR**	**1,826,261,770**
	PROGRAM PENATAAN DESA				*0*	*SR*	*3.102*	*SR*	*16,014,000*
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				*0*	*SR*	*5.487*	*SR*	*13,934,000*
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				*0*	*SR*	*3.62*	*SR*	*28,304,200*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT				*0*	*SR*	*9.126*	*SR*	*227,490,000*

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*13.095*	*SR*	*12.701*	*SR*	*1,540,519,570*
13	**DINAS PERHUBUNGAN**	**3**	**16**	**38**	**3.611**	**SR**	**5.22**	**SR**	**4,146,548,226**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				*0*	*SR*	*0.636*	*SR*	*29,178,000*
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				*0*	*SR*	*5.586*	*SR*	*33,437,300*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*17.846*	*SR*	*9.439*	*SR*	*4,083,932,926*
14	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN**	**5**	**10**	**36**	**18.744**	**SR**	**4.216**	**SR**	**2,359,613,287**
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				*19.286*	*SR*	*1.748*	*SR*	*28,270,000*
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				*12.308*	*SR*	*11.645*	*SR*	*925,712,735*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				*24.138*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				*20*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*17.991*	*SR*	*7.686*	*SR*	*1,405,630,552*
15	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	**15**	**23**	**41**	**8.345**	**SR**	**0.818**	**SR**	**1,344,032,144**
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PERKOPERASIAN								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				*9.5*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				*50*	*SR*	*7.995*	*SR*	*48,350,000*
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				*24*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				*7.053*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				*34.615*	*SR*	*4.272*	*SR*	*1,295,682,144*

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	KABUPATEN/KOTA								
16	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**	**6**	**13**	**19**	**7.977**	**SR**	**0.801**	**SR**	**1,236,010,817**
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				*25.132*	*SR*	*0*	*SR*	*0*
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*22.727*	*SR*	*4.806*	*SR*	*1,236,010,817*
17	**DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA**	**12**	**24**	**45**	**9.377**	**SR**	**11.172**	**SR**	**1,951,408,631**
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				*12.5*	*SR*	*17.5*	*SR*	*280,000,000*
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				*0*	*SR*	*3.5*	*SR*	*55,219,454*
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				*0*	*SR*	*14.463*	*SR*	*36,847,118*
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				*0*	*SR*	*17.582*	*SR*	*7,905,000*

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				*0*	*SR*	*26.637*	*SR*	*16,832,000*
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				*14.286*	*SR*	*5.343*	*SR*	*30,070,000*
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				*0*	*SR*	*9.83*	*SR*	*66,930,000*
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				*33.333*	*SR*	*19.826*	*SR*	*14,640,000*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*52.406*	*R*	*8.427*	*SR*	*1,431,465,059*
18	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**6**	**14**	**32**	**2.639**	**SR**	**1.558**	**SR**	**1,172,692,438**
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				*1.667*	*SR*	*0.953*	*SR*	*3,030,000*
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				*0*	*SR*	*1.338*	*SR*	*3,630,000*
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				25.417	SR	7.058	SR	1,166,032,438
19	**DINAS PERIKANAN**	**5**	**15**	**35**	**10.74**	**SR**	**5.966**	**SR**	**1,348,690,790**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				*0.693*	*SR*	*0.102*	*SR*	*1,610,000*
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				*2.222*	*SR*	*22.937*	*SR*	*11,920,000*
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				*20*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				*0*	*SR*	*0.503*	*SR*	*1,610,000*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*30.782*	*SR*	*6.288*	*SR*	*1,333,550,790*
20	**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**	**6**	**13**	**21**	**18.382**	**SR**	**2.03**	**SR**	**1,848,823,586**
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				*0*	*SR*	*0.506*	*SR*	*3,030,000*
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				*41.128*	*SR*	*1.443*	*SR*	*3,030,000*
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				*30*	*SR*	*0.77*	*SR*	*3,630,000*
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				*0*	*SR*	*3.168*	*SR*	*3,030,000*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*39.167*	*SR*	*6.296*	*SR*	*1,836,103,586*
21	**SEKRETARIAT DAERAH**	**11**	**22**	**64**	**36.725**	**SR**	**7.91**	**SR**	**12,779,602,706**
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				*15.714*	*SR*	*2.17*	*SR*	*67,613,664*

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				*26.166*	*SR*	*1.69*	*SR*	*18,600,000*
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				*26.098*	*SR*	*8.69*	*SR*	*2,332,132,900*
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				*79.333*	*T*	*5.30*	*SR*	*69,929,500*
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				*20.238*	*SR*	*9.65*	*SR*	*1,341,794,680*
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				*0*	*SR*	*6.01*	*SR*	*65,744,366*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*50*	*SR*	*3.48*	*SR*	*56,018,000*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*45.719*	*SR*	*13.57*	*SR*	*460,666,838*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*42.36*	*SR*	*4.94*	*SR*	*782,431,955*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*4.183*	*SR*	*5.25*	*SR*	*2,528,684,026*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*94.167*	*ST*	*26.26*	*SR*	*5,055,986,777*
22	**SEKRETARIAT DPRD**	**2**	**14**	**30**	**13.061**	**SR**	**5.114**	**SR**	**1,541,207,989**
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				*12.143*	*SR*	*9.888*	*SR*	*101,894,178*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*13.978*	*SR*	*0.339*	*SR*	*1,439,313,811*
23	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**4**	**16**	**54**	**19.48**	**SR**	**3.00**	**SR**	**1,729,448,646**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				*58.33*	*R*	*7.10*	*SR*	*183,484,131*
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				*4.72*	*SR*	*1.20*	*SR*	*29,747,100*
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				*0.00*	*SR*	*0.40*	*SR*	*4,830,000*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*14.87*	*SR*	*3.30*	*SR*	*1,511,387,415*
24	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**3**	**11**	**46**	**17.984**	**SR**	**10.21**	**SR**	**8,382,663,683**
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				*15.189*	*SR*	*5.065*	*SR*	*4,506,372,492*
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				*7.692*	*SR*	*9.113*	*SR*	*260,051,000*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*31.071*	*SR*	*16.454*	*SR*	*3,616,240,191*
25	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	**3**	**7**	**27**	**13.165**	**SR**	**7.175**	**SR**	**2,117,234,091**
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				*0*	*SR*	*9.487*	*SR*	*31,137,340*
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				*10.396*	*SR*	*6.86*	*SR*	*105,524,600*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*29.101*	*SR*	*5.178*	*SR*	*1,980,572,151*
26	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**3**	**11**	**27**	**6.946**	**SR**	**5.448**	**SR**	**1,961,092,587**
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				*15.393*	*SR*	*1.612*	*SR*	*25,963,652*

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				*1*	*SR*	*3.552*	*SR*	*41,407,302*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*49.795*	*SR*	*11.181*	*SR*	*1,893,721,633*
27	**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**	**2**	**8**	**23**	**1.79**	**SR**	**2.95**	**SR**	**1,801,506,468**
	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*10.714*	*SR*	*5.151*	*SR*	*1,801,506,468*
28	**INSPEKTUR DAERAH**	**3**	**9**	**22**	**15.239**	**SR**	**9.517**	**SR**	**1,635,830,767**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				*2.612*	*SR*	*8.399*	*SR*	*190,857,600*
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				*20.907*	*SR*	*15.206*	*SR*	*154,454,600*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*38.68*	*SR*	*4.946*	*SR*	*1,290,518,567*
29	**KEC. NUNUKAN**	**6**	**14**	**28**	**5.685**	**SR**	**2.92**	**SR**	**3,492,587,064**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*6.25*	*SR*	*6.179*	*SR*	*289,971,000*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*16.667*	*SR*	*4.024*	*SR*	*8,100,000*
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*-*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*11.19*	*SR*	*7.315*	*SR*	*3,194,516,064*
30	**KEC. NUNUKAN SELATAN**	**5**	**12**	**25**	**18.363**	**SR**	**6.337**	**SR**	**2,430,018,998**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*62.5*	*R*	*16.35*	*SR*	*13,452,670*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*15.625*	*SR*	*8.442*	*SR*	*192,713,620*
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*-*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*-*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*13.69*	*SR*	*6.894*	*SR*	*2,223,852,708*
31	KEC. SEBATIK	**6**	**15**	**33**	**18.091**	**SR**	**6.811**	**SR**	**862,211,151**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*21.429*	*SR*	*2.702*	*SR*	*2,053,230*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*50*	*SR*	*25.873*	*SR*	*11,746,350*
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				*25*	*SR*	*2.573*	*SR*	*510,000*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*-*
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	*-*

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*12.118*	*SR*	*9.715*	*SR*	*847,901,571*
32	**KEC. SEBATIK BARAT**	**6**	**14**	**29**	**7.009**	**SR**	**0.661**	**SR**	**676,703,618**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*25*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*17.053*	*SR*	*3.968*	*SR*	*676,703,618*
33	**KEC. SEBATIK TIMUR**	**6**	**12**	**24**	**1.496**	**SR**	**0.599**	**SR**	**604,846,120**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*8.974*	*SR*	*3.592*	*SR*	*604,846,120*
34	**KEC. SEBATIK UTARA**	**5**	**14**	**30**	**40.96**	**SR**	**2.023**	**SR**	**805,731,766**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*50*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*50*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				*50*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*40*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*14.801*	*SR*	*10.114*	*SR*	*805,731,766*
35	**KEC. SEBATIK TENGAH**	**6**	**13**	**23**	**6.134**	**SR**	**3.774**	**SR**	**516,490,686**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*25*	*SR*	*16.686*	*SR*	*22,185,325*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*11.803*	*SR*	*5.958*	*SR*	*494,305,361*
36	**KEC. SEIMANGGARIS**	**4**	**9**	**20**	**33.968**	**SR**	**1.006**	**SR**	**588,462,861**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*41.667*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				*25*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*25*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*44.206*	*SR*	*4.022*	*SR*	*588,462,861*
37	**KEC. SEBUKU**	**6**	**13**	**22**	**1.218**	**SR**	**0.786**	**SR**	**837,819,080**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*7.308*	*SR*	*4.717*	*SR*	*837,819,080*

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
38	**KEC. TULIN ONSOI**	**6**	**12**	**20**	**10.71**	**SR**	**4.18**	**SR**	**793,046,270**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*33.33*	*SR*	*7.05*	*SR*	*7,780,000*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*0.00*	*SR*	*0.00*	*SR*	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				*25.00*	*SR*	*4.70*	*SR*	*2,380,000*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				*0.00*	*SR*	*3.33*	*SR*	*170,000*
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*0.00*	*SR*	*0.00*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*5.95*	*SR*	*10.02*	*SR*	*782,716,270*
39	**KEC. SEMBAKUNG**	**6**	**11**	**24**	**18.687**	**SR**	**0.391**	**SR**	**703,841,986**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*17.5*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*25*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				*25*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*31.667*	*SR*	*0*	*SR*	-

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*12.953*	*SR*	*2.348*	*SR*	*703,841,986*
40	**KEC. SEMBAKUNG ATULAI**	**4**	**12**	**22**	**12.308**	**SR**	**0.875**	**SR**	**659,679,958**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*21.667*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*25*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*2.564*	*SR*	*3.499*	*SR*	*659,679,958*
41	**KEC. LUMBIS**	**4**	**11**	**32**	**10.903**	**SR**	**7.076**	**SR**	**1,376,023,331**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0	SR	0	SR	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0	SR	0	SR	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				20	SR	20	SR	7,320,500
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				23.611	SR	8.303	SR	1,368,702,831
42	**KEC. LUMBIS OGONG**	**4**	**8**	**13**	**31.25**	**SR**	**2.762**	**SR**	**707,102,256**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*100*	*SR*	*0*	*SR*	-

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*25*	*SR*	*11.048*	*SR*	*707,102,256*
43	**KEC. KRAYAN**	**6**	**12**	**27**	**1.06**	**SR**	**0.567**	**SR**	**782,109,377**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*6.358*	*SR*	*3.403*	*SR*	*782,109,377*
44	**KEC. KRAYAN SELATAN**	**5**	**11**	**20**	**29.865**	**SR**	**0.442**	**SR**	**598,790,186**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*33.333*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*100*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*15.992*	*SR*	*2.208*	*SR*	*598,790,186*
45	**KEC. KRAYAN BARAT**	**6**	**12**	**22**	**2.564**	**SR**	**0.75**	**SR**	**724,921,573**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0	SR	0	SR	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				0	SR	0	SR	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*5.385*	*SR*	*4.499*	*SR*	*724,921,573*
46	**KEC. KRAYAN TIMUR**	**6**	**11**	**20**	**3.333**	**SR**	**0.853**	**SR**	**517,567,221**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*20*	*SR*	*5.118*	*SR*	*517,567,221*
47	**KEC. KRAYAN TENGAH**	**4**	**9**	**17**	**2.841**	**SR**	**1.248**	**SR**	**649,775,175**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*11.364*	*SR*	*4.992*	*SR*	*649,775,175*
48	**KEC. LUMBIS HULU**	**4**	**9**	**16**	**1.511**	**SR**	**0.646**	**SR**	**574,962,983**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*6.044*	*SR*	*2.582*	*SR*	*574,962,983*

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
49	**KEC. LUMBIS PANSIANGAN**	**5**	**13**	**24**	**25.934**	**SR**	**6.641**	**SR**	**624,314,769**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				*108.33*	*UNK*	*24.276*	*SR*	*17,330,295*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*21.336*	*SR*	*8.926*	*SR*	*606,984,474*
50	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**6**	**10**	**21**	**4.103**	**SR**	**2.059**	**SR**	**739,980,277**
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				*0*	*SR*	*5.76*	*SR*	*78,789,876*
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				*0*	*SR*	*0.67*	*SR*	*8,040,800*
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				*0*	*SR*	*0.822*	*SR*	*3,700,000*
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				*0*	*SR*	*0*	*SR*	-

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	RKPD Tahun 2025			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA		RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN (Rp)
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	%	PREDIKAT	%	PREDIKAT	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				*24.615*	*SR*	*5.099*	*SR*	*649,449,601*
		357	**773**	**1748**	**10.95**	**SR**	**4.24**	**SR**	**405,480,358,405**

Sumber: Berbagai sumber diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2.27 terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja program RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 sampai dengan triwulan I yang diampu oleh 50 Perangkat Daerah adalah sebanyak 10,95% dengan predikat SR.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target program RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketersediaan sumber daya yang cukup memadai, terutama anggaran, SDM serta sarana dan prasarana.
2. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan target kinerja daerah.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program/kegiatan
4. Kerjasama lintas sektor, maupun kerjasama dengan *stake holders* di luar lingkup pemeritahan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah.

2.2.2. Target Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah lima tahunan yang dirumuskan berdasarkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya dikemukakan bahwa visi, misi dan arah kebijakan bupati dan wakil bupati periode 2025-2029 yaitu:

“Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri”

Inovatif, Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Prinsip Peningkatan Efisiensi, Perbaikan Efektivitas, Perbaikan Kualitas Pelayanan, Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan, Beroreantasi Kepada Kepentingan Umum, Dilakukan Secara Terbuka, Memenuhi Nilai Kepatutan, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya Tidak Untuk Kepentingan Diri Sendiri.

Sejahtera, Tercapainya Kehidupan Masyarakat Yang Tentram Yang Ditandai Dengan Peningkatan Penghasilan Masyarakat, Dapat Menikmati Akses Terhadap Pendidikan Dan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan.

Adil, Meretas Ketimpangan Dan Kesenjangan Pembaguanan Infrastruktur Khususnya Pembagunan Pelayanan Dasar Seperti Jalan Dan Transportasi, Air Bersih, Energi Listrik, Dan Jaringan Wifi.

Mandiri, Kemampuan Pemerintah Untuk Mengelola Sumber Daya Alam Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Serta Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Daerah Yang Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Bersama.

Sedangkan misi Bupati Bupati dan wakil Bupati terpilih, yakni :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berkarakter;
2. Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal ;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Melayani, Cepat dan Tuntas;
4. Percepatan dan Penuntasan Pembagunan Infrastruktur Dasar yang Adil dan Merata;
5. Menciptakan Tata Kehidupan yang Harmoni dengan Menjaga dan Melestarikan Nilai - Nilai Budaya dan Kearifan Lokal.

Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Indikator tujuan dan sasaran sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Berikut ini disajikan target indikator RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

Tabel 2.29
Target Indikator RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

MISI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025-2029	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029	SATUAN	2024 (Capaian)	2025 (Target)	2026 (Target)	2027 (Target)	2028 (Target)	2029 (Target)	2030 (Target)
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Dan Berkarakter.	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Merata**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**69.27**	**69.96**	**70.66**	**71.35**	**72.04**	**72.73**	**73.43**
		Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah dan	Tahun	8.39	8.49	8.59	8.68	8.78	8.88	8.98
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.69	12.70	12.72	12.73	12.74	12.75	12.77
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata	Usia Harapan Hidup	Tahun	73.13	73.16	73.20	73.23	73.26	73.29	73.33
Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif Melalui Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya Lokal**		**Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**4.03**	**5.50**	**5.62**	**5.74**	**5.86**	**5.98**	**6.10**
		Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	Persen	19.93	20.50	21.07	21.63	22.20	22.77	23.34
			Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	6.34	7.03	7.46	7.89	8.32	8.75	9.18
		Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas	Persen	0,188	0,2	0,25	0,3	0,75	1	1,3

MISI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025-2029	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029	SATUAN	2024 (Capaian)	2025 (Target)	2026 (Target)	2027 (Target)	2028 (Target)	2029 (Target)	2030 (Target)
		Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Realisasi Investasi	Miliar Rupiah	3050.41	4546.17	5261.20	5976.23	6691.26	7406.30	8121.33
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi dan Sosial Masyarakat untuk Pemerataan Kesejahteraan		**Persentase Penduduk Miskin**	**Persen**	**5,73**	**5.38**	**5.26**	**5.15**	**5.03**	**4.92**	**4.80**
			Gini Ratio	**Persen**	**0,270**	**0,265**	**0,260**	**0,255**	**0,250**	**0,245**	**0,240**
		Menguatnya Perlindungan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	69,08	69,75	70,88	72	73,60	74,22	76,15
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan untuk menunjang Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	73,85	79,16	81,50	83,72	85,22	86,90	88,37
		Meningkatnya Kesempatan Kerja untuk Menurunkan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.71	2.59	2.49	2.39	2.29	2.19	2.09

MISI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025-2029	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029	SATUAN	2024 (Capaian)	2025 (Target)	2026 (Target)	2027 (Target)	2028 (Target)	2029 (Target)	2030 (Target)
		Tingkat Pengangguran									
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat Dan Tuntas.	**Terwujudnya Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	**75.70**	**76.24**	**76.98**	**77.45**	**78.00**	**78.90**	**79.50**
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai	64.56	66.00	67.85	68.89	69.60	70.35	71.20
		Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.74	3.885	4.03	4.175	4.32	4.465	4.61
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Indeks SPBE	Indeks	2.61	2.74	2.87	3	3.13	3.26	3.39
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan	Opini BPK	Skor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Sistem Merit	Indeks	1,34	1.47	1.57	1.64	1.78	1.85	1.95
Percepatan Dan	**Terwujudnya Infrastruktur**		**Indeks Kepuasan**	**Indeks**	**50**	**52.5**	**55**	**57.5**	**60**	**62.5**	**65**

MISI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025-2029	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029	SATUAN	2024 (Capaian)	2025 (Target)	2026 (Target)	2027 (Target)	2028 (Target)	2029 (Target)	2030 (Target)
Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata.	**Kewilayahan yang Adil, Tangguh dan Berwawasan Lingkungan**		**Layanan Infrastruktur**								
		Meningkatnya Konektivitas Antar wilayah	Indeks Konektivitas	Indeks	55,64	57,38	59,00	61,10	63,72	65,41	67,50
			Indeks Infrastruktur	Indeks	65.04	66.21	67.37	68.54	69.7	70.86	72.03
		Meningkatknya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	138.29	134.41	130.12	130.53	126.24	126.65	122.36
		Meningkatnya kualitas penataan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,62 (2023)	80.55	81.35	81.03	81.83	81.51	82.31
Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan Menjaga Dan Melestarikan Nilai - Nilai	**Terciptanya Masyarakat Harmonis yang Rukun, Toleran dan Berbudaya**		**Indeks Harmoni Indonesia (Ihal)**	**Indeks**	**7,13**	**7,24**	**7,30**	**7,44**	**7,50**	**7,68**	**7,80**
		Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78.94	79.98	81.02	82.06	83.1	84.14	85.18
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	56,71	57,90	59,10	60,29	61,49	62,69	63,88

MISI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025-2029	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029	SATUAN	2024 (Capaian)	2025 (Target)	2026 (Target)	2027 (Target)	2028 (Target)	2029 (Target)	2030 (Target)
Budaya Dan Kearifan Lokal		Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan	Indeks Trantibumlinmas	Indeks	63	68	72	78	80	82	86

Sumber: Berbagai sumber diolah, 2025

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.1.1. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan pembangunan dapat ditelusuri melalui evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya dan memperhatikan kondisi di masyarakat atas suatu perkara yang sedang terjadi. Permasalahan tersebut di masa yang akan datang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehingga menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan. Berikut ini adalah rekapitulasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Nunukan yang telah memperhatikan perkara atau isu di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan Nasional.

Tabel 2.31
Permasalahan Pembangunan kabupaten Nunukan

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
1	Pendidikan	• Partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan masih rendah (SPM) • Angka partisipasi kasar PAUD masih dibawah 50% • Masih adanya anak putus sekolah • Menurunnya angka kelulusan pendidikan menengah (SMP/MTs) • Adanya penurunan Angka partisipasi kasar pada pendidikan menengah (SMP/MTs) • Adanya anggapan bahwa pendidikan usia dini hanya menghabiskan biaya • Rendahnya motivasi dan minat peserta didik untuk bersekolah dan memilih untuk bekerja • Masih adanya akses menuju sekolah yang sulit untuk dijangkau • Sulitnya para pendidik untuk mengikuti proses belajar mengajar sesuai jadwal yang ditentukan penyelenggara

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		• Masih adanya anggapan masyarakat bahwa untuk bekerja tidak perlu menggunakan ijazah
2	Kesehatan	• Pelayanan dasar terhadap ibu hamil, ibu bersalin, balita, anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia dan penderita hipertensi masih belum mencapai target (SPM) • Terjadi kenaikan signifikan pada Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH • Terjadi peningkatan AKI per 100.000 KH • Belum semua Puskesmas memiliki tim penanganan kegawat daruratan maternal disertai advokasi rujukan melibatkan lintas sektor belum maksimal sehingga masih ada persalinan bukan oleh nakes dan tidak di faskes • Kasus kematian bayi masih tinggi • Kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan khususnya di wilayah 3 dan 4 • Meningkatnya Prevalensi Penyakit Tidak Menular (Jantung, Hipertensi, Diabeter Mellitus dll) • Meningkatnya Insidensi Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan • Sistem Informasi Kesehatan belum memadai
3	PUPR	• Persentase pemenuhan akses layak sanitasi bersanitasi masih belum optimal • Persentase pemenuhan akses layak air minum di Kabupaten Nunukan belum 100%

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		• Tidak adanya sumber air baku di Pulau Nunukan dan Sebatik dan hanya mengandalkan air permukaan tadah hujan • Tidak terealisasinya kegiatan rumah tangga bersanitasi/ rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah • Belum direncanakannya pendamping untuk tenaga fasilitastor lapangan yang merupakan kegiatan swakelola • Belum adanya prioritas untuk membangun jalan atau pembukaan jalan baru (lebih menitikberatkan pada peningkatan jalan)
4	Perkim	• Penurunan permukiman layak huni • Air bersih dan sanitasi menjadi kewenangan DPU • Ruang terbuka hijau menjadi urusan DLH
5	Trantibum	• Menurunnya jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana • Menurunnya persentase warga negara yang ikut pelatihan kesiapsiagaan bencana • Adanya keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan permasalahan yang dihadapi • Akses jalan yang belum memadai • Laporan masyarakat yang sering terlambat sehingga penanganan kebakaran belum optimal • Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya kebakaran • Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		• Kurangnya pelatihan tentang peningkatan kecakapan anggota/ aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan • Belum memadainya akses jalan
6	Sosial	• Masih terhadap penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
7	Tenaga Kerja	• Terjadi penurunan jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan • Peningkatan angka sengketa antara perusahaan dan pekerja • Penyebaran PPKS Anak Terlantar disetiap kecamatan • Penyebaran informasi kesempatan kerja yang masih kurang • Angkatan kerja setiap tahun meningkat dikarenakan migrasi penduduk dari luar daerah • Kesempatan kerja tidak sesuai kualifikasi yang diinginkan persusahaan • Kecamatan di luar pulau Nunukan tidak bisa mengikuti pelatihan dikarenakan Transportasi menuju BLK yang ada di pulau Nunukan cukup mahal
8	PPPA	• Pembinaan ketenagakerjaan belum optimal terhadap perusahaan/ pekerja • Masih terdapat sekitar 40% angkatan kerja perempuan yang belum terserap dalam pasar kerja

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
9	Pangan	• Ketersediaan pangan di Kabupaten Nunukan mengalami tren penurunan • Terjadi penurunan skor PPH dan masih di bawah rata-rata skor PPH nasional • Harga pangan menjadi tinggi, khususnya di Kecamatan Sebuku, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sembakung, dan kecamatan lainnya • Faktor penghambat adalah ketersediaan dana yang tidak dapat dijamin penuh dan alokasi kebijakan anggaran yang berubah - ubah menjadikan penyusunan berpotensi dapat mengalami perubahan dan penyesuaian pada waktu dan kondisi tertentu • Kuranganya pemahaman masyarakat/ pelaku usaha/ petani tentang pentinya keamanan pangan Ketersediaan pangan tidak merata sepanjang tahu • Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah • Konsumsi pangan masyarakat yang belum Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman • Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat • Perlunya jaminan mutu pada pangan segar
10	Pertanahan	• Penurunan penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi • Penurunan tingkat penyelesaian kasus pertanahan • Izin lokasi sdh tidak ada kewenangan, sementara KKPR menjadi kewenangan PTSP

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		• Perbup Izin membuka tanah belum dituntas • Beberapa kewenangan masih berada di BPN
11	Lingkungan Hidup	• Terjadi penurunan IKLH • Terhambatnya perkembangan Indeks Kualitas Air oleh adanya konversi lahan menjadi perkebunan sawit di sepanjang sungai dan belum pernah dilakukan normalisasi sungai Permasalahan Pembangunan • Tidak adanya uji emisi kendaraan bermotor • Separuh dari total sampah berhasil diolah dan teratasi melalui TPA,kegiatan 3R, maupun kegiatan pengolahan sampah lainnya • Minimnya jumlah SDM Fungsional PEDAL, PPLH, Penyuluh LH, Analis Lingkungan Hidup • Rendahnya komitmen pelaku usaha/ kegiatan dalam melaksanakan kewajiban izin lingkungan dan peraturan bidang LH
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	• Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang cenderung menurun • NIK ganda pada KTP • Masyarakat belum memiliki NIK NIK pada KTP el tidak aktif • Penduduk Non Permanen tidak Melaporkan Kedatangan/Kepindahannya • Masih ada masyarakat yang menggunakan jasa calo dalam pengurusan dok adminduk • Lokus layanan belum memilliki jaringan internet
13	PMD	• Terjadi penurunan nilai Indeks Desa Membangun

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
14	PPKB	• Belum optimalnya persentase KB Aktif
15	Perhubungan	• Terjadi kenaikan kepada V/C rasio kab/ kota • Banyaknya Permintaan masyarakat terkait layanan angkutan • Masalah Serius yang selalu terjadi dari waktu ke waktu di jalan
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	• Belum semua PD terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo • Sulitnya mencari lahan untuk pembangunan tower • Kurangnya koordinasi antara pihak vendor yang ingin membangun dengan pihak diskominfo • Adanya gangguan jaringan karena faktor alam Pengelolaan website OPD yang belum maksimal • Masih terbatasnya jangkauan jaringan dan bandwith internet
17	Koperasi, dan UKM	• Adanya penurunan jumlah koperasi aktif • Jumlah koperasi tidak aktif semakin meningkat • Koperasi tidak maksimal dalam menjalankan usahanya sehingga terdapat koperasi yang tidak melaksanakan RAT • Rendahnya kompetensi pelaku UMK dalam mengelola usaha • Sulitnya akses pemasaran bagi pelaku UMK • Kurangnya kreatifitas dan inovasi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya • Kurangnya kesadaran pelaku UKM melengkapi usahanya dengan dokumen perizinan (NIB, PKP, PIRT, dan Halal)

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		• Adanya keterbatasan modal pada pelaku UMKM baru • Masih banyaknya koperasi yang administrasinya belum tertata dengan baik (tidak tertib, tidak transparan dan tidak akuntabel)
18	Penanaman Modal	• Adanya kesulitan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi (investasi yang dilakukan setelah pandemi memerlukan waktu untuk kembali menghasilkan output yang signifikan) • Kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi informatika • Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan usahanya • Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan realisasi investasi usahanya dalam bentuk LKPM khususnya pelaku UKM • Jangkauan jaringan internet serta kualitas SDM pengguna layanan digital yang masih memerlukan pendampingan dalam proses perizinan berusaha dan non berusaha
19	Kepemudaan dan Olahraga	• Menurunnya jumlah atlet berprestasi • Menurunnya jumlah wirausaha muda Menurunnya persentase pemuda yang aktif dalam organisasi pemuda • Masih kurangnya kreatifitas pemuda dalam berwirausaha

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		• Masih minimnya sarana prasarana olahraga terutama di wilayah yang memiliki aksesibilitas yang terbatas • Masih kurangnya pelatih yang bersertifikasi • Masih terdapat organisasi/ OKP yang belum terdaftar • Kurangnya kerjasama antar stakeholder untuk saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan kepemudaan di bidang lain
20	Statistik	• Cakupan ketersediaan data statistik sektoral yang terus menurun • Belum optimalnya pengolahan, dan updating data statistik sektoral
21	Kebudayaan	• Kurangnya variasi event yang ada di Kab. Nunukan • Minimnya kesadaran masyarakat tentang potensi daerah akan kearifan lokal • Belum optimalnya penggalian atau pengkajian terhadap karya budaya, situs maupun cagar budaya • Masih rendahnya regenerasi dari pelaku seni sehingga berdampak pada menurunnya perlaku seni • Potensi cagar budaya banyak terdapat didaerah kecamatan yang memiliki aksesibilitas yang sulit di jangkau
22	Perpustakaan	• Adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan fasilitas perpustakaan dengan minat atau aksesibilitas masyarakat untuk menggunakannya

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
23	Kearsipan	• Adanya komitmen yang kuat dari pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa arsip dikelola dengan baik, sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku
24	Kelautan dan Perikanan	• Tingkat konsumsi ikan masih rendah • Aksesibilitas ke pasar ikan yang sulit • Pendapatan masyarakat yang rendah • Selera masyarakat yang kurang untuk mengonsumsi ikan • Kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan masih kurang
25	Pariwisata	• Terbatasnya destinasi pariwisata yang ada di Kab. Nunukan • Minimnya informasi terkait paket wisata sehingga berpengaruh pada lama tinggal di Kab. Nunukan • Belum tersedianya informasi pariwisata disitus online • Masih minimnya daya tarik wisata dan promosi pariwisata • Belum optimalnya pengelolaan kawasan wisata • Kurangnya inovasi dan atraksi pada objek wisata • Masih rendahnya tingkat amenitas pada sejumlah objek wisata
26	Pertanian	• Jumlah kelompok tani aktif yang fluktuatif • Kurangnya akses permodalan di tingkat kelompok tani • Kurangnya petugas di lapangan dalam melakukan pendampingan dan pembinaan di kelompok tani

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		• Kurangnya bantuan dan kelompok tani yang kurang berkembang
27	Peternakan	• Jumlah penyakit pada hewan meningkat
28	Perdagangan	• Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan menurun • Inflasi nasional dampak dari Kenaikan BBM pada akhir 2022 yang berdampak pada kenaikan harga produksi sehingga harga barang juga mengalami kenaikan dan mengurangi jumlah minat belanja masyeakat di tingkat perdagangan besar dan perdagangn eceran • Pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor UKM dan IKM juga tidak maksimal sehingga berdaampak pada pendapatan masyarakat secara umum • Daya Beli Masyarakat terhadap Kebutuhn pokok dan kebutuhan sekunder juga menurun akibat pendapatan masyarakat tidak meningkat
29	Perindustrian	• Penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDRB • Keterbatasan Kualitas Sumber daya Manusia IKM dalam Hal Managemen usaha, inovasi produk, akses pasar dan penguasaan teknologi • Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pelaku IKM dalam memanfaaatkan teknologi dalam pengajuan permohonan Sertifikat Produk melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional)

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		• Standarisasi dan sertifikasi beberapa produk IKM yang merupakan syarat menembus pasar glonal masih lemah karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait pemenuhan standarisasi dan sertifikasi • Keterbatasan Modal Usaha bagi beberapa pelaku IKM untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan daya saing industri dalam Negeri
30	Transmigrasi	• Masih adanya seketa lahan transmigrasi dengan masyarakat, sehingga sebagaian warga transmigrasi belum mendapatkan Lahan Usaha 2 • Masih kurangnya pembinaan warga transmigrasi terkait kesejahteraan warga transmigrasi
31	Sekretariat Daerah	• Adanya penurunan pada indeks kepatuhan standar pelayanan publik • Masih ditemukan ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dengan perjanjian kinerja di level OPD • Belum optimalnya beberapa komponen pelayanan publik antara mekanisme pengaduan pelayanan dan akses informasi layanan • Belum tersedianya sistem administrasi yang terintegratif untuk menunjang kinerja instansi
32	Sekretariat Dewan	• Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD mewarnai pengambilan keputusan terhadap rencana kerja DPRD yang ditetapkan sehingga berdampak pada realisasi pelaksanaan kegiatan

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		• Belum optimalnya pelayanan terhadap anggota DPRD
33	Perencanaan	• Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA memiliki ketercapaian 100%
34	Penelitian dan Pengembangan	• Indeks inovasi daerah Kab. Nunukan belum optimal
35	Kepegawaian	• Tingkat profesionalitas aparatur masih dalam predikat sedang • Kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian (beberapa layanan kepegawaian masih belum menerapkan layanan less paper) • Masih terdapat penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki • Belum semua pegawai ASN mengikuti asesmen dalam rangka penilaian kompetensi • Kurang optimalnya penggunaan data kinerja sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan • Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis merit sistem
36	Pendidikan dan Pelatihan	• Kurangnya minat ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis • Belum optimalnya hasil analisa kebutuhan diklat/ analisa pengembangan kompetensi setiap pegawai

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		• Pemberian kesempatan Pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja belum sepenuhnya diberlakukan • Pelaksanaan pengembangan kompetensi yang belum 1 pintu • Data kepesertaan diklat diluar BKPSDM belum terlaporkan
37	Pengawasan	• Rendahanya persentase tindak lanjut hasil temuan • Masih belum efektifnya fungsi pengawasan • Layanan pengawasan dan pembinaan Inspektorat terhadap Perangkat Daerah belum Optimal • Belum terimplementasinya Kendali Mutu Audit secara Optimal • Kurangnya Koordinasi pengawasan • Kurangnya Profesionalisme APIP • Sistem deteksi penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan belum optimal
38	Kewilayahan	• Sarana dan Prasarana Kantor masih terbatas terutama pada sarana penunjang pelayanan seperti komputer, server jaringan yang sering mengalami gangguan dan alat perakaman kependudukan yang rusak • SDM di Kecamatan Khususnya bagian Pelayanan masih terbatas • Akses jalan menuju kantor kecamatan masih sulit karena kondisi jalan rusak terutama pada musim hujan

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		• Minimnya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan mekanisme persyaratan pelayanan
39	Kesbangpol	• Terjadi peningkatan potensi konflik • Rendahnya kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan • Pendidikan politik bagi pemilih pemula masih belum efektif • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengembangan ketahanan social,ekonomi, budaya dan agama • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun hubungan yg harmonis antar suku, agama dan ras • Perubahan perilaku social masyarakat sebagai dampak Teknologi dan informasi • Mudanhya masyarakat terprovokasi dengan Isu SARA dan berita Hoax menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 • Lemahnya pemahaman dan rendahnya implementasi ideology Pancasila dan wasbang • Peningkatan kualitas demokrasi menuju demokrasi substansi yaitu demokrasi yang mengemban amanat rakyat • Belum optimalnya kewaspadaan dini masyarakat, pemantauan orang asing, penanganan konflik social, upaya pencegahan secara dini, bahaya terorisme dan radikalisme

No	Urusan	Permasalahan Pembangunan
		• Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hokum dan HAM yg berpotensi konflik dan disintegrasi social.

Sumber : Hasil analisis, 2025

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2026, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun lalu (2024) dan perkiraan tahun berjalan (2025) yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah memeliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026 seyogtanya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029, dan diselaraskan dengan arahan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, serta arah kebijakan ekonomi provinsi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.

Namun dikarenakan pada saat proses penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 ini belum terdapat RKP Tahun 2026 maupun RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, maka penyelarasan mengacu pada Rancangan RKP Tahun 2026, dan kebijakan ekonomi yang tertuang dalam paparan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 pada saat Musrenbang RKPD Kaltara 2026, serta memeperhatikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2026.

3.1.1. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia

Gambaran kondisi dan arah kebijakan ekonomi makro Indonesia yang tertuang dalam RKP Tahun 2026 bersumber dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026.

3.1.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar 1,23 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 10,52 persen; diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 9,84 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,27 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,01 persen. Sementara itu, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 4,55 persen dan 5,03 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 19,25 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,22 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,66 persen; Konstruksi sebesar 9,84 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,99 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 63,96 persen.

Sedangkan jika dilihat dari PDB menurut pengeluaran Ekonomi Indonesia Triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 4,87 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen PK-P yang terkontraksi sebesar 1,38 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,78 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,89 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,07 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,12 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa

(yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut Pengeluaran) juga tumbuh sebesar 3,96 persen.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial selama Triwulan I tahun 2025 menurut kelompok pulau masih disumbangkan oleh Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 57,43 persen; diikuti Pulau Sumatera 22,14 persen; Pulau Kalimantan 8,49 persen; Pulau Sulawesi 6,95 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara 2,71 persen; serta Pulau Maluku dan Papua 2,62 persen.

Pada triwulan I-2025, pertumbuhan ekonomi secara spasial di beberapa kelompok provinsi tercatat mengalami penguatan. Kelompok provinsi yang mencatat penguatan pertumbuhan (y-on-y) adalah Pulau Sulawesi yang tumbuh sebesar 6,40 persen, tertinggi di Indonesia; diikuti oleh Pulau Jawa sebesar 4,99 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 4,85 persen.

Secara lengkap disajikan pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I-2025, Pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha dan Pertumbuhan PDB menurut pengeluaran, serta Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB menurut Pulau, pada gambar 3.1 berikut ini.

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I Tahun 2025

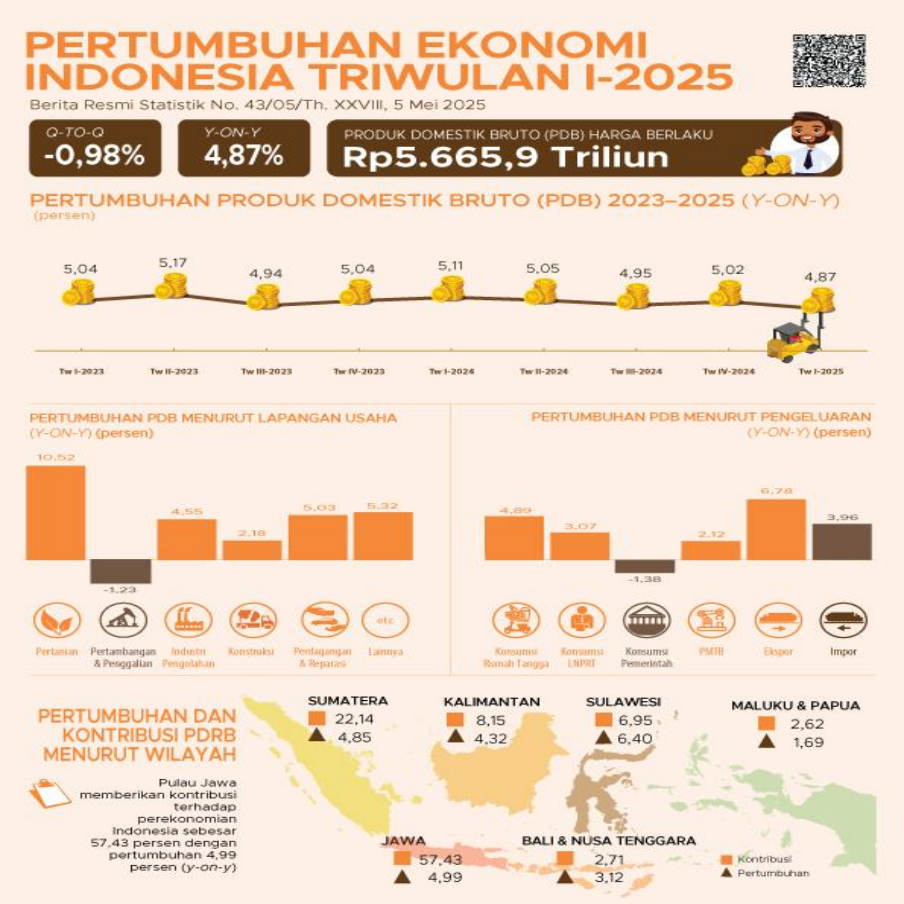

Sumber: *Berita Resmi Statistik RI, 2025*

Situasi ekonomi global 2024–2025 masih menghadapi tantangan, dengan kinerja perekonomian yang bervariasi antarnegara serta ketidakpastian yang meningkat di awal 2025. Ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat seiring dengan pergantian kepemimpinan di banyak negara yang memicu perubahan kebijakan, terutama terkait kebijakan tarif. Kondisi pemburukan perang dagang dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun 2025.

Bagi Indonesia, transmisi dampak terjadi melalui dua jalur utama, yaitu jalur perdagangan dan jalur arus modal. Dari jalur perdagangan, tarif AS berpotensi menurunkan ekspor Indonesia langsung ke AS maupun secara tidak langsung melalui penurunan permintaan negara-negara mitra dagang Indonesia (khususnya Tiongkok dan negara tujuan ekspor Indonesia) yang selanjutnya memicu penurunan harga komoditas global. Hal ini berisiko menekan pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya berdampak pada

penerimaan negara, kemampuan negara melakukan belanja, serta peningkatan beban utang.

Gambar 3.2
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau di Indonesia
Triwulan I Tahun 2025

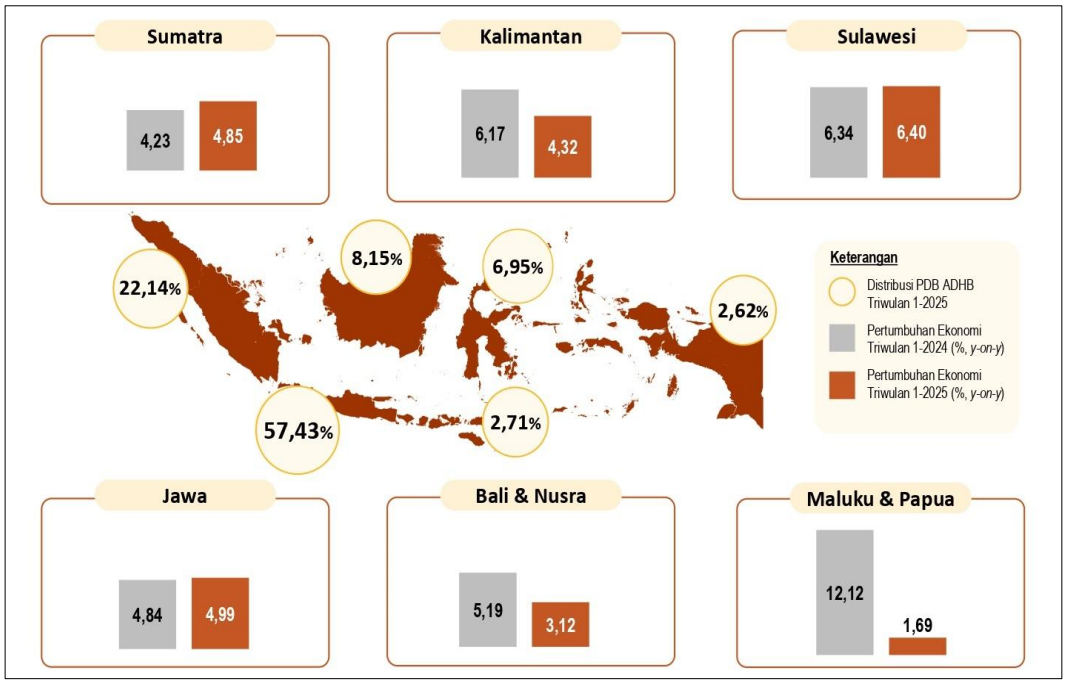

Sumber: *Berita Resmi Statistik RI, 2025*

3.1.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dinyatakan bahwa tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80–6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori upper middle-income country. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya. manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Upaya strategis dan mendesak untuk meningkatkan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha guna memperkuat transformasi ekonomi, yang mencakup (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (ii) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan; serta (iii) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor dan wilayah.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global yang didukung oleh ekspansi pasar ekspor, peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global, serta memanfaatkan peluang di tengah ketidakpastian geopolitik global melalui strategi: (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan tarif dan nontarif untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (ii) pengembangan pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, serta optimalisasi market intelligence, business matching dan pengamanan pasar ekspor; (iii) penguatan diplomasi untuk menurunkan

hambatan perdagangan dan mendorong penguatan tatanan perdagangan global serta meningkatkan efektivitas implementasi Free Trade Agreement (FTA) dan/atau Comprehensive Eonomic Partnership Agreement (CEPA); (iv) peningkatan kapasitas eksportir untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor, termasuk pelatihan ekspor dan bisnis e-commerce bagi pelaku UMKM, pengembangan exporter tools untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (v) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan database informasi pasar potensial dan buyer secara real-time; serta (vi) penguatan koordinasi kebijakan dan penyediaan data perdagangan jasa dan produk kreatif.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,85–6,38 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai trajectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 21,20 persen di tahun 2026. Faktor demand side yang diperkirakan turut menjadi pendorong kinerja industri pengolahan, seperti (i) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (ii) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; (iii) perluasan program makan bergizi bagi anak dan ibu hamil yang mendorong permintaan subsektor industri makanan dan minuman; serta (iv) peningkatan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan yang didorong dengan kebutuhan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, penanggulangan penyakit, dan akses pelayanan kesehatan dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta.

Sektor pertanian dalam arti luas pada tahun 2026 ditargetkan mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 3,09–3,33 persen. Pertumbuhan sektor pertanian utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Sektor konstruksi

pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 7,80–7,91 persen, didorong oleh proyek-proyek seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit daerah dan pembangunan KI dan KEK.

Sektor perdagangan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,25–5,62 persen. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global, melalui strategi (i) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah; (ii) promosi dan misi dagang, serta kerja sama antardaerah di setiap provinsi; (iii) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah; (iv) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah; (v) pendampingan adaptasi e-commerce bagi pelaku usaha di daerah termasuk UMKM serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan e-commerce dan digitalisasi perdagangan; (vi) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah; (vii) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik; (viii) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya; serta (ix) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

Arah kebijakan pariwisata difokuskan pada peningkatan nilai tambah pariwisata yang dilakukan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Faktor-Faktor pendukung kinerja sektor pariwisata meliputi (i) peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan bandara, pelabuhan dan transportasi darat yang mempermudah akses wisatawan serta peningkatan jumlah rute penerbangan langsung internasional ke Indonesia; (ii) kebijakan peningkatan kualitas SDM pariwisata; (iii) pengembangan atraksi dan event berkualitas meliputi peningkatan penyelenggaraan acara berskala internasional; (iv) penguatan pariwisata berkelanjutan melalui pelestarian budaya, pengembangan desa wisata berbasis komunitas, dan peningkatan sertifikasi dan regulasi untuk destinasi wisata yang ramah lingkungan; serta

(v) optimalisasi pemasaran pariwisata melalui AI dan digitalisasi sektor pariwisata (Tourism 5.0).

Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dinyatakan bahwa strategi jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera melalui 8 (delapan) strategi yang difokuskan pada: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Sementara, Strategi jangka pendek diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan fiskal dalam meredam gejolak dengan menjaga (i) stabilisasi ekonomi melalui diplomasi ekonomi terkait perdagangan, investasi melalui negosiasi, deregulasi dan perluasan pasar ekspor. Termasuk memperkuat kolaborasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan; (ii) melindungi dunia usaha dan daya beli melalui pemberian insentif fiskal, dan berbagai program perlindungan sosial; dan (iii) menjaga APBN tetap sehat dan kredibel dengan mengendalikan defisit dan utang, efisiensi dan rekonstruksi belanja, serta menjaga *fiscal buffer* dan fleksibilitas.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 kebijakan ekonomi secara umum diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan yang merupakan kesatuan wujud yang saling terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dalam kondisi ini, pembangunan tidak hanya bertumpu pada angka statistik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Secara konkret terdapat delapan strategi untuk pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, sebagai berikut:

1) Peningkatan Produktivitas Pertanian menuju Swasembada Pangan;
2) Industrialisasi (hilirisasi): padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan
3) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4) Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

5) Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
6) Transformasi Digital
7) Investasi: FDI berorientasi ekspor dan Investasi non-APBN
8) Belanja Negara untuk produktivitas: Makan Bergizi Gratis, Pembangunan 3 Juta Rumah, dll.

Selanjutnya, secara kewilayahan **arah pembangunan wilayah Kalimantan** adalah menjadi "Superhub Ekonomi Nusantara", dengan beberapa arah kebijakan ekonomi disajikan dalam infografis berikut ini.

Gambar 3.3
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kalimantan Utara
Tahun 2025-2029

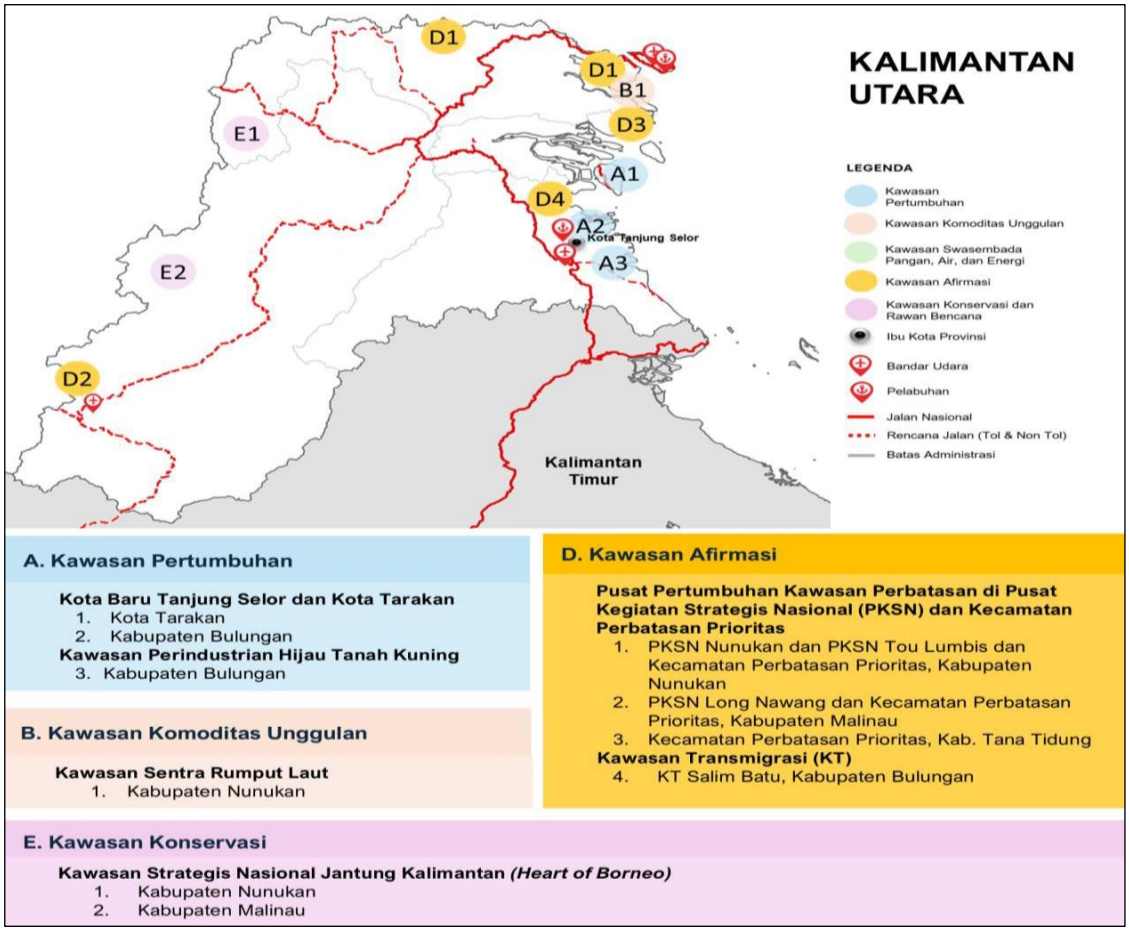

Sumber: *RPJMN 2025-2029*

3.1.2. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Utara

Arah kebijakan ekonomi Kalimantan Utara diekstrasi dari Rancangan RKPD 2026, yang merupakan pelaksanaan perencanaan tahun ke-2 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

3.1.2.1. Kondisi Perekonomian Kalimantan Utara

Kondisi ekonomi Kalimantan Utara triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,06 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar 0,06 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,89 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 10,63 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,34 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan tumbuh masing-masing sebesar 0,53 persen dan 9,08 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kalimantan Utara masih didominasi oleh Lapangan Pertambangan dan Penggalian sebesar 28,67 persen; diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,94 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,56 persen; Konstruksi sebesar 12,03 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 8,69 persen. Peran kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Utara mencapai 77,89 persen.

Dari sisi PDRB Pengeluaran pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh komponen pengeluaran kecuali komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,77 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,81 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,54 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 2,88 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 1,76 persen.

Namun demikian pertumbuhan perekonomian kalimantan utara lebih tinggi tertahan oleh melambatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan serta industri pengolahan. Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan demand

global terhadap komoditas perikanan, serta sejalan dengan tren normalisasi demand pada awal tahun. Dari sisi permintaan, kinerja perekonomian yang tetap bertumbuh positif terutama didukung oleh ekspor seiring dengan masih terjaganya kebutuhan ekspor batubara antar daerah dalam negeri terutama untuk keperluan industri seperti pembangkit listrik, industri semen serta smelter mineral. Di sisi lain, kinerja pertumbuhan perekonomian Kaltara yang dapat tumbuh lebih tinggi tertahan oleh melambatnya kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) meskipun masih tetap tinggi dibandingkan tren historisnya sejalan dengan masih berlanjutnya pembangunan sejumlah proyek strategis di Kaltara.

3.1.2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Utara

Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026 yang tertuang dalam Rancangan RKPD Tahun 2026 yaitu "***Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Optimalisasi Potensi Daerah***".

Guna mendukung agenda pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 di kisaran 5,00-5,60%. Berikut strategi dan langkah-langkah mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi kalimantan utara tahun 2026:

1) Peningkatan Produktivitas: Industrialisasi (hilirisasi) berorientasi ekspor dan program padat karya
   - Pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam unggulan (nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, dll)
   - Pembangunan 3 juta rumah
2) Peningkatan Produktivitas Pertanian menuju Swasembada Pangan
   - Kawasan Food Estate/Sentra Produksi Pangan
   - Makan Bergizi Gratis
   - Modernisasi dan digitalisasi pertanian
   - Pengembangan pangan lokal dan pangan akuatik
   - Subsidi pupuk, akses benih/pestisida dan bahan bakar, irigasi pertanian dan perikanan, mesin pertanian.

3) Swasembada Energi melalui Ekonomi Hijau
    - Energi terbarukan
4) Peningkatan Inovasi Teknologi melalui Transformasi Digital
    - Penguatan Sumber Daya Manusia Digital
    - Digitalisasi sektor ekonomi dan layanan publik
    - Kajian/penelitian dalam rangka penguasaan teknologi
5) Peningkatan Investasi Produktif Utamanya FDI (Foreign Direct Investment) atau Investasi Langsung Asing) Berorientasi Ekspor, dan Investasi Non-APBN
    - Pemberian Insentif dan Fasilitasi Investasi sesuai dengan karakteristik sektor dan wilayah.
    - Peningkatan Iklim Investasi melalui kepastian kebijakan dan hukum, serta sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan

Selanjutnya arah kebijakan ekonomi jangka menengah provinsi Kalimantan Utara ditujukan untuk mendukung pencapaian Misi 2 RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029 “Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan”, dengan arahan sebagai berikut:

1) Peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk sektor ekonomi unggulan dan potensial secara berkelanjutan
2) Peningkatan kapasitas pemasaran produk
3) Pengembangan riset dan inovasi pendukung pengembangan produk unggulan daerah
4) Pengembangan hilirisasi dan diversifikasi ekonomi
5) Pengembangan ekonomi digital

Sementara fokus arah kebijakan kewilayahan Kalimantan Utara, yakni sebagai Beranda Depan Negara, Lumbung Energi Baru dan Terbarukan, serta Pusat Industri Hijau Berkelanjutan.

3.1.3. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Nunukan

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten tahun 2026 ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

3.1.3.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Nunukan

Untuk memperoleh gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Nunukan terkini, berikut akan disajikan data dan informasi (a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (b) Tingkat Kemiskinan; (c) Indeks Gini; dan (d) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh unit barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah tertentu atau di wilayah domestik suatu negara, yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk setempat.

Perhitungan PDRB secara konseptual dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan Produksi (Lapangan Usaha), Pengeluaran, dan Pendapatan. Namun untuk kepentingan penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 ini perhitungan PDRB menggunakan pendekatan Produksi (Lapangan Usaha) dan Pengeluaran.

PDRB terbagi menjadi 2 jenis yakni:

1) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) atau PDRB Riil, yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan berfungsi untuk mengukur Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara rill dari tahun ke tahun; dan
2) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) atau dikenal dengan PDRB Nominal yang disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan berfungsi untuk mengetahui kemampuan ekonomi serta melihat struktur perekonomian suatu daerah.

Berdasarkan buku Kabupaten Nunukan Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh BPS, pada tahun 2024 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 atau PDRB Riil Kabuten Nunukan mencapai 18,65 triliun. Capaian 2024 lebih tinggi dari PDRB ADHK tahun lalu yang berada diangka 17,91 triliun. Hal tersebut menunjukkan terdapat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,03 persen di tahun 2024. Lapangan usaha yang meraih pertumbuhan riil tertingi di tahun 2024, yakni (1) Sektor Konstruksi 18,66 persen; (2) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,51 persen; dan (3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,27 persen.

Untuk mendapatkan informasi historis capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Nunukan selama 5 tahun terakhir berdasarkan PDRB ADHK, berikut disajikan perbandingannya dengan LPE Provinsi Kalimantan Utara dan LPE Indonesia (Nasional) Tahun 2020-2024.

Gambar 3.4
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Indonesia
Tahun 2020 - 2024

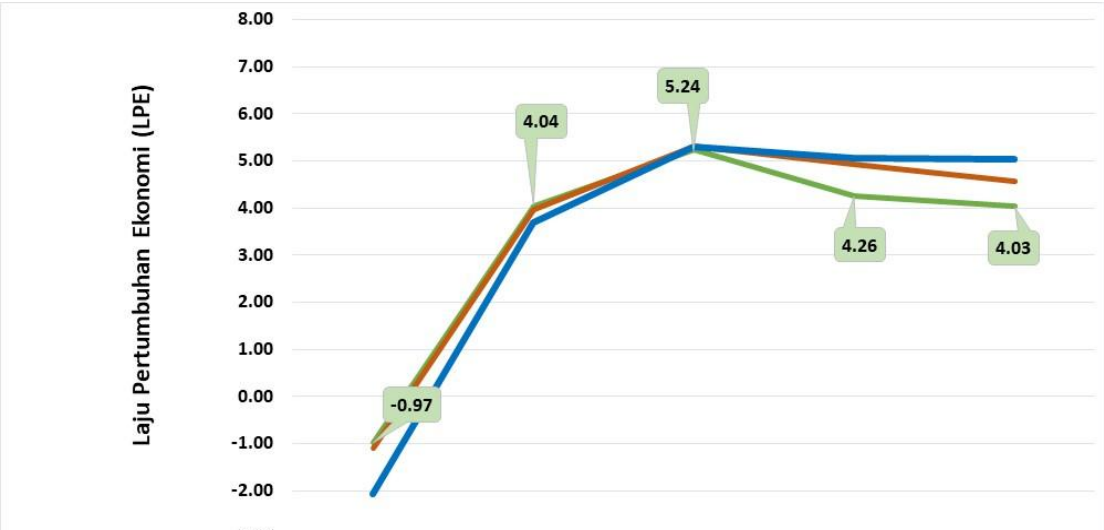

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Nunukan	-0.97	4.04	5.24	4.26	4.03
Provinsi Kalimantan Utara	-1.09	3.98	5.32	4.94	4.57
Indonesia (Nasional)	-2.07	3.70	5.31	5.05	5.03

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2025

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara/daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik.

Berdasarkan Gambar 3.2, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nunukan mulai tahun 2023 hingga 2024 lebih rendah daripada LPE Indonesia (Nasional). Bahkan pada tahun 2021, Kabupaten Nunukan mengungguli Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahun 2024 LPE Kabupaten Nunukan mengalami perlambatan, hanya mencapai 4,03 persen atau lebih rendah 0,23 persen dibandingkan tahun lalu. Bahkan lebih rendah 0,54 persen dibandingkan dengan LPE Provinsi Kalimantan Utara, dan 1,00 persen di bawah LPE Indonesia. Kondisi ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk dikaji dalam rangka mencari solusi peningkatan LPE di Kabupaten Nunukan.

Kemudian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Nunukan tahun 2024 mencapai 40,54 triliun, atau menurun 4,69 persen dibanding tahun lalu yang mana PDRB ADHB berada diangka 42,53 triliun. Struktur ekonomi Kabupaten Nunukan tahu 2024 relatif memiliki pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana kontribusi PDRB didominasi sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang sebesar 40,35 persen dari total PDRB Kabupaten Nunukan. Namun pertumbuhan share di sektor pertambangan dan penggalian melemah yakni menurun sebesar 6,20 persen dibandingkankan tahun sebelumnya. Selanjutnya share margin terbesar kedua, berasal dari lapangan usaha pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 19,92 persen dari total PDRB, dan di posisi ketiga dengan kontribusi sebesar 7,68 persen ditempati oleh sektor konstruksi.

Berikut disajikan secara detail kontribusi 17 Lapangan Usaha dalam struktur ekonomi Kabupaten Nunukan Tahun 2024

Gambar 3.5
Struktur Ekonomi Kabupaten Nunukan
Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2024

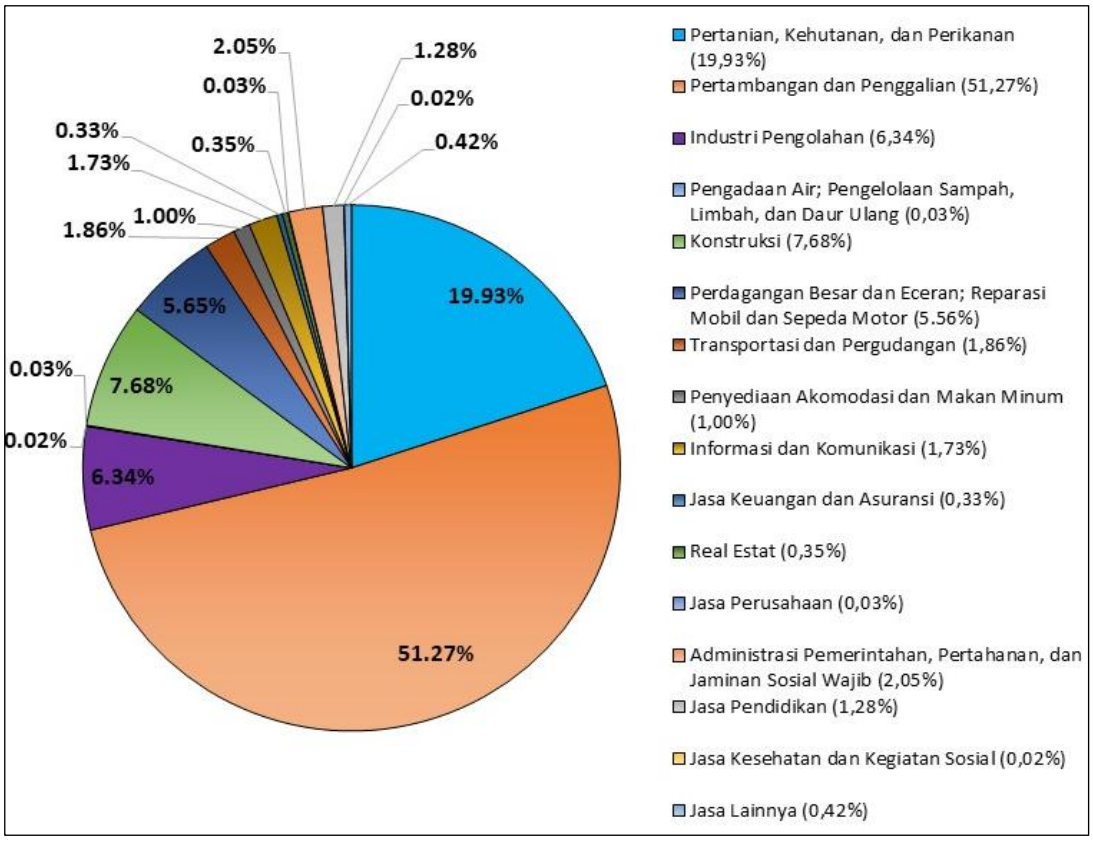

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2025

Selain berfungsi untuk memotret struktur ekonomi, dari PDRB ADHK juga dapat diketahui perkembangan PDRB Per Kapita dari tahun ke tahun.

PDRB Per Kapita merupakan gambaran pendapatan rata-rata penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah tertentu, yang didapat dari hasil bagi antara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah pendudukan suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut diasumsikan semakin membaik perekonomiannya serta sejahtera masyarakatnya.

Berikut ini disajikan PDRB Per Kapita Kabupaten Nunukan dalam kurun 5 tahun terakhir, serta gambaran pertumbuhannya.

Gambar 3.6
PDRB Per Kapita Per Tahun
Penduduk Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

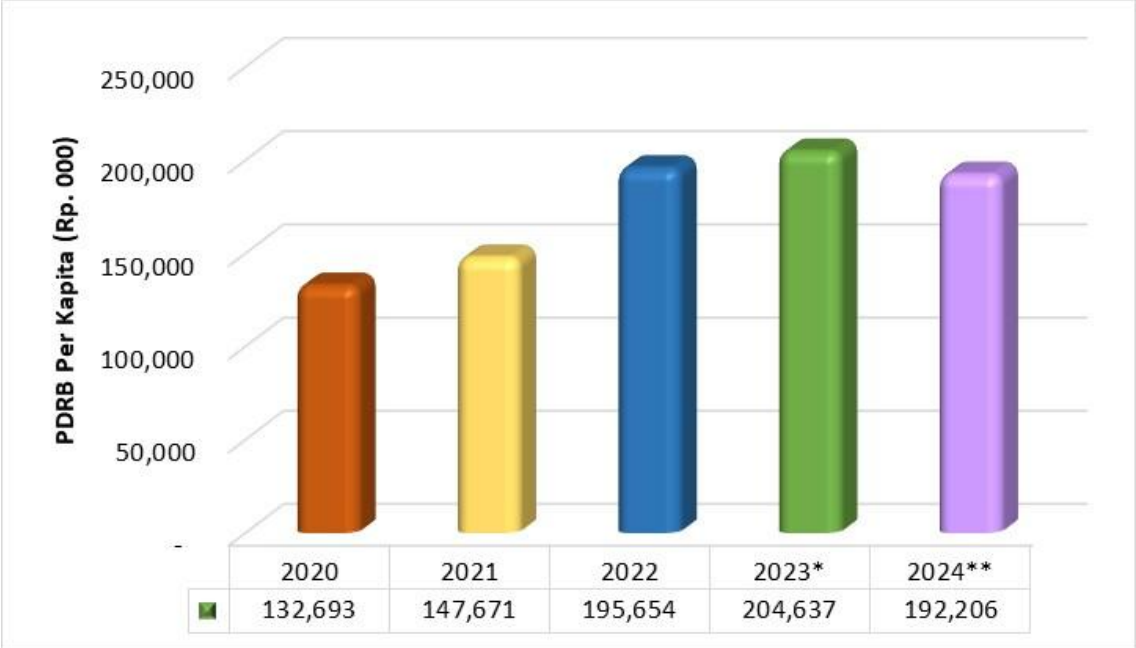

*Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Nunukan, diolah, 2025

Secara nominal PDRB Per Kapita penduduk Kabupaten Nunukan dalam kurun 2020-2023 terus menunjukkan tren kenaikan. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6,07 persen, dengan demikian laju pertumbuhan rata-rata PDRB dalam lima tahun terakhir dikisaran 9,01 persen per tahun. Sementara persentase pertambahan penduduk Kabupaten Nunukan tahun 2024 sebesar 1,47 persen, sehingga menjadi salah faktor yang mempengaruhi penurunan PDRB Per Kapita Kabupaten Nunukan, karena pertumbuhan Penduduk lebih tinggi daripada pertumbuhan PDRB.

Faktor lain yang mempengaruhi penurunan PDRB Per Kapita Kabupaten Nunukan tahun 2024, karena memiliki struktur ekonomi yang belum

terdiversifikasi, dan masih tergantung pada sektor primer sehingga rentan terhadap fluktuasi harga komoditas utama.

Penurunan ini perlu diperhatikan dan dianalisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mendasarinya dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan.

b. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Dan Garis Kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Berikut ini disajikan perkembangan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan Kabupaten Nunukan Tahun dalam 5 tahun terakhir.

Gambar 3.7
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Nunukan Tahun 2020-2024

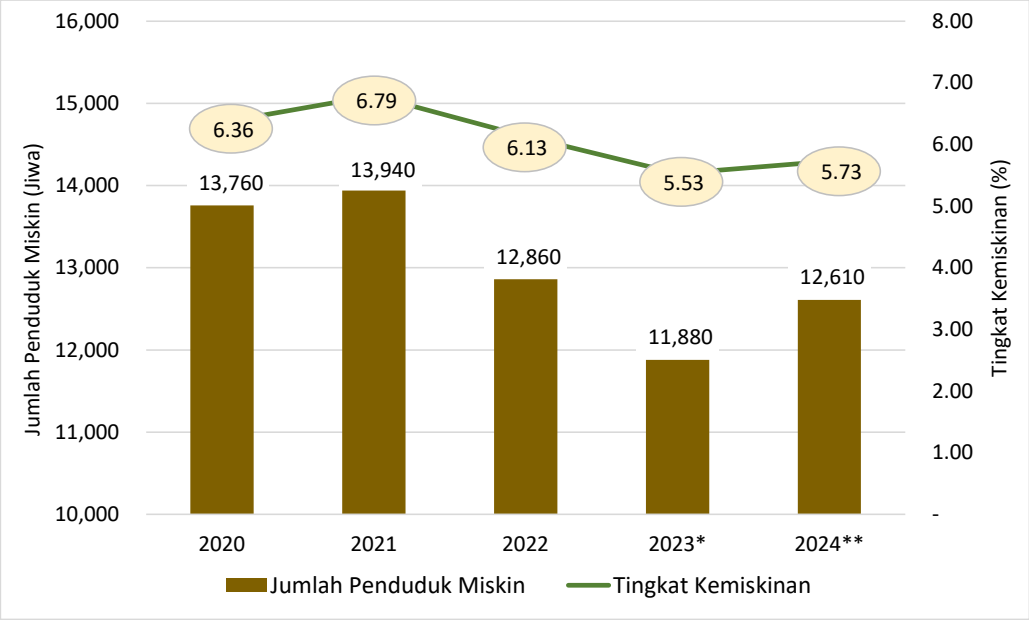

*Catatan: *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara*
Sumber: Data BPS Nunukan, diolah, 2025

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 597.431 per kapita per bulan.

Berdasarkan Gambar 3.7 di atas, jika dirata-ratakan persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun mencapai 6,11 persen per tahun. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 730 Jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga tingkat kemiskinan meningkat 0,20 persen yakni dari 5,53 persen di tahun 2023 menjadi 5,73 persen di tahun 2024.

c. Indeks Gini

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan dan dipublikasi oleh Corrado Gini, ahli statistik, demografi sekaligus sosiolog Italia pada tahun 1912 dalam bukunya "*Variabilita e Mutabilita*" atau *Variability dan Mutability*. Kini Indeks Gini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah.

Berikut disajikan perkembangn Indeks Gini Kabupaten Nunukan dalam 5 (Lima) tahun terakhir.

Gambar 3.8
Perbandingan Indeks Gini
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Indonesia
Tahun 2020-2024



Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2025

Indeks Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pendapatan per kapita yang sama. Sedangkan Indeks Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti pendapatan per kapita hanya dimiliki satu penduduk atau sumber pendapatan hanya dikuasai satu pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Indeks Gini, semakin tinggi tingkat kesenjangan distribusi pendapatan suatu daerah antara penduduk yang berpendapatan tinggi dengan penduduk yang berpendapatan rendah.

Dari Gambar 3.8 tampak bahwa Indeks Gini Kabupaten Nunukan memiliki tren lebih rendah daripada Provinsi Kalimantan Utara maupun Nasional, kecuali pada tahun 2024 lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Utara yakni di angka 0,270. Capaian ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di Kabupaten Nunukan relatif rendah. Baik Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Nasional memiliki tingkat ketimpangan pendapatan rendah karena seluruhnya berada di bawah nilai 0,400.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penduduk yang tergolong penganggur terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Kemudian yang dimaksud angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi bukan termasuk angkatan kerja.

Perkembangan TPT di Kabupaten Nunukan dalam 5 tahun terakhir dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 3.9
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara dan Indonesia
Tahun 2020-2024

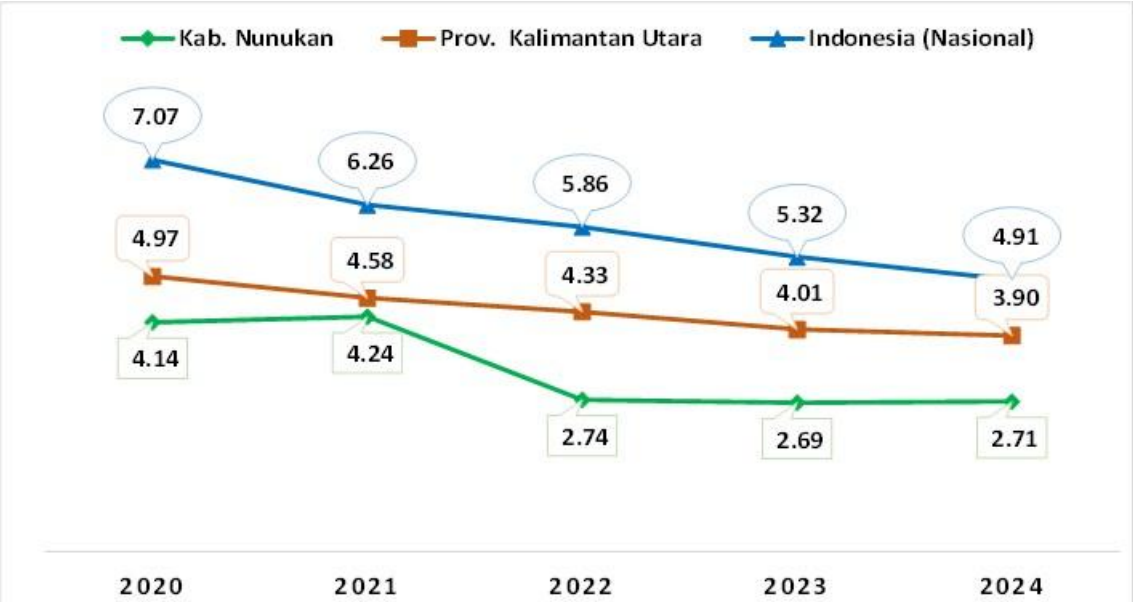

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, diolah, 2025

Dari grafik pada Gambar 3.9 tampak bahwa dalam lima tahun terakhir TPT Kabupaten Nunukan konsisten berada di bawah Provinsi Kalimantan Utara, serta jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Indonesia, dengan rata-rata TPT hanya 3,30% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan angkatan kerja di Kabupaten Nunukan cukup baik dan bukan merupakan Kabupaten dengan TPT tertinggi baik di Tingkat Provinsi maupun Nasional.

Pada tahun 2024 jumlah penduduk angkatan kerja Kabupaten Nukan sebanyak 113.968 Jiwa, dan 2,71 persen atau 3.283 Jiwa diantaranya termasuk dalam kategori penganggur terbuka. Jumlah penganggur terbuka tahun 2024 bertambah sebanyak 213 Jiwa dari tahun sebelumnya, demikian pula tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 0,02 persen..

3.1.3.2. Prospek dan Tantangan Ekonomi Kabupaten Nunukan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Kabupaten Nunukan menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua di Kalimantan Utara pada 2024. Dengan kontribusi sebesar 27,03 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi, posisi Nunukan hanya berada di bawah Kota Tarakan yang masih memimpin perekonomian wilayah. Capaian ini menegaskan peran strategis Nunukan dalam struktur perekonomian provinsi.

Kabupaten Nunukan memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan, terutama pada sektor industri pengolahan dan perdagangan. Kedua sektor ini dinilai lebih tahan terhadap gangguan eksternal dan cenderung memiliki pertumbuhan yang stabil sepanjang waktu. Stabilitas sektor perdagangan menjadi andalan di tengah fluktuasi harga komoditas, seperti batu bara dan rumput laut. Sektor ini dapat menjadi alternatif unggulan bagi Nunukan jika dikembangkan secara berkelanjutan dan didukung infrastruktur memadai.

Kemudian pasca 4 tahun terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kini geliat aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Nunukan yang bersumber dari pelaku UMKM juga semakin meningkat, bahkan terdapat produk UMKM yang telah berhasil diekspor.

Selain itu dengan adanya penandatangan pembaruan Perjanjian Perdagangan Perbatasan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia atau Indonesia-Malaysia *Border Trade Agreement (BTA)* pada 8 Juni 2023, dan telah beroperasinya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan, maka Kabupaten Nunukan berpeluang meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional di antara kedua Negara. Dengan kondisi geografis dan karakteristik sumber daya yang dimiliki, Kabupaten Nunukan juga dapat mendukung Prioritas Nasional ke-2 atau Asta Cita ke-2 melalui peningkatan ekonomi sektor pertanian dan perikanan dalam rangka swasembada pangan, pengembangan ekonomi kreatif, serta implementasi ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Kemudian Kabupaten Nunukan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan ekosistem serta pemanfaatan ekonomi digital.

Tantangan ekonomi Kabupaten Nunukan tidak hanya bersumber dari kondisi internal Kabupaten Nunukan, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi dan situasi ekonomi nasional maupun global. Tantangan yang hendaknya disikapi oleh Pemerintah Daerah, diantaranya:

1. Struktur ekonomi Kabupaten Nunukan masih sangat bergantung pada sektor primer, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga. Kondisi ini menjadi tantangan agar terjadi balancing maka perlu melakukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kinerja perekonomian sektor sekunder dan tersier.
2. Kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang kompleks dan terpisah-pisah, sehingga masih dihadapkan pada isu konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kurang merata dan bervariasinya aktivitas perekonomian Masyarakat.

3. Regulasi perizinan berusaha, serta aturan ekspor Indonesia yang sulit dipenuhi persyaratannya oleh pelaku usaha sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
4. Kondisi geopolitik utamanya kebijakan perang tarif dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar global, fluktuasi harga komoditas dan berotensi meningkatkan inflasi di Daerah.
5. Ketersediaan pangan kabupaten Nunukan masih sangat tergantung pada pasokan dari luar daerah, sementara prioritas nasional Indonesia menuju Swasembada Pangan, yang utamanya difokuskan dalam rangka implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
6. Tantangan ekonomi digital diantaranya kesenjangan akses internet dan infrastruktur digital yang belum memadai, literasi digital yang masih rendah dan isu keamanan data.
7. Kondisi keuangan daerah tahun 2026 masih berpotensi terkena efisiensi anggaran, sehingga dapat mempengaruhi belanja daerah yang berdampak pada aktivitas ekonomi kabupaten Nunukan.

3.1.3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Nunukan

Tema RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 yaitu "***Berdaya Saing Dengan Ekonomi Inklusif dan Infrastruktur Berkelanjutan Didukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Inovatif***".

Untuk mendukung agenda pembangunan tersebut, fokus pembangunan ekonomi Kabupaten Nunukan tahun 2026 ditujukan untuk mewujudkan visi misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah khususnya Misi 2 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yakni "Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal".

Strategi pertama yaitu Peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan dengan melibatkan peran masyarakat, serta memperlancar arus perdagangan, dengah arah kebijakan sebagai berikut:

1) Membangun dasar Pengembangan diversifikasi pangan.

2) Membangun dasar Pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi *school-to- work.*
3) Membangun dasar Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.

Strategi kedua yaitu Peningkatan keunggulan kompetitif dan komparatif UMKM melalui peningkatan kualitas produk, inovasi, kemitraan dan perluasan jaringan pemasaran dengan memanfaatkan teknologi, serta penguatan BUMD/ BUMDES, dengah arah kebijakan sebagai berikut:

1) Membangun dasar Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
2) Membangun dasar Peningkatan Produktivitas BUMD.
3) Membangun dasar Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.

Strategi ketiga yaitu Peningkatan Iklim Investasi yang berbasis pada potensi dan perluasan lapangan kerja, serta Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) Membangun dasar Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti energi terbarukan.
2) Membangun dasar Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.

Selain itu, pada tahun 2026 kebijakan pengendalian inflasi akan secara konsisten terus dilakukan melalui penguatan sinergi dengan Bank Indonesia di tingkat pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah. Strategi-strategi terus ditempuh melalui kebijakan menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, menjamin dan mengawasi kelancaran distrubusi serta komunikasi yang efektif terus dilakukan dalam upaya Bersama-sama mengendalikan inflasi baik di tingkat pusat maupun di daerah. Penggunaan Produk dalam negeri juga menjadi agenda perekonomian daerah yang ditopang oleh sektor perindustrian dan perdagangan sehingga kegiatan ekonomi didaerah bahan dalam negeri dapat semakin menggeliat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Dari 17 Arah Baru Menuju Perubahan Kabupaten Nunukan yang merupakan Arah Kebijakan/Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Periode 2025-2030, terdapat 9 Arah Kebijakan yang dapat mendukung peningkatan ekonomi daerah dan menjadi acuan dalam penentuan program prioritas daerah tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1) Pemberian Bantuan Bibit, Pupuk kepada Petani, dan Alat Mekanisasi Pertanian Secara Gratis.
2) Membuat Kampung Pertanian Hortikultura dan Palwija Berbasis Pengwilayahan
3) Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk Lahan Pertanian Produktif Khususnya Lahan Persawahan dan Hortikultura.
4) Memastikan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Untuk Tanaman Padi Dan Perkebunan.
5) Memberikan Bantuan Alat Tangkap Untuk Nelayan.
6) Pengembangan Sektor Budidaya Ikan Dengan Pembuatan Kampung Perikanan
7) Bantuan Modal Dan Peningkatan Keterampilan Pelaku Usaha UMKM.
8) Satu Desa Satu Program Unggulan Berbasis Potensi Lokal Melalui Penguatan Bumdes.
9) Pembangunan 100 Kilometer Jalan Tani Pertahun.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan keuangan daerah diselaraskan dengan kebijakan fiskal Indonesia, dan mandat peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan fiskal nasional secara umum merupakan upaya untuk penyehatan APBN yang ditempuh melalui ***collecting more, spending better,*** **dan** ***innovative financing.***

Fokus kebijakan fiskal nasional tahun 2026 adalah memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Untuk itu diperlukan reformasi struktural yang konsisten dan berkelanjutan yang difokuskan pada 8 (delapan) strategi guna mewujudkan: (i) ketahanan pangan; (ii) ketahanan energi; (iii) Makan Bergizi Gratis (MBG); (iv) program pendidikan; (v) program kesehatan; (vi) pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; (vii) pertahanan semesta; serta (viii) akselerasi investasi dan perdagangan global.

Pada tahun 2026, seirama dengan arah kebijakan ekonomi nasional, kebijakan fiskal Indonesia juga dimaksudkan untuk mencapai 5 goals jangka pendek yakni (a) akselerasi investasi; (b) pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM; (c) Ketahanan Pangan; (d) Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi); dan (e) Kesehatan (Indeks Kesehatan). Arahan kebijkan belanja untuk mencapai tiga tujuan tersebut khusus kepada wilayah Kalimantan Utara termasuk Kabupaten Nunukan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Arahan Kebijakan Keuangan
Wilayah Kalimantan Utara Tahun 2026

Goals 2026		Arahan Kebijakan Keuangan
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)		1) Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik;
		2) Fasilitasi diversifikasi ekonomi dan meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi komoditas lokal dengan adopsi teknologi yang dibutuhkan;
		3) Penguatan kawasan sentra produksi yang berkualitas sehingga harga komoditas andalan lebih stabil (kelapa sawit, udang, kepiting, rumput laut, batubara, bijih besi, dan intan);
		4) Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM;
		5) Dukungan pada UMKM pada pembiayaan, digitalisasi market produk dan sertifikasi yang memadai;
		6) Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau
		7) Pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)		1) Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat.
		2) Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti Pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar;
		3) Dukungan APBD untuk memastikan ketertiban dan keamanan Masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan system mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum
		4) Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin.
Ketahanan Pangan	Pertanian	1) Penguatan fiskal daerah missal sinergi pendanaan maupun *creative financing* antara lain untuk peningkatan infrastruktur;
		2) Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan;
		3) Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya.
	Perikanan	1) Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas perikanan;
		2) Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan;
		3) Optimalisasi belanja untuk meningkatkan infrastruktur perikanan
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)		1) Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI;
		2) Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan;
		3) Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan;
		4) Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan
		5) Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan pendidikan.
Kesehatan (Indeks Kesehatan)		1) Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penanganan stunting dan penguatan layanan kesehatan;
		2) Peningkatan kapasitas *fiscal* daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.;
		3) Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan;
		4) Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan;
		5) Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.

Sumber: Dokumen KEM dan PPKF Tahun 2026

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan

merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berdasarkan fungsi:

1) Fungsi otorisasi memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2) Fungsi perencanaan memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3) Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5) Fungsi distribusi mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6) Fungsi stabilisasi mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang bukan hanya mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau *output* melainkan *outcome* bahkan manfaat suatu program dan kegiatan dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Prinsip pengelolaan keuangan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap prospek serta tantangan perekonomian daerah seperti diuraikan pada sub bab sebelumnya, dirumuskan arah kebijakan keuangan Kabupaten Nunukan tahun 2025 yang mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, secara umum upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membangun komunikasi dan konsolidasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor migas (*lifting*), dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Dana Insentif Daerah (DID).

Salah satu pilar kebijakan dalam mendukung APBD yang sehat dan kredibel tersebut adalah *collecting more* melalui optimalisasi pendapatan daerah. Kebijakan optimalisasi terus dilakukan dengan senantiasa menjaga iklim investasi dan usaha yang tetap kondusif. serta keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Selain itu pemerintah daerah melakukan langkah-langkah strategis lainnya khususnya dalam mendorong peningkatan kinerja pendapatan daerah pasca terbitnya undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yakni salah satunya merancang peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi daerah.

Upaya lain yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan instansi vertikal baik yang berhubungan dengan pertanahan maupun terkait dengan

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terkait pertukuran data obyek dan subyek yang ada di kabupaten nunukan, realisasi penerimaan PBB P3, PPh 21 dan PPh 25/26 di Wilayah Kabupaten Nunukan sebagai dasar perhitungan proyeksi pendapatan berikutnya.

Selanjutnya melakukan sinergitas dengan provinsi khususnya pembahasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi kepada daerah terkait Opsen (pungutan tambahan pajak menurut persentase) yakni Opsen pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang disebut Opsen BBNKB yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Pemerintah daerah juga akan terus berupaya meningkatkan sistem dan memberikan layanan pajak agar lebih optimal khususnya peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui beberapa strategi dari sektor PBB P2 dengan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam rangka sinergitas, pertukaran data, pengawasan, pengendalian dan penagihan pajak serta pengembangan sistem pelayanan pajak untuk memudahkan proses perpajakan daerah menjadi mutlak dimaksimalkan.

Pada tahun 2025 terdapat kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), sehingga berakibat pada menurunnya Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer dari Pemerintah Pusat. Kebijakan ini berpotensi untuk terjadi kembali di tahun 2026, sehingga Pemerintah Kabupaten Nunukan hendaknya mensiasati kemungkinan tersebut dengan berupaya mencari sumber pendapatan daerah yang baru, serta melakukan penyesuaian alokasi belanja yang bersumber dari TKD.

Proyeksi/target pendapatan daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2

Realisasi, dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2023 s.d. 2027

KODE	KODE	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Tahun 2024 (n-1)	Proyeksi/Target Tahun 2025 (n)	Proyeksi/Target Tahun 2026 (n+1)	Proyeksi/Target Tahun 2027* (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1,785,329,041,005**	**2,033,308,976,638**	**1,981,187,317,056**	**1,955,010,523,440**	**1,938,644,988,963**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**193,175,709,910**	**127,653,753,821**	**140,610,106,310**	**151,745,698,714**	**161,794,137,940**
4.1.01	Pajak Daerah	96,346,709,187	35,522,091,611	46,451,741,620	51,883,129,716	57,073,146,003
4.1.02	Retribusi Daerah	3,617,007,695	5,950,326,059	5,334,492,839	5,813,266,773	6,292,040,708
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,510,249,390	4,923,804,211	3,600,000,000	4,676,770,614	4,907,759,857
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	88,701,743,637	81,257,531,939	85,223,871,851	89,372,531,611	93,521,191,372
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1,572,303,816,978**	**1,894,166,786,504**	**1,828,017,210,746**	**1,790,076,824,726**	**1,762,394,587,776**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1,446,241,730,713**	**1,714,521,203,790**	**1,701,881,679,000**	**1,663,941,292,980**	**1,620,747,318,564**
4.2.01.05	Dana Desa	179,186,422,500	209,361,032,800	176,857,567,000	178,074,147,980	179,290,728,960
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-	2,780,794,500	7,242,130,000	7,242,130,000	7,242,130,000
4.2.01.07-09	Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK)	1,267,055,308,213	1,502,379,376,490	1,517,781,982,000	1,478,625,015,000	1,434,214,459,604
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	**126,062,086,265**	**179,645,582,714**	**126,135,531,746**	**126,135,531,746**	**141,647,269,212**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	79,391,305,466	148,048,133,922	126,135,531,746	126,135,531,746	96,116,334,407
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	46,670,780,799	31,597,448,792	-	-	45,530,934,804
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**19,849,514,118**	**11,488,436,313**	**12,560,000,000**	**13,188,000,000**	**14,456,263,248**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9,924,757,059	5,744,218,156	11,862,628,723	12,455,760,159	14,456,263,248
4.3.05	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi	9,924,757,059	5,744,218,156	697,371,277	732,239,841	-

Keterangan: *Proyeksi Ranwal RPJMD Kab. Nunukan 2025-2029

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah tahun 2026 dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan, dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1) Untuk implementasi pemenuhan pelayanan dasar (SPM), dan belanja wajib mengikat (*mandatory spending*).
2) Untuk belanja pelaksanaan program proritas daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026
3) Untuk belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2026 Kabupaten Nunukan , sebagai berikut:

1. Belanja difokuskan untuk mendukung Prioritas Kepala dan Wakil Kepala Daerah yakni Program 17 Arah Baru Perubahan.

2. Mendukung 5 goals utama kebijakan fiskal nasional, yakni a) akselerasi investasi; (b) pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM; (c) Ketahanan Pangan; (d) Pendidikan; dan (e) Kesehatan (Indeks Kesehatan).
3. Belanja untuk mendukung Prioritas Nasional, terutama Proyek Strategis Nasional (PSN) dan 17 Program Prioritas Presiden.
4. Efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang seiring dengan pemanfaatan TIK;
5. Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;
6. Reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan
7. Peningkatan efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah

Proyeksi/target belanja daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi, dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2023 s.d. 2027

KODE	KODE	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Tahun 2024 (n-1)	Proyeksi/Target Tahun 2025 (n)	Proyeksi/Target Tahun 2026 (n+1)	Proyeksi/Target Tahun 2027* (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	**BELANJA DAERAH**	**1,587,439,099,840**	**1,929,323,822,237**	**2,033,981,191,847**	**2,005,185,554,455**	**2,063,644,988,963**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**981,670,537,549**	**1,149,763,023,002**	**1,266,860,060,739**	**1,281,649,214,668**	**1,250,299,045,348**
5.1.01	Belanja Pegawai	464,588,640,563	551,649,473,806	637,457,610,272	668,270,135,691	622,510,534,222
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468,688,861,749	537,436,588,758	580,331,042,249	562,408,896,746	572,645,566,804
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	8,886,137,080	9,489,311,596	13,759,701,290	13,269,963,584	14,693,910,087
5.1.05	Belanja Hibah	35,974,013,757	50,333,418,128	34,277,776,662	36,764,588,829	39,472,704,864
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3,532,884,400	854,230,714	1,033,930,266	935,629,818	976,329,370
5.2	**BELANJA MODAL**	**319,894,374,903**	**527,109,325,511**	**469,512,062,127**	**450,360,356,927**	**496,061,228,732**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	7,197,360,000	24,803,156,000	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68,466,707,799	73,715,885,849	53,192,031,188	60,496,283,993	66,427,383,032
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64,842,758,540	127,189,991,518	96,526,249,154	97,979,847,566	125,887,441,773
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180,244,356,560	316,932,298,386	290,716,107,856	288,004,201,453	299,529,696,026
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6,340,552,004	1,887,309,758	3,516,763,949	2,003,447,935	2,340,131,921
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	186,480,000	757,753,980	1,876,575,980	1,876,575,980
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2,757,072,105**	**143,291,417**	**18,865,358,704**	**5,000,000,000**	**5,000,000,000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,757,072,105	143,291,417	18,865,358,704	5,000,000,000	5,000,000,000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**283,117,115,283**	**252,308,182,306**	**278,743,710,277**	**268,175,982,860**	**312,284,714,884**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	283,117,115,283	252,308,182,306	278,743,710,277	268,175,982,860	312,284,714,884

Keterangan: *Proyeksi Ranwal RPJMD Kab. Nunukan 2025-2029

Berdasarkan proyeksi tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Nunukan merencanakan kebijakan defisit anggaran sebesar 2,57 persen, sehingga pagu indikatif Belanja Daerah lebih tinggi 50,17 Miliar dibandingkan dengan proyeksi pendapatan daerah. Sesuai PMK 75 Tahun 2024, batas maksimal defisit APBD 2025 bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah 3,75 persen dari Pendapatan Daerah, karena berada pada kategori kapasitas fiskal daerah "Sangat Tinggi" dengan rasio kapasitas fiskal daerah 1,898.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel 3.4
Realisasi, dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2023 s.d. 2027

KODE	KODE	JUMLAH				
		Realisasi Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Tahun 2024 (n-1)	Proyeksi/Target Tahun 2025 (n)	Proyeksi/Target Tahun 2026 (n+1)	Proyeksi/Target Tahun 2027* (n+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**139,692,343,605**	**306,662,310,511**	**50,175,031,015**	**96,175,031,015**	**125,000,000,000**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**139,692,343,605**	**309,662,310,511**	**50,175,031,015**	**96,175,031,015**	**125,000,000,000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	121,587,126,405	277,767,527,711	50,175,031,015	96,175,031,015	125,000,000,000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	18,105,217,200	31,894,782,800	-	-	-
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**3,000,000,000**	**-**	**-**	**-**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	-	-			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	**-**	3,000,000,000		-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**139,692,343,605**	**306,662,310,511**	**50,175,031,015**	**96,175,031,015**	**125,000,000,000**

Keterangan: *Proyeksi Ranwal RPJMD Kab. Nunukan 2025-2029

Pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Nunukan belum merencanakan pembentukan Dana Cadangan maupun Penyertaan Modal Daerah.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dalam rumusan RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2026 adalah kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan di tahun 2026 berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Selanjutnya untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah tahun 2026 ditetapkan sejumlah prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam program-program Pembangunan Daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang kondisi hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome)* program Perangkat Daerah.

Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Nunukan maka visi Daerah dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah " Kabupaten Nunukan Yang Inovatif, Sejahtera, Adil Dan Mandiri "

Berikut merupakan penjelasan detail dari masing-masing visi Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 tersebut diatas:

Inovatif: Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Berdasarkan Prinsip Peningkatan Efisiensi, Perbaikan Efektivitas, Perbaikan Kualitas Pelayanan, Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan, Beroreantasi Kepada Kepentingan Umum, Dilakukan Secara Terbuka, Memenuhi Nilai Kepatutan, Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya Tidak Untuk Kepentingan Diri Sendiri.

Sejahtera: Tercapainya Kehidupan Masyarakat Yang Tentram Yang Ditandai Dengan Peningkatan Penghasilan Masyarakat, Dapat Menikmati Akses Terhadap Pendidikan Dan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan

Adil: Meretas Ketimpangan Dan Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur Khususnya Pembangunan Pelayanan Dasar Seperti Jalan Dan Transportasi, Air Bersih, Energi Listrik, Dan Jaringan Wifi

Mandiri Kemampuan Pemerintah Untuk Mengelola Sumber DayaAlam Sehingga Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Serta Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Daerah Yang Dipergunakan Untuk Kesejahteraan Bersama.

Visi tersebut dijabarkan pada 5 Misi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yaitu:

MISI 1 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, DAN BERKARAKTER

Misi pertama Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029, yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, dan Berkarakter”, merupakan jawaban atas tantangan utama yang dihadapi daerah, yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagaimana diidentifikasi dalam RPJPD 2025-2045. Masih terbatasnya kompetensi, ketimpangan distribusi tenaga pendidik dan kesehatan, serta akses layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata menyebabkan daya saing SDM Kabupaten Nunukan tertinggal dibandingkan wilayah lain. Oleh karena itu, pemerintah daerah merancang program-program yang terintegrasi untuk membangun SDM unggul, di antaranya melalui perbaikan fasilitas pendidikan, penyediaan akses internet bagi sekolah di wilayah terpencil, pemberian beasiswa kepada mahasiswa dan pelajar berprestasi dari keluarga tidak mampu, serta pengadaan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru honorer, P3K, maupun ASN, menjadi perhatian utama. Penguatan lembaga pelatihan kerja berbasis standar nasional dan

penyediaan 1.000 pelatihan kerja gratis setiap tahun bertujuan memperluas keterampilan masyarakat agar siap bersaing di dunia kerja.

Di sisi lain, membangun SDM berkualitas tidak hanya bertumpu pada pendidikan, melainkan juga pada kesehatan masyarakat yang optimal. Oleh karena itu, Pemkab Nunukan melaksanakan perbaikan total manajemen rumah sakit daerah, meningkatkan ketersediaan dokter umum dan spesialis, serta memperluas akses layanan kesehatan hingga ke pelosok melalui penyediaan ambulans mobile di setiap kecamatan. Fokus pada penurunan angka stunting dan perbaikan gizi balita juga menjadi prioritas, dengan memberdayakan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dasar. Selaras dengan itu, peningkatan kesejahteraan tenaga medis diupayakan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan. Dengan pendekatan yang holistik, misi ini diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia Nunukan yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sehat secara fisik dan mental serta berkarakter kuat, guna mendukung percepatan pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi.

MISI 2 PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

Misi kedua Kabupaten Nunukan, yaitu Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, secara langsung dirancang untuk menjawab isu strategis RPJPD 2025-2045 tentang belum optimalnya pengelolaan sumber daya berbasis lokal. Potensi pertanian, perikanan, peternakan, dan kekuatan UMKM yang tersebar di berbagai wilayah desa hingga pesisir masih belum dimanfaatkan secara maksimal, baik dalam peningkatan produksi maupun hilirisasi produknya. Karena itu, program-program yang dirancang, seperti pemberian bantuan bibit tanaman pangan dan hortikultura, alat mekanisasi, serta pupuk bersubsidi dan non-subsidi, ditujukan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Di sisi lain, upaya ini juga mengarah pada penguatan hilirisasi produk pertanian dan perikanan kelautan, yang

menjadi isu strategis dalam rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029. Hilirisasi ini dilakukan melalui pembentukan kampung hortikultura, kampung perikanan, dan pemberian fasilitas budidaya yang mendorong produksi berkelanjutan serta siap didistribusikan ke pasar yang lebih luas.

Lebih jauh lagi, tantangan distribusi perdagangan yang selama ini terhambat, sebagaimana disebut dalam rancangan teknokratik RPJMD 2025-2029, dijawab dengan strategi penguatan UMKM berbasis potensi lokal melalui program satu desa satu UMKM yang didukung oleh penguatan BUMDes. Dengan begitu, akses masyarakat ke modal usaha, pelatihan keterampilan, dan penguatan jejaring pemasaran menjadi lebih terbuka. Ini diperkuat pula dengan upaya peningkatan infrastruktur penunjang seperti sarana dan prasarana pariwisata, yang tidak hanya mendukung ekonomi kreatif lokal, tetapi juga memperluas akses pasar hasil-hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM. Melalui pendekatan terintegrasi ini, diharapkan pengelolaan sumber daya berbasis lokal dapat lebih optimal, hilirisasi produk unggulan berjalan lancar, dan distribusi perdagangan daerah Nunukan semakin efisien serta kompetitif

MISI 3 PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI, CEPAT DAN TUNTAS

Misi ketiga ini berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat, dan tuntas. Hal ini menjawab isu strategis RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045, yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang mendukung percepatan pembangunan wilayah perbatasan. Melalui pengembangan E-Government, pemenuhan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas informasi publik, diharapkan pelayanan pemerintahan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan publik di wilayah perbatasan akan semakin mudah diakses masyarakat, mendukung percepatan pembangunan, dan meningkatkan daya saing daerah.

Selain itu, penerapan Sistem Merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) menjadi langkah strategis dalam menjawab isu Rancangan

Teknokratik RPJMD 2025-2029, yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintah daerah. Penempatan ASN berbasis sistem meritokrasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan ASN serta tenaga honorer, hingga pemberian insentif RT, diharapkan mendorong profesionalisme dan integritas birokrasi daerah. Pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pelayanan ini menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan percepatan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan

MISI 4 PERCEPATAN DAN PENUNTASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG ADIL DAN MERATA

Misi keempat ini diarahkan untuk menjawab isu strategis RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045, yaitu terbatasnya aksesibilitas dan belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar wilayah serta belum optimalnya tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Fokus utama pembangunan infrastruktur dasar meliputi jalan dan jembatan, perumahan dan air bersih, hingga energi listrik dan jaringan. Penyediaan 100 km jalan tani per tahun, alat berat di setiap kecamatan, serta subsidi transportasi hasil pertanian di wilayah perbatasan seperti Krayan dan Lumbis diharapkan mampu membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Selain itu, pembangunan rumah layak huni, sarana air bersih, serta pemerataan energi listrik dan internet di desa-desa blank spot menjadi fondasi utama dalam pemerataan pembangunan yang inklusif.

Lebih jauh, misi ini juga menjadi jawaban atas isu strategis dalam Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029, khususnya terkait masih terbatasnya kapasitas dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar, serta belum optimalnya pembangunan pedalaman tertinggal dan perbatasan. Upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar ini diharapkan juga mampu mengatasi degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit, dengan mendorong sistem pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, ketahanan air, energi, dan pangan diperkuat

melalui pemerataan akses air bersih, energi listrik, dan internet, yang menjadi prasyarat penting dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, adil, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan

MISI 5 MENCIPTAKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONI DENGAN MENJAGA DAN MELESTARIKAN NILAI -NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

Misi ini bertujuan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Nunukan yang harmonis, inklusif, dan sejahtera melalui pelestarian nilai-nilai budaya, agama, dan kearifan lokal. Penguatan peran lembaga adat dan keagamaan menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan yang berakar pada nilai-nilai budaya masyarakat lokal. Program peningkatan bantuan dan anggaran lembaga adat serta intensif bulanan bagi kepala iman masjid, guru mengaji, pengelola rumah ibadah, dan guru sekolah minggu, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan tokoh masyarakat yang menjadi panutan di wilayahnya. Ruang yang lebih luas bagi partisipasi lembaga adat dalam perencanaan kebijakan pemerintah daerah juga menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan berbasis kearifan lokal, menciptakan rasa memiliki, serta memperkuat kohesi sosial.

Selain itu, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Program penguatan organisasi perempuan, peningkatan kapasitas perempuan, serta perlindungan sosial bagi generasi emas Nunukan, lanjut usia, dan difabel diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan produktif. Peningkatan kualitas organisasi pemuda juga diharapkan dapat menciptakan ruang partisipasi generasi muda dalam pembangunan berbasis potensi lokal. Dengan demikian, misi ini berkontribusi langsung dalam mengatasi rendahnya kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga identitas budaya sebagai kekuatan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2026

4.2.1. Prioritas Nasional

Tahun 2026 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia - Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan, sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Tahun 2026 merupakan tahun ke-II pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029, dan Indonesia harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan. Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dituangkan dalam 8 (delapan) misi agenda pembangunan, yaitu (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, ditopang dengan; (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; dan (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta (8) Kesinambungan Pembangunan.

Tahun 2026 merupakan tahun ke II dari RPJMN tahun 2025-2029 yang menjadi tahap I RPJPN tahun 2025-2045 dalam upaya perkuatan pondasi transformasi. **Tema RKP Tahun 2026 "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif".** Berpedoman pada RPJMN 2025-2029 terdapat 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Nasional yang dikenal dengan Asta Cita yaitu:

1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;

2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; serta
8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Secara kewilayahan, pembangunan nasional di wilayah Kalimantan difokuskan pada:

1) Pembangunan sumber daya manusia unggul yang didukung dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan keilmuan maupun pendidikan karakter, serta keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan di Wilayah Kalimantan melalui:
   (a) penetapan Wajib Belajar 13 Tahun;
   (b) restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan;
   (c) penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan *Stunting*;
   (d) penetapan Penggunaan Registrasi Sosial Ekonomi dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif;

(e) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan *Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics* berkualitas;
(f) pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; serta
(g) penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (pendidikan budi pekerti).

2) Pembangunan sarana prasarana untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi di wilayah Kalimantan dalam mewujudkan konsep superhub ekonomi serta meningkatkan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan dan digital, serta pemerataan infrastruktur dasar di daerah-daerah afirmasi 3TP melalui:

(a) penetapan *hub* laut dan *hub* udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi,
(b) penguatan infrastruktur digital,
(c) pengembangan infrastruktur transisi energi,
(d) Percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, serta
(e) penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

3) Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata dan inklusif melalui

(a) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
(b) pengembangan skema graduasi bantuan sosial;
(c) peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
(d) peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
(e) peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
(f) percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
(g) peningkatan produksi industri pengolahan;
(h) dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta
(i) penyediaan Infrastruktur untuk mendukung transisi energi.

4.2.2. Prioritas Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2025-2029, tema utama arah pembangunan wilayah Kalimantan Utara adalah " Beranda Depan Negara, Lumbung Energi Baru dan Terbarukan Kalimantan, serta Pusat Industri Hijau Berkelanjutan". Sebagai upaya mewujudkan tema pembangunan wilayah Kalimantan tersebut pembangunan lima tahun ke depan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 didasarkan pada *highlight* arah kebijakan/indikasi intervensi yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Arah kebijakan/indikasi intervensi tersebut menjadi dasar merumuskan program prioritas/unggulan untuk periode pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut:

1. Transformasi sosial yang meliputi:
    a. Penuntasan stunting
    b. Percepatan eliminasi malaria khususnya kabupaten/kota kasus tertinggi
    c. Pemenuhan tenaga medis dan kesehatan melalui afirmasi pendayagunaan medis dan kesehatan dari masyarakat lokal, terutama di daerah afirmasi 3TP
    d. Peningkatan kualitas serta kuantitas kepesertaan jaminan kesehatan national sebagai bentuk perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar
    e. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya
    f. Peningkatan mutu dan akses pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas
    g. Optimalisasi peran dan fungsi sekolah vokasi dalam mendukung dunia usaha dan industri
2. Transformasi ekonomi yang meliputi:
    a. Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan batubara dan hasil hutan), dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan seperti industri petrochemicals dan industri kendaraan listrik;

b. Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning;
c. Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti energi terbarukan (*hydropower* dan *sonar panel*);
d. Pengembangan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
e. Pengembangan kawasan industri (Kawasan Industri Hijau Indonesia Tanah Kuning) dengan memanfaatkan potensi energi lokal hidro (Sungai Kayan) dan gas bumi;
f. Pengembangan pembangkit listrik berbasis hidro (PLTA Kayan dan Mentarang) beserta transmisi Sistem Kaltara 150 kV serta sistem terisolasi;
g. Pengembangan pembangkit rendah karbon untuk industri (*captive power*)

3. Transformasi tata Kelola
   a. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
   b. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
   a. Penyelesaian permasalahan *outstanding boundaries problems* (OBP) di Kalimantan Utara
   b. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas
5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi
   a. Pengembangan diversifikasi pangan

b. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan baku, terutama di sepanjang pesisir daratan Kalimantan Utara
c. Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Kayan dan Mentarang untuk mendukung lumbung energi baru
d. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah pengamanan pesisir pulau terkecil terluar
e. Optimalisasi fungsi kawasan konservasi Taman Nasional Kayan Mentarang untuk pariwisata minat khusus dan pengurangan emisi GRK dengan skema karbon/net sink
f. Pencegahan deforestasi dan rehabilitasi lahan kritis termasuk lahan mangrove

4.2.3. Prioritas Kabupaten Nunukan

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026 disyaratkan harus mampu menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Penentuan prioritas didasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan yang dan isu-isu strategis dalam Rancangan RPJMD tahun 2025-2029. Penentuan prioritas sangat mempertimbangkan sasaran pembangunan daerah prioritas nasional dan prioritas Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Keselarasan ini bermakna agar keterpaduan, fokus dan sinergi dalam pencapaian target dan integrasi program yang saling mendukung.

Isu-isu strategis Rancangan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Kabupaten Nunukan sebagai wilayah terluar, terdepan, dan perbatasan negara memiliki karakteristik geografis, demografis, dan sosial-ekonomi yang unik, sekaligus kompleks. Letaknya yang strategis di perbatasan Indonesia–Malaysia menjadikan Nunukan bukan hanya berfungsi sebagai beranda terdepan NKRI, tetapi juga menghadapi tantangan pembangunan yang bersifat multidimensi. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar yang belum merata, serta kerentanan

terhadap degradasi lingkungan dan penyakit tropis menjadi realitas yang harus dihadapi dalam kerangka pembangunan nasional. Oleh karena itu, isu-isu nasional yang berkembang di tingkat pusat perlu diterjemahkan secara kontekstual dan mendalam dalam perspektif kewilayahan Nunukan, agar perencanaan pembangunan ke depan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat lokal serta memperkuat peran strategis daerah ini dalam menjaga kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan di wilayah perbatasan. Berikut merupakan isu kewilayahan Kabupaten Nunukan:

1. **Ketergantungan Ekonomi pada Sektor Hulu dan Minimnya Hilirisasi Industri Lokal**

Perekonomian Kabupaten Nunukan hingga saat ini masih sangat bergantung pada sektor-sektor primer seperti perikanan tangkap, pertanian, dan kehutanan. Sektor ini memang memiliki potensi besar, namun masih bersifat hulu dan belum terintegrasi dengan rantai nilai industri hilir yang mampu menciptakan nilai tambah secara optimal. Minimnya kawasan industri, belum tersedianya pusat logistik terpadu, dan keterbatasan infrastruktur dasar seperti energi dan air bersih menyebabkan investor kurang tertarik untuk membangun industri pengolahan di wilayah ini. Hal ini berdampak pada stagnasi penciptaan lapangan kerja formal dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Ketergantungan pada komoditas mentah juga membuat ekonomi Nunukan rentan terhadap fluktuasi harga global. Padahal, potensi hilirisasi hasil laut, hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan pertanian tropis sangat besar jika dioptimalkan dengan dukungan ekosistem industri yang memadai.

2. **Ketimpangan Akses Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah**

Sebagai wilayah yang terdiri atas daratan dan pulau-pulau kecil, dengan bentang geografis sulit dan keterpisahan antar kecamatan, Kabupaten Nunukan menghadapi tantangan besar dalam hal konektivitas. Masih banyak desa dan permukiman yang sulit diakses karena keterbatasan infrastruktur jalan, jembatan, transportasi laut, dan telekomunikasi. Ketimpangan infrastruktur ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di kawasan perkotaan atau

pesisir tertentu, sementara wilayah pedalaman dan perbatasan tetap tertinggal. Kurangnya pusat pertumbuhan baru di daerah perbatasan membuat potensi ekonomi lokal belum tergarap optimal. Akses yang tidak merata juga berdampak pada distribusi logistik, harga bahan pokok yang tinggi, dan lambatnya perputaran ekonomi lokal.

3. Kemiskinan dan Kesenjangan Wilayah Perdesaan dan Perbatasan

Wilayah perdesaan dan perbatasan di Kabupaten Nunukan masih menjadi kantong kemiskinan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas ekonomi, minimnya akses terhadap layanan dasar, serta belum berkembangnya usaha mikro dan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Keterisolasian geografis menyebabkan masyarakat di wilayah ini sulit menjangkau fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar, hingga akses ke lembaga keuangan formal. Ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, antara wilayah tengah dan pinggiran, memicu kesenjangan sosial dan memperkuat ketidakadilan spasial. Jika tidak ditangani secara serius, hal ini bisa menghambat semangat kebangsaan dan memperlemah posisi strategis wilayah perbatasan sebagai beranda NKRI.

4. Akses Kesehatan yang Terbatas dan Kerentanan Terhadap Penyakit Tropis

Nunukan sebagai daerah tropis perbatasan menghadapi tantangan besar dalam penanganan penyakit menular seperti **malaria**, tuberkulosis, dan infeksi kulit. Tantangan tersebut diperparah oleh keterbatasan tenaga kesehatan, fasilitas layanan kesehatan dasar yang belum merata, serta kesulitan logistik dalam pengiriman obat dan alat medis ke wilayah terpencil. Beberapa Puskesmas belum memiliki dokter tetap, dan transportasi antarkampung masih sangat tergantung pada cuaca. Penanganan penyakit tropis juga menghadapi tantangan dalam hal edukasi masyarakat dan budaya hidup sehat, karena sebagian wilayah masih sulit dijangkau oleh kampanye kesehatan publik secara masif.

5. Terbatasnya Akses Pendidikan dan Pengembangan Talenta Lokal

Keterbatasan infrastruktur pendidikan, kurangnya tenaga pendidik berkualitas di wilayah terpencil, serta minimnya fasilitas pengembangan talenta seperti balai latihan kerja, pusat teknologi tepat guna, atau inkubator UMKM menjadi hambatan serius dalam pembangunan SDM Nunukan. Akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi juga masih rendah, terutama bagi anak-anak di wilayah pulau-pulau kecil dan desa perbatasan. Akibatnya, banyak potensi anak muda daerah yang tidak dapat berkembang maksimal dan tidak siap memasuki pasar kerja modern. Pengembangan vokasi dan pelatihan kerja belum berjalan optimal karena minimnya sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan institusi pendidikan.

6. Ancaman terhadap Lingkungan akibat Konversi Lahan dan Deforestasi

Tingginya konversi lahan hutan menjadi areal tidak produktif, baik karena pembalakan liar, kebakaran lahan, maupun alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan. Kabupaten Nunukan memiliki kawasan hutan tropis yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan, sumber air, dan pelindung keanekaragaman hayati. Namun, lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan menyebabkan ancaman ekologis semakin nyata. Jika tidak ditangani, kerusakan ini akan memperburuk bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan, menurunkan daya dukung lingkungan, serta memperburuk kualitas hidup masyarakat lokal.

Dengan memadukan atas permasalahan dan isu-isu strategis pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 serta telaah yang mendalam atas Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029 maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Penurunan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja
2. Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan
3. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar
4. Kemudahan akses pangan
5. Penguatan kelompok masyarakat tangguh bencana dan perubahan iklim

6. Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola

Secara normatif maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 harus merupakan implementasi arah kebijakan (*game changer*) pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2025-2045.

Tabel 4.2
Implementasi Arah Kebijakan Pada Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2026

No	Upaya Transformatif (*game changer*)	Prioritas Pembangunan
1.	Membangun dasar Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah afirmasi 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan) di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif.	Penurunan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja
2.	Membangun dasar pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.	
3.	Membangun dasar Pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.	
4.	Membangun dasar Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.	
5.	Membangun dasar Pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school-to-work.	
6.	Membangun dasar perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan
7.	Membangun dasar Penuntasan stunting, percepatan eliminasi malaria, dan pengendalian penyakit menular (TB) melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor.	
8.	Membangun dasar Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan	

No	Upaya Transformatif (*game changer*)	Prioritas Pembangunan
	kualitasnya.	
9.	Membangun dasar Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi.	
10.	Membangun dasar Penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar
11.	Membangun dasar Pengembangan angkutan sungai untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi	
12.	Membangun dasar Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia.	
13.	Membangun dasar Penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	
14.	Membangun dasar Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	
15.	Membangun dasar Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan	
16.	Membangun dasar Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.	Kemudahan akses pangan
17.	Membangun dasar Pengembangan diversifikasi pangan	
18.	Membangun dasar Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim	Penguatan kelompok masyarakat tangguh bencana dan perubahan iklim
19.	Membangun dasar Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.	
20.	Membangun dasar Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data	Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola

No	Upaya Transformatif (*game changer*)	Prioritas Pembangunan
	dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah	
21.	Membangun dasar Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	
22.	Membangun dasar Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.	
23.	Membangun dasar Percepatan digitalisasi Membangun dasar layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	
24.	Membangun dasar Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	

Sumber: RPJPD Kab. Nunukan Tahun 2025 – 2045, diolah

4.2.4. Sinkronisasi dan Harmonisasi Sasaran Pembangunan

Dalam penetapan Sasaran Pembangunan Daerah tentunya sangat mempertimbangkan kesesuaian dengan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara dan Sasaran Pembangunan Nasional. Sinergi target Sasaran Pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sinergi Sasaran Pembangunan Nasional,
Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan Tahun 2026

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET TAHUN 2026		
		NASIONAL (RPJMN)	KALIMANTAN UTARA (RPJMD)	NUNUKAN (RPJMD)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	8	5,35	5,62
2.	PDRB per Kapita	7.400 – 8.240 USD	218,99 – 220,14	
3.	Angka Kemiskinan (%)	4,50 – 5	4,40 – 4,64	5,26
4.	Ketimpangan Pendapatan (Gini	0,372 – 0,375	0,254	0,260

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET TAHUN 2026		
		NASIONAL (RPJMN)	KALIMANTAN UTARA (RPJMD)	NUNUKAN (RPJMD)
	ratio)			
5.	Indeks Modal Manusia	0,59	0,57	
6.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	62,37	48,42	45,93
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,20	81,08	
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4 - 5	3,46	2,49
9.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	---		70,66
10.	Inflasi (%)	1,5 – 3,5 %		3 – 3,9

Sumber: RPJMN, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029; diolah

Tabel 4.4
Sinergi Pembangunan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Utara
dan Prioritas Kabupaten Nunukan Tahun 2026

TAHUN 2026					
PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)		PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN UTARA		PRIORITAS KABUPATEN NUNUKAN	
	(Asta cita 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				Penurunan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja
	(Asta cita 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, Mengembangkan industry kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.				
	(Asta cita 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam Negeri.				
	(Asta cita 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga,				Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan

TAHUN 2026					
PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)		PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN UTARA		PRIORITAS KABUPATEN NUNUKAN	
	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, Pemuda, dan penyandang disabilitas.				
					Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar
	(Asta cita 2) Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.				Kemudahan akses pangan
	(Asta cita 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan Budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				Penguatan kelompok masyarakat tangguh bencana dan perubahan iklim
	(Asta cita 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta				Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola

TAHUN 2026					
PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)		PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN UTARA		PRIORITAS KABUPATEN NUNUKAN	
	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.				
	(Asta cita 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).				

Sumber: Rantek RPJPN Tahun 2025-2029; diolah

Sebagai satu kesatuan dalam penyusunan perencanaan yang terintegrasi perlu sinergi antara tema Nasional, tema Provinsi Kalimantan Utara dan tema Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 tersaji sebagai berikut:

Tabel 4.4
Sinergi Antar Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Nunukan Tahun 2026

Tema Pembangunan Tahun 2026		
Nasional (RKP)	Provinsi Kalimantan Utara (Ranwal RPJPN)	Kabupaten Nunukan (RKPD)
"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"	Beranda Depan Negara Lumbung Energi Baru Dan Terbarukan, Serta Pusat Industri Hijau Berkelanjutan	Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar dan Infrastruktur ekonomi yang menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif

Sumber: RPJMN Ranwal RPJMD 2025-2029

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2026 dijabarkan dalam Program Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

Tabel 4.5

Penjabaran Misi pada Program Pembangunan Daerah Tahun 2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR (SATUAN)	2024 (Capaian)	2025 (Target)	2026 (Target)	PROGRAM PRIORITAS	PD PENYELENGGARA URUSAN
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Dan Berkarakter.	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Merata**		**Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)**	**69.27**	**69.96**	**70.66**		
		Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8.39	8.49	8.59	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang Pendidikan
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.69	12.7	12.72	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
							Program Pengembangan Kurikulum	
							Program Pembinaan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73.13	73.16	73.2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bidang Kesehatan
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
							Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR (SATUAN)	2024 (Capaian)	2025 (Target)	2026 (Target)	PROGRAM PRIORITAS	PD PENYELENGGARA URUSAN
							Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
							Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Bidang Pangan
Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Akseleratif Melalui Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya Lokal**		**Pertumbuhan Ekonomi (Persen)**	**4.03**	**5.5**	**5.62**		
		Meningkatnya Pertumbuhan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, dan Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (Persen)	19.93	20.5	21.07	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bidang Pertanian
							Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
							Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
							Program Penyuluhan Pertanian	
							Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR (SATUAN)	2024 (Capaian)	2025 (Target)	2026 (Target)	PROGRAM PRIORITAS	PD PENYELENGGARA URUSAN
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
							Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (Persen)	6.34	7.03	7.46	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Bidang Perindustrian
		Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase UMKM Naik Kelas (Persen)	0.188	0,2	0,25	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Bidang Koperasi UKM
							Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
							Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Bidang Pariwisata
		Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	3050.41	4546.17	5261.2	Program Promosi Penanaman Modal	Bidang Penanaman Modal
							Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR (SATUAN)	2024 (Capaian)	2025 (Target)	2026 (Target)	PROGRAM PRIORITAS	PD PENYELENGGARA URUSAN
							Program Pengembangan Ekspor	Bidang Perdagangan
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi dan Sosial Masyarakat untuk Pemerataan Kesejahteraan		**Persentase Penduduk Miskin (Persen)**	**5,73**	**5.38**	**5.26**		
			Gini Ratio (Persen)	**0,270**	**0,265**	**0,260**		
		Menguatnya Perlindungan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	69,08	69,75	70,88	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Bidang Sosial
							Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan untuk menunjang Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (Indeks)	73,85	79,16	81,50	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan PA
							Program Peningkatan Kualitas Keluarga	

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR (SATUAN)	2024 (Capaian)	2025 (Target)	2026 (Target)	PROGRAM PRIORITAS	PD PENYELENGGARA URUSAN
		Meningkatnya Kesempatan Kerja untuk Menurunkan Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2.71	2.59	2.49	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja
							Program Penempatan Tenaga Kerja	
							Program Hubungan Industrial	
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Melayani, Cepat Dan Tuntas.	**Terwujudnya Tranformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional**		**Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)**	**BB**	**BB**	**BB**		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP (Nilai)	B	B	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan Penataan Organisasi)	Unsur Pendukung (Bag.Organisasi Setda)
							Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Unsur Penunjang Bidang Perencanaan
							Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
							Program Penyelenggaraan Pengawasan	Unsur Pengawasan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR (SATUAN)	2024 (Capaian)	2025 (Target)	2026 (Target)	PROGRAM PRIORITAS	PD PENYELENGGARA URUSAN
							Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
							Program Pengelola Perbatasan	Unsur Penunjang Bidang Pengelola Perbatasan
		Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	3.74	3.885	4.03	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung (Bag.Kesra Setda)
							Program Pencatatan Sipil	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Program Pendaftaran Penduduk	
							Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
							Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Unsur Pendukung (Sekretariat DPRD)
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Unsur Kewilayahan (21 Kecamatan)

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR (SATUAN)	2024 (Capaian)	2025 (Target)	2026 (Target)	PROGRAM PRIORITAS	PD PENYELENGGARA URUSAN
							Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	UPT. RSUD dan Puskesmas
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Indeks SPBE (Indeks)	2.61	2.74	2.87	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Bidang Komunikasi dan Informatika
							Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Bidang Statistik
							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
							Program Riset dan Inovasi Daerah	Bidang Litbang
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK (Skor)	WTP	WTP	WTP	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Unsur Penunjang Bidang Perencanaan
							Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Unsur Penunjang Bidang Keuangan
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
							Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR (SATUAN)	2024 (Capaian)	2025 (Target)	2026 (Target)	PROGRAM PRIORITAS	PD PENYELENGGARA URUSAN
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Sistem Merit	1,34	1,46	1,55	Program Kepegawaian Daerah	Bidang Kepegawaian
							Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Percepatan Dan Penuntasan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Adil Dan Merata.	**Terwujudnya Infrastruktur Kewilayahan yang Adil, Tangguh dan Berwawasan Lingkungan**		**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Indeks)**	**50**	**52.5**	**55**		
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	**78,62**	**80.55**	**81.35**		
		Meningkatnya Konektivitas Antar wilayah	Indeks Konektivitas (Indeks)	55,64	57,38	59,00	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Bidang Perhubungan
							Program Pengelolaan Pelayaran	
							Program Pengelolaan Penerbangan	
			Indeks Infrastruktur (Indeks)	65.04	66.21	67.37	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Bidang PU dan Penataan Ruang

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR (SATUAN)	2024 (Capaian)	2025 (Target)	2026 (Target)	PROGRAM PRIORITAS	PD PENYELENGGARA URUSAN
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
							Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	
							Program Penyelenggaraan Jalan	
							Program Pengembangan Perumahan	
							Program Kawasan Permukiman	
							Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
							Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR (SATUAN)	2024 (Capaian)	2025 (Target)	2026 (Target)	PROGRAM PRIORITAS	PD PENYELENGGARA URUSAN
		Meningkatknya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	138.29	134.41	130.12	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		Meningkatnya kualitas Penataan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas air	56,67	77,07	77,27	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Bidang Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara	95,52	72,42	72,72		
			Indeks Kualitas Tutupan lahan	94,15	98,17	98,24		
							Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
							Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	
							Program Pengelolaan Persampahan	
Menciptakan Tata Kehidupan Yang Harmoni Dengan	**Terciptanya Masyarakat Harmonis**		**Indeks Harmoni Indonesia (Ihal) (Indeks)**	**7,13**	**7,24**	**7,30**		

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR (SATUAN)	2024 (Capaian)	2025 (Target)	2026 (Target)	PROGRAM PRIORITAS	PD PENYELENGGARA URUSAN
Menjaga Dan Melestarikan Nilai - Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal	**yang Rukun, Toleran dan Berbudaya**	Lestarinya Kearifan Lokal untuk Membangun Kerukunan dan Toleransi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	78.94	79.98	81.02	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Unsur Pemerintahan Umum (Kesbangpol)
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (Indeks)	56,71	57,90	59,10	Program Pengembangan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan
		Meningkatnya Ketenteraman dan Stabilitas Kewilayahan	Indeks Trantibumlinmas (Indeks)	63	68	72	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
							Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

4.2.5. Telaah Atas Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penyusunan RKPD memberikan ruang dan hak kepada anggota DPRD untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan gagasan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar sasaran dan obyek pembangunan daerah tepat sasaran dengan perwujudan visi Kabupaten Nunukan.

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Saran dan pendapat yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD untuk perencanaan pembangunan tahun 2026 diinput dalam sipd-ri.kemendagri.go.id disinergikan dalam program dan kegiatan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026. Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD disajikan pada table 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Penyelarasan Pokok-pokok Pikiran DPRD
Dengan Prioritas, Program dan Kegiatan

NO	BIDANG URUSAN	ASPIRASI	PERMASALAHAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
1.	Pendidikan	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	Belum tersediannya rumah dinas guru SD 5 Kec krayan timur	Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
2.	Pekerjaan Umum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sering banjir, air keruh dan tidak tersedia air bersih di Desa Atap Sembakung RT 8	Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

NO	BIDANG URUSAN	ASPIRASI	PERMASALAHAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
3.	Pekerjaan Umum	Rekonstruksi Jalan	Kondisi jalan tidak baik sehingga perlunya Peningkatan Jalan RT.09 Tritip Desa Binusan	Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar	Program Pengelolaan Jalan
4.	Pekerjaan Umum	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Perlunya Drainase RT. 13 Bukit Cinta Nunukan Tengah	Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
5.	Pekerjaan Umum	Rehabilitasi Jalan	Rusaknya jalan yang di lewati oleh masyarakat dikarnakan jalan masih tanah Jln Persemaian RT 14	Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar	Program Pengelolaan Jalan
6.	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Buruknya kualitas jalan tani yang membantu petani mengeluarkan buah sawit RT 3 Desa Bambangan	Penurunan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7.	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Tani Pada Kelompok Tani Di Desa Sei Balansiku	Penurunan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
8.	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani pada Kelompok Tani di Desa Pa'Umung Kecamatan Krayan Timur	Penurunan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
9.	Perikanan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Minimnya fasilitas usaha nelayan skala kecil dalam pemberdayaan usaha rumput laut yaitu wadah untuk menjemur rumput laut di RT 04 Desa Tg Karang Kecamatan Sebatik	Penurunan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
10.	Perikanan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Bantuan mesin genset untuk nelayan tangkap di Desa Tg Karang Kecamatan Sebatik	Penurunan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

NO	BIDANG URUSAN	ASPIRASI	PERMASALAHAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
11	Perikanan	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Perlunya penurunan kemiskinan melalui penciptaan dan Perluasan lapangan kerja di Desa Tanjung Karang Kecamatan Sebatik	Penurunan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
12.	Perikanan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan pengadaan bibit ikan bagi Nelayan di Desa Long Sempayang Kecamatan Krayan Timur	Penurunan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
13.	Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Perlunya Pengadaan Alat Pengolahan Sampah Medis, INCENERATOR di RS Pratama Krayan	Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
14.	Kesehatan	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Penambahan Gedung Kesehatan atau Unit Transfusi Darah pada RS Pratama Krayan Kecamatan Krayan Barat	Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Kesehatan	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kurangnya upaya pengendalian faktor resiko penyakit, baik yang menular maupun tidak. di Kecamatan Tulin Onsoi	Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
16	Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan di RT 03 Desa Balansiku Kecamatan Sebatik	Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
17	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindung	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Masih ada perempuan yang mengalami kekerasan fisik dan	Reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

NO	BIDANG URUSAN	ASPIRASI	PERMASALAHAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM
	an Anak		pelecehan maka diperlukan pelatihan beladiri praktis khusus perempuan di Kota Nunukan		
18	Trantibumlinmas	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penguatan kelompok masyarakat tangguh bencana dan perubahan iklim di Desa Padaidi Kecamatan Sebatik	Penguatan kelompok masyarakat tangguh bencana dan perubahan iklim	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
19	Trantibumlinmas	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kurangnya Pelatihan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dangan kebencanaan di Kecamatan Krayan Timur	Penguatan kelompok masyarakat tangguh bencana dan perubahan iklim	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

BAB V
RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN DAERAH

Sebagai konsekuensi logis dari sebuah sistem bahwa capaian pembangunan daerah dapat digapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Pendanaan daerah sebagai sumber daya utama disusun berdasarkan hasil analisa keuangan dengan mempertimbangkan realisasi capaian selama 3 tahun terakhir. Pendanaan daerah merupakan pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang terdiri atas transfer dari pemerintah pusat maupun transfer dari provinsi Kalimantan Utara dan daerah lain, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 tersaji pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2026

NO	URAIAN	TAHUN			
		Realisasi 2023 (Audited)	2024 (Perda P-APBD)	2025 (Perda APBD)	2026 (Proyeksi)
A	**Pendapatan Asli Daerah**	**193.175.709.909,57**	**104.176.542.730,00**	**140.380.590.710,00**	**130.208.248.039,84**
	Pajak daerah	96.346.709.187,00	27.567.997.175,00	46.222.226.020,00	36.604.545.948,40
	Retribusi daerah	3.617.007.695,45	4.280.372.672,00	5.334.492.839,00	4.602.216.338,38
	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.510.249.390,10	5.100.000.000,00	3.600.000.000,00	6.169.653.943,91
	Lain-lain PAD yang sah	88.701.743.637,02	67.228.172.883,00	85.223.871.851,00	82.831.831.809,14
B	**Pendapatan Transfer**	**1.572.303.816.977,69**	**1.753.298.574.319,00**	**1.840.347.932.619,00**	**1.721.190.688.883,23**
1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.446.241.730.712,69**	**1.666.121.385.000,00**	**1.747.576.604.000,00**	**1.597.874.343.881,65**
	Dana Perimbangan	1.267.055.308.212,69	1.484.253.682.000,00	1.318.827.725.763,14	1.409.310.534.614,98
	Dana Bagi Hasil	484.023.216.791,00	730.653.820.000,00	552.347.828.821,80	627.019.618.198,80
	Dana Alokasi	522.613.482.075,00	541.708.714.000,00	545.856.394.101,67	556.549.973.650,95

NO	URAIAN	TAHUN			
		Realisasi 2023 (Audited)	2024 (Perda P-APBD)	2025 (Perda APBD)	2026 (Proyeksi)
	Umum (DAU)				
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	260.418.609.346,69	211.891.148.000,00	220.623.502.839,67	225.740.942.765,23
	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
	Dana Desa	179.186.422.500,00	181.867.703.000,00	185.311.009.366,67	188.563.809.266,67
2	**Transfer Antar-Daerah**	**126.062.086.265,00**	**87.177.189.319,00**	**92.771.328.619,00**	**123.316.345.001,58**
	Pendapatan Bagi Hasil	79.391.305.466,00	58.114.740.527,00	66.654.652.738,66	69.834.190.284,85
	Bantuan Keuangan	46.670.780.799,00	29.062.448.792,00	48.746.044.760,56	53.482.154.716,73
C	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**10.034.757.059,00**	**9.561.580.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
	Hibah	110.000.000,00	-	-	-
	Dana Darurat	-	-	-	-
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	9.924.757.059,00	9.561.580.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	JUMLAH TOTAL	**1.775.514.283.946,26**	**1.867.036.697.049,00**	**1.993.288.523.329,00**	**1.861.398.936.923,07**

Sumber BPKAD dan Bapenda: Data diolah

Pendanaan daerah tersebut diatas sepenuhnya membiayai Indikasi rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 yang disusun berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, selaras dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.

Rencana program dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014, dikelompokkan menjadi 8 (delapan) unsur urusan yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebanyak 6 (enam) bidang urusan yaitu bidang pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebanyak 18 (delapan belas) bidang urusan yaitu tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan dan kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan sebanyak 8 (delapan) bidang urusan yaitu kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian dan transmigrasi.
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sebanyak 2 (dua) bidang urusan yaitu sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebanyak 6 (enam) bidang urusan yaitu perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan serta pengelolaan perbatasan.
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sebanyak 1 (satu) bidang urusan yaitu Inspektorat Daerah.
7. Unsur kewilayahan sebanyak 1 (satu) bidang urusan yaitu Kecamatan.
8. Unsur Pemerintahan Umum sebanyak 1 (satu) bidang urusan yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah tersebut diimplementasikan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan indikator kinerja, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, lokasi dan Perangkat Daerah penanggung jawab. Disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil capaian

kinerja pembangunan daerah tahun 2024 dan arahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Pusat yang bersifat wajib (*mandatory*)

Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan pembiayaannya pada tahun 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sebagai bagian penyelenggaraan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maka RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) khususnya pada Menu Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Sebagai langkah untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang menggambarkan keadaan dan cita-cita Indonesia Emas 2045 yang diinginkan pada RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045, maka disusunlah Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2026 sebagaimana tersaji dalam Tabel 5.2 berikut :

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
		DINAS PENDIDIKAN					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpatispasi dalam PAUD 4. Tingkat patisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidkan dasar dan menengah yang berpastisipasi dalam pendidikan kesetaraan 2. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpastisipasi dalam pendidikan menengah pertama 1. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpastisipasi dalam pendidikan dasar	100 Persen 60,11 Persen 62,51 Persen 97.80 Persen 99,04 Persen			
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar 2. Persentase sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 3. Angka putus sekolah SD/MI 4. Angka partisipasi Murni SD/MI 5. Angka kelulusan SD/MI 6. Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs 7. Persentase SD dan SMP Negeri Terakreditasi 8. Persentase peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 9. Persentase peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya Pendidikan Persentase terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah	58.70 Persen 59.25 Persen 0.40 Persen 95.81 Persen 100.00 Persen 88.00 Persen 63.39 Persen 15.68 Persen 96.75 Persen 100 Persen			
1	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	753.595.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	1.226.545.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
3	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	1.628.480.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
4	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	15 Paket	1.997.692.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
5	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	158 Peserta Didik	377.785.690,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
6	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	139 Orang	919.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
7	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	0 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
8	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	139 Satuan Pendidikan	31.853.080.420,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
9	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
10	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
11	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
12	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
13	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
14	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1400 Paket	725.191.930,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
15	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18 Ruang	8.007.180.990,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
16	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
17	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	139 Satuan Pendidikan	285.724.010,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
18	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	893.710.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
19	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	250 Peserta Didik	348.838.900,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
20	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	1.000.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1. Persentase peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 2. Persentase peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 3. Persentase sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik 4. Angka putus sekolah SMP/MTs 5. Angka partisipasi Murni SMP/MTs 6. Angka kelulusan SMP/MTs 7. Angka melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	1.89 Persen 95.18 Persen 71.16 Persen 1.00 Persen 87.26 Persen 99.90 Persen 98.85 Persen 100 Persen			
21	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	3.622.595.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
22	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	609.425.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
23	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	1.980.520.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
24	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	449.330.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
25	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket	767.155.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
26	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	200 Peserta Didik	434.719.789,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
27	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	127 Peserta Didik	1.015.654.787,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
28	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	0 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
29	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	440.502.129,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
30	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
31	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	63 Satuan Pendidikan	16.988.501.079,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
32	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
33	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0 Konten Digital	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
34	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
35	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
36	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	58 Satuan Pendidikan	401.373.767,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
37	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	8 Ruang	3.240.860.175,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
38	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
39	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	1.128.784.895,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
40	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	247.655.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1. Angka Partisipasi Murni Paud 2. Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 3. Persentase peserta didik PAUD yang menerima perlaengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Persentase peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya Pendidikan Persentase unit kerja internal,yang mendapatkan,layanan sarana dan prasarana aparatur	55.80 Persen 96.00 Persen 4.64 Persen 94.63 Persen 100 Persen			
41	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	1.373.876.510,92	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
42	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	15 Paket	264.983.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
43	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik	232.782.650,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
44	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	730 Orang	3.023.425.120,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1	2	3	4	5	10	11	12
45	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	250.000.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
46	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	685.526.625,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
47	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	185 Satuan Pendidikan	4.714.567.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
48	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	185 Orang	173.631.270,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
49	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
50	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	65 Orang	230.001.190,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
51	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	185.339.805,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
52	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	233.958.555,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
53	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	355.585.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
54	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	0 Komunitas	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
55	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	1.481.726.998,10	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
56	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
57	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
58	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	800 Paket	562.487.860,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
59	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
60	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	37 Paket	506.201.780,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
61	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	185 Satuan Pendidikan	120.673.070,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
62	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Persentase satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 2. Persentase peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintaham Daerah 3. Persentase peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan Persentase unit kerja internal,yang mendapatkan,layanan sarana dan prasarana aparatur	69.37 Persen 0.01 Persen 75.98 Persen 100 Persen			
63	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30 Peserta Didik	48.708.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
64	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	35 Orang	233.234.350,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
65	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	129.729.375,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
66	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	321.488.210,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
67	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	15 Satuan Pendidikan	2.381.810.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
68	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30 Orang	153.893.440,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
69	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	151.232.550,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
70	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
71	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0 Kegiatan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
72	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	60 Paket	200.001.050,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
73	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
74	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	0 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
75	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	4558 Peserta Didik	322.901.155,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
76	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	2 unit	1.113.567.768,14	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
77	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	395.902.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
78	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal spesifik lokasi	85 Persen			
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum	1 Persen			
79	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	157.912.620,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
80	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	0 Buku	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
81	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	30 Orang	153.575.040,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
82	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Sekolah Yang Menerapkan Kurikulum	1 Persen			
83	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
84	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2. Rasio guru terhadap rombongan belajar sekolah pendidikan dasar 1. Rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan dasar	1,07 Persen 12.15 Murid/Guru			
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1. Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV Sekolah Pendidikan Dasar 2. Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik Sekolah Pendidikan Dasar 3. Kepala Sekolah yang memiliki STTPP Calon Kepala Sekolah 4. Rasio Tenaga Kependidikan terhadap Satuan Pendidikan/Lembaga 5. Peningkatan Jenjang Karir Pendidik 6. Pengembangan Jenjang Karir Pendidik	85.00 Persen 30.79 Persen 49.7 Persen 3.53 Persen 25.33 Persen 9.67 Persen			
85	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	435 Dokumen	309.293.040,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
86	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	245 Laporan	398.856.940,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah swasta yang mengelola pendidikan secara mandiri	100 Persen			
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar	100 Persen			
87	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25 Dokumen	128.248.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
88	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25 Dokumen	114.117.646,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase penilaian Kelayakan usul Perizinan Paud dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100 Persen			
89	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20 Dokumen	122.254.850,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
90	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20 Dokumen	107.518.839,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase kegiatan pengembangan bahasa dan sastra	65 Persen			
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyususnan Kamus Bahasa Daerah kabupaten/kota	1 Buku			
91	1.01.06.2.01.0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	1 Kamus	169.292.040,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
92	1.01.06.2.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Publikasi	84.421.775,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
93	1.01.06.2.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	100 Buku	94.515.720,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
94	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Peserta Didik	250.076.720,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat daerah	100 Persen			
95	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	87.017.895,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
96	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	49.842.352,50	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
97	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	227.690.937,75	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
98	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	549.358.707,50	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen			
100	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1600 Orang/bulan	368.856.663.710,27	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
101	1.01.01.2.02.0004	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	407.289.328,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
101	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	210.534.091,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
102	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	112.055.519,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
103	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	229.736.696,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			
104	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	247.080.304,40	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
105	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	131.937.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			
106	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	523.310.660,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja internal,yang mendapatkan,layanan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen			
107	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	595.340.730,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
108	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	53.683.252,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
109	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	119.979.135,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
110	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	99.993.871,50	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
111	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	243.859.253,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
112	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	274.177.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			
113	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
114	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
115	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			
116	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	413.804.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
117	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.039.390.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja internal,yang mendapatkan,layanan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen			
118	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	238.087.097,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
119	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	1.254.405.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
120	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	64.713.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
121	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	347.700.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Puskesmas Lapri					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
122	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	126 Orang	102.102.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
123	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1541 Orang	45.300.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
124	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2 Orang	14.400.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
125	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14 Orang	12.300.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
126	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	131.280.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
127	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	21.600.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
128	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	18.900.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
129	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	26.080.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
130	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	6.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
131	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	80.364.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
132	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	104.312.600,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
133	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	900.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
134	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	12.675.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
135	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.633.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
136	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
137	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	7.940.400,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			
138	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	170.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Aji Kuning					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
139	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Kegiatan Orang	116.702.520,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
140	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Kegiatan Orang	40.500.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
141	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1 Kegiatan Orang	16.200.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
142	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Kegiatan Orang	6.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
143	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	271.939.150,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
144	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.300.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
145	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	22.200.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
146	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	15.500.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
147	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Kegiatan Orang	33.750.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
148	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	118.109.973,60	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
149	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	116.434.400,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
150	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Kegiatan Orang	1.320.026,40	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
151	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	21.970.480,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
152	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
153	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	16.800.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
154	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	23.007.600,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			
155	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	440.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Seimenggaris					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
156	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	216 Orang	88.567.500,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
157	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2012 Orang	82.800.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
158	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	18 Orang	27.000.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
159	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang	3.600.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
160	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	278.640.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
161	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	25.800.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
162	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	32.480.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
163	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	21.600.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
164	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18 Orang	10.800.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
165	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	70.826.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
166	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	161.849.500,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
167	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	200 Orang	3.320.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
168	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	13.595.500,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
169	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	5.800.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
170	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	21.600.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
171	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	66.000.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
172	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	25.600.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA					
	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	2.14.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			
173	2.14.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	515.052.500,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Pembeliangan					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
174	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	250 Orang	137.651.750,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
175	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	72.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
176	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	14 Orang	16.200.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
177	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	244 Orang	27.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
178	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	224.154.150,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
179	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	10	9.600.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
180	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	18.300.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
181	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	16.969.700,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
182	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang	9.600.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
183	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	154.346.300,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
184	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	158.401.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
185	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	40 Orang	750.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
186	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	28.108.800,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
187	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.459.450,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
188	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
189	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	19.009.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			
190	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	570.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Atap					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
191	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	140 Orang	74.256.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
192	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1500 Orang	95.580.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
193	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	20 Orang	29.520.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
194	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9 Orang	14.910.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
195	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	226.053.750,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
196	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	25.920.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
197	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	24.420.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
198	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	26.940.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
199	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	300 Orang	11.160.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
200	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	70.750.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
201	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	154.037.600,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
202	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	25.920.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
203	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	17.144.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
204	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	17.160.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
205	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	67.120.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
206	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	14.922.400,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
207	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	410.000.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Tanjung Harapan					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
208	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	65 Orang	121.689.999,98	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
209	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	611 Orang	31.800.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
210	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	15.000.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
211	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	66 Orang	9.000.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
212	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	144.076.200,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
213	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	6.600.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
214	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	13.200.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
215	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	11.906.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
216	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	14 Orang	9.000.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
217	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	71.211.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
218	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	90.031.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
219	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	25.335.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
220	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
221	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
222	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
223	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	11.782.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			
224	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	100.000.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Mansalong					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
225	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	103.428.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
226	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	39.000.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
227	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	24.600.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
228	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	9.000.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
229	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	228.444.800,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
230	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
231	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	22.500.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
232	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	26.940.550,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
233	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	14.400.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
234	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	58.745.450,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
235	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	105.385.400,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
236	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	1.500.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
237	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	11.223.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
238	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	7.964.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
239	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	39.600.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
240	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	0 Dokumen	39.000.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
241	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	18.962.600,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			
242	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	634.000.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Binter					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
243	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	136 Orang	163.816.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
244	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1044 Orang	53.100.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
245	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	21.480.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
246	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7 Orang	12.360.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
247	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6 Dokumen	327.424.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
248	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	16.740.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
249	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	15.960.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
250	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	50.850.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
251	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	12.240.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
252	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	44.983.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
253	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	192.151.200,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
254	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	17.472.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
255	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	2 Dokumen	16.700.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
256	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	17.640.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
257	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	86.820.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
258	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Nunukan Timur					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
259	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	354 Orang	61.776.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
260	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1619 Orang	32.400.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
261	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8 Orang	18.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
262	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	10.800.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
263	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	239.010.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
264	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	31.950.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
265	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	27.300.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
266	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	36.500.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
267	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8 Orang	33.600.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
268	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	50.125.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
269	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	116.448.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
270	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	8.273.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
271	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	17.101.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
272	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
273	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	32.400.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
274	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	26.850.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
275	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	3.081.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Timur	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			
276	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	470.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Binusan					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
277	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	49.920.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
278	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	10.800.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
279	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	16.200.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
280	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	6.600.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
281	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	135.676.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
282	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
283	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	12.300.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
284	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	24.450.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
285	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	12.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
286	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	49.440.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
287	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	58.878.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
288	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	17.800.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
289	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	600.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
290	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
291	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	[object Object]
		RUMAH SAKIT PRATAMA SEBUKU					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
292	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	3.520.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		RUMAH SAKIT PRATAMA KRAYAN					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
293	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0 Dokumen	2.990.284.080,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
294	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	9.598.700,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas dan RS milik pemerintah daerah yang terakreditasi nasional Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu	100 % 10,9 per 1.000 KH 158 per 100.000 KH			
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia sarana, prasarana, Farmasi dan Alat kesehatan	24 Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
295	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Pa' Upan	[object Object]
296	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	5.055.110.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
297	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	2 Unit	6.344.420.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Pengu atan Sistem Kesehatan
298	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	3.848.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Pengu atan Sistem Kesehatan
299	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	315.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
300	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	1.611.825.999,92	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Sungai Nyamuk Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Aji Kuning	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Pengu atan Sistem Kesehatan Dana Bagi Hasil (DBH)
301	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	2.188.374.830,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Pengu atan Sistem Kesehatan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
302	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit	1.636.136.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
303	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100 Unit	4.147.200.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
304	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	200 Unit	554.868.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
305	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	4 Unit	7.071.580.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
306	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	80 Paket	16.808.385.856,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
307	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1 Layanan	168.392.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
308	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	92 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Visit Rate Puskesmas	100 persen			
309	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3887 Orang	416.275.694,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
310	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4069 Orang	582.410.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
311	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3700 Orang	456.136.220,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
312	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12695 Orang	303.105.100,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
313	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21800 Orang	699.009.790,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
314	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37000 Orang	754.871.620,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
315	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5730 Orang	653.852.042,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Bagi Hasil (DBH)
316	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5997 Orang	29.900.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
317	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1382 Orang	51.791.660,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
318	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	314 Orang	46.722.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
319	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6170 Orang	63.535.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
320	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2441 Orang	96.840.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
321	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	87.454.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
322	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	50.999.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
323	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	316.999.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
324	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	153.680.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
325	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	416.476.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Bagi Hasil (DBH)
326	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	184.929.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
327	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
328	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	150.652.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Bagi Hasil (DBH)
329	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	59.613.930,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
330	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	37.317.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
331	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	176.547.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
332	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	20.262.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
333	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	100 Orang	34.999.250,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
334	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	199.152.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
335	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	211.559.055,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
336	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
337	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	90.443.680,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
338	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	633.527.250,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Bagi Hasil (DBH)
339	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	21 Unit	146.978.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
340	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	38.260.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
341	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	2.340.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
342	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Orang	2.340.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
343	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	505 Orang	46.980.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
344	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	25.200.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
345	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	49.950.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
346	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	472.674.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
347	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	119.723.000,06	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
348	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas secara Terintegrasi	33 persen			
349	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 Dokumen	36.620.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah sakit kelas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang teregister	23 Unit			
350	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	18 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
351	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	1.025.988.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang memenuhi standart kualifikasi	100 Persen			
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemberian Izin dan Rekomendasi Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1 dokumen			
352	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	19.942.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kerja Internal yang direncanakan Sumberdaya Manusia Kesehatan	24 Unit kerja internal			
353	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10 Dokumen	23.536.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK
354	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	92.357.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit internal yang mendapatkan peningkatan kompetensi SDM	3 Puskesmas dan RSP			
355	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	9 Orang	1.517.735.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase PKRT yang diawasi	100 persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen pemberian izin dan rekomendasi Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 dokumen			
356	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	35.280.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen sertifikat PIRT yang diterbitkan	1 dokumen			
357	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	44.174.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan	100 persen			
358	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	47.319.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-Pengawas an Obat dan Makanan
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diterbitkan	0 Dokumen			
359	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	34.280.462,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	0 dokumen			
360	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Unit	134.382.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa yang melaksanakan STBM	94 Persen			
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 dokumen			
361	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen	31.288.350,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Kampanye GERMAS melalui Penggerakan Masyarakat	16 dokumen			
362	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	5 Dokumen	168.110.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang melakukan pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	19 Kecamatan			
363	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	113.790.900,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ersentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
364	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25 Dokumen	280.358.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			
365	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	657 Orang/bulan	108.591.598.882,02	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
366	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	135.506.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
367	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	31 Laporan	74.472.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	0 dokumen			
368	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	49.580.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
369	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	66.188.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	0 dokumen			
370	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
371	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 Dokumen	29.810.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	24 Unit kerja internal			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
372	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	29.996.920,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
373	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	203.795.200,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
374	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	30.181.800,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
375	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	80.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
376	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	35.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
377	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	270.564.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	24 Unit kerja internal			
378	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.026.540.150,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
379	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.229.601.080,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	24 Unit kerja internal			
380	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	295.836.870,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
381	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	30.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
382	1.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	20.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			
383	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	415.027.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA					
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	35 %			
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	9 OPD			
384	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45.591.750,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB Dana Bagi Hasil (DBH)
385	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Kegiatan	53.991.760,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang memiliki data lengkap terkait program KKBPK/Bangga Kencana	21 kecamatan			
386	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	18.150.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB
387	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
388	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
389	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	71,53 %			
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi dan KIE melalui Media, audien, dan momentum Bangga Kencana	8 stakholder			
390	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	488.555.650,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB
391	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	333.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB
392	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	8 Laporan	140.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB
393	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB
394	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
395	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	100.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah tenaga penyuluh KB (PKBdanPLKB)	25 org			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
396	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1 Orang	1.352.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
397	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	31.500.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
398	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1 Orang	392.741.998,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB Dana Alokasi Umum (DAU)
399	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
400	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	29.250.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
401	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	77.877.620,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholder, pemangku kepentingan perangkat daerah dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK/Bangga Kencana	5 stakholder			
402	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	225.500.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
403	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	40 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
404	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kampung	117.600.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pelayanan KIE kemitraan/lemb	51 %			
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan Kethanan dan Kesejahteraan kelaurga	20 kali			
405	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0 Laporan / Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
406	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
407	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1 Unit	91.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
408	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	75.512.540,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan Kethanan dan Kesejahteraan kelaurga	5 organisasi			
409	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan	747.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
410	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	10 laporan	896.400.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB
		RSUD NUNUKAN					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
411	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	2.500.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Pelaya nan Kesehatan Rujukan
412	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	15.320.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	Pendapatan dari BLUD
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %			
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mengelola BLUD	1 Unit kerja internal			
413	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.670.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	Pendapatan dari BLUD
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			
414	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	44.010.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	Pendapatan dari BLUD
		UPT. Laboratorium Kesehatan Daerah					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
415	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
		Puskesmas Nunukan					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
416	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	130.320.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
417	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	74.400.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
418	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	63.600.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
419	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	17.700.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
420	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	277.192.250,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
421	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	22.050.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
422	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	50.100.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
423	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
424	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	7.200.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
425	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	98.979.525,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
426	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	152.502.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
427	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	7.443.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
428	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
429	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	22.385.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
430	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
431	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	29.700.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
432	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	10.222.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
433	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja	2.560.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Tengah Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Utara Kab. Nunukan, Nunukan, Nunukan Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Sedadap					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
434	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	479 Orang	67.680.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
435	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4732 Orang	13.800.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
436	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1340 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
437	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6 Orang	14.400.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
438	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	225 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
439	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
440	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
441	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	35.700.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
442	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	40.800.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
443	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25547 Orang	12.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
444	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
445	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	146.168.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
446	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	3 Orang	1.200.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
447	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
448	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1919 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
449	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	39.900.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
450	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			
451	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Bulan Unit Kerja	1.120.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Setabu					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
452	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	220 Orang	91.454.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
453	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1600 Orang	59.400.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
454	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	8 Orang	9.600.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
455	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16 Orang	10.800.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
456	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	244.473.500,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
457	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	20.400.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
458	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	15.600.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
459	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
460	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	8 Orang	1.800.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
461	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	111.284.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
462	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	118.983.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
463	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	220 Orang	600.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
464	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	14.167.500,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
465	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
466	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	7.650.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
467	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			
468	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	620.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		PUskesmas Sei. Taiwan					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
469	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	117 Orang	53.599.200,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
470	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1318 Orang	64.500.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
471	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	11 Orang	14.400.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
472	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	150 Orang	11.550.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
473	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	[object Object]
474	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	8.700.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
475	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	19.500.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
476	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	14.144.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
477	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	11 Orang	5.700.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
478	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	[object Object]
479	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	86.582.600,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
480	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	16.143.700,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
481	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	[object Object]
482	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	39.150.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
483	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			
484	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	370.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Sungai Nyamuk					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
485	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	298 Orang	113.356.800,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
486	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2988 Orang	72.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
487	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2 Orang	23.400.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
488	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	141 Orang	7.350.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
489	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5 Dokumen	214.250.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
490	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	15.873.200,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
491	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	46.500.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
492	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	24.750.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
493	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2 Orang	12.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
494	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	92.690.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
495	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	122.049.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
496	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	43 Orang	600.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
497	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
498	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.050.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
499	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	28.800.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
500	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	18.300.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			
501	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	856.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Puskesmas Sanur					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
502	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	209.931.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
503	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	81.000.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
504	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	12.000.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
505	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	20.400.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
506	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen	293.039.950,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
507	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
508	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	28.200.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
509	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
510	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	7.200.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
511	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen	152.930.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
512	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	155.239.700,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
513	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	18.125.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
514	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	3.270.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
515	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	0 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
516	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	19.886.300,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA					
	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	2.14.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			
517	2.14.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
		Puskesmas Long Bawan					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
518	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	161 Orang	127.008.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
519	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1558 Orang	44.880.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
520	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	18.000.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
521	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	137 Orang	25.800.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
522	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	214.852.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
523	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	35.100.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
524	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	29.580.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
525	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
526	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10 Orang	24.000.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
527	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	94.225.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
528	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	526.262.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
529	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	5 Orang	1.800.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
530	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	17.970.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
531	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.027.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
532	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	64.800.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
533	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	47.540.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
534	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	6.300.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		RUMAH SAKIT PRATAMA SEBATIK					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
535	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	3.950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
536	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	0 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPT Balai Pengelola Farmasi dan Alat Kesehatan					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
537	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	70000000 Paket	823.108.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
538	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	250000000 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		Puskesmas Long Layu					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
539	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	130.555.200,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
540	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1 Orang	97.380.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
541	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	20.420.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
542	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	34.380.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
543	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	270.081.500,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
544	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.300.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
545	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	23.560.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
546	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	9.242.295,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
547	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	13.660.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
548	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	60.657.705,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
549	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	303.925.600,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
550	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	22.834.800,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
551	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	2.260.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
552	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1 Dokumen	24.920.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
553	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen	66.960.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
554	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	20.590.400,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	55.91 Persen 66.67 %			
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peserntase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	55,91 %			
555	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,09 KM	893.816.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
556	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	7 Unit	10.335.835.900,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
557	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	4,0 KM	4.400.273.680,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
558	1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0,1 KM	851.984.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
559	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,65 KM	3.139.944.900,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
560	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0,15 KM	2.894.968.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
561	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0,10 KM	1.059.988.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
562	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,75 KM	3.285.907.070,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
563	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0 KM	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
564	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Jaringan			
565	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0,15 KM	1.643.358.200,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
566	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,03 KM	410.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
567	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,05 KM	200.000.000,00	[object Object]	[object Object]
568	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	74.19 Persen			
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk berakses air minum	74,19 %			
569	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	20 Liter/Detik	500.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
570	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	20 Liter/Detik	5.379.040.520,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
571	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
572	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	2 Unit	500.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-			
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
573	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0 Ton/hari	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
574	1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	5 M^3/Hari	60.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	30.00 Persen			
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	30 %			
575	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	700 M	3.645.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
576	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	500 Meter	1.100.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
577	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
578	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	480.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-			
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
579	1.03.07.2.01.0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	0 Liter/Detik	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
580	1.03.07.2.01.0025	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	3 Unit	515.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan publik yang terbangun	20 %			
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	20 %			
581	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	23 Dokumen	47.627.188.250,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
582	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	30 Dokumen	415.102.040,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-			
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
583	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	3.310.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Indeks aksesibilitas Tingkat kemantapan jalan kabupaten	1.75 Indeks 58.23 Persen			
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	58,23 %			
584	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	0 Dokumen	376.071.710,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
585	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	5 KM	13.540.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
586	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	17 KM	180.750.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
587	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2.5 KM	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
588	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	2 Jembatan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
589	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	15 Jembatan	33.585.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
590	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	5 Jembatan	105.974.191,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
591	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0 KM	500.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
592	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	14 KM	38.091.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
593	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	4 KM	3.255.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian dokumen RTRW	80 %			
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan rinci tata ruang yang ditetapkan	1 Dokumen			
594	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 dokumen Dokumen	749.991.950,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	1 Dokumen			
595	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1 Dokumen Layanan	449.996.030,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
596	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 dokumen Dokumen	199.968.380,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	1 Dokumen			
597	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 dokumen Dokumen	99.974.420,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen			
598	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	107.510.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
599	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	59.660.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
600	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	143.266.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50/14 Orang/ Bulan			
601	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	8.142.277.525,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Paket			
602	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	396.460.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	[object Object]
603	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	166.951.650,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	[object Object]
604	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	52.728.800,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	[object Object]
605	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	352.284.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	2 Unit			
606	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	86.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	[object Object]
607	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.345.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	[object Object]
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan			
608	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	186.996.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
609	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	4.438.782.272,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	[object Object]
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit			
610	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	115.146.710,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	[object Object]
611	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	43.800.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	[object Object]
612	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	155.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	[object Object]
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	70 %			
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah rumah korban Bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang terdata untuk mendapatkan bantuan rehab/pembangun baru	4 dokumen			
613	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	4 Dokumen	56.121.290,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
614	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	49 Dokumen	71.593.680,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah rumah yang dibangun/rehab bagi korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	49 unit			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
615	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	22 Unit Rumah	572.047.280,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
616	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	27 Unit Rumah	89.131.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	jumlah koordinasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan	1 laporan			
617	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni	6.77 Persen			
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen infrastruktur kawasan permukiman	1 Kawasan			
618	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	22.657.542,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah bangunan rumah dan kualitas infrastruktur kawasan permukiman yang optimal	1 Kawasan			
619	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	40 Unit Rumah	883.795.850,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
620	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	10 Laporan	61.862.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
621	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	10 Ha	2.505.376.570,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			
622	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 Lokasi	3.652.078.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
623	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	12 Lokasi	259.498.240,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %			
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen			
624	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	110.206.475,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
625	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	21.398.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
626	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	101.244.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bln			
627	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan	3.983.412.006,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Paket			
628	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.314.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
629	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.329.230,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
630	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
631	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	57.662.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan			
632	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	17.110.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
633	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	993.720.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit			
634	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	57.600.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
635	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	17.200.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
636	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	170.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase penyelesaian konflik pertanahan	39.91 %			
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian konflik pertanahan	1 Dokumen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
637	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	517.201.310,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-			
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
638	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	48.036.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
639	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	49.550.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
640	2.10.05.2.01.0007	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.612.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase pelayanan izin terbit	70 %			
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Izin membuka/Memanfatkan Tanah Yang Terbitkan dalam 1(satu) tahun	2 persen			
641	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	0 Dokumen	196.730.245,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase realisasi TORA	70 %			
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penatagunaan Tanah yang terlaksana dalam 1(satu) Tahun	100 Laporan			
642	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	200.849.440,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA					
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan pemadaman, pencegahan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	88.46 Persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian pencegahan,pemadaman dan penyelamatan yang dilaksanakan	141 kejadian			
643	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	50 Laporan	35.639.565,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
644	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	7 Orang	108.962.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1	2	3	4	5	10	11	12
645	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	20 Desa/Kelurahan	22.144.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
646	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 Unit	382.676.770,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah tempat dilakukan pemeriksaaan peralatan proteksi kebakaran	15 tempat			
647	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	15 Dokumen	33.505.570,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
648	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	5 Dokumen	5.745.590,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	jumlah investigasi kejadian kebakaran	50 kejadian			
649	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	50 Dokumen	49.129.415,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan/sosialisasi dan edukasi masyarakat	8 lokasi			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
650	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	400 Orang	38.515.130,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
651	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	7 Desa/Kelurahan	90.974.150,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
652	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	4 Dokumen	87.050.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang dilaksanakan	91 kali			
653	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	91 Laporan	92.889.250,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
654	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	3 Laporan	35.963.920,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
655	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	7 Unit	578.773.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas yang disusun	31 Dokumen			
656	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	36.055.230,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
657	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan	21.054.955,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
658	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	24.360.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	4 unit			
659	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan Orang/bulan	15.151.905.200,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	4 unit			
660	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	24.400.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	4 Unit			
661	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	61.934.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	4 unit			
662	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6.080.800,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
663	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.610.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
664	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Paket	89.146.270,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
665	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	24.613.605,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
666	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	170.446.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	4 unit			
667	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.700.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	4 unit			
668	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	232.798.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
669	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.893.707.464,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	4 unit			
670	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	9.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
671	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	940.342.794,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
672	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	13.600.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
673	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	249.896.050,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
674	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	567.676.040,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
675	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA					
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100 Persen			
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	500 Kasus			
676	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	288.653.500,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
677	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	240 Dokumen	126.080.250,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
678	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Orang	239.308.200,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
679	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	18 Dokumen	77.039.750,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
680	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	500 laporan	1.040.172.180,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
681	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3 Laporan	47.246.250,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
682	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 Laporan	45.133.500,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	8 Perda/Perkada			
683	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 Laporan	66.215.300,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
684	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	50 Laporan	233.166.400,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
685	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60 Laporan	148.644.580,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2 Orang			
686	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan	130.374.000,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	10 Dokumen			
687	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	49.530.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
688	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	127.627.010,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	14 Bulan			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
689	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	10.269.993.602,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
690	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	37.018.940,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
691	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	32.280.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
692	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	10.016.000,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian	5 Unit			
693	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
694	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	30.364.000,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
695	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	13.126.330,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5 Unit			
696	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.290.680,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
697	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.285.670,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
698	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	37.908.410,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
699	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	151.518.000,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	20			
700	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	99.900.000,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
701	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81.900.000,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
702	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.966.674.884,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Pemeliharaan	16 Unit			
703	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	117.422.110,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
704	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	8.950.000,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
705	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	62.703.020,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA					
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Upaya Penanggulangan Bencana Melalui Pelaksanaan Kegiatan Persentase upaya penanggulangan bencana melalui pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana	100 % 100 Persen			
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase upaya pelayanan informasi rawan bencana	100 %			
706	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	60 Orang	75.042.437,20	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
707	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			
708	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	178.951.805,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
709	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	100 Unit	3.713.135.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
710	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	50 Orang	28.990.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
711	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	73.818.370,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
712	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	53.322.750,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
713	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	10 Orang	52.990.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
714	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
715	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
716	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	505.422.330,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
717	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
718	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	40 Kawasan	81.712.160,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) upaya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %			
719	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
720	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	106.362.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
721	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	10 Orang	195.460.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
722	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	73.676.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
723	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	60 Orang	102.703.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
724	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	8 Orang	293.080.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
725	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
726	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	3 Laporan	52.640.160,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase (%) upaya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100 %			
727	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	40.330.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
728	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
729	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
730	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
731	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	30 Orang	170.558.270,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
732	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	15 Orang	54.167.310,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
733	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	42.801.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
734	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1 Lembaga	94.767.697,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
735	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1 Laporan	78.942.630,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
736	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	129.754.710,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
737	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	83.798.220,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
738	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	4.105.150,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah berkualitas yang disusun	4 Dokumen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
739	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	82.462.070,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
740	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	14.989.750,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
741	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
742	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13.030.950,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
743	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
744	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	26.764.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
745	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	25.380.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	4 Unit			
746	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	5.276.554.694,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
747	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	8.700.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	4 Unit			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
748	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	419.820.496,68	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
749	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	165.435.667,10	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
750	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	49.549.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
751	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan Laporan	200.100.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	4 unit			
752	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	199.744.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
753	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	139.274.530,60	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
754	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	224.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	100 %			
755	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	127.754.736,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
756	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.300.302.320,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaanBMD	4 Unit			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
757	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	351.143.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
758	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	39.530.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
759	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan pelayanan pemberdayaan sosial	50 %			
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang diberdayakan	1 KAT			
760	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	282.974.720,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	5 Rekomendasi			
761	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	6.333.800,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	21 Orang			
762	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Orang	260.228.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
763	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	14.929.785,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
764	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Keluarga	2.243.310,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
765	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga	7.106.150,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	-	-			
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	12 Orang			
766	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	68.508.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	232 Orang			
767	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	93.907.792,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
768	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang	85.322.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
769	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	67.342.266,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
770	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	70.180.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
771	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	37.140.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
772	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Orang	16.091.470,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
773	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	84.450.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
774	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	109.739.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial undefined	16 Orang undefined undefined			
775	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
776	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	82.018.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase anak terlantar dan fakir miskin yang ditangani	94 %			
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	undefined	undefined undefined			
777	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	23.200.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
778	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	43.922.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data fakir miskin yang valid Jumlah data fakir miskin yang valid undefined	20,000 Orang 20000 Orang undefined undefined			
779	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	27626 Orang	569.741.450,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
780	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	5714 Keluarga	71.378.500,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
781	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6091 Keluarga	16.735.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
782	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	72.460.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan tanggap darurat bencana undefined	100 % undefined undefined			
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan Sosial yang ditangani undefined	1560 Orang undefined undefined			
783	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	5987 Orang	67.013.650,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
784	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	5987 Orang	82.560.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
785	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit	35.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
786	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang	10.294.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
787	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	495 Orang	59.869.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	90 %			
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara undefined	1 Kawasan undefined undefined			
788	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
789	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	61.072.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN					
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap APBD	1.05 Persen			
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	20 Perangkat daerah			
790	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	52.049.530,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
791	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	50 Orang	44.579.150,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat penguatan dan pengembangan	7 Lembaga			
792	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25 Orang	38.608.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO Per 10.000 penduduk perempuan	2 Rasio			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	4 Orang			
793	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22.896.350,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	2 Orang			
794	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	4 Orang	46.340.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	48 %			
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan dalam rangka meningktakan kualitas keluarganya	50 Keluarga			
795	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	77.219.860,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanan pembangunan undefined	70 % undefined undefined			
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	20 SKPD			
796	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	99.207.200,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kecamatan Layak Anak	19,05 %			
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PHA	2 Lembaga			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
797	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 Organisasi	46.837.350,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			
798	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.968.100,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio Kekerasan terhadap Anak Per 10.000 anak	3 Rasio			
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan kekerasan	8 Anak			
799	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	8 Orang	34.818.750,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
800	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	26.476.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			
801	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.850.450,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
802	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan			
803	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27/12 Orang/bulan	4.962.308.236,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			
804	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	7.733.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
805	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	49.994.010,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
806	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	36.997.100,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
807	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	118.182.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	6 Unit			
808	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
809	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	90.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
810	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	25.750.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
811	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	815.911.488,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara	12 Unit			
812	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	100.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
813	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	340.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur lumbung pangan	57.14 Persen			
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah lumbung yang layak digunakan (renovasi) 2.Jumlah ketersediaan sarana lumbung pangan (Pembangunan)	0 unit 1 unit			
814	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	12 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan pangan)	87.52 Persen			
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan			
815	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	8.450.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
816	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	9.162.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
817	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	146.468.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	14,0 ton			
818	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	14 Ton	245.592.400,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan			
819	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	100.362.240,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan yang ditangani	45,04 persen			
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	cakupan daerah rentan rawan pangan yang ditangani Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/KOta	5 kecamatan 1 Dokumen			
820	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.218.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan keamanan pangan segar	20 Persen			
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	5 lokasi			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
821	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	20.993.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
822	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	0 Dokumen	60.746.250,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianyan Laporan Capaian Kinerrja (LKPJ, LKJIP, SPIP dan LPPD)	4 Dokumen			
823	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	29.872.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-			
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
824	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
825	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	110.745.500,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			
826	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0	0	161.379.000,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
827	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 laporan	126.538.780,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			
828	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	30 Dosis	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-			
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			
829	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
830	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Dam Parit (Jaringan Irigasi) yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara Jumlah prasarana pertanian yang dibangun	undefined undefined 24 unit			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
831	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	255.310.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
832	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	122.050.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
833	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
834	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	1.059.826.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			
835	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	210.889.700,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
836	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	146.072.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			
837	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	5 Unit Usaha	166.285.140,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Wilayah Yang Terkendali Bencana Pertaniannya	90 %			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian di Kabupaten Nunukan	11000 ha			
838	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	11000 Ha	305.655.650,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Bidang Pertanian Yang Diawasi	17,86 %			
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbina dan Terawasinya Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian	18 laporan			
839	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
840	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
841	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	18 Laporan	75.095.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penangkar yang Diawasi	6 Penangkar			
842	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	0	0	59.238.000,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	-			
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			
843	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	199.999.980,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
844	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	23 Unit	789.999.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
845	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
846	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 Unit	99.999.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
847	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	30 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianyan Laporan Capaian Kinerrja (LKPJ, LKJIP, SPIP dan LPPD)	4 Dokumen			
848	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	161.752.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
849	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	53.006.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			
850	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	196 Orang/bulan	18.853.027.101,20	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket			
851	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	193.102.340,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
852	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	103.652.610,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
853	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
854	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Laporan	120.820.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan			
855	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	195.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
856	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.720.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
857	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.682.013.920,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
858	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	73.712.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
859	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
860	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan yang di susun dan dilaksanakan	67 Persentase			
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian muatan RPPLH Tersedianya dokumen pendukung RPPLH (Dokumen D3TLH)	10 Persentase 1 Dokumen			
861	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	618.965.256,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentasi Pemenuhan Terhadap Baku Mutu Lingkungan (air dan Udara)	68 persen			
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan	5 kawasan			
862	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	345.641.869,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
863	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1.429.999.680,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
864	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	306.614.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah areal	70 areal			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
865	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	21.310.200,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
866	2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	1 Lokasi	19.612.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah areal	50 areal			
867	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	40.026.250,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Penanganan RTH	100 persentase			
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan	2 kawasan			
868	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	105 Ha	8.079.743.621,94	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
869	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	20 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
870	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	28 Unit	1.940.522.736,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
871	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Unit	205.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pengendalian B-3 dan Limbah B-3	24 persentase			
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah limbah B-3	75 ton			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
872	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	9.598.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	13,33 persentase			
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi perizinan	31 kegiatan			
873	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	12 Dokumen	45.132.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
874	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang Orang	7.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
875	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	19 Badan Usaha	301.472.100,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase penetapan Hak MHA terkait PPLH	20 persen			
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase pendampingan	20 persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
876	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 Dokumen	53.119.990,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase SDM yang mengikuti pengembangan pelatihan/penyuluhan	100 persen			
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan	100 persen			
877	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	28.952.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
878	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	25 Orang	49.984.270,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
879	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	25.150.800,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan yang diterima oleh masyarakat	67 persen			
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan	50 persen			
880	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6 Entitas	37.759.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan	100 persentase			
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pengaduan	100 persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
881	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	3 Pengaduan	24.605.230,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
882	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	0 Perkara	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Terkelola	81 persentase			
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah Terkelola	81 persen			
883	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok	8.115.360,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
884	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit	119.229.880,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
885	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen	8.519.160,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
886	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	18 Ton	68.528.380,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
887	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional					
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	6811 Ton	7.794.847.544,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya pelayanan admisitrasi perkantoran yang berkualitas	80 persen			
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	7 dokumen			
888	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	138.895.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
889	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	22.452.870,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal	7 unit			
890	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5.811.379.436,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal	7 unit			
891	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	204.195.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
892	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	36.311.820,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
893	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.999.655,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
894	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	147.967.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
895	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang	3 unit			
896	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	68.850.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal	7 unit			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
897	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	139.873.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
898	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	968.540.560,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal	7 unit			
899	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	1.472.123.800,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
900	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN					
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP el Persentase kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Nunukan Persentase Anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari yg Memiliki KIA Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yg memiliki KIA	100 Persen 100 Persen 75 Persen 75 Persen			
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang dilakukan	4 Jenis			
901	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3 Dokumen	19.385.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
902	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	469.780.810,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1 Laporan			
903	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase anak yang memiliki Akta Kelahiran	98.00 Persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan	4 Jenis			
904	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	21 Layanan	133.209.640,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Laporan			
905	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	46.053.750,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
906	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang memanfaatkan data administrasi kependudukan melalui PKS	5 OPD			
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan Data Kependudukan dan pemanfaatan data dan penyajian data base kependudukan yang akurat	1 Laporan			
907	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	25.011.130,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
908	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	110.079.170,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang akuntabel	21 Laporan			
909	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	78.049.700,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data penduduk tingkat kabupaten	100 %			
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Profil kependudukan	1 dokumen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
910	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	15.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	69,00 Persen			
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang berkualitas	5 dokumen			
911	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	13.357.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
912	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
913	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	34.399.230,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1 unit			
914	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	5.238.845.439,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian	0			
915	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	65.186.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	1 unit			
916	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.720.320,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
917	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	587.452.442,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
918	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	94.381.210,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
919	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	8.506.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
920	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	250.016.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	1 unit			
921	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.200.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
922	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	408.948.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
923	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	678.277.800,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internalyang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	7 unit			
924	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	91.073.050,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
925	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	18.250.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi Jasa Umum
926	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase pengentasan desa Sangat tertinggal dan Desa Tertingal	75,40 persen			
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Yang Meningkat Statusnya Jumlah Desa Yang terfasilitasi Pernataan, Kewenangan, kode , Sarana dan Prasarana Desa	9 Desa 4 Desa			
927	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	9 Desa	40.067.600,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei	Dana Bagi Hasil (DBH)
928	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	1 Desa	148.949.350,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
929	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	2 Desa	69.039.750,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
930	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	3 Unit	21.262.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa	43,00 persen			
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antara desa	19 Desa			
931	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	49.997.500,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
932	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	30.102.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua	Dana Bagi Hasil (DBH)
933	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	74.392.400,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase administrasi pemerintahan desa yang baik	71,12 persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan pengawasan penyelenggaran admistrasi pemerintahan desa	5 Desa			
934	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	11.447.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
935	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	13.480.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
936	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	69.132.250,00	Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
937	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	200.557.140,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
938	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	8.932.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
939	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen	24.677.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
940	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	34.672.550,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
941	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	26.230.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
942	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	18.974.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
943	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	16.675.700,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
944	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	232 Orang	68.117.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
945	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	2 Laporan	39.941.100,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
946	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	50.384.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	48,63 persen			
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdyakan	50 LKD/LAD			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
947	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	1.120.134.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
948	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	44.400.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
949	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	144.302.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
950	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.019.320.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 persen			
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	10 dokumen			
951	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	61.322.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
952	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	29.994.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
953	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.840.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5 Unit Kerja			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
954	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.412.613.494,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5 Unit Kerja			
955	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.998.160,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
956	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	16.785.450,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
957	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.999.720,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
958	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	109.895.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
959	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15.686.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit Kerja			
960	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	36.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5 Unit Kerja			
961	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	29.724.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
962	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.570.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
963	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	603.211.632,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 Unit Kerja			
964	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	57.818.080,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		DINAS PERHUBUNGAN					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio ijin trayek angkutan darat	0.000516 Rasio			
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Penetapan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ	100 persen			
965	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan	7 Jenis			
966	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	89.030.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
967	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	251.248.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
968	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit	41.306.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
969	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	200 Unit	353.558.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang aktif	2 Unit			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
970	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
971	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	109.604.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yg diuji KIR	639 Unit			
972	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	46.180.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
973	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	550 Unit	22.900.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
974	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	550 Dokumen	24.976.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
975	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	9.988.173,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
976	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	17.300.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
977	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	7 Unit	193.392.020,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
978	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	75.673.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
979	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	8.310.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100 Pesen			
980	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
981	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	163.019.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	15373 Orang			
982	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	10.180.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
983	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Unit	253.728.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Trayek Angkutan Darat yang dikeluarkan	107 Izin			
984	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	52.452.150,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan angkutan perairan	0.11 %			
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Produktifitas Penumpang Angkutan Perairan	316433 Orang			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
985	2.15.03.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	1.078.824.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Trayek Angkutan Perairan yang dikeluarkan	227 Ijin			
986	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	55.343.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kebutuhan Prasarana Perhubungan Perairan yang direhab atau dipelihara Jumlah Prasarana Perhubungan Perairan yang dibangun	100 Persen 29 Unit			
987	2.15.03.2.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	1 Dokumen	69.107.310,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
988	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	7 Unit	316.186.640,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
989	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1 Laporan	49.998.130,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100 Persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
990	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.560.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
991	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	21.496.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
992	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	13.648.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen			
993	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	7.463.721.960,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen			
994	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
995	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	25.302.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen			
996	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	14.997.950,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
997	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	495.593.090,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
998	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	392.868.580,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
999	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	90.923.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			
1000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.517.860.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1001	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.444.972.244,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen			
1002	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	240.124.510,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1003	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	99.959.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1004	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	631.698.020,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100 Persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo Jumlah Konten Informasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik Persentase khalayak	2 Laporan 3 Orang 5 Komunitas 5 Konten 4 Media 5 pemohon 2 Dokumen 50 Persentase 72 Persentase			
1005	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	11.330.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1006	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	5 Komunitas	41.436.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1007	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 Permohonan	181.931.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1008	2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	50 Persentase	25.070.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1009	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	306.800.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1010	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	5 Konten	145.745.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1011	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	3 Orang	55.256.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memiliki situs web yang sesuai dengan standar	60 %			
1012	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	182.941.750,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Publik dan Layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan Pemerintah daerah	60 %			
1013	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	10 Aplikasi	45.064.500,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
1014	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	84.318.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1015	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	265.936.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1016	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	344.864.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1017	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	10 Aplikasi	708.379.875,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1018	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	10 Aplikasi	117.664.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1019	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	50 unit	45.862.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1020	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30 Perangkat Daerah	386.658.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1021	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	10 Layanan	104.213.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1022	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	3 Program	100.733,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1023	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi	23.304.875,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1024	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	30 Perangkat Daerah	5.622.686.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan penggangaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	10 Dokumen			
1025	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	19.958.130,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1026	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.304.220,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1027	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.975.530,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1028	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.997.310,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1029	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.985.430,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
1030	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	35.671.040,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Penghasilan Aparatur	14 Bulan			
1031	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	4.038.614.098,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan penyediaan kebutuhan barang/ jasa administrasi umum perkantoran	12 Bulan			
1032	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	42.150.790,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1033	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	46.012.140,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1034	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	150.031.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan Oprasional penunjang perkantoran	12 Bulan			
1035	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.240.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1036	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	516.262.872,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran	25 Unit			
1037	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	91.414.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh
1038	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	28.400.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	70 %			
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Statistik yang telah dilengkapi Metadata	29 dokumen			
1039	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	29 Dokumen	272.299.815,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase keamanan informasi pemerintah	70 %			
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang Meng Implementasikan Keamanan Informasi	25 Jumlah			
1040	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	25 Perangkat Daerah	125.963.500,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN DAN					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	17.37 Persen			
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Yang Diperiksa dan Diawasi Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Koperasi			
1041	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	81.612.780,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM pengelola koperasi yang meningkat kapasitasnya	13.66 Persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Pemahaman Perkoperasian	30 Koperasi			
1042	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	30 Orang	66.406.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	13.65 Persen			
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi Yang Diberdayakan dan Dilindungi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	55 Koperasi			
1043	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	0 Unit Usaha	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	13.41 Persen			
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Yang Diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	80 UMK			
1044	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	80 Unit Usaha	91.634.665,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1045	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	0 Unit Usaha	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	5.79 Persen			
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3 Pelaku Usaha Kecil			
1046	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50 Unit Usaha	102.336.520,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	8 Dokumen			
1047	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	115.822.185,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1048	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	8.405.100,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	6 Unit Kerja			
1049	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24/12 Orang/bulan	4.626.503.915,80	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum	6 Unit Kerja			
1050	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	109.419.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1051	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.445.040,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1052	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.171.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1053	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	161.709.000,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan penyediaan Jasa Penunjang	6 Unit Kerja			
1054	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1055	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1056	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	538.103.008,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan BMD	6 Unit Kerja			
1057	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	145.758.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1058	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	13.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1059	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi (non) perizinan yang diterbitkan tepat waktu	100 %			
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Yang Diterbitkan	2 Dokumen			
1060	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	29.720.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah SKA Yang Diterbitkanan	100 Dokumen			
1061	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	100 Dokumen	40.219.855,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan dalam kondisi layak/sehat	23.26 Persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelolah	1 Unit			
1062	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	47.976.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1063	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelolah sarana distribusi perdagangan yang dibina	27 Orang			
1064	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9 Dokumen	280.169.800,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Barang Beredar Yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan	2.21 Persen			
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Diawasi	23 Jenis Barang			
1065	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8 Laporan	36.079.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1066	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8 Laporan	1.190.713.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian harga dan Stok barang kebutuhan pokok yang dilaksanankan	15 Kegiatan			
1067	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 Laporan	46.209.200,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1068	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	230.159.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk Bersubsidi yang disalurkan yang diawasi	3000 Ton			
1069	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan	38.240.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor bersih perdagangan	439.40 Miliar Rupiah			
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang Yang Diikuti Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang Yang Diikuti	3 Jumlah Pameran/ misi dagang 3 Jumlah Pameran/ Misi Dagang			
1070	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1 Pelaku Usaha	166.302.460,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1071	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	1 Pelaku Usaha	119.396.705,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1072	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1073	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5 Produk	41.918.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP bertanda tera sah yang berlaku	65.00 Persen			
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Ditera/Tera Ulang Dalam Tahun Berjalan Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Ditera/Tera Ulang Dalam Tahun Berjalan	56,68 % 56,68 Persen			
1074	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	475 Unit	102.557.100,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1075	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	13 Orang	52.037.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk unggulan daerah yang meningkat penjualannya	62.50 Persen			
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3 Jumlah Promosi / Pemasaran			
1076	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1 UMKM	49.999.960,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1077	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	0 UMKM	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan Jumlah Sentra IKM	4.29 Persen			
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0 Dokumen			
1078	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1079	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	8 Dokumen	37.960.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1080	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1081	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20 Dokumen	415.755.750,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan oleh instansi terkait	100 Persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Verifikasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Pelaku IKM			
1082	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	7 Dokumen	37.655.380,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1083	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	7 Dokumen	40.475.380,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data IKM Produktif di Kabupaten Nunukan	2.4 Persen			
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data InformasiLengkap dan Terkinni	1 Dokumen			
1084	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	44.459.280,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Penanam Modal / Pelaku Usaha	30 Persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Terlaksananya Kajian Pengembangan Investasi	30 Dokumen			
1085	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1086	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	30 Dokumen	71.778.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten	2 Dokumen			
1087	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1088	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2 Daerah	33.197.280,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1089	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Penanam Modal (PMDN dan PMA) Berskala Nasional	30 Investor			
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi dan Potensi Daerah yang Diikuti	1 Kegiatan			
1090	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	101.912.925,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1091	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Sangat Baik Indeks			
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha dan Non Usaha	200 Jumlah Izin			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1092	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	169.453.705,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1093	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	48.726.610,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1094	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	185 Kegiatan Usaha	169.193.740,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Kepatuhan Penanam Modal terhadap Ketentuan Perizinan Berusaha	Sangat Baik Nilai			
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	14 Agenda			
1095	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9 Kegiatan Usaha.	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	[object Object]
1096	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	280 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	[object Object]
1097	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	200 Kegiatan Usaha	133.613.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data dan informasi Penanam Modal/Pelaku Usaha yang dapat diolah, dikaji dan dimanfaatkan	100 Persen			
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi	65 Dokumen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1098	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	26 Dokumen	49.999.800,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Berkualitas yang disusun	9 Dokumen			
1099	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	20.088.800,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1100	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.943.610,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	1 Unit			
1101	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.134.115.923,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Pemgelolaan Barang Milik Daerah	1 Unit			
1102	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.672.990,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	4 Unit Kerja			
1103	2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	[object Object]
1104	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.600.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum	1 Unit Kerja			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1105	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	186.813.200,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1106	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.317.640,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1107	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	163.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1108	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	213.670.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang	1 Unit Kerja			
1109	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	145.800.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1110	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30.180.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1111	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	508.417.440,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Unit Kerja			
1112	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	79.453.800,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1113	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	37.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
		DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	100 %			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan dan pengembangan pemuda	2895 Orang			
1114	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	Dana Bagi Hasil (DBH)
1115	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	50 Orang	36.174.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1116	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5 Orang	73.783.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang terbina	1 Organiasi			
1117	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2 LAPORAN Organisasi	400.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Peningkatan prestasi cabang olahraga kab/kota	9 Cabor			
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
1118	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	[object Object]
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	3 Event			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1119	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	2.058.479.870,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			
1120	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	4 Dokumen Dokumen	2.400.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	1 Kegiatan			
1121	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	699.689.730,00	Kab. Nunukan, Nunukan Nunukan Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan organisasi pramuka	100 %			
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi kepramukaan (kwarcab) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1 Organisasi			
1122	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	4275 Orang	200.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang berkualitas	8 Dokumen			
1123	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41.639.320,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	Dana Bagi Hasil (DBH)
1124	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	24.207.830,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi keuangan	1 Unit			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1125	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27/14 Orang/bulan	4.137.708.911,40	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Jumlah unit kerja internal yang mendapat layanan administrasi umum	1 Unit			
1126	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	174.449.630,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	Dana Bagi Hasil (DBH)
1127	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	79.947.475,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	Dana Bagi Hasil (DBH)
1128	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.247.925,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	Dana Bagi Hasil (DBH)
1129	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Laporan	86.837.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	8 Laporan			
1130	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan Laporan	244.181.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	Dana Bagi Hasil (DBH)
1131	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	986.198.112,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	11 Unit			
1132	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	34.990.700,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	Dana Bagi Hasil (DBH)
1133	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	7.960.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	Dana Bagi Hasil (DBH)
1134	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	320.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase 10 pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	40 %			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	1 Objek			
1135	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1.499.999.745,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1136	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	64.996.800,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			
1137	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pengembangan kesenian tradisional	80 %			
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembinaan kesenian yang dilakukan	1 Pembinaan			
1138	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	5 Orang	14.986.800,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1139	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	25 Sertifikat	24.995.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1140	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	49.963.210,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan sejarah lokal	100 %			
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggalian dan pembinaan sejarah lokal	1 Sejarah			
1141	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	2 Orang	37.578.650,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1142	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit	15.135.800,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Selisun	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1143	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	14.999.940,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	76 %			
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar Budaya yang sudah terkaji	5 Objek			
1144	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	6 Objek	26.449.510,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
1145	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	36.877.350,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dikelolah	5 Objek			
1146	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	5 Objek	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan DTW yang dibangun sarana dan prasarananya	48,13 %			
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang di kelolah	1 DTW			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1147	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Sumantipal Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	[object Object]
1148	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	45 Orang	147.293.125,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Mansalong Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Sumantipal	Dana Bagi Hasil (DBH)
1149	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	226.361.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Sumantipal	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	1 Destinasi			
1150	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	125.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1151	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	383.307.570,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Binusan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1152	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Laporan	56.757.610,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Srinanti Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Naputi	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan/ pembinaan TDUP	1 Laporan			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1153	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	84 Usaha	56.413.100,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pelaksanaan pemasaran pariwisata	80 Persen			
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah promosi/pemasaran pariwisata	2 Promosi			
1154	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Kegiatan	2.944.005.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1155	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	105.999.910,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan pemanfatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	41,74 %			
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah ruang bereksperesi, berpromosi dan berinteraksi insan kreatif yang tersedia	1 Ruang Kreatif			
1156	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	51.909.540,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang terbina	15.72 Persen			
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	17 Sektor			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1157	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	24.614.570,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1158	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelatihan pelaku ekonomi kreatif yang di fasilitasi	1 Pelatihan			
1159	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	44.191.750,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tingkat pembinaan perpustakaan	24.55 Persen			
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah kegiatan pembinaan, pengembangan dan pelayanan perpustakaan	100 Persen			
1160	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	54.259.405,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1161	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	25 Perpustakaan	0,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
1162	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1163	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	42.097 Eksemplar	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1164	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten	5 Kegiatan			
1165	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5 Perpustakaan	50.567.080,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1166	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	20 Orang	121.549.970,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1167	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	30 Lokus	72.598.800,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Persentase pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	0.50 Persen 0,5 persen			
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah kegiatan pelestarian naskah kuno	100 Persen			
1168	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	30 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	9 Laporan			
1169	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan	35.311.700,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1170	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	17.723.530,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100 Persen			
1171	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	4.399.967.042,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan Bimtek	53 Orang			
1172	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1173	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	4 Unit kerja			
1174	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.089.100,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1175	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	86.339.170,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1176	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	98.530.670,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1177	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.662.800,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1178	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	252.634.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 unit kerja			
1179	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	153.228.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1180	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	46.400.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1181	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	304.418.336,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit kerja internal yang mendapatkan layanan Pemeliharaan BMD	4 unit kerja			
1182	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	62.590.200,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1183	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	34.500.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1184	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	11.854.040,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang dikelola sesuai dengan Standar Kearsipan	82.76 Persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1185	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	21600 Berkas	89.394.460,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1186	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	250 Berkas	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1187	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Laporan	99.893.490,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten dan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan	1			
1188	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50 Pengguna	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1189	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip OPD yang dilindungi dan diselamatkan	100 Persen			
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun	100			
1190	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	167.227.900,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat	10 Arsip			
1191	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10 Arsip	0,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase OPD yang melaksanakan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai dengan NSPK Persentase OPD yang melaksanakan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai dengan NSPK	8 persen 8 Persen			
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	4 OPD			
1192	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	15 Arsip	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		DINAS PERIKANAN					
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap	10 %			
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan	1515 Unit			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1193	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	21.002.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1194	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1509 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1195	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	6 Unit	428.122.500,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan binaan kelompok nelayan	6 %			
1196	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	10 Orang	79.431.710,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1197	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	21.540.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung, Tepian Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1198	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5 Unit Usaha	0,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung, Tepian Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah data laporan pendaratan ikan	1 Dokumen			
1199	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan usaha perikanan yang diterbitkan	33,22 %			
1200	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	1923 Rekomendasi	17.981.750,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya	12 %			
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan binaan kelompok pembudidaya	9,55 %			
1201	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	131.871.050,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1202	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	10 Kelompok	34.769.765,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1203	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	5 Kelompok	10.199.940,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1204	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	149.040.870,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan usaha perikanan budidaya yang diterbitkan	50 Rekomendasi			
1205	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Rekomendasi	21.490.925,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan	28 Unit			
1206	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.459.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1207	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	534.664.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1208	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	10 Dokumen	30.388.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1209	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	24 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan kelompok nelayan dan pembudidaya	5 %			
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan perikanan yang di laksanakan	1 tahun			
1210	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	50 Pelaku Usaha	22.449.425,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1211	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	50 Pelaku Usaha	28.544.175,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Laju pertumbuhan konsumsi ikan	17,04 %			
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-			
1212	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan sistem pemasaran dan mutu hasil perikanan	5 kali			
1213	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	5 Unit Usaha	69.683.600,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN)	5 kali			
1214	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,066 Ton	121.910.275,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1215	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	4 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100 %			
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1216	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	56.517.250,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1217	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	13.710.955,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1218	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	43.539.975,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			
1219	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	4.005.736.995,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			
1220	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	9.796.930,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1221	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	21.191.450,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1222	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	39.836.390,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1223	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	33.184.250,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1224	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	154.935.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1225	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	16.450.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1226	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	854.793.488,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			
1227	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	83.681.570,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1228	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	19.500.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1229	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen rencana tenaga kerja daerah yang disusun	0 %			
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rencana tenaga kerja daerah 2022- 2027	0 Dokumen			
1230	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100 % 44,67 %			
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	590 Orang			
1231	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	590 Orang	456.435.710,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	31,53 Persen			
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	130 Orang			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1232	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	130 Orang	26.310.285,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair / Bursa Kerja	50 Orang			
1233	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50 Orang	54.023.590,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	200 Orang			
1234	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	200 Orang	52.935.120,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB, LKS Biparti, Struktur skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	9,41 %			
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	2 Perusahaan			
1235	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	2 Perusahaan	62.326.940,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	5 Perkara			
1236	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara	154.866.590,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah Persentase dokumen rencana tenaga kerja daerah yang disusun	100 Persen persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100 %			
1237	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	65.921.690,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1238	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	176.090.665,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	12 Bulan			
1239	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	5.429.114.282,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	100 %			
1240	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.555.210,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1241	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	115.773.725,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1242	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1243	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	80.148.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	100 %			
1244	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.530.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1245	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	102.360.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1246	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	728.489.632,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	100 %			
1247	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	69.984.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1248	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	22.010.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1249	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan PTB (Pembangunan Transmigrasi Baru)	14.29 %			
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan			
1250	3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	31.338.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pengembangan kawasan transmigrasi	33.33 %			
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan permukiman Transmigrasi	1 Pemukiman			
1251	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	175 Kepala Keluarga	61.976.925,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1252	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		SEKRETARIAT DAERAH					
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	100 %			
1253	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	19.149.957.338,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	95 %			
1254	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	455.227.179,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Alokasi Umum (DAU)
		BAGIAN HUKUM					
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH					
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan huku	100 Persen			
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Laporan Aksi HAM, Dokumentasi Poduk Hukum dan Informasi Hukum yang berkualitas	90 %			
1255	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	367.989.640,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1256	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6 Kasus	578.767.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1257	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	506 Dokumen	120.763.865,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN					
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH					
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	100 %			
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten	Sangat Tinggi (4,21- Nilai			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1258	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7 Dokumen	934.815.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1259	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	789.256.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah	90 %			
1260	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	65.179.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1261	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	49.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1262	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	12 Laporan	28.743.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH					
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase realisasi program pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum	100 Persen			
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase realisasi kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan yang terlaksana	90 %			
1263	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	43 Dokumen	10.210.808.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1264	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	599.026.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1265	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	2.446.470.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM					
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH					
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-			
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-			
1266	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	164.695.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1267	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	10.391.419.250,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1268	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	14 Dokumen	209.134.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1269	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1270	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			
1271	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen	129.991.780,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1272	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	135.015.855,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1273	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	139.937.570,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH					
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Kebijakan Perekonomian dan SDA Serta Administrasi Pembangunan Yang Terlaksana undefined	90 % undefined undefined			
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat capaian kinerja administrasi pembangunan undefined	95 % undefined undefined			
1274	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 laporan Dokumen	59.569.550,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1275	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 laporan Laporan	54.394.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1276	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan Laporan	566.885.450,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA					
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH					
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (Sistem informasi, SDM, kematangan UKPBJ) undefined	86 Indeks undefined undefined			
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pelayanan pengadaan barang dan jasa yang sesuai SOP	100 %			
1277	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	70 Dokumen	247.256.520,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1278	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	20 Dokumen	517.488.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1279	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	283.672.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		BAGIAN ORGANISASI					
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH					
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase perangkat Daerah sesuai pedoman nomenklatur	100 %			
1280	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	50 Dokumen	831.152.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1281	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	48 Laporan	209.685.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1282	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	349.977.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1283	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	29 Dokumen	399.974.250,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		BAGIAN UMUM					
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH					
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen 89/100 Persen			
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %			
1284	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	19.999.505,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1285	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	99.999.755,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 %			
1286	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	120 Dokumen	29.999.965,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	92 %			
1287	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	86.171.400,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1288	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.366.624.080,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1289	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	293.544.958,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1290	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	335.636.560,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1291	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	72.050.055,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1292	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	58 Laporan	2.574.422.320,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1293	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8000 Dokumen	87.791.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			
1294	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1.453.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %			
1295	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Laporan	51.250.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1296	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	50 Laporan	2.960.454.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1297	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	45 Laporan	7.981.074.040,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			
1298	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	535.628.146,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1299	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84 Unit	1.394.598.370,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1300	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	220 Unit	1.933.902.500,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1301	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.477.361.250,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	95 %			
1302	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	1.372.781.660,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1303	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	998.274.990,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1304	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	237.672.800,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Bagi Hasil (DBH)
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN					
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH					
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %			
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	95 %			
1305	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	450 Laporan	6.143.793.250,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1306	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	210 Laporan	2.885.734.230,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1307	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	210 Laporan	749.883.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN					
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH					
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %			
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai pedoman	100 %			
1308	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	131.172.550,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1309	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	22.219.400,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1310	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	23.137.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1311	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	24.999.735,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1312	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	24.998.400,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1313	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	78.071.400,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai pedoman	100 %			
1314	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	760 Dokumen	772.374.620,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1315	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	77.139.500,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	95 Persen			
1316	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	218.140.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1317	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	260.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1318	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		SEKRETARIAT DPRD					
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.02	SEKRETARIAT DPRD					
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	93 %			
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan yang disahkan	2 Peraturan			
1319	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	32.657.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1320	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen	1.707.891.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1321	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	2.159.174.100,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1322	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	25 Dokumen	191.173.530,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1323	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	35.175.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kebijakan Anggaran yang terlaksana	7 Dokumen			
1324	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	0	0	54.620.635,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
1325	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen Dokumen	68.436.705,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1326	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	58.140.155,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1327	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	58.139.605,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1328	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	8.318.560,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1329	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	23.292.480,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pemerintahan yang dijalankan	60 Laporan			
1330	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	10 Laporan	56.567.165,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1331	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10 Laporan	56.567.165,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1332	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10 Laporan	56.567.165,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1333	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10 Dokumen	473.214.965,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas DPRD	25 Orang			
1334	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1335	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	720.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1336	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	294.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1337	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	42 Dokumen	23.512.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1338	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	23.512.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1339	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	779.195.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	75 Dokumen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1340	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	52 Laporan	1.004.174.495,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1341	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	25.745.820,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1342	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	2.005.132.820,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik	1 Dokumen			
1343	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	8.999.820,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Rapat Fasilitasi Tugas DPRD	104 Rapat			
1344	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	47 Dokumen	4.152.400.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1345	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	20.105.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1346	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	1.460.312.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1347	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	52 Dokumen	1.361.640.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 % 100 Persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	7 Dokumen			
1348	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	255.214.325,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1349	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	147.337.490,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keungan yang tersusun	12 Bulan			
1350	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4.376.112.079,40	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tersusun	1 Dokumen			
1351	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	86.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1352	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	160.024.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Umum	5 Dokumen			
1353	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	156.275.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1354	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	424.442.440,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1355	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120 Paket	1.295.761.564,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1356	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	214.222.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	31 Dokumen			
1357	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	27 Unit	139.269.340,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Layanan			
1358	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.040.400.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1359	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.009.001.360,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Laporan			
1360	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 Unit	427.082.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1361	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	520.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1362	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.066.364.800,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah dewan yang mendapatkan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	25 Orang			
1363	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	17.029.200.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1364	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	485.540.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1365	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	180.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	2 Layanan			
1366	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	90 Laporan	250.160.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1367	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	1.027.907.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	5.01	PERENCANAAN					
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan Perda/Perkada	100 %			
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan Perda/Perkada	3 Dokumen			
1368	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1369	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	46.642.700,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1370	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	22 Berita Acara	49.947.650,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1371	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	120.231.400,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1372	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	420 Usulan	397.248.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1373	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	1.550.530.110,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) berbasis elektronik yang data dan informasinya terintegrasi dalam SIPD	3 RPD			
1374	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 Orang	279.446.150,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun tepat waktu	3 Dokumen			
1375	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	51.162.600,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1376	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	662.037.500,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD	100 %			
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen RENSTRA Terhadap RPJMD dan Dokumen Renja Terhadap RKPD Pada Perencanaan Pembangunan tahun berkenaan bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %			
1377	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	45.433.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1378	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30 Laporan	40.652.460,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1379	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	28 Laporan	75.330.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1380	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	28 Laporan	52.678.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1381	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	402.499.245,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1382	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	28.476.700,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1383	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	60.120.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1384	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	53.605.200,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan Dokumen RENSTRA Terhadap RPJMD dan Dokumen Renja Terhadap RKPD Pada Perencanaan Pembangunan tahun berkenaan bidang Perekonomian dan SDA	100 %			
1385	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	42.316.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1386	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	35.168.740,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1387	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	48.320.780,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1388	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan	30.054.850,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1389	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	47.586.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1390	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	30.034.940,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1391	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	102.284.520,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1392	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan	26.834.280,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen RENSTRA Terhadap RPJMD dan Dokumen Renja Terhadap RKPD Pada Perencanaan Pembangunan tahun berkenaan Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan	100 %			
1393	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	38.114.260,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1394	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	43.233.750,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1395	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	93.724.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1396	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	79.261.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1397	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	38.892.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1398	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	34.619.590,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1399	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	55.934.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1400	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	40.973.250,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %			
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	13 Dokumen			
1401	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	77.258.680,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1402	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	67.338.480,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1403	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	130.682.800,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			
1404	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	6.712.950.779,80	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1405	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	46.800.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1406	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	109.915.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			
1407	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	101.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1408	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	524.314.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1409	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	154.966.210,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1410	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	64.716.575,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1411	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	364.812.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			
1412	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	456.460.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1413	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	366.379.280,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1414	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	234.030.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1415	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	545.183.424,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			
1416	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	247.927.670,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1417	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	51.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1418	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	495.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	32 %			
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan			
1419	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	70.000.175,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			
1420	5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	30.034.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-			
1421	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	210.000.055,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1422	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	29.999.720,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	5.02	KEUANGAN					
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2 %			
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen Penggangaran dan Regulasi	100 %			
1423	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	708.174.735,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1424	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	683.274.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1425	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	715.321.200,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1426	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	683.380.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1427	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	282.487.105,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1428	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6 Dokumen	528.941.390,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1429	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	51 Orang	792.232.530,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tertib Capaian Penerbitan SP2D dan Penyerapan Belanja Daerah	100 %			
1430	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1000 Dokumen	143.307.380,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1431	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	800 Dokumen	249.618.980,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1432	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	10000 Dokumen	691.411.560,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1433	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	51 Orang	249.385.515,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersusunya Dokumen Pelaporan Keuangan Daerah dan Pembinaan Akuntansi	100 %			
1434	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	334.416.660,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1435	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	654.075.595,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1436	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	433.434.920,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1437	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	320.324.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1438	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	38 Orang	91.796.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyediaan Belanja Tak Terduga dan Penyaluran Bantuan Keuangan	60 %			
1439	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	342.569.494.851,69	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1440	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	18.865.358.704,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Prosentase Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100 %			
1441	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	286.890.250,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	100 %			
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Jenis BMD yang Terkelola	100 %			
1442	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	385.952.465,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1443	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	9.067.025,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1444	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	50 Dokumen	9.923.430,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1445	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	65.042.585,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1446	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	308.356.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1447	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	47.215.845,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1448	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	795.400.870,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1449	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	25 Laporan	113.565.100,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1450	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	21.824.550,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1451	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	50 Dokumen	568.799.890,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1452	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	50 Laporan	99.734.480,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1453	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	442.319.450,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1454	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	105.633.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	8 Dokumen			
1455	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.955.500,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1456	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	21.722.500,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1 OPD			
1	2	3	4	5	10	11	12

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1457	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/bulan	14.006.177.325,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	100 %			
1458	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.324.900,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1459	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	305.282.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1460	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	81.239.190,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1461	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.407.450,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1462	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	77.966.350,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1463	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	169.397.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	100 %			
1464	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	286.500.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1465	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	44.900.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1466	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.083.889.952,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	20 Unit			
1467	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	92.072.580,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1468	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		BADAN PENDAPATAN DAERAH					
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	5.02	KEUANGAN					
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penerimaan dana transfer ke daerah	100 Persen			
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah koordinasi pengelolaan dana transfer ke daerah	6 kali			
1469	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	200.171.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan pajak daerah	3 Persen			
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah pajak daerah	1805088079 1 Rp			
1470	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	40.650.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1471	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	75.109.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1472	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	190.448.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1473	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	128.958.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1474	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5 Laporan	100.845.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1475	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	69011 Laporan	101.277.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1476	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	5 Obyek Pajak	95.187.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1477	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	69131 Dokumen	167.759.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1478	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	120 Layanan	11.340.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1479	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1480	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	5 Dokumen	111.640.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1481	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5 Dokumen	19.680.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1482	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	22 Dokumen	138.037.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1483	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	7 Laporan	110.570.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1484	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan	91.403.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen			
1485	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	41.487.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1486	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	7.837.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	24 dokumen			
1487	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	7.057.433.761,90	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	4 laporan			
1488	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	20.570.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1489	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 Paket	179.233.872,70	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1490	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	26 Paket	218.874.650,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1491	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	253.976.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	2 laporan			
1492	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73.992.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1493	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	197.651.216,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	28 unit			
1494	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	59.830.561,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1495	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	23.550.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	5.03	KEPEGAWAIAN					
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai dengan kualitas pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	183.85 Persen			
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Jenis Informasi Kepegawaian yang terupdate	3 Jenis			
1496	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	58.116.720,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1	2	3	4	5	10	11	12
1497	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	7 Dokumen	58.375.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1498	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1499	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	96 Dokumen	122.037.650,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1500	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	67.389.580,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1501	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	58.960.680,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1502	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3 Dokumen	60.818.250,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah SK yang terbit	1362 SK			
1503	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	300 Dokumen	85.397.650,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1504	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	832 Dokumen	64.847.210,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1505	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	220 Dokumen	82.710.590,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	220 ASN			
1506	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	170 Orang	338.151.660,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1507	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen	44.048.150,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1508	5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Jumlah ASN yang mendapat pembinaan dan penghargaan	140 ASN 349 ASN			
1509	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 Laporan	1.105.831.270,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1510	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	10 Orang	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1511	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	307 Orang	56.361.900,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1512	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60 Orang	30.454.360,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1513	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan	104.059.900,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Berkualitas yang disusun	6 Dokumen			
1514	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	23.497.540,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1515	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	16.869.260,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	4 unit			
1516	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5.861.821.842,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	4 unit			
1517	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	44.854.310,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1518	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1519	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	170.525.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyedian jasa penunjang	4 unit			
1520	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	320.536.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1521	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	391.144.800,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	4 unit			
1522	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	57.948.260,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
1523	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	33.301.000,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
1524	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	499.620.559,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4,35 Persen 4.35 Persen			
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	120 ASN			
1525	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang	1.664.922.430,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 ASN			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1526	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	1.896.692.230,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH					
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH					
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan EValuasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan 1 paket 2 dokumen 5 unit kerja			
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KInerja Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang disusun	4 Dokumen 4 Laporan			
1527	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	44.944.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1528	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	34.157.575,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersalurnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Paket			
1529	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	3.201.076.332,95	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Komponen Instalasi/Penerangan yang tersedia Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang disediakan Berdasarkan Klasifikasi BMD Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibutuhkan	1 Paket 1 Laporan 7 Paket 1 Paket 1 Laporan 6 Unit			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1530	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1531	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.450.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1532	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	40.101.300,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1533	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.121.650,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1534	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	255.252.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1535	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	248.359.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket 12 laporan 1 Paket			
1536	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.800.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1537	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	17.400.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1538	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	486.752.640,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan/Service Jumlah PKB yang dibayarkan tepat waktu	1 Paket 6 Unit			
1539	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	29.778.360,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1540	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
	5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN					
	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Jumlah kecamatan yang dimonitoring kawasan perbatasan Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan dikawasan perbatasan jumlah wilayah perbatasan yang terkoordinir Jumlah laporan monitoring dan evaluasi di kawasan perbatasan Jumlah Fasilitasi kerjasama dan dokumen Perencanaan yang dilaksanakan Persentase pengelolaan kawasan perbatasan yang dilaksanakan	1 kecamatan 1 laporan 2 kegiatan 2 laporan 4 dokumen 65 %			
	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Fasilitasi Kerjasama dan Dokumen Perencanaan yang Dilaksanakan Dalam Kegiatan Sosek Malindo, OBP, BTA dan BCA Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Renaksi dan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan	4 Kegiatan 3 Dokumen			
1541	5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	2 Dokumen	317.500.420,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1542	5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	2 Dokumen	767.500.655,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan jumlah koordinasi, integrasi dan sinkronissi pemanfaatan kawasan petbatasan jumlah pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan jumlah tanda batas daerah yang terpelihara jumlah tanda batas negara yang terpelihara	2 dokumen 2 kegiatan 2 laporan 1 laporan 4 laporan			
1543	5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	14.996.350,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1544	5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	17.999.665,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1545	5.06.02.2.02.0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	4 Dokumen	321.999.935,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1546	5.06.02.2.02.0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	1 Dokumen	18.060.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1547	5.06.02.2.02.0005	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan	24.999.925,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan pembangunan dikawasan perbatasan Presentase hasil Monitoring dan Evaluasi yang digunakan dalam mendukung kebijakan daerah	2 laporan 2 laporan			
1548	5.06.02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	107.038.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1549	5.06.02.2.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	125.052.490,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		INSPEKTORAT DAERAH					
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH					
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan berdasarkan PKPT/Non PKPT Persentase tindak lanjut temuan rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	100 Persen 90 Persen			
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	196 Laporan			
1550	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	34 Laporan	825.060.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1551	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	32 Laporan	123.250.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1552	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	68 Laporan	842.453.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1553	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	56 Laporan	973.230.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1554	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen	678.937.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan			
1555	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	600.063.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-	-			
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			
1556	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1557	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi	40 OPD			
1558	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 perangkat daerah	767.819.980,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1559	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31 perangkat daerah	610.044.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1560	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	246.712.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1561	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	599.003.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 % Persen			
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkualitas yang di susun	9 Dokumen			
1562	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	259.667.020,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1563	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	71.698.500,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Keuangan	5 Unit			
1564	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	9.227.632.828,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian	5 Unit			
1565	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	46 Orang	2.562.704.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	5 Unit			
1566	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.884.856.610,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1567	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	83.000.910,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1568	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.378.515,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1569	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	299.728.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa Penunjang	5 Unit			
1570	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	41.400.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1571	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1572	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	123.480.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan barang milik Daerah	5 Unit			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1573	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	192.301.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1574	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	[object Object]
		KEC. NUNUKAN					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 %			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %			
1575	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	49.751.665,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1576	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	1.173.216.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	100 %			
1577	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	7.992.360,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1578	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	67.993.120,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	100 %			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang di berdayakan	3 Laporan			
1579	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	43.476.150,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan	100 %			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1580	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarak atan	36.046.760,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1581	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	[object Object]
1582	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	799.627.510,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1583	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	43.446.050,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kelembagaan kemasyarakatan yang diberdayakan	6 Dokumen			
1584	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	9.172.690,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1585	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	26.703.330,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			
1586	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	32.539.900,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umu	100 %			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi di Kecamatan	5 Dokumen			
1587	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	14.899.400,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1588	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	18.438.800,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	5 Dokumen			
1589	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen	7.650.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkualitas yang disusun	6 Dokumen			
1590	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	5.499.560,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1591	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	9.499.780,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5 Unit			
1592	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	8.864.720.345,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian	100 Persen			
1593	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	143 Unit	59.500.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	5 Unit			
1594	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10.390.600,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1595	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	302.500.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1596	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	118.835.750,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1597	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	38.094.430,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1598	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	206.196.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5 Unit			
1599	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.872.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1600	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.544.420.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 Unit			
1601	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	59.893.440,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1602	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1603	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. NUNUKAN SELATAN					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 %			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase cakupan terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1604	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	28.460.095,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase cakupan terlaksananya Urusan Pemerintahan dilimpahkan kepada camat	100 %			
1605	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	55.399.110,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	100 %			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase cakupan masyarakat kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan	100 %			
1606	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarak atan	28.364.235,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1607	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	458.161.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
1608	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	270.957.610,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
1609	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	47.525.105,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pemberdayaan	100 %			
1610	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarak atan	808.359.190,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1611	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Kemasyarak atan	27.907.570,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1612	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	4 Unit	51.970.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1613	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	65.020.245,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	100 % 100 Persen			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase cakupan wilayah yang terkoordinasikan penyelenggaraan TRANTIBUM	100 %			
1614	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	47.731.520,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 % 100 Persen			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang terselenggarakan	100 %			
1615	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang	22.949.415,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1616	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	58.553.800,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 % 100 Persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkualitas yang disusun	14 Dokumen			
1617	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	9.680.835,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1618	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	6.110.940,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5 Unit			
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.068.465.906,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5 Unit			
1620	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	14.978.540,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1621	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	80.170.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1622	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	37 Paket	158.645.910,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1623	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	51.826.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	5 Unit			
1624	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	31.960.930,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan jasa penunjang urusan	5 Unit			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1625	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	173.742.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1626	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.351.698.912,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 Unit			
1627	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	64.043.140,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1628	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	25.140.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1629	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	149.952.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. SEBATIK					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	98 Persen			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %			
1630	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	9.933.790,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1631	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	11.392.400,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1632	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	9.295.300,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1633	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	9.998.920,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %			
1634	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	9.258.560,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1635	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5 Laporan	9.973.620,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1636	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	12.348.880,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyaraka	98 %			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	98 %			
1637	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarak atan	22.700.390,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 laporan			
1638	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	14.101.410,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	98 %			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase penyelenggaraan koordinasi ketremtraman dan ketertiban umum	100 %			
1639	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	27.962.060,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terselenggarannya kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %			
1640	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	9.910.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselengarakan	100 %			
1641	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	10.047.900,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	98 Persen			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi, mendapat rekomendasi dan terawasi	100 %			
1642	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	15.760.670,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1643	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	14.744.380,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1644	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	11.978.950,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah berkualitas yang disusun	14 dokumen			
1645	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	25.449.330,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1646	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	22.466.940,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1647	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	30.151.900,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan administrasi keuangan	5 unit			
1648	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.283.427.247,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Alokasi Umum (DAU)
1649	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	41.125.400,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	5 unit			
1650	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.329.140,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1651	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	155.652.120,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1652	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.346.720,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1653	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.887.600,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1654	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	206.332.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah BMD yang disediakan	24 unit			
1655	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	45.328.620,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1656	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	71.423.240,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5 unit			
1657	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58.942.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1658	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1659	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	323.958.048,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pelayanan BMD	6 unit			
1660	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	33.961.480,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1661	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	4.560.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1662	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	134.572.560,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Tanjungkarang	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. SEBATIK BARAT					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 Persen			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100 %			
1663	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	13.801.210,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahahan yang tiodak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 %			
1664	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.468.770,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %			
1665	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	9.644.678,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1666	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	14.513.860,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	100 %			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan	100 %			
1667	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	7.088.860,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1668	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	16.999.640,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100 %			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100 %			
1669	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	9.855.772,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100 %			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum	100 %			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1670	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 Orang	121.534.500,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %			
1671	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	7.073.140,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1672	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	6.395.090,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1673	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	[object Object]
1674	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	17.927.480,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah berkualitas yang disusun	9 Dokumen			
1675	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.690.920,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1676	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.498.660,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1677	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.800.500,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5 Unit			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1678	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.599.934.592,60	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 Unit			
1679	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			
1680	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	53.475.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	5 Unit			
1681	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.984.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1682	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	111.610.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1683	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	52.823.570,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1684	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.690.770,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1685	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	211.234.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	16 Unit			
1686	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	33.300.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1687	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	92.940.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1688	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	120.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Binalawan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5 unit			
1689	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94.167.200,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1690	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1691	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	350.540.400,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 Unit			
1692	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	67.640.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1693	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6.260.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. SEBATIK TIMUR					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 Persen			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	JumlahKegiatan Koordinasi PenyelenggaraanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	49 Kegiatan			
1694	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	21.267.480,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1695	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48 Dokumen	17.580.570,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan yang dilimpahkan	32 Dokumen			
1696	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	27.260.600,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1697	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	35.237.080,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan yang dilimpahkan	15 Dokumen			
1698	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	13 Dokumen	9.715.150,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1699	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	18.576.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	100 %			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang diberdayakan	4 Desa			
1700	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarak atan	16.031.240,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100 %			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			
1701	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	26.756.280,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan fasilitas Keamanan dalam tekhnik pencegahan kejahatan	24 Kegiatan			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1702	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	3.740.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan Desa dan Kelurahanyang dibina dan di awasi	4 Desa			
1703	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	[object Object]
1704	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	30.604.100,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	14 Dokumen			
1705	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.441.300,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1706	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	22.973.580,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja internal yang mendapatkan layangan admistrasi keuangan	12 Orang/Bulan			
1707	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2.132.176.793,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Umum	150 Paket			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1708	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.127.840,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1709	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	200.813.120,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1710	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	51.973.060,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1711	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.721.830,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1712	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106 Laporan	157.250.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja internal yang mendapatkan layanan Penyediaan jasa	24 Laporan			
1713	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73.126.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1714	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	440.045.216,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			
1715	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	93.515.340,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1716	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	14.100.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
1717	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	121.800.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Timur, Tanjung Harapan	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. SEBATIK UTARA					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 %			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat desa	100 %			
1718	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	11.760.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1719	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	3.400.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat dii Wilayah Kecamatan Persenstase terlaksananya urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan 100 %			
1720	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.397.090,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %			
1721	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1722	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	19.310.190,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	100 %			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %			
1723	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarak atan	20.272.220,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1724	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.400.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	100 %			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Polri, TNI dan Instansi Vertikal di ilayah Kecamatan	1 Laporan			
1725	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.920.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan			
1726	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	13.673.010,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	3 Dokumen			
1727	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	4.852.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1728	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	11.515.160,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1729	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Sungai Pancang	[object Object]
1730	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan	4.720.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1731	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	4.890.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %			
1732	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	9.537.580,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Seberang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1733	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	9.022.180,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Seberang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan/Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN persentase terlaksananya kegiatan keuangan	14 Bulan 100 %			
1734	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	223 Orang/bulan	2.118.413.296,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Seberang	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian	5 Unit 100 %			
1735	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	0,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100 %			
1736	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.965.600,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Seberang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1737	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	89.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1738	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	65.495.830,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Seberang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1739	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.028.350,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Seberang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1740	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	131.951.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100 %			
1741	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	130.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Seberang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1742	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	179.170.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Seberang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			
1743	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.422.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Seberang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1744	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	329.120.928,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Seberang	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			
1745	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	46.887.400,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1746	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	11.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Seberang	Dana Bagi Hasil (DBH)
1747	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Utara, Seberang	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. SEBATIK TENGAH					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Musrembang	1 Laporan			
1748	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	33.240.010,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			
1749	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	12.810.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan			
1750	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	8.207.590,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1751	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	15.042.440,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang proporsional	1 Laporan			
1752	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.690.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Penyelanggaraan Ketentraman dan Ketertiban	1 Laporan			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1753	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	13.498.680,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Dokumen			
1754	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	109.166.480,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1755	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	19.449.160,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Dokumen			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang proporsional	1 Dokumen			
1756	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	6.642.800,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1757	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	19.832.720,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1758	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	6.249.860,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1759	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	20.026.120,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1760	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.886.060,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas yang disusun	1 Laporan			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas yang disusun	1 Dokumen			
1761	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.640.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Maspul	Dana Bagi Hasil (DBH)
1762	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	32.631.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Maspul	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang			
1763	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.952.281.256,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Maspul	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	1 Paket			
1764	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	178.328.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Maspul	Dana Bagi Hasil (DBH)
1765	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	53.144.720,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Maspul	Dana Bagi Hasil (DBH)
1766	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.693.720,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Maspul	Dana Bagi Hasil (DBH)
1767	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.276.140,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Maspul	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1768	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	139.540.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan Barang	1 Unit			
1769	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	155.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Maspul	Dana Bagi Hasil (DBH)
1770	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	244.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Maspul	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			
1771	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	37.020.000,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Maspul	Dana Bagi Hasil (DBH)
1772	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Maspul	Dana Bagi Hasil (DBH)
1773	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	294.179.248,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Maspul	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	undefined Unit			
1774	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	77.040.640,00	Kab. Nunukan, Sebatik Tengah, Maspul	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. SEI MENGGARIS					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 %			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Usulan			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1775	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	30.233.340,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1776	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Laporan			
1777	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	39.658.380,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100 %			
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	4 Laporann			
1778	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	122.357.790,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	4 desa			
1779	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	15.728.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	8 Dokumen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1780	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	15.688.300,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1781	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	9.218.300,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1782	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.948.300,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5 Unit Kerja			
1783	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	1.917.494.429,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1784	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	38.960.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5 Unit Kerja			
1785	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.371.600,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1786	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	162.436.400,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1787	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	18.943.500,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1788	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.266.050,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1789	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	147.990.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5 Unit Kerja			
1790	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	43.800.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1791	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	340.297.920,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 Unit Kerja			
1792	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	69.241.260,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1793	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	16.788.440,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1794	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	108.500.000,00	Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. SEBUKU					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 %			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	1 kegiatan			
1795	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	28.777.410,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah urusan yang dilimpahkan	3 kegiatan			
1796	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	27.077.410,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	30 dokumen			
1797	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	22.297.410,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	100 %			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang diberdayakan	10 desa			
1798	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	32.824.820,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah desa yang diberdayakan	10 desa			
1799	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	24.687.410,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian K3 Ketertiban,Ketentraman Keindahan	100 %			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			
1800	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	33.964.630,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	10 kegiatan			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1801	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	330 Orang	84.898.300,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1802	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	26.562.410,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	100 %			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi Jumlah Pemerintahan desa dan kelurahan yang dibina dan diawasi	10 Desa 10 desa			
1803	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	22.569.910,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,dan evaluasi kinerja yang berkualitas Perangkat Daerah Yang Berkualitas	12 Dokumen			
1804	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	14.736.300,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1805	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	47.802.600,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	6 unit			
1806	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.197.703.543,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1807	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	33.460.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1808	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	9.560.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	6 unit			
1809	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1810	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	206.448.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1811	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	31.537.220,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1812	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.131.600,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1813	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	182.075.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	6 unit			
1814	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1815	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	218.206.752,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	2 unit			
1816	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	20.885.000,00	Kab. Nunukan, Sebuku, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. TULIN ONSOI					
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja internal yang dilayani oleh OPD kecamatan Tulin Onsoi	100 %			
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas perangkat daerah yang berkualitas	2 dokumen			
1817	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	18.790.380,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 % 100 Persen			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan			
1818	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	36.776.476,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			
1819	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	42.643.856,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
1820	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	22.502.238,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	100 %			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang di berdayakan	12 Desa			
1821	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	8.458.238,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang dlaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	12 Desa			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1822	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	32.139.904,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	100 %			
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			
1823	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	130.783.608,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitas Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Kegiatan			
1824	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintah Desa Yang Di Bina dan Di Awasi	12 Desa			
1825	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	29.056.702,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja internal yang dilayani oleh OPD kecamatan Tulin Onsoi	100 %			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas perangkat daerah yang berkualitas	2 dokumen			
1826	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	87.146.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1 Unit			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1827	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	1.776.508.301,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5 Unit			
1828	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.752.900,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
1829	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.905.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
1830	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	141.336.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	4 unit			
1831	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.648.300,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
1832	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	267.479.540,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
1833	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	322.705.248,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	6 unit			
1834	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	70.032.060,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
1835	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
1836	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
1837	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.000.000,00	Kab. Nunukan, Tulin Onsoi, Semua Kel/Desa	[object Object]
		KEC. SEMBAKUNG					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 Persen			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan undefined	100 Persen undefined undefined			
1838	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	33.099.180,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1839	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	16.140.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 Persen			
1840	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5 Dokumen	15.550.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1841	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	26.890.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	100 %			
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang diberdayakan	2 Desa			
1842	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	24.940.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	100 %			
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	2 Desa			
1843	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	32.652.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	10 Desa			
1844	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	172.272.290,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1845	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	7.260.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pemerintahan Desa yang di berikan faslitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	100 Persen			
1846	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	27.320.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1847	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	19.500.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1848	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	26.864.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen			
1849	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	13.700.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1850	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	35.700.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1851	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	10.960.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	12 Bulan			
1852	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang Orang/bulan	3.239.738.275,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1853	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	32.880.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1854	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.960.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	100 Persen			
1855	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1856	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	182.643.100,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1857	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.274.280,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1858	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	150.350.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	100 Persen			
1859	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.240.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1860	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	269.471.808,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan Pemeliharaan	100 Persen			
1861	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	44.603.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. SEMBAKUNG ATULAI					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			
1862	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	29.777.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			
1863	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	36.772.160,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1864	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	54.898.080,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			
1865	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan	16.600.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1866	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	31.160.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			
1867	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2 Lembaga Kemasyarak atan	14.977.360,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			
1868	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	4.507.770,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			
1869	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	450 Orang	119.533.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			
1870	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	29.999.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1871	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	21.862.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			
1872	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	56.399.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1873	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	18.221.300,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			
1874	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17/14 Orang/bulan	2.654.975.405,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			
1875	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	29.413.600,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			
1876	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	299.987.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1877	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	222.598.555,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1878	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	161.996.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1879	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.997.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1880	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	179.202.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			
1881	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1882	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	368.594.976,00	Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			
1883	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	45.096.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1884	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sembakung Atulai, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. LUMBIS					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			
1885	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15.878.380,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1886	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	6.800.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			
1887	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.970.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			
1888	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	95.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			
1889	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	7.086.970,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1890	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	6.860.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahaan Desa yang dibina dan diawasi	28 Desa			
1891	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1.700.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1892	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	7.320.500,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1893	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	7.950.910,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1894	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	5.235.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1895	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1.700.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kerja Yang Tersusun	12 Dokumen			
1896	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12.180.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1897	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	8.377.680,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1898	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.977.760,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertangungjawaban Keuangan Perangkat Daerah Yang tersusun tepat Waktu	12 Bulan			
1899	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 ORANG /14 BULAN Orang/bulan	4.044.950.284,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1900	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	25.408.080,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	2 Dokumen			
1901	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.585.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum	5 Unit			
1902	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	5.564.900,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1903	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.500.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1904	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.410.300,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1905	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	` Paket	6.999.850,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1906	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	145.342.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	0 Jenis			
1907	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan BMD	12 Bulan/unit			
1908	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	` Laporan	30.000.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1909	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1910	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	337.920.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara	2 Unit			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1911	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.288.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1912	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1913	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	22.000.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa	[object Object]
1914	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
		KEC. LUMBIS OGONG					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 Persen			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 KEGIATAN			
1915	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan Laporan	161.388.820,00	Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	100 %			
1916	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan Laporan	44.200.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			
1917	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26 Lembaga Kemasyarak atan	23.183.560,00	Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	10 DESA			
1918	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	26 Laporan Laporan	19.720.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			
1919	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	3.237.320.648,00	Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
1920	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan Dokumen	118.800.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	100 %			
1921	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	174.980.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1922	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	26.732.190,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1923	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	792.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1924	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan Laporan	156.742.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	100 %			
1925	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan Laporan	2.800.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1926	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	377.400.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	4 UNIT			
1927	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit Unit	126.798.740,00	Kab. Nunukan, Lumbis Ogong, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. KRAYAN					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	100 %			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kali			
1928	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	24.958.500,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1929	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.423.820,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	5 Urusan			
1930	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	30.101.100,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1931	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	10.338.700,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	27 Laporan			
1932	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23 Lembaga Kemasyarak atan	7.535.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	100 %			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	100 %			
1933	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	20.873.700,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1934	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	9.970.400,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100 %			
1935	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24 Orang	110.549.500,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1936	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen	10.662.400,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa	23 Dokumen			
1937	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	8.840.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1938	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	9.144.300,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1939	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	120 Laporan	20.450.750,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	10 Dokumen			
1940	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	5.063.850,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1941	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	13.475.300,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Keuangan	7 Unit			
1942	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.883.258.664,40	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Administrasi Umum	7 Unit			
1943	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	87.731.750,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1944	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.226.278,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1945	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.318.750,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1946	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	16.017.980,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1947	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73 Laporan	312.724.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pengadaan BMD	7 Unit			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1948	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	49.950.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1949	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	14.000.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1950	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	105.000.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Penyediaan Jasa Penunjang	7 Unit			
1951	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.600.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1952	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	414.043.216,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	4 Unit			
1953	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	44.979.750,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1954	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	34.500.000,00	Kab. Nunukan, Krayan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. KRAYAN SELATAN					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 Persen			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %			
1955	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	49.964.850,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1956	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	9.860.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1957	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	50.257.700,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			
1958	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarak atan	22.252.400,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			
1959	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	32.595.400,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1960	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9.998.650,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1961	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	21.567.500,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1962	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	15.300.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlaj Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %			
1963	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	9.992.134,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1964	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	6.971.610,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlaj Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %			
1965	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.909.885.873,08	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internak yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum	100 %			
1966	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	151.550.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1967	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	24.998.959,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1968	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.999.660,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1969	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	208.002.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			
1970	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	36.000.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1971	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	111.900.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1972	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	149.997.500,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	100 %			
1973	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	429.492.528,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	100 %			
1974	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	75.960.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. KRAYAN BARAT					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 Persen			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %			
1975	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25 Laporan	24.987.880,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	100 %			
1976	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	9.937.053,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1977	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	44.085.227,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	100 %			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4 Kali			
1978	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga Kemasyarak atan	14.957.375,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			
1979	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	25 Lembaga Kemasyarak atan	59.911.965,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	100 %			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	100 %			
1980	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	24.991.070,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100 %			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1981	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	91.546.969,50	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
1982	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	19.964.612,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %			
1983	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25 Dokumen	24.972.710,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1984	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	25 Laporan	49.994.234,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja internal yang dilayani oleh OPD kecamatan Krayan Barat Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 % 100 Persen			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas Perangkat Daerah Yang Berkualitas	100 %			
1985	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.722.275,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1986	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9.983.025,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	100 %			
1987	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2.481.185.164,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			
1988	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	660.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1989	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	133.458.398,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1990	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.987.197,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1991	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.995.260,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1992	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	149.982.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	100 %			
1993	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1994	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	342.617.920,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	13 Unit			
1995	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	114.534.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
1996	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	9.780.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
1997	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	226.883.667,00	Kab. Nunukan, Krayan Barat, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. KRAYAN TIMUR					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	100 %			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %			
1998	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17 Laporan	22.233.380,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	100 %			
1999	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	4.882.340,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	13.761.500,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	100 %			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %			
2001	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32 Lembaga Kemasyarak atan	2.166.050,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2002	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	17 Dokumen	2.166.050,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	100 %			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	100 %			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
2003	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	20.655.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peresentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terlaksana dengan Tepat Sasaran	100 %			
1	2	3	4	5	10	11	12
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Peneyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai penugasaan kepala daerah	100 %			
2004	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang	130.047.370,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2005	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	4.971.980,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	100 %			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %			
2006	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17 Dokumen	9.860.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2007	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	17 Laporan	9.860.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tat kelola administrasi perencanaan dan keuangan perangkat daerah Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 % 100 Persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas	100 %			
2008	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.468.300,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2009	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.897.200,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	100 %			
2010	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12/12 Orang/bulan	2.130.378.284,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	100 %			
2011	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	167.980.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2012	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.351.250,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2013	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.753.140,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2014	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	254.198.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	100 %			
2015	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	193.648.224,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	100 %			
2016	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	77.661.600,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Timur, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. KRAYAN TENGAH					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 % 100 Persen			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Jumlah			
2018	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	25.851.900,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2019	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.073.110,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			
2020	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11 Laporan	13.950.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			
2021	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	168.405.949,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100 % 100 Laporan			
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1 Dokumen			
2023	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang	109.186.241,60	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2024	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	11.118.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintah Desa Yang di berikan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11 Desa 100 %			
2025	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	11 Laporan	44.000.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 %			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas	7 Dokumen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
2026	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	8.085.825,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	100 %			
2027	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2.003.408.781,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	100 %			
2028	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	18.766.770,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2029	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	311.801.124,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2030	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.514.563,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2031	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.222.706,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2032	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	250.350.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			
2033	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	49.950.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	100 %			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
2034	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	345.323.856,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5 unit			
2035	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	21.297.920,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2036	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	40.193.378,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2037	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	33.300.000,00	Kab. Nunukan, Krayan Tengah, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. LUMBIS HULU					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 Persen			
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	1 urusan			
2038	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	11.986.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	100 %			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan partisipasi masyarakat desa yang dilakssanakan	100 %			
2039	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarak atan	49.856.876,00	Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
2040	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	107.826.750,00	[object Object]	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cangkupan pemerintah desa yang diberikan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	10 Desa			
2041	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10 Laporan	24.977.450,00	Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja internal yang dilayani oleh OPD kecamatan Lumbis Hulu	100 %			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkualitas yang disusun	12 dokumen			
2042	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	24.980.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	100 %			
2043	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.016.429.124,00	Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	100 %			
2044	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	61.226.600,00	Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2045	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.846.150,00	Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
2046	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	180.168.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	100 %			
2047	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	26.000.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2048	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	23.400.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2049	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	65.604.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2050	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	205.608.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	100 %			
2051	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	2.139.500,00	Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2052	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	413.989.920,00	Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	2 Unit			
2053	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	99.200.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2054	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	9.962.260,00	Kab. Nunukan, Lumbis Hulu, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		KEC. LUMBIS PANSIANGAN					
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					
	7.01	KECAMATAN					
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100 Persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Persentase penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	1 Dokumen			
2055	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	9.891.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2056	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	4.180.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	2 Dokumen			
2057	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	25.227.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	100 %			
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang diberdayakan	13 Desa			
2058	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	5.046.900,00	Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	1 Dokumen			
2059	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	13.739.500,00	Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	100 %			
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan)	1 Dokumen Dokumen			
2060	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	9 Laporan	129.557.110,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			
2061	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Dokumen Orang	0,00	Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	13 Kali			
2062	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	37.480.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2063	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen	4.950.700,00	Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2064	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan	6.903.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100 Persen			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitasPerangkat Daerah Yang Berkualitas	5 Dokumen			
2065	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	7.920.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
2066	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	7.920.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2067	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	32.300.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	14 Bulan			
2068	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18/bulan Orang/bulan	1.798.797.510,00	Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2069	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	45.220.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	1 Dokumen Dokumen			
2070	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	11.520.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			
2071	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	125.000.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2072	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	44.818.080,00	Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2073	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	16.771.370,00	Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
2074	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	211.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	12 Bulan			
2075	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.120.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
2076	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan Laporan	388.200.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	2 Unit			
2077	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	95.984.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
2078	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2.460.000,00	Kab. Nunukan, Lumbis Pansiangan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Peserta Sosialisasi Pembauran Kebangsaan dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	'0,00067 Persen			
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			
2079	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000 Orang	292.289.410,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2080	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	54 Orang	706.413.290,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Pendidikan Politik bagi pemilih pemula	0,34 Persen			
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			
2081	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	1.415.942.040,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Lumbis, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Sei Menggaris, Semua Kel/Desa	[object Object]
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Pelayanan Pendaftaran bagi Organisasi Kemasyarakatan (LSM, Yayasan, Perkumpulan)	100 Persen			
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-			
2082	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang	174.734.550,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	[object Object]
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase peran Masyarakat dalam terciptanya ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	0,89 Persen			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			
2083	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	50 Orang	389.137.790,00	Kab. Nunukan, Sebatik, Semua Kel/Desa	[object Object]
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase Wawasan Nusantara untuk NKRI	71,43 Persen			
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-			
2084	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	149.737.610,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2085	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	30 Orang	314.317.500,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
2086	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.099.260.980,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	12 Bulan			
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
2087	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.202.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	[object Object]
2088	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	4.835.495,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	[object Object]
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			
2089	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	6.538.839.372,40	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	[object Object]
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			
2090	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.971.200,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	[object Object]
2091	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	21.462.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	[object Object]
2092	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	30.826.470,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	[object Object]
2093	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.875.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	[object Object]
2094	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	85.374.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Pendanaan			
				Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8
2095	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	[object Object]
2096	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	78.942.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	[object Object]
2097	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	171.699.200,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	[object Object]
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			
2098	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	42.089.600,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	[object Object]
2099	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	7.350.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	[object Object]

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dan gambaran dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. IKU merupakan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif yang akan memberikan informasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Permendagri 86 menyebutkan bahwa IKU merupakan indikator sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai upaya memberikan gambaran yang jelas mengenai ukuran keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, maka perlu adanya Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Indikator kinerja daerah menjadi alat ukur utama dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pembangunan, khususnya dalam tiga aspek utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan daya saing daerah Dalam kurun periode RPJMD, capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah akan diukur melalui akumulasi pencapaian indikator kinerja program yang mencerminkan hasil (outcome) maupun dampak (impact) secara tahunan maupun kumulatif hingga akhir periode perencanaan tahun 2029. Dengan demikian, indikator kinerja daerah menjadi tolak ukur utama untuk memastikan bahwa arah pembangunan berjalan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan serta mampu mencapai target yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Perumusan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 mengacu pada indikator tujuan *(impact indicators)* dan indikator sasaran *(outcome indicators)* yang telah ditetapkan. Penyusunan indikator tersebut dilakukan melalui analisis keterkaitan antara program pembangunan daerah dengan pencapaian indikator kinerja daerah secara keseluruhan. Proses ini memastikan bahwa setiap indikator memiliki keterukuran yang jelas, relevan, serta dapat dievaluasi secara berkala. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja daerah

yang telah dirumuskan mencerminkan sejauh mana visi dan misi pembangunan Kabupaten Nunukan diwujudkan. Dengan kata lain, capaian indikator kinerja daerah memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta menjadi tolok ukur utama bagi keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Selain sebagai alat ukur capaian pembangunan, indikator kinerja daerah juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyajian target kinerja secara terbuka kepada publik memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Berikut ini disajikan gambaran Target Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 yang merangkum ukuran pencapaian kinerja pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam matriks di bawah ini:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nunukan 2025-2030

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69.27	69.96	70.66	71.35	72.04	72.73	73.43
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.03	5.50	5.62	5.74	5.86	5.98	6.10
Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,73	5.38	5.26	5.15	5.03	4.92	4.80
Gini Ratio	Persen	0,270	0,265	0,260	0,255	0,250	0,245	0,240
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	50	52.5	55	57.5	60	62.5	65
Indeks Harmoni Indonesia (Ihal)	Indeks	7,13	7,24	7,30	7,44	7,50	7,68	7,80

Sumber data : Ranwal RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Masih dalam rangka memastikan seluruh visi, misi kepala daerah tertuang secara komprehensif dalam kerangka pembangunan 5 tahunan, sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), dirumuskan pula Indikator Kinerja Daerah yang merupakan tolok ukur yang lebih terperinci dari keberhasilan pembangunan Kabupaten Nunukan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Adapun Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nunukan dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Nunukan 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**Aspek Geografi dan Demografi**								
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	50	52,5	55	57,5	60	62,5	65
2	Indeks Infrastruktur	Indeks	65.04	66.21	67.37	68.54	69.7	70.86	72.03
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,62 (2023)	80.55	81.35	81.03	81.83	81.51	82.31
II	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**								
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69.27	69.96	70.66	71.35	72.04	72.73	73.43
5	Rata-rata Lama Sekolah dan	Tahun	8.39	8.49	8.59	8.68	8.78	8.88	8.98
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.69	12.70	12.72	12.73	12.74	12.75	12.77
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	73.13	73.16	73.20	73.23	73.26	73.29	73.33
8	Indeks Harmoni Indonesia (Ihal)	Indeks	7,13	7,24	7,30	7,44	7,50	7,68	7,80

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78.94	79.98	81.02	82.06	83.1	84.14	85.18
10	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	56,71	57,90	59,10	60,29	61,49	62,69	63,88
11	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	73,85	79,16	81,50	83,72	85,22	86,90	88,37
III	**Aspek Daya Saing Daerah**								
12	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.03	5.50	5.62	5.74	5.86	5.98	6.10
13	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,73	5.38	5.26	5.15	5.03	4.92	4.80
14	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian	Persen	19.93	20.50	21.07	21.63	22.20	22.77	23.34
15	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	6.34	7.03	7.46	7.89	8.32	8.75	9.18
16	Persentase UMKM Naik Kelas	Persen	0,188	0,2	0,25	0,3	0,75	1	1,3
17	Realisasi Investasi	Miliar Rupiah	3050.41	4546.17	5261.20	5976.23	6691.26	7406.30	8121.33
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.71	2.59	2.49	2.39	2.29	2.19	2.09

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IV	**Aspek Pelayanan Umum**								
19	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
20	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	B	B	BB	BB
21	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.74	3.885	4.03	4.175	4.32	4.465	4.61
22	Indeks SPBE	Indeks	2.61	2.74	2.87	3	3.13	3.26	3.39
23	Opini BPK	Skor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Indeks Sistem Merit	Indeks	1,34	1.47	1.57	1.64	1.78	1.85	1.95

Sumber data : Ranwal RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029

BAB VII
PENUTUP

RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2026 merupakan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang akan menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan menyempurnakan Rancangan Renja Tahun 2026. Regulasi menyebutkan bahwa dokumen ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah melalui tahapan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholder) melalui tahapan Musrenbang sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan, utamanya sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan yang akan ditetapkan.

RKPD diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. RKPD ini harus sejalan dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan provinsi Kalimantan Utara. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan provinsi dan nasional.

Secara normatif, RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026 yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026.

Secara operasional, RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung

jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Secara faktual, RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, realisasi program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional diantaranya sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat yang telah disinkronisasikan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan dengan prinsip *money follow program.* Dengan demikian usulan kegiatan yang telah diajukan harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain kerangka pendanaannya diusulkan dalam APBD Kabupaten Nunukan juga diusulkan kepada Pemerintah Provinsi melalui APBD Provinsi, kepada Pemerintah Pusat melalui APBN baik dalam bentuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan maupun yang langsung dilaksanakan oleh Kementerian K/L terkait.

Dalam Pelaksanaannya, RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh pemangku kepentingan yang berperan aktif dalam pembangunan daerah yaitu :

1. Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 tidak hanya memuat program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kerangka pembangunan daerah dan

pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah maupun yang melalui upaya mendorong partisipasi masyarakat;

3. Dalam rangka upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dari APBN, maka setiap perangkat daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026 dengan berpedoman pada RKPD ini;

4. Setiap kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi penyusunan kebijakan pada saat penyusunan Renja-PD Tahun 2026 dan pada saat menyusun RKA/DPA OPD Tahun 2026, serta evaluasi hasil Renja-PD tahun 2024 setiap Triwulan pada tahun berkenaan;

5. Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam RKPD tahun 2026 wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan dan Peraturan Perundang–undangan lain yang berlaku;

6. Program kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang terdapat dalam dokumen RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026, menjadi acuan untuk setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renja tahun 2026 dan apabila terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan diluar dokumen ini tidak dapat dianggarkan di tahun anggaran 2026;

7. Bappeda-Litbang melakukan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2026 pada saat penyusunan DPA OPD Tahun 2026 dan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dalam kurun waktu semester dan tahunan berdasarkan evaluasi hasil Renja-PD; dan

8. Bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2026 dan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sudah berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi sipd-ri.kemendagri.go.id dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi.

Nunukan, 30 Juni 2025

BUPATI NUNUKAN

IRWAN SABRI